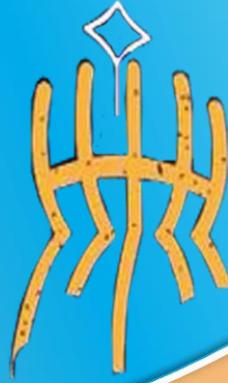




Pemerintah Kabupaten Empat Lawang



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
TAHUN 2024-2026
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EMPAT LAWANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NEgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di PProvinsi Sumatera Selatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagai mana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Rancangan Awal kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 -2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lawang Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Empat Lawang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Empat Lawang untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Empat Lawang

untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Empat Lawang untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output) hasil (outcome), dampak (impact).
20. Pembangunan Daerah adalah usaha sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya.

BAB II

RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

Ruang lingkup RPD meliputi :

- a. Tujuan, Sasaran, Strategi;
- b. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
- c. Program Perangkat Daerah, dan;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 3

Isi dan Uraian RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dengan sistematika terdiri dari :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah
- d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
- e. Bab V Tujuan dan Sasaran
- f. Bab VI Strategi arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- g. Bab VII Kerangka Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah

- h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- i. Bab IX Penutup

BAB III PELAKSANAAN RPD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan RPD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD.

Pasal 7

- (1) pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh Bappeda secara berkala.
- (2) pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tapi tidak terbatas pada :
 - a. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
 - b. Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - c. Indikator Kinerja Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah; dan
 - d. Target Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah.
- (3) pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPD yang diterjemahkan dalam Renstra Perangkat Daerah, RKPD.
- (4) pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menjamin bahwa:

- a. Dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah telah berpedoman pada Program Perangkat Daerah / Program Pembangunan Daerah; dan
 - b. Indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dijabarkan ke dalam rencana Program, dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (5) hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Program Perangkat Daerah / Program pembangunan dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 8

- (1) evaluasi terhadap RPD mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (3) evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, hasil evaluasi RKPD dan RKAP BUMD.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal

BUPATI EMPAT LAWANG

H. MUHAMMAD JONCIK

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

PAUZAN KHOIRI, AP., MM

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2023 NOMOR
.....

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya pula, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Empat Lawang 2024-2026 dapat diselesaikan.

RPD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pedanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD.

Namun pada perkembangan terdapat berbagai dinamika yang berpengaruh terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Empat Lawang dan kebijakan pemerintah Pusat. Kebijakan pemerintah dimaksud yaitu : diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Dalam penyelesaian penyusunan dokumen RPD Kabupaten Empat Lawang ini dirasa masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kami sangat menghargai komentar dan saran untuk memperbaiki Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Empat Lawang.

*Billahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

**Tebing Tinggi,
Bupati Empat Lawang,**

H. Joncik Muhammad

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan RPD Kabupaten Empat Lawang	I-1
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-3
1.4 Maksud dan Tujuan	I-3
1.5 Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografis Dan Demografis	II-1
2.1.1 Aspek Geografis	II-1
2.1.2 Aspek Demografis	II-33
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-37
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-37
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-49
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-51
2.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-51
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	II-51
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	II-62
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-74
2.3.4 Fokus Fungsi Penunjang.....	II-79
2.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-85
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-85
2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-85
2.4.3 Fokus Iklim Investasi	II-86

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-86
2.5 Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rencana, Kebijakan Dan Program Pembangunan.....	II-88
2.6 Analisis Capaian Kinerja.....	II-88

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Empat Lawang 2018-2023.....	III-1
3.1.2 Neraca Daerah.....	III-5
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-7
3.2.1 Proporsi Pengguna Anggaran.....	III-8
3.2.2 Analisis Pembiayaan.....	III-11
3.3 Kerangka Pendanaan.....	III-12
3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah.....	III-13
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendapatan.....	III-17

BAB IV PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1 Identifikasi Permasalahan Utama Kabupaten Empat Lawang.....	IV-2
4.1.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan	IV-13
4.1.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV-19
4.1.4 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Urusan Pilihan.....	IV-24
4.2 Isu Strategis.....	IV-27

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan dan Sasaran.....	V-1
5.1.1 Tujuan.....	V-2
5.1.2 Sasaran.....	V-3

BAB VI STRATEGI DAN KEBIJAKAN

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	VI-1
6.1.1 Strategi	VI-1

6.1.2 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan..... VI-9

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH**

7.1 Penyusunan Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah..... VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah..... VIII-1

8.1.1 Indikator Kinerja Utama.....VIII-1

8.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... VIII-3

BAB IX PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi..... IX-1

9.2 Kaidah Pelaksanaan..... IX-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Dokumen RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...	I-3
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Empat Lawang.....	II-2
Gambar 2.2	Grafik Tinggi wilayah per kecamatan (mdpl).....	II-3
Gambar 2.3	Peta Kelerengan Kabupaten Empat Lawang.....	II-4
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Empat Lawang	II-5
Gambar 2.5	Peta Hidrologi Kabupaten Empat Lawang.....	II-6
Gambar 2.6	Distibusi Jasa Lingkungan Penyediaan Air Per Kecamatan	II-7
Gambar 2.7	Distribusi Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Per Kecamatan	II-7
Gambar 2.8	Peta Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021.....	II-8
Gambar 2.9	Grafik Batang Status Air Per Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021.....	II-8
Gambar 2.10	<i>Pie Chart</i> Persentase Status Air Kabupaten Empat Lawang	II-9
Gambar 2.11	Persentase Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021.....	II-10
Gambar 2.12	Peta Jasa Pengaturan Kualitas Udara	II-13
Gambar 2.13	Persentase Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Tahun 2021	II-14
Gambar 2.14	Persentase Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara Per Kecamatan Tahun 2021.....	II-14
Gambar 2.15	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sumatera Selatan	II-15
Gambar 2.16	Peta Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Empat Lawang.....	II-16
Gambar 2.17	Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Empat Lawang	II-17
Gambar 2.18	Jasa Penyediaan Pangan.....	II-17
Gambar 2.19	Persentase jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021.....	II-18
Gambar 2.20	Persentase Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Per Kecamatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021	II-18
Gambar 2.21	Peta Kawasan Pertambangan Kabupaten Empat Lawang.....	II-19
Gambar 2.22	Peta Kawasan Permukiman Kabupaten Empat Lawang	II-21
Gambar 2.23	Peta Kawasan Budidaya Kabupaten Empat Lawang	II-22
Gambar 2.24	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Empat Lawang	II-24
Gambar 2.25	Peta Kawasan Hutan Kabupaten Empat Lawang.....	II-25
Gambar 2.26	Peta Ketinggian Tanah Kabupaten Empat Lawang.....	II-25
Gambar 2.27	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Empat Lawang.....	II-27
Gambar 2.28	Peta Rawan Gerakan Tanah Kabupaten Empat Lawang.....	II-30
Gambar 2.29	Peta Rawan Gunung Api Kabupaten Empat Lawang	II-30
Gambar 2.30	Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Empat Lawang.....	II-31
Gambar 2.31	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Indikatif	

	barbasis Jasa Pengatur Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Empat Lawang	II-31
Gambar 2.32	Persentase Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Banjir Tahun 2021	II-32
Gambar 2.33	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Indikatif Berbasis Jasa Pengatur Mitigasi Bencana kebakaran Lahan Kabupaten Empat Lawang	II-32
Gambar 2.34	Persentase Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021	II-33
Gambar 2.35	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (miliar rupiah), 2022	II-37
Gambar 2.36	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Empat Lawang 2017-2022	II-37
Gambar 2.37	Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2022.....	II-42
Gambar 2.38	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Empat Lawang, 2018 – 2022...	II-43
Gambar 2.39	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-44
Gambar 2.40	Indeks Kesehatan Kabupaten Empat Lawang 2018-2022	II-45
Gambar 2.41	Indeks Pendidikan Kesehatan Kabupaten Empat Lawang 2018-2022	II-45
Gambar 2.42	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Empat Lawang	II-47
Gambar 2.43	Kemiskinan Ekstrim vs Garis Kemiskinan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022.....	II-48
Gambar 2.44	Laju Pertumbuhan Ekonomi vs Kemiskinan Kabupaten Empat Lawang.....	II-48
Gambar 2.45	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem.....	II-48
Gambar 2.46	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapat Bantuan dari Program Pemerintah Menurut Kabupaten /Kota di Sumatera Selatan .	II-49
Gambar 2.47	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Empat Lawang 2017-2022.....	II-50
Gambar 2.48	Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	II-53
Gambar 2.49	Indek Pembangunan Gender Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022.....	II-64
Gambar 2.50	Indek Pemberdayaan Gender Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022.....	II-65
Gambar 2.51	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan Kabupaten Empat Lawang dan Provinsi Sumatera Selatan, Januari-Juni Tahun 2021	II-77
Gambar 2.52	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Empat Lawang dan Provinsi Sumatera Selatan, Januari-Juni Tahun 2021	II-77
Gambar 4.1	Perbandingan IPM Kabupaten Empat Lawang dengan IPM Kab/Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2022	IV-2
Gambar 4.2	Perbandingan IPG Kabupaten Empat Lawang terhadap IPG Kab/Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2022	IV-3
Gambar 4.3	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Empat Lawang terhadap Gini	

	Ratio Kab/Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2022	IV-3
Gambar 4.4	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Empat Lawang terhadap Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2022	IV-4
Gambar 4.5	Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.....	IV-4
Gambar 4.6	Indeks Pendidikan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017-2022.....	IV-5
Gambar 4.7	Pengeluaran perkapita Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022.	IV-5
Gambar 4.8	Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Empat Lawang dengan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2022.....	IV-6
Gambar 4.9	Persentase Rumah Tangga Miskin Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan yang Mendapat Bantuan Program Pemerintah.....	IV-6
Gambar 4.10	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Sumsel Tahun 2022.....	IV-7
Gambar 4.11	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.....	IV-7
Gambar 4.12	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.....	IV-8
Gambar 4.13	Capaian IDM Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2022	IV-9
Gambar 4.14	Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2021.....	IV-9
Gambar 4.15	Nilai Investasi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022	IV-10
Gambar 4.16	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Perdagangan, dan	IV-11
Gambar 4.17	Indeks Pemantauan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	IV-13
Gambar 4.18	Indeks SPBE Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 dan 2021	IV-13
Gambar 4.19	Harapan Lama Sekolah Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Tahun 2022	IV-14
Gambar 4.20	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten dan Kota di Sumsel Tahun 2022	IV-15
Gambar 4.21	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017-2021	IV-18
Gambar 4.22	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Empat Lawang dibandingkan Kab/Kota Tahun 2017-2021.....	IV-18
Gambar 4.23	Kerangka Pikir Perumusan Isu Strategis Daerah	IV-26
Gambar 8.1	Keterkaitan Indikator Kinerja	VIII-1
Gambar 8.2	Struktur Dimensi EKPOD.....	VIII-4

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas wilayah menurut Kecamatan, Kabupaten Empat Lawang	II-1
Tabel 2.2	Topografi Kabupaten Empat Lawang	II-2
Tabel 2.3	Kondisi Kelerengan Menurut Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang .	II-4
Tabel 2.4	Pengamatan Unsur Iklim-Curah Hujan Menurut Bulan, 2022	II-10
Tabel 2.5	Pengamatan Unsur Iklim-Suhu Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Palembang 2022.....	II-11
Tabel 2.6	Pengamatan Unsur Iklim-Kelembapan Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Palembang 2022	II-12
Tabel 2.7	Pengamatan Unsur Iklim-Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Palembang, 2022	II-12
Tabel 2.8	Parameter dan Skoring Kawasan Hutan Lindung.....	II-23
Tabel 2.9	Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Empat Lawang	II-26
Tabel 2.10	Luas Panen Tanaman Holtikultura.....	II-29
Tabel 2.11	Produksi tanaman hortikultura	II-29
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, 2019-2022	II-33
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Empat Lawang, 2022.....	II-34
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Empat Lawang, 2022.....	II-35
Tabel 2.15	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, 2022	II-36
Tabel 2.16	Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB atas dasar Harga Konstan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 s.d 2022 (dalam juta) Kabupaten Empat Lawang.....	II-38
Tabel 2.17	Nilai Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2018 - 2022 (dalam juta) Kabupaten Empat Lawang atas Dasar Harga Berlaku.....	II-39
Tabel 2.18	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Empat Lawang.....	II-40
Tabel 2.19	Pertumbuhan kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Empat Lawang.....	II-41
Tabel 2.20	Perkembangan PDRB Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 s.d 2022 atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Kabupaten Empat Lawang	II-41
Tabel 2.21	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2018 s.d 2022 Provinsi Sumatera Selatan	II-43
Tabel 2.22	Komponen IPM Kabupaten Empat Lawang, 2018 – 2022	II-46

Tabel 2.23	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Empat Lawang, 2018 – 2022	II-46
Tabel 2.24	Jumlah penduduk kerja dan Angkatan Kerja di Kabupaten Empat Lawang, 2018-2022	II-49
Tabel 2.25	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Empat Lawang.....	II-50
Tabel 2.26	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2017-2022 Kabupaten Empat Lawang	II-51
Tabel 2.27	Indikator Kinerja Pendidikan.....	II-51
Tabel 2.28	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2018-2022 di Kabupaten Empat Lawang.....	II-52
Tabel 2.29	Jumlah Sekolah, Jumlah rombel, Jumlah Ruang Kelas, Jumlah Perpustakaan, Perbandingan ruang kelas terhadap Rombel, Perbandingan Rombel dan Guru, menurut jenjang pendidikan, Tahun 2018 – 2022.....	II-53
Tabel 2.30	Jumlah Guru dan jumlah Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Empat Lawang	II-54
Tabel 2.31	Rasio Guru dan Peserta Didik (per Wilayah)	II-56
Tabel 2.32	Rasio Guru dan Rombel (per Wilayah)	II-56
Tabel 2.33	Rasio Kelas dan Murid.....	II-56
Tabel 2.34	Indikator Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018-2022	II-57
Tabel 2.35	Indikator Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018-2022	II-57
Tabel 2.36	Indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018-2022	II-58
Tabel 2.37	Panjang Jalan menurut Pemerintah yang berwenang di Kabupaten Empat Lawang (km).....	II-58
Tabel 2.38	Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-59
Tabel 2.39	Statistik Perumahan Kabupaten Empat Lawang 2018-2022	II-59
Tabel 2.40	Luas Kawasan Kumuh dan Persentase Penanganan di Kabupaten Empat Lawang.....	II-60
Tabel 2.41	Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	II-61
Tabel 2.42	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Tahun 2017-2022	II-61
Tabel 2.43	Indikator kinerja BPBD	II-61
Tabel 2.44	Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	II-62
Tabel 2.45	Indikator Kinerja Dinas Sosial.....	II-62
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022	II-64
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022.....	II-64
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022	II-65

Tabel 2.49	Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kab. Empat Lawang	II-66
Tabel 2.50	Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil.....	II-67
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 – 2022	II-67
Tabel 2.52	Status Desa menurut IDM di Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018-2022.....	II-68
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022	II-68
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 – 2022	II-69
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang.....	II-70
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022	II-70
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018– 2022	II-71
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 – 2022	II-72
Tabel 2.59	Capaian Kebudayaan di Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018-2022 ..	II-72
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018 – 2023.....	II-73
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018 – 2022.....	II-73
Tabel 2.62	Indikator kinerja urusan pariwisata.....	II-74
Tabel 2.63	Potensi Objek Wisata Alam dan Budaya di Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2023	II-75
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018 – 2022.....	II-77
Tabel 2.65	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi (Padi dan Jagung) di Kabupaten Empat Lawang, 2018 -2022	II-78
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018 – 2022	II-78
Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018 – 2021	II-78
Tabel 2.68	Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018 – 2022	II-79
Tabel 2.69	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perikanan Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018 – 2022	II-79
Tabel 2.70	Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022	II-79
Tabel 2.71	Realisasi Indikator Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022.....	II-80
Tabel 2.72	Jarak dari ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan di Kabupaten Empat	

Lawang.....	II-81
Tabel 2.73 Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022	II-81
Tabel 2.74 Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022	II-82
Tabel 2.75 Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2018 – 2022	II-82
Tabel 2.76 Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang.....	II-83
Tabel 2.77 Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Keuangan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022	II-83
Tabel 2.78 Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022	II-84
Tabel 2.79 Realisasi indikator terkait kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018-2022	II-86
Tabel 2.80 Jumlah Angkatan Kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan .	II-87
Tabel 2.81 Rasio Ketergantungan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022.....	II-88
Tabel 2.82 Hasil Capaian Kinerja untuk indikator SPM	II-88
Tabel 2.83 Unit Produksi Perumda Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang.....	II-92
Tabel 2.84 Pelanggan Perumda Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang ..	II-92
Tabel 2.85 Konsumsi Air Perumda Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang.....	II-93
Tabel 2.86 Data Jumlah Pelanggan PDAM pada SPAM Ibu Kota Kabupaten Tebing Tinggi.....	II-93
Tabel 2.87 Data Jumlah Pelanggan Berdasarkan Kelompok Pelanggan pada SPAM Ibu Kota Kabupaten Tebing Tinggi Tahun 2021	II-94
Tabel 2.88 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022.....	II-95
Tabel 3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupsten Empat Lawang 2018-2023	III-2
Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022	III-6
Tabel 3.3 Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018-2022	III-9
Tabel 3.4 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022.....	III-10
Tabel 3.5 Defisit Anggaran Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018-2022.....	III-11
Tabel 3.6 Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018-2022	III-11

Tabel 3.7	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Empat Lawang .	III-12
Tabel 3.8	Proyeksi APBD Kabupaten Empat Lawang 2024-2026.....	III-13
Tabel 3.9	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2024-2026	III-15
Tabel 3.10	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	III-16
Tabel 4.1	Komponen Pembentuk IKLH	IV-11
Tabel 4.2	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2021	IV-12
Tabel 4.3	Capaian Nilai SAKIP dan Opini BPK Tahun 2018-2021.....	IV-12
Tabel 5.1	Keterkaitan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan dengan Tujuan.....	V-1
Tabel 5.2	Indikator Tujuan.....	V-2
Tabel 5.3	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran	V-3
Tabel 5.4	Sasaran dan Indikator Sasaran	V-5
Tabel 5.5	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang	V-6
Tabel 6.1	SWOT Indeks Pembangunan Manusia	VI-2
Tabel 6.2	SWOT Pertumbuhan Ekonomi	VI-2
Tabel 6.3	SWOT Indeks Reformasi Birokrasi	VI-4
Tabel 6.4	Analisis SWOT Dalam Penentuan Strategi Daerah Indeks Pembangunan Manusia	VI-5
Tabel 6.5	Analisis SWOT Dalam Penentuan Strategi Daerah Pertumbuhan Ekonomi.....	VI-6
Tabel 6.6	Analisis SWOT Dalam Penentuan Strategi Daerah Indeks Reformasi Birokrasi.....	VI-6
Tabel 6.7	Tujuan, Sasaran, dan Strategi.....	VI-7
Tabel 6.8	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan.....	VI-10
Tabel 6.9	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Empat Lawang	VI-12
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang RPD 2024-2026.....	VII-4
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Empat Lawang	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang	VIII-5

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Empat Lawang merupakan salahsatu kabupaten yang akan mengikuti pilkada serentak Tahun 2024 mendatang, dan Tahun 2023 ini adalah merupakan tahun terakhir masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu Tahun 2018 - 2023.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, bahwa Daerah yang Kepala Daerahnya berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 diwajibkan menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Perkada.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan



- Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang, Pemilihan Kepala Daerah dilakukan serentak secara Nasional Tahun 2024.
- 6) Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 - 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 - 18) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lawang Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor

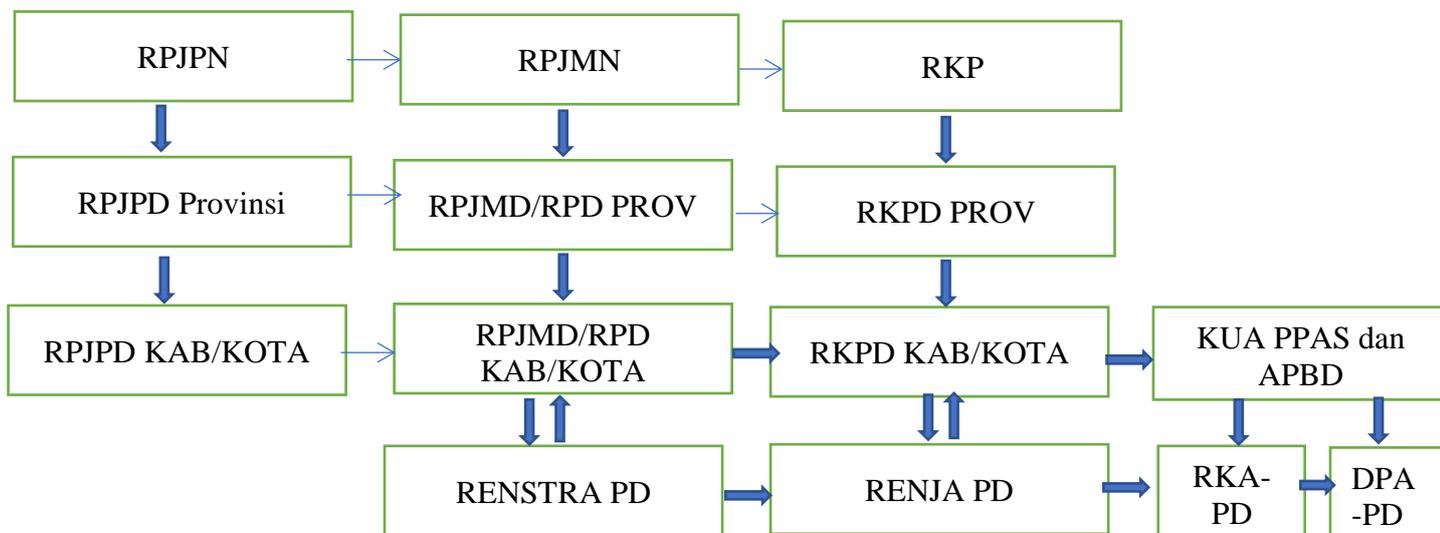
20) Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara, masyarakat serta para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya saling berhubungan dan diupayakan untuk saling bersinergi satu sama lain.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD/RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambar 1.1
Hubungan Dokumen RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah/RPD bagi Daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Disamping mengacu pada RPD/Renstra PD, RKPD Tahun 2024 juga berpedoman pada Peraturan Perundang - Undangan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPD Provinsi Tahun 2024 -2026, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

1.5 Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 -2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, dasar hukum penyusunan; hubungan Rencana Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang: Gambaran umum daerah yang meliputi; aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah serta aspek pelayanan umum

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2018-2022 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2024-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Empat Lawang.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang didasarkan pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten dan isu strategis aktual. Pada bab ini juga disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan dari Strategi terpilih. Dalam bab ini juga diuraikan hubungan setiap strategi dengan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada bab

ini juga dijelaskan masing-masing strategi untuk mencapai program prioritas pembangunan. Program prioritas pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang terpilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang kerangka pendanaan seluruh program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 serta program Program Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan Sasaran Daerah yang ditetapkan Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bagi pencapaian bidang urusan oleh perangkat daerah dalam menunjang keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat penjelasan tentang pedoman transisi serta Proses dan Mekanisme Pelaksanaan tahapan RPD setiap Tahun secara berjenjang serta pelaporan pelaksanaannya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB
II**

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Analisis pada aspek geografi Kabupaten Empat Lawang perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana.

a. Karakteristik lokasi dan wilayah

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 2.256,44 km². Adapun batas wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Timur : Kabupaten Lahat
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lahat dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat : Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Secara umum wilayah administrasi Kabupaten Empat Lawang terdiri dari 10 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 147 Desa, dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas wilayah menurut Kecamatan, Kabupaten Empat Lawang

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Muara Pinang	193,72	8,59		22
2	Lintang Kanan	264,55	11,72		16
3	Pendopo	192,86	8,55	3	16
4	Pasemah Air Keruh	217,90	9,66		15
5	Ulu Musi	329,62	14,61		14
6	Sikap Dalam	230,76	10,23		11
7	Talang Padang	140,90	6,24		13
8	Tebing Tinggi	362,93	16,08	6	20
9	Pendopo Barat	95,20	4,22		10
10	Saling	228,00	10,10		10
Jumlah /Total		2.256,44	100	9	147

Sumber : Permendagri 72 Tahun 2019

Peta administrasi Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

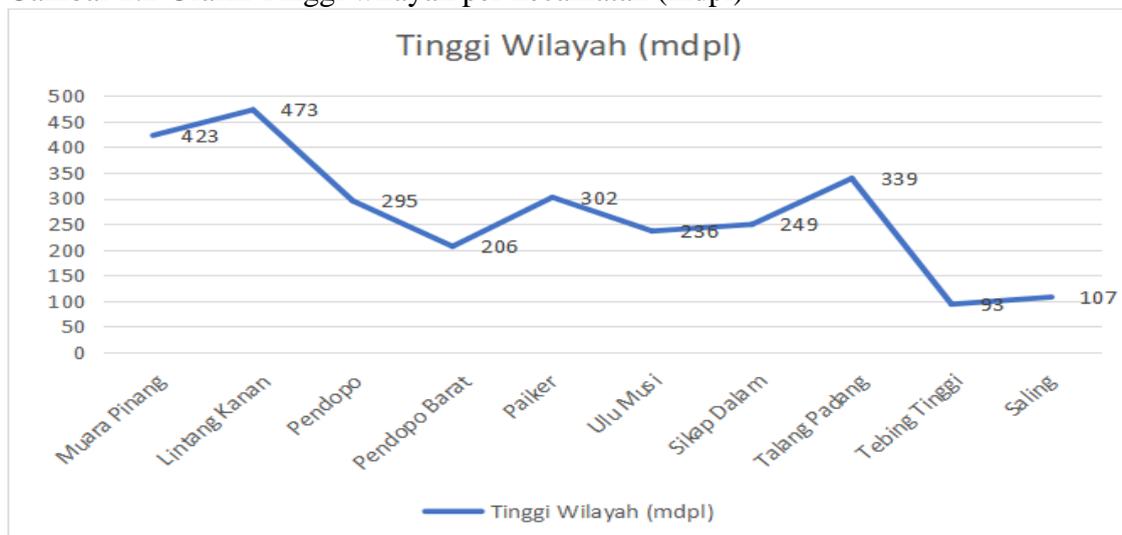
Tabel 2. 2 Topografi Kabupaten Empat Lawang

No.	Kecamatan	Bentuk Wilayah
3.	Ulu Musi	Berombak sampai bergelombang
4.	Tebing Tinggi	Berbukit
5.	Lintang kanan	Berbukit
6.	Talang Padang	Berbukit
7.	Pasemah Air keruh	Berbukit sampai bergunung
8.	Pendopo Barat	Berbukit
9.	Sikap Dalam	Berombak sampai bergelombang
10	Muara saling	Berbukit

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2023

Kabupaten Empat Lawang terletak pada ketinggian wilayah yang bervariasi, antara 150 meter sampai dengan 700 meter dari atas permukaan laut. Wilayah barat-timur memiliki ketinggian antara 150 meter sampai dengan 450 meter di atas permukaan laut. Daerah dengan ketinggian antara 300 meter sampai dengan 450 meter di atas permukaan laut mencakup areal seluas 64%. Pada wilayah selatan timur merupakan wilayah di daerah pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian rata-rata antara 600 meter sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ke arah utara timur, memiliki ketinggian antara 150 meter sampai dengan 250 meter di atas permukaan laut, relatif datar dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Gambar 2.2 Grafik Tinggi wilayah per kecamatan (mdpl)



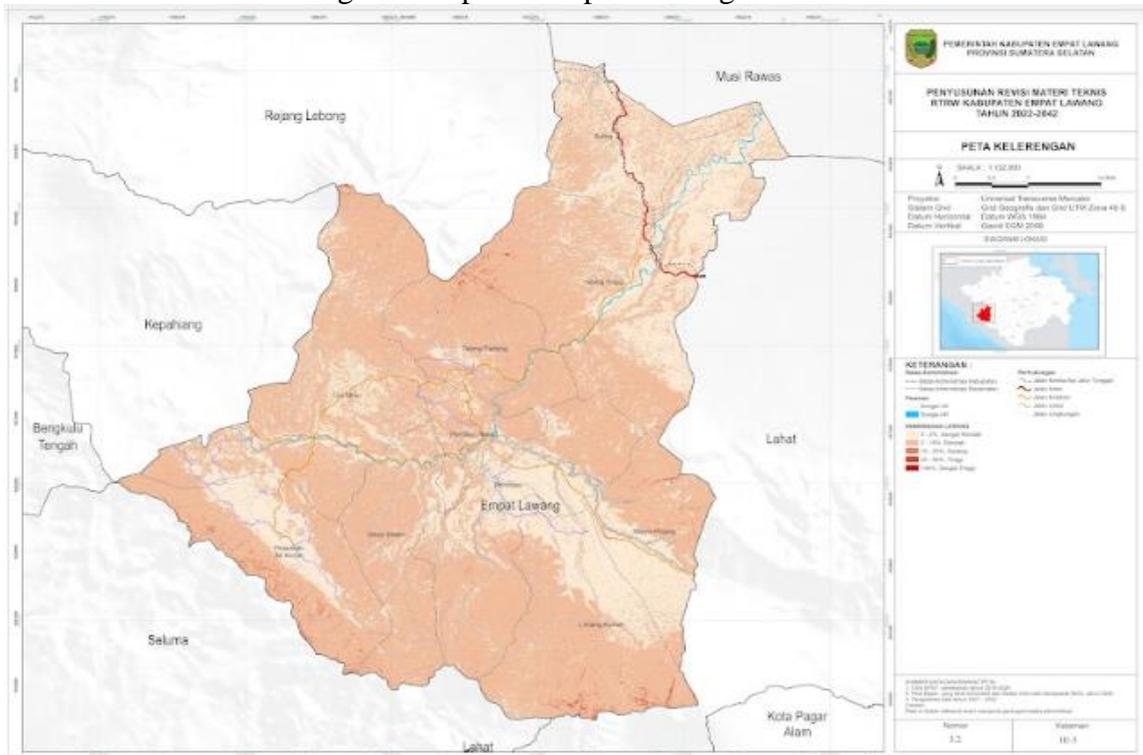
Sumber : BPN, 2020

Tabel 2.3 Kondisi Kelerengan Menurut Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang

No.	Kec.	Luas (Ha)						Jumlah
		0-2%	2-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%	
1.	Muara Pinang	1.376,64	7.131,55	4.747,47	3.179,90	1.072,40	108,48	17.616,44
2.	Lintang Kanan	2.595,80	8.162,72	7.295,34	6.462,95	1.956,22	484,67	26.957,70
3.	Pendopo	3.376,71	9.158,94	7.712,77	4.588,35	598,32	-	25.435,09
4.	Pendopo Barat	571,64	4.886,21	3.281,03	629,08	80,43	-	9.448,39
5.	Pasemah Air Keruh	3.591,78	3.684,42	3.228,34	5.129,03	4.177,10	380,10	20.190,77
6.	Ulu Musi	1.845,70	18.008,14	10.168,35	4.526,00	688,62	78,50	35.315,31
7.	Sikap Dalam	318,36	5.694,05	6.777,87	3.338,29	527,50	35,18	16.691,25
8.	Talang Padang	83,15	3.117,41	6.728,59	4.692,61	1.671,05	93,49	16.386,30
9.	Tebing Tinggi	9.193,53	21.134,37	11.077,33	6.387,93	2.404,36	177,48	50.375,00
10.	Saling	3.471,00	11.911,38	389,12	18,16	-	-	15.789,66
Total		26.424,31	92.889,19	61.406,21	38.952,30	13.176,00	1.357,9	234.205,91

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2023

Gambar 2. 3 Peta Kelerengan Kabupaten Empat Lawang



Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah tahun 2023-2043

4) Geologi

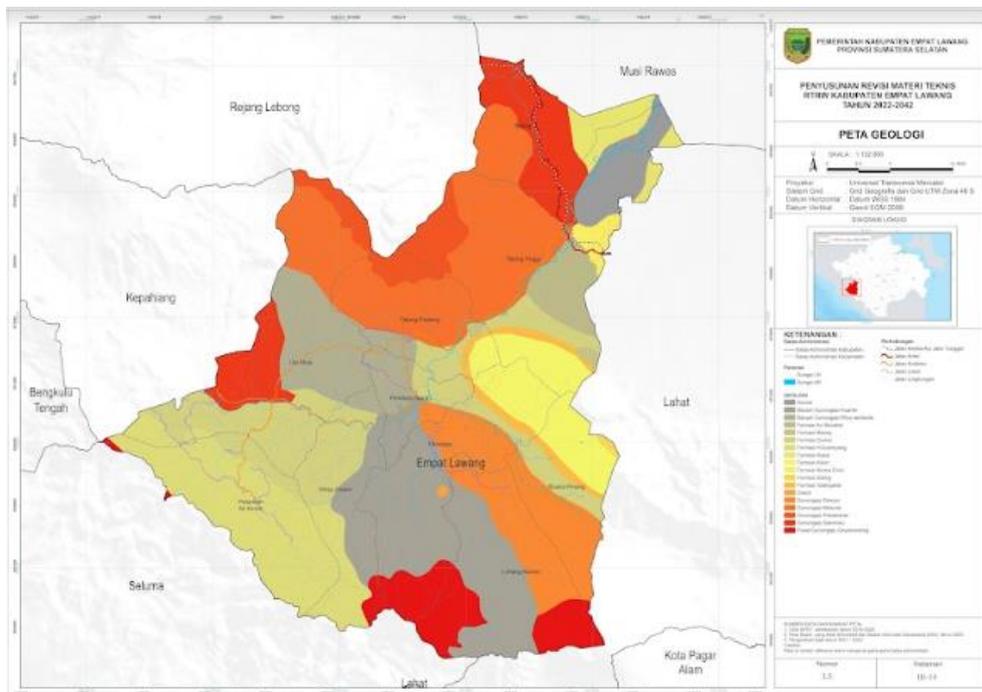
Secara regional perkembangan struktur geologi di Sumatera bagian Selatan pada prinsipnya dipengaruhi oleh beberapa rejim tektonik. Pada daerah cekungan belakang busur (*Back-arc Basin*) struktur geologi berkembang akibat kombinasi pergeseran lateral, sedangkan pada daerah busur vulkanik perkembangan struktur geologi dikontrol oleh wrenching. Pada cekungan Sumatera bagian Selatan, struktur geologi pada umumnya ditunjukkan oleh dua komponen utama yaitu.

1. Batuan dasar pra tersier yang membentuk half graben, horst dan blok seser
2. Elemen struktur berarah barat laut tenggara dan struktur defresi ditimur laut yang keduanya terbentuk sebagai akibat orogen Plio-Plistosen

Kabupaten Empat Lawang secara geologi memiliki peluang untuk memiliki simpanan dari penyebaran energi fosil dan non fosil akibat sejarah geologi. Secara topografi yang relatif berbukit dan bergelombang membentuk sebagian besar wilayah Kabupaten Empat Lawang dan pada umumnya merupakan perbukitan. Relief perbukitan ini terbentuk karena wilayah Kabupaten Empat Lawang termasuk kedalam lajur pegunungan bukit barisan yang membentang disepanjang pulau Sumatera di bagian Barat.

Berdasarkan tatanan tektonik wilayah Kabupaten Empat Lawang menempati mendala cekungan belakang busur paleogene yang dikenal sebagai cekungan Sumatera bagian Selatan dibagian Timur dan mendala busur vulkanik yang membentang secara regional disepanjang pegunungan bukit barisan dibagian Barat. Kedua mendala tektonik ini terbentuk akibat adanya interaksi menyerong antara lempeng benua eurasia ditimur laut pada tersier. Pertemuan kedua lempeng bumi tersebut terletak disepanjang parit Sunda yang berada di lepas pantai Barat Sumatera dimana lempeng samudera menyusup dengan penunjaman miring – 30° dibawah kontinen yang dikenal sebagai Paparan Sunda atau Sundaland (Penyusunan Kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Empat Lawang: 2011). Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 2.4 di bawah ini

Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Empat Lawang

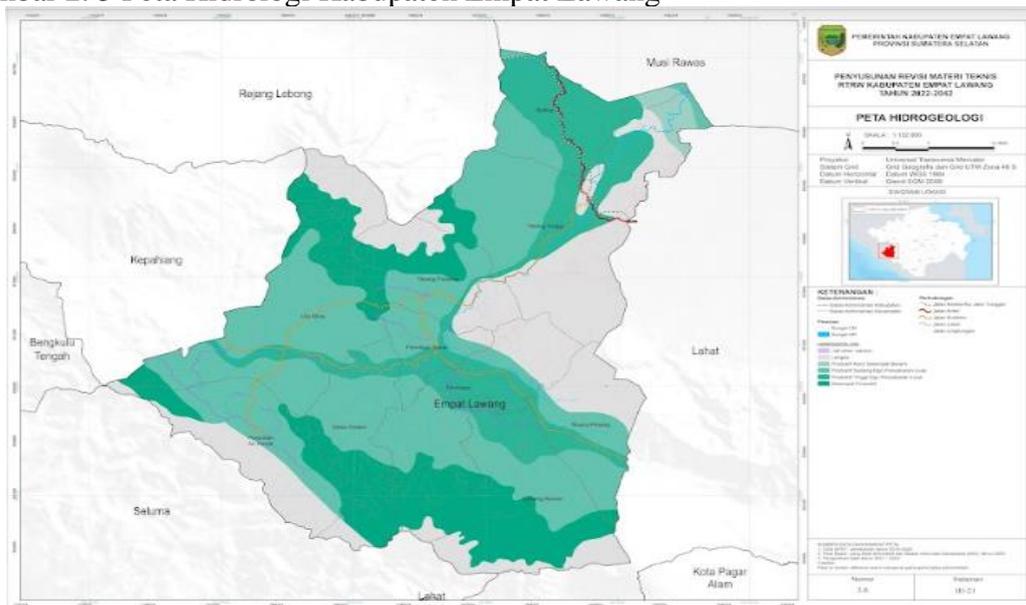


Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah tahun 2023-2043

5) Hidrologi

Wilayah Kabupaten Empat Lawang mempunyai sumber-sumber air yang melimpah, dikelilingi oleh alur anak dan cabang Sungai Musi yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Empat Lawang. Beberapa Sungai yang relatif besar adalah sungai Air Lintang, Sungai Musi, Sungai Air Keruh dan Sungai Air Saling. Sungai-sungai di Kabupaten Empat Lawang ini airnya pada umumnya tampak keruh dan membawa bahan endapan lempung (*suspended materials*). Hal ini disebabkan salah satunya oleh aktivitas penebangan pohon-pohon (hutan) yang tak terkendali, sehingga terjadi erosi yang intensif di daerah hulu. Erosi di daerah hulu akan selalu diikuti oleh sedimentasi di sepanjang aliran sungai. Akibat dari pendangkalan aliran sungai, maka pola aliran sungai sering berpindah-pindah tempat.

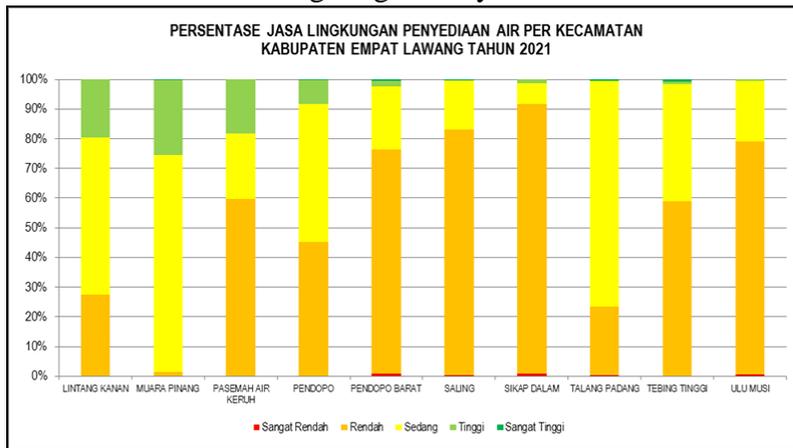
Gambar 2. 5 Peta Hidrologi Kabupaten Empat Lawang



Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah Tahun 2023-2043

Persediaan air sungai tersebut tergantung pada mata air dari Bukit Barisan. Berdasarkan sistem DAS, sebagian besar di Kabupaten Empat Lawang berada dalam wilayah Sub - sub DAS Musi yang merupakan Sub – sub DAS dari DAS Provinsi dan DAS Pasemah, Lintang sebagai DAS Kabupaten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.5. Keterkaitan antara struktur hidrologi dan distribusi ketersediaan air dapat dijelaskan melalui kajian daya dukung daya tampung lingkungan, hal tersebut tercermin pada gambar 2.6.

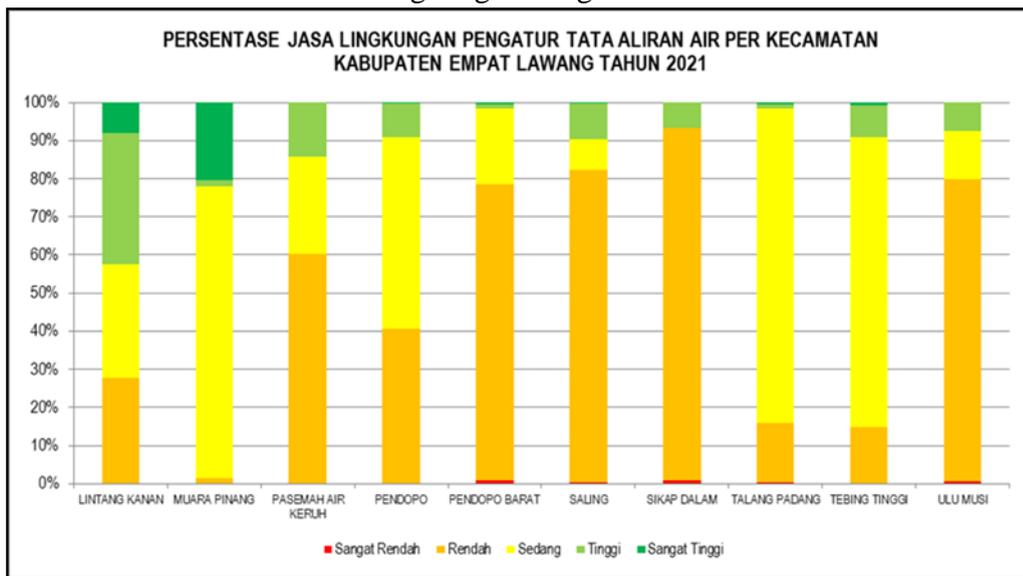
Gambar 2.6 Distribusi Jasa Lingkungan Penyediaan Air Per Kecamatan



Sumber: Revisi Dokumen DDT Kabupaten Empat Lawang, 2021

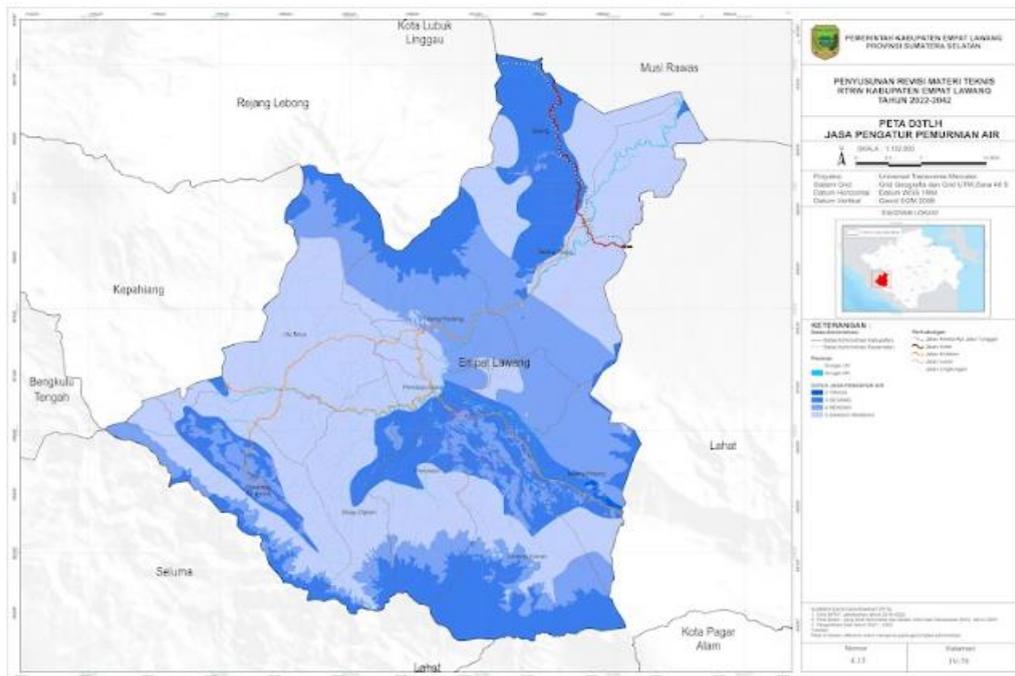
Pada Gambar 2.6 dapat dilihat bahwa jasa penyediaan air bersih di seluruh kecamatan sudah rendah, dengan pengaturan yang juga masih sangat sederhana, sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara distribusi ketersediaan air dengan distribusi pengaturan air Gambar 2.7, khususnya di wilayah kecamatan dengan ketersediaan air rendah.

Gambar 2.7 Distribusi Jasa Lingkungan Pengatur Tata Aliran Air Per Kecamatan



Sumber: Revisi Dokumen DDT Kabupaten Empat Lawang, 2021

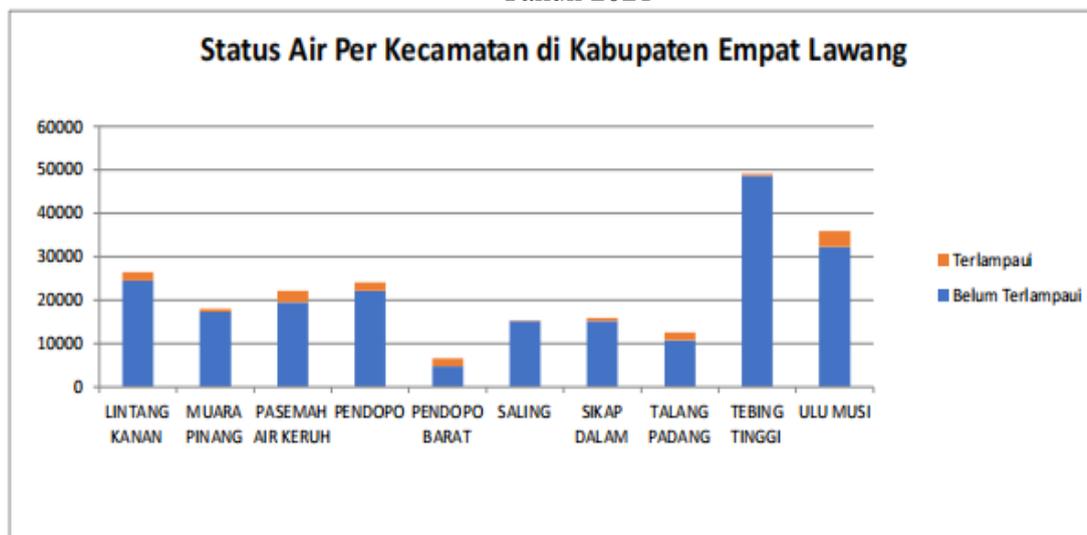
Gambar 2. 8 Peta Jasa Lingkungan Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021



Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah tahun 2023-2043

Daya dukung lingkungan dalam wilayah kabupaten dalam menghasilkan jasa pengaturan pemurnian air sebagian besar masuk dalam kategori rendah dan sangat rendah. Sebagaimana dirangkum dalam Gambar 2.8, bahwa sebesar 47% dari luas wilayah Kabupaten Empat Lawang masuk dalam kategori sangat rendah dalam menghasilkan jasa lingkungan pengatur pemurnian air ini, 26 % dan 27 % termasuk kategori rendah dan sedang. Tidak ada kecamatan yang memiliki kinerja tinggi dan sangat tinggi dalam hal jasa pemurnian air (Gambar 2.8).

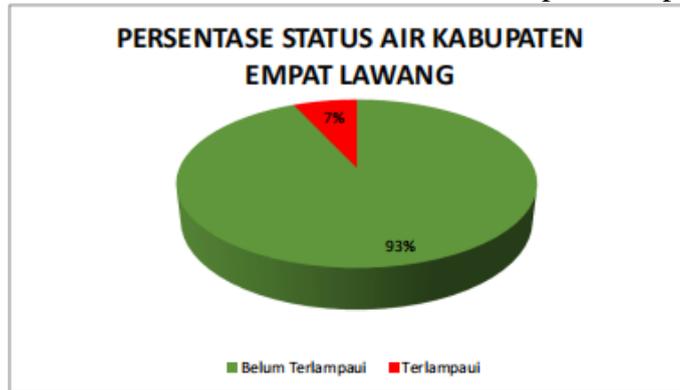
Gambar 2.9 Grafik Batang Status Air Per Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021



Sumber: Revisi Dokumen DDT Kabupaten Empat Lawang, 2021

Secara agregat, Daya Dukung dan Daya Tampung (D3T) air di Kabupaten Empat Lawang 93% belum terlampaui, hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.10. Hal ini di gambarkan dengan selisih ketersediaan air yang masih memadai untuk memenuhi kebutuhan kegiatan penduduk Kabupaten Empat Lawang di setiap kecamatan yang tergambar pada Gambar 2.10. Pada Gambar 2.10 terlihat bahwa status air paling banyak berada di Kecamatan Tebing Tinggi dengan jumlah D3T air terbanyak belum terlampaui.

Gambar 2.10 *Pie Chart* Persentase Status Air Kabupaten Empat Lawang



Sumber: Revisi Dokumen DDT Kabupaten Empat Lawang, 2021

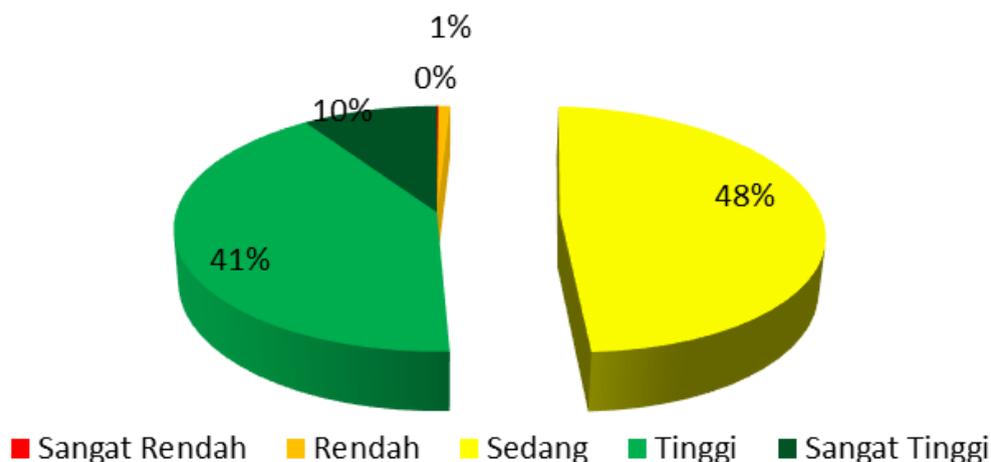
6) Klimatologi

a) Tipe

Kabupaten Empat Lawang beriklim tropis basah dengan curah hujan antara 97 – 386 mm/hari sepanjang tahun. Suhu udara di Kabupaten Empat Lawang berkisar 30,47° C – 32,16° C, pada bulan-bulan tertentu, seperti bulan April, suhu udara minimum mencapai rata-rata 22,7° C. Sedang pada Bulan Januari, suhu udara maksimum bisa mencapai 37,1° C. Kelembaban udara di wilayah Kabupaten Empat Lawang berkisar antara 66,85 – 90,20 R.h kelembaban terendah terjadi pada bulan Desember, sementara kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Agustus.

Di Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana terangkum dalam Gambar 2.11, jasa pengaturan iklim masih relatif lebih baik. Sebagian besar wilayah dalam Kabupaten Empat Lawang masuk kategori sedang dan tinggi kemampuannya dalam menghasilkan jasa pengaturan iklim yaitu hampir mencapai 48% dan 41% dari total luas wilayah.

Gambar 2. 11 Persentase Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021



Sumber: Revisi Dokumen DDT Kabupaten Empat Lawang, 2021

b) Curah Hujan

Tabel 2.4 Pengamatan Unsur Iklim-Curah Hujan Menurut Bulan, 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	284,5	22,0	4,2
Februari	230,7	16,0	3,9
Maret	304,0	19,0	4,1
April	417,9	22,0	4,6
Mei	247,5	17,0	5,0
Juni	135,7	19,0	4,7
Juli	133,1	8,0	4,6
Agustus	170,9	18,0	5,3
September	163,1	17,0	3,9
Oktober	578,1	22,0	2,7
November	250,1	20,0	3,4
Desember	334,6	19,0	2,5

Catatan: Data Tidak Tersedia di Kabupaten Empat Lawang, data yang dipakai adalah data secara umum di Sumatera Selatan

Sumber: BMKG, 2023

Dari Tabel 2.4 diketahui secara umum di Sumatera Selatan jumlah curah hujan paling tinggi terjadi di Bulan Oktober, yaitu 578,1 mm, dengan jumlah hari hujan pada Bulan Oktober adalah 22 hari dan penyinaran matahari sebanyak 2,7 %. Hal ini selaras dengan jumlah intensitas hujan per harinya, dimana hujan paling banyak turun di akhir Tahun 2022, yaitu pada Bulan Januari, April dan Oktober. Namun bila dibandingkan

antara dua bulan terakhir di Tahun 2022, maka dari segi penyinaran matahari di Bulan Desember, Sumatera Selatan paling sedikit penyinaran matahari, sebanyak 2,5%. Artinya pada Tahun 2022 di Bulan Desember paling banyak cuaca mendung, namun secara tingkat curah hujan paling tinggi terjadi di Bulan Oktober.

Berdasarkan curah hujan di Sumatera Selatan secara umum, terjadi pergeseran nilai curah hujan. Dalam tiga tahun terakhir di Sumatera Selatan curah hujan semakin tinggi. Hal ini terlihat dari curah hujan yang tinggi terjadi di setiap bulannya, dan penyinaran matahari yang minim untuk setiap bulannya. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan iklim di Sumatera Selatan.

b) Suhu

Tabel 2.5 Pengamatan Unsur Iklim-Suhu Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Palembang 2022

Bulan Month	Suhu /Temperature (°C)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/ <i>January</i>	23,0	28,7	34,2
Februari/ <i>February</i>	22,8	29,2	35,3
Maret/ <i>March</i>	22,5	29,8	36,0
April/ <i>April</i>	23,0	30,1	35,3
Mei/ <i>May</i>	23,8	30,4	36,2
Juni/ <i>June</i>	23,1	29,3	34,8
Juli/ <i>July</i>	22,2	29,5	34,8
Agustus/ <i>August</i>	20,4	29,2	34,6
September/ <i>September</i>	23,4	29,2	35,7
Oktober/ <i>October</i>	22,4	28,9	35,2
November/ <i>November</i>	23,4	29,8	35,4
Desember/ <i>December</i>	22,3	29,0	34,6

Sumber: BMKG, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 2.5 diketahui bahwa suhu di Sumatera Selatan pada Tahun 2022 berada di suhu minimum 20,4°C dan maksimum 36,2°C, suhu tertinggi berada di Bulan Mei, sebesar 36,2°C. Suhu terendah yang terjadi pada Tahun 2022 adalah 20,4°C yang terjadi pada Bulan Agustus.

b) Kelembapan

Tabel 2.6 Pengamatan Unsur Iklim-Kelembapan Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Palembang 2022

Bulan <i>Month</i>	Kelembaban / <i>Humidity</i> (%)		
	Minimum	Rata-rata <i>Average</i>	Maksimum <i>Maximum</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/ <i>January</i>	57,0	82,3	99,0
Februari/ <i>February</i>	57,0	80,9	98,0
Maret/ <i>March</i>	60,0	81,7	98,0
April/ <i>April</i>	57,0	80,2	98,0
Mei/ <i>May</i>	60,0	79,5	99,0
Juni/ <i>June</i>	57,0	80,2	98,0
Juli/ <i>July</i>	55,0	79,1	99,0
Agustus/ <i>August</i>	57,0	79,0	98,0
September/ <i>September</i>	59,0	81,8	98,0
Oktober/ <i>October</i>	57,0	83,8	100,0
November/ <i>November</i>	62,0	83,2	99,0
Desember/ <i>December</i>	58,0	82,5	100,0

Sumber: BMKG, 2023

Tabel 2.7 Pengamatan Unsur Iklim-Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Palembang, 2022

Bulan <i>Month</i>	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara		
	<i>Wind Velocity (m/sec)</i>			<i>Atmosphere Pressure (mb)</i>		
	Minimum	Rata-rata <i>Average</i>	Maksimum <i>Maximum</i>	Minimum	Rata-rata <i>Average</i>	Maksimum <i>Maximum</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/ <i>January</i>	0,0	3,2	9,0	1005,1	1009,2	1013,7
Februari/ <i>February</i>	0,0	3,0	9,0	1002,1	1008,1	1005,4
Maret/ <i>March</i>	0,0	2,6	8,0	1002,3	1007,6	1015,5
April/ <i>April</i>	0,0	2,1	7,0	1003,8	1007,7	1012,7
Mei/ <i>May</i>	0,0	2,5	27,0	1003,3	1007,5	1011,5

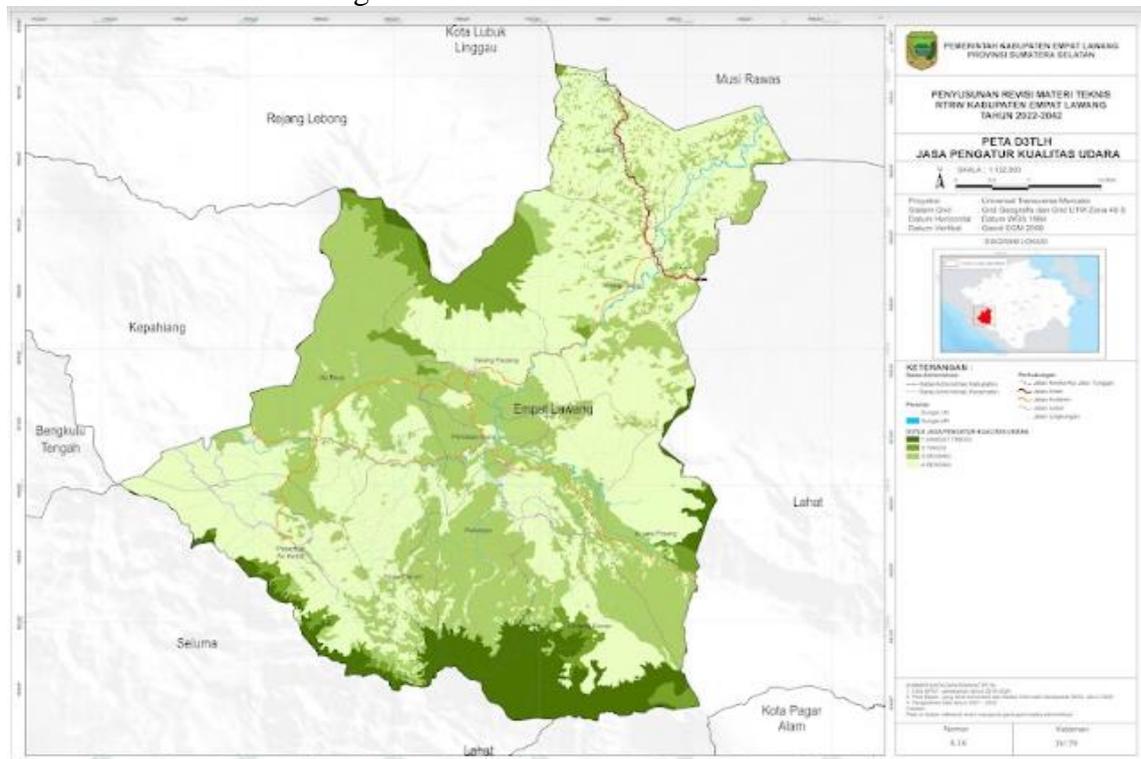
Sumber: BMKG 2023

Lanjutan Tabel 2.7 Pengamatan Unsur Iklim-Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Palembang, 2022

Bulan Month	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara		
	Wind Velocity (m/sec)			Atmosphere Pressure (mb)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Juni/June	0,0	2,7	11,0	1004,2	1008,2	1011,5
Juli/July	0,0	2,9	13,0	1003,9	1007,7	1010,9
Agustus/ August	0,0	3,0	8,0	1004,4	1008,1	1011,7
September/ September	0,0	2,6	7,0	1003,3	1009,1	1013,7
Oktober/ October	0,0	1,8	9,0	1004,3	1008,6	1012,8
November/ November	0,0	1,8	6,0	1003,2	1008,0	1013,0
Desember/ December	0,0	2,4	11,0	1002,4	1007,6	1013,2

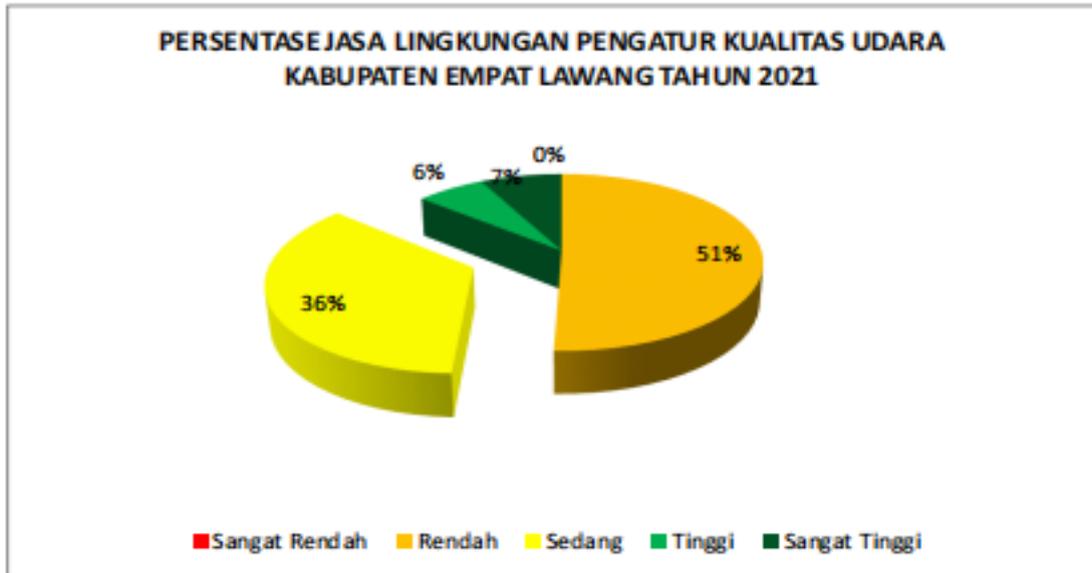
Sumber: BMKG 2023

Gambar 2.12 Peta Jasa Pengaturan Kualitas Udara



Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah tahun 2023-2043

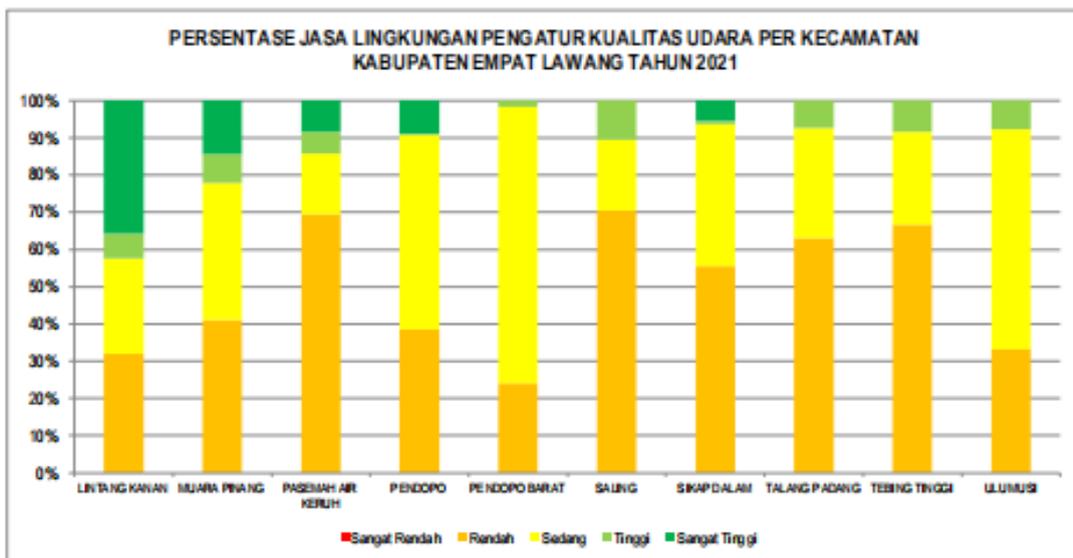
Gambar 2.13 Persentase Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara Tahun 2021



Sumber :Revisi Dokumen DDT Kabupaten Empat Lawang,2021

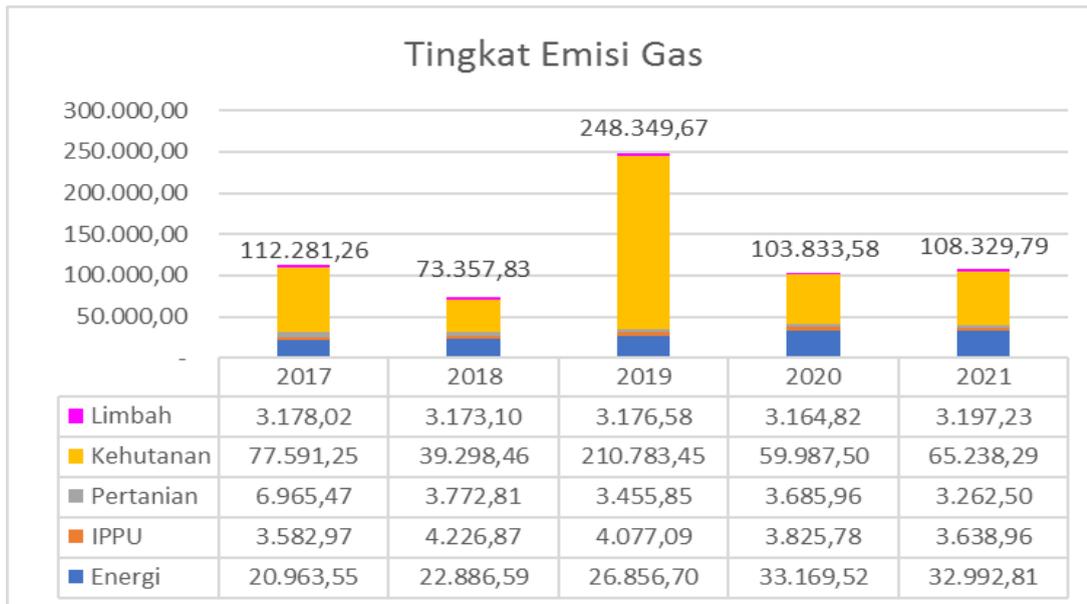
Gambar 2.13 menunjukkan pada Tahun 2021 jasa lingkungan pengatur kualitas udara Kabupaten Empat Lawang sebesar 51% rendah, 36% sedang.

Gambar 2.14 Persentase Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara Per Kecamatan Tahun 2021



Sumber: Revisi Dokumen DDT Kabupaten Empat Lawang, 2021

Gambar. 2.15 Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Sumatera Selatan



Sumber: https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/frontend/data/tingkat_emisi#contact

Secara trend data selama lima tahun diketahui bahwa tingkat emisi gas rumah kaca meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan tingkat emisi gas sebesar 0,375 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Namun bila melihat secara terpisah Tahun 2021 dengan Tahun 2017 didapatkan persentase penurunan tingkat pencemaran di Tahun 2021 bila dibandingkan dengan data 2017 adalah sebesar 0,03519.

7) Penggunaan Lahan

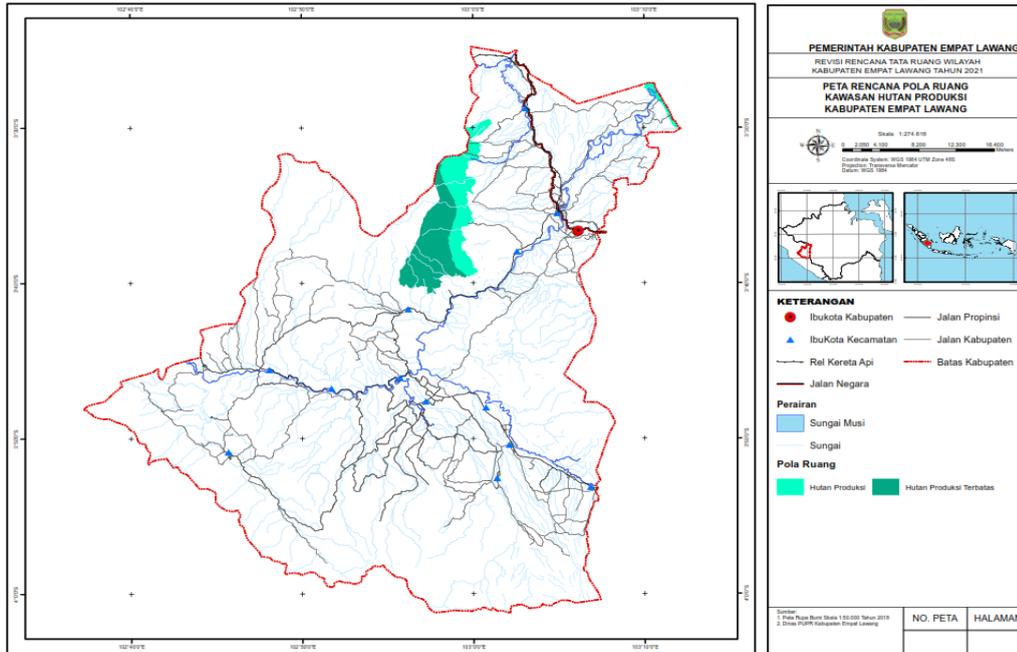
a) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Empat Lawang terdiri dari Kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, peruntukan pertanian, peruntukan perikanan, peruntukan pertambangan, peruntukan industri, peruntukan pariwisata, peruntukan permukiman, dan peruntukan pertahanan keamanan.

(1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan yang diperuntukan bagi Hutan Produksi Tetap dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam. HTP berada di Kecamatan Saling, Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Tebing Tinggi seluas 4.557,9 (Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Sembilan) hektar. HP berada di Kecamatan Saling, Kecamatan Talang Padang, dan Kecamatan Tebing Tinggi seluas 3.835,07 (Tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima koma nol tujuh) hektar.

Gambar 2. 16 Peta Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Empat Lawang



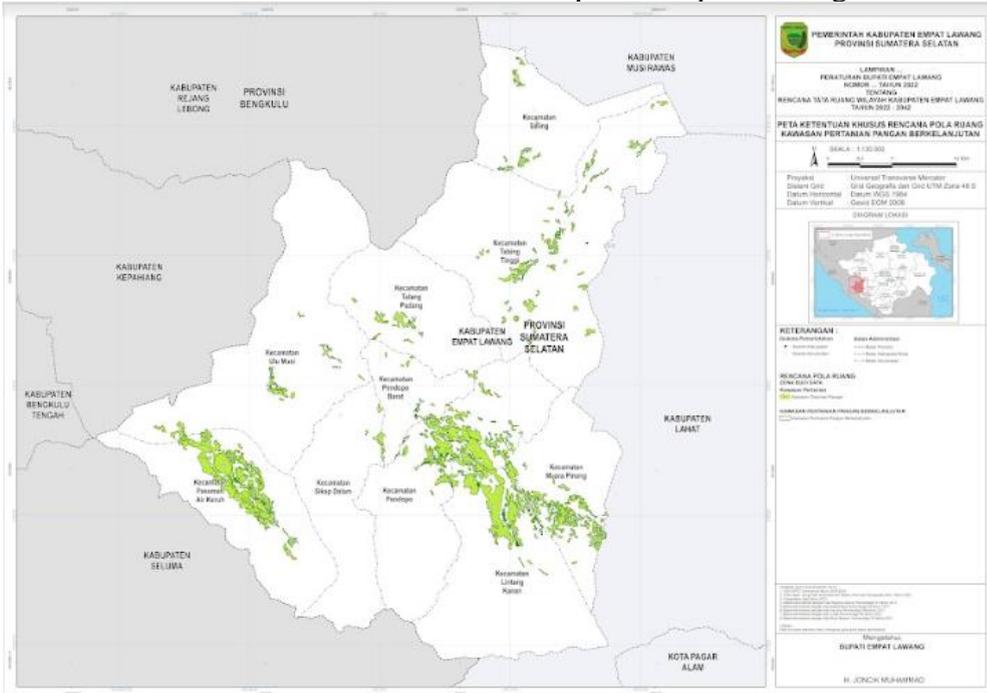
Sumber: Perda RTRW Kabupaten Empat Lawang, 2012; diolah tahun 2021

(2) Kawasan Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB Kabupaten Empat Lawang, namun berdasarkan analisis shift share pada PBRB Kabupatn Empat Lawang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, diketahui bahwa terjadi penurunan persentase kontribusi sektor pertanian. Hal tersebut dapat menjadi indikasi pada kedua kemungkinan, kemungkinan pertama bahwa telah terjadi penguatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan ditandainya dengan tumbuhnya sektor jasa dan perdagangan. Namun bisa berarti kemungkinan kedua, penurunan kontribusi PBRB sektor pertanian disebabkan menurunnya produksi pertanian dan berkurangnya luasan Kawasan pertanian.

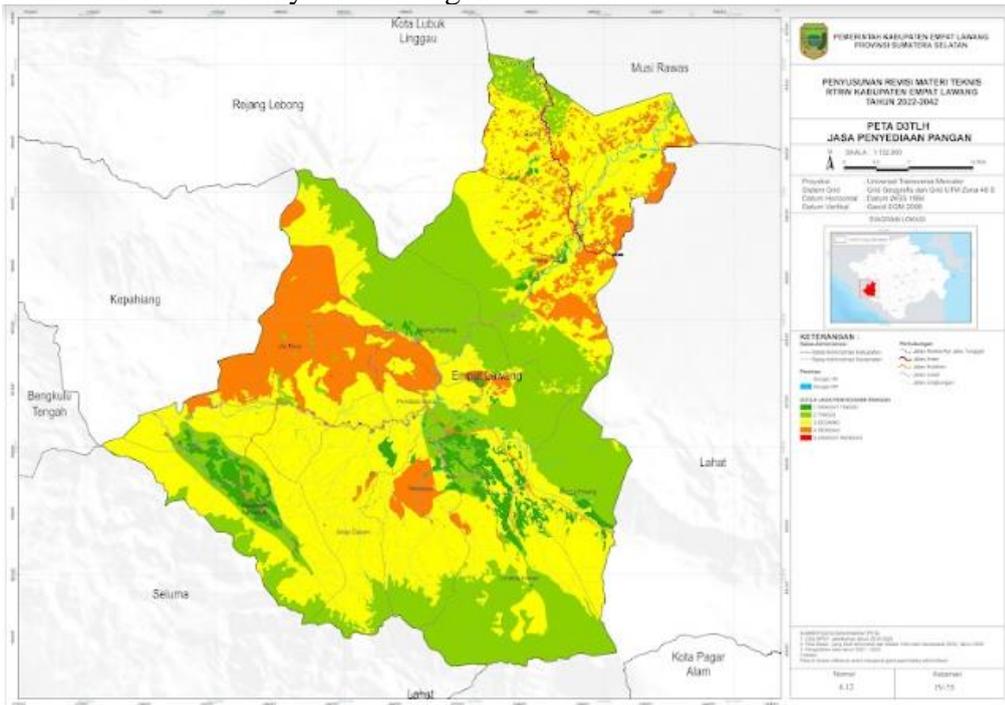
Sebaran wilayah pertanian di wilayah Kabupaten Empat Lawang masih dapat dikategorikan sebagai *spot partial* (luasan terpisah) yang tersebar di seluruh kecamatan, berarti dibutuhkan *effort* yang lebih untuk me-*manage* wilayah pertanian tersebut. Adapun sebarannya, yaitu yaitu Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Saling, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Ulu Musi seluas 13.339 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) hektar. Untuk kelestarian kawasan pertanian pangan, secara keseluruhan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang penetapannya melalui Peraturan Bupati, yang diikuti dengan peningkatan manajemen kewilayahan untuk mencapai efisinsi pengelolaan pemanfaatan ruang.

Gambar 2. 17 Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Empat Lawang



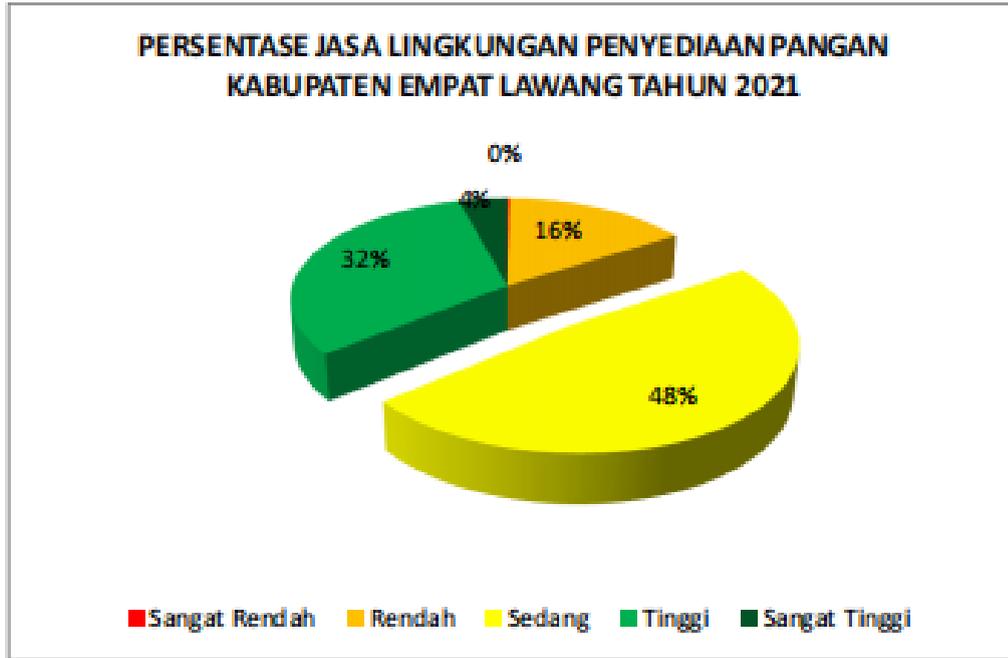
Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah tahun 2023-2043

Gambar 2.18 Jasa Penyediaan Pangan



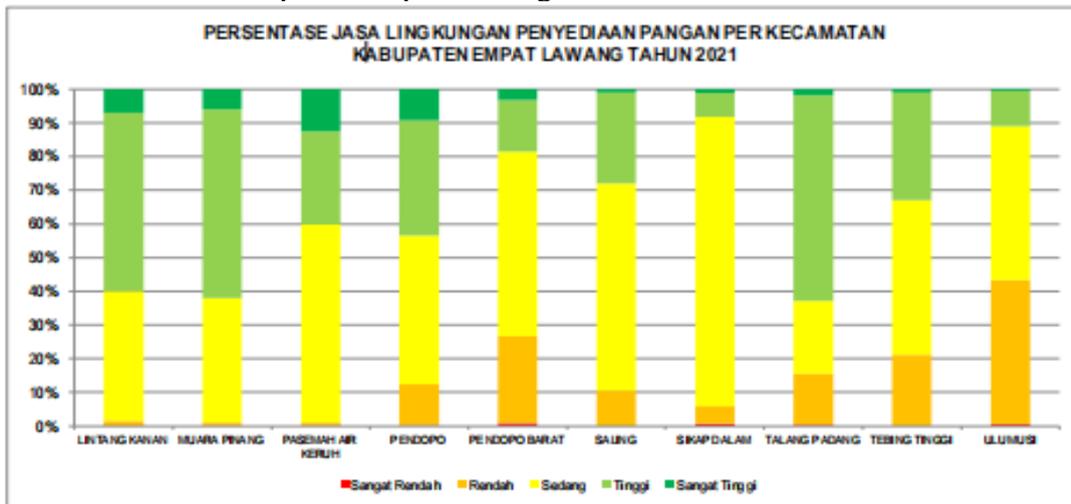
Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah tahun 2023-2043

Gambar 2.19 Persentase jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Kabupaten Empat Lawang 2021



Sumber: Revisi DDDT Kabupaten Empat Lawang, 2021

Gambar 2.20 Persentase Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Per Kecamatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021

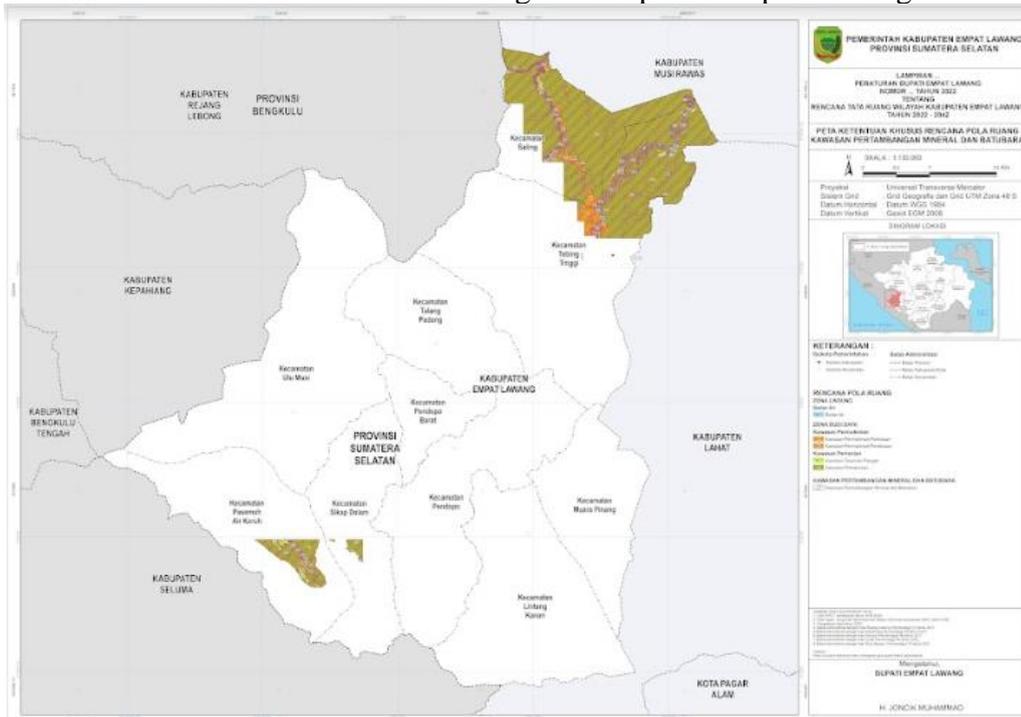


Sumber: Revisi DDDT Kabupaten Empat Lawang, 2021

A.3 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Rencana pengembangan kawasan pertambangan dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral dan bahan galian yang dimiliki Kabupaten Empat Lawang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*) dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan (*environmental friendly*).

Gambar 2. 21 Peta Kawasan Pertambangan Kabupaten Empat Lawang



Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah tahun 2023-2043

Peruntukan ruang untuk kawasan pertambangan di Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:

- Kawasan potensi batubara seluas kurang lebih 3.007,11 Ha (Tiga Ribu Tujuh koma Sebelas) hektar di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Talang Padang, dan Kecamatan Tebing Tinggi;
- Kawasan potensi panas bumi berupa energi panas bumi berada di Kecamatan Pasemah Air Keruh pada kawasan Pegunungan Bukit Barisan;
- Pengembangan kawasan potensi pertambangan dalam bentuk wilayah pertambangan meliputi:
 - Wilayah usaha pertambangan;
 - Wilayah pertambangan rakyat; dan
 - Wilayah kerja pertambangan panas bumi.
- Pengembangan dan/atau pembangunan terminal khusus pertambangan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan lainnya disesuaikan dengan hasil kajian kebutuhan pengembangan dan/atau pembangunan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Kawasan pertambangan ditetapkan dengan mengacu pada penetapan lokasi Wilayah Pertambangan (WP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A.4 Kawasan Peruntukan Industri

Dengan mempertimbangkan karakteristik kewilayahan dan sebaran potensi ekonomi, kawasan peruntukan industri di Kabupaten Empat Lawang berupa industri kecil, berupa Sentra industri kecil dan menengah, meliputi:

- Industri pengolahan produk pertanian di Kecamatan Ulu Musi; dan
- Industri kerajinan, meliputi: Kecamatan Pendopo; Kecamatan Saling; Kecamatan Pendopo Barat; dan Kecamatan Tebing Tinggi.

A.5 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Empat Lawang dilakukan untuk memanfaatkan potensi wisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Perwilayahan Kabupaten Empat Lawang terdiri dari 4 (empat) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) dan 2 (dua) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK).

1. KPPK 1 dengan Tema Pengembangan: Wisata Alam, Wisata Pendidikan Wisata Keluarga, Kuliner, Fasilitas Akomodasi, Bisnis dan MICE dengan destinasi unggulan Pantai Terusan;
2. KPPK 2 dengan Tema Pengembangan: Wisata alam, pedesaan, rumah adat, sawah dan pemandangan dengan destinasi unggulan Danau Oge Tebat Gimbe;
3. KPPK 3 dengan Tema Pengembangan: Wisata Agrowisata dan wisata alam, destinasi unggulan Air Terjun Batu Betiang;
4. KPPK 4 dengan Tema Pengembangan: Wisata Alam, Agrowisata, budaya dan Petualangan, destinasi Pemandian Putri Mayang Sari;
5. KSPK Tebing Tinggi: Air Terjun Sangeh, Pantai Terusan, Pulo Mas, Desa Wisata Terusan, Tugu Emas, Jembatan Musi II, Para Cafe, Kupang, Sentra Kopi Empat Lawang dan Lempok Duren;
6. KSPK Muara Pinang: Pemandian Putri Mayangsari, Situs Megalitikum Air Terjun Curup Degian, Agrowisata sawah dan Air Terjun Curup Embun.

A.6 Kawasan Peruntukan Permukiman

Berdasarkan analisis proyeksi kebutuhan rumah dan luas lahan untuk permukiman di Kabupaten Empat lawang maksimal luas lahan permukiman perkotaan adalah 8.127,34 Ha (Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh koma Tiga Puluh Empat) hektar dan luas maksimal lahan pemukiman pedesaan adalah 395,03 (tiga ratus Sembilan puluh lima koma nol tiga) hektar dengan kebutuhan rumah 24.085 unit rumah untuk tahun perencanaan 2040 (Sumber RP3KP; 2018). Hal ini didukung oleh rencana pola ruang Kabupaten Empat lawang untuk tahun 2032 yang telah ditetapkan, di mana terdapat lahan seluas 8.522,37 Ha atau 3.78% yang diperuntukkan untuk kawasan permukiman.

Strategi pengembangan kawasan permukiman baru di Kabupaten Empat lawang ini dibagi menjadi dua wilayah, yaitu kawasan permukiman di perkotaan dan pedesaan. Pengembangan kawasan permukiman baru perlu memperhatikan rencana pengaturan bangunan, dengan beberapa kriteria dalam pengaturan bangunan sebagai alat untuk pengendalian dan pengaturan agar sesuai dengan arahan dan rencana pengembangan wilayah.

A.7 Kawasan Hutan Rakyat

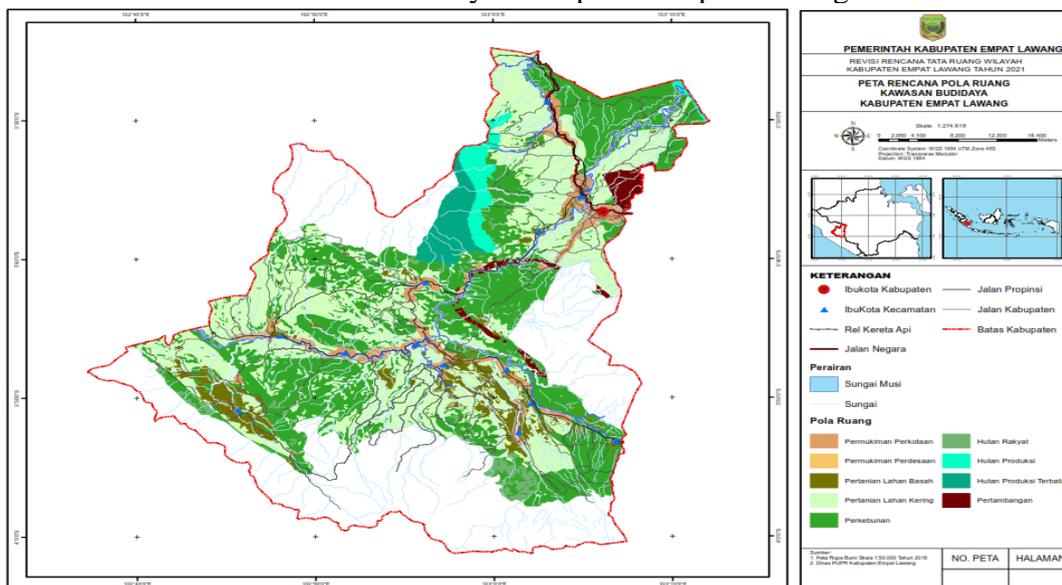
Kawasan hutan rakyat Apabila kawasan hutan rakyat berada pada lahan yang memiliki kelerengan >40% untuk kepentingan kelestarian lingkungan perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lindung. Pada Kabupaten Empat Lawang kawasan hutan rakyat belum diakomodir dalam RTRW maupun dalam SK penetapan Kawasan Hutan dari Kementerian LHK.

A.8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

1. Kantor kepolisian Kabupaten Empat Lawang, meliputi:
 - a. Markas kepolisian resort (Mapolres) yang terletak di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi;
 - b. Markas kepolisian sektor (Mapolsek) yang terdapat di setiap wilayah Kecamatan Kabupaten Empat Lawang.
 - c. Kepolisian Sektor (Polsek) yang terletak di Kecamatan Saling, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Pendopo Barat.
2. Kantor militer Kabupaten Empat Lawang, meliputi:
 - a. Komando Rayon Militer (Koramil) yang terdapat di Kecamatan Pendopo Barat/Pendopo, Kecamatan Lintang Kanan/Muara Pinang, Kecamatan Pasemah Air Keruh/Ulu Musi, Kecamatan Tebing Tinggi/Saling, dan Kecamatan Talang Padang; dan
 - b. Markas Komando Distrik Militer (Makodim) yang terletak di wilayah kecamatan Tebing Tinggi.

Gambar 2. 23 Peta Kawasan Budidaya Kabupaten Empat Lawang



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Empat Lawang, 2012; diolah tahun 2021

b) Kawasan Lindung

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Adapun beberapa kriteria kawasan sesuai hutan lindung meliputi:

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175; dan/atau
2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan di atas 40%; dan/atau
3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter atau lebih.

Aturan penilaian kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan tersebut ditentukan berdasarkan klasifikasi yang dapat dilihat pada Tabel 2. 8.

Tabel 2. 8 Parameter dan Skoring Kawasan Hutan Lindung

1 Kemiringan Lereng			
	Persen Lereng	Keterangan	Skor
	0 – 8 %	Datar	20
	8 – 15 %	Landai	40
	15 – 25 %	Agak Curam	60
	25 – 40 %	Curam	80
	>40 %	Sangat Curam	100
2 Jenis Tanah			
	Kelompok Jenis Tanah	Kepekaan Terhadap Erosi	Skor
	Alluvial, Glei, Planosol, Hidromorf Kelabu, Literite Air Tanah	Tidak Peka	15
	Latosol	Agak Peka	30
	Brown Forest, Non Calcic	Kurang Peka	45
	Andosol, Grumosol, Podsolik	Peka	60
	Regosol, Litosol Organosol, Renzine	Sangat Peka	75
3 Intensitas Hujan			
	Kisaran Curah Hujan (mm/hari hujan)	Keterangan	Skor
	8 – 13,6	Sangat Rendah	10
	13,6 – 20,7	Rendah	20
	20,7 – 27,7	Sedang	30
	27,7 – 34,8	Tinggi	40
	>34,8	Sangat Tinggi	50

Sumber: Keppres Nomor 32 Tahun 1990

Fungsi Kawasan lindung yang harus menjadi perhatian di Kabupaten Empat Lawang adalah Kawasan sempadan sungai. Saat ini kondisi *eksisting* pola ruang di sempadan sungai khususnya Sungai Musi telah dimanfaatkan sebagai permukiman dan infrastruktur penunjangnya, oleh karena itu perlu adanya perhatian dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga tidak mengganggu fungsinya sebagai wilayah penyangga daerah sekitarnya.

Kawasan lain yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah Kawasan Rawan Bencana Alam, merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Empat Lawang terdiri dari kawasan rawan bencana gerakan tanah, kawasan rawan

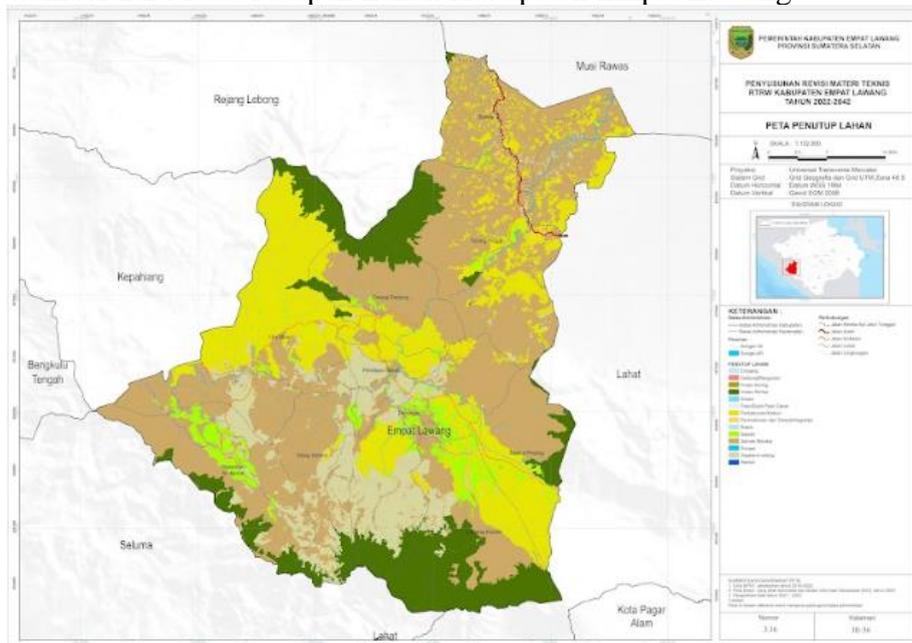
bencana banjir, bencana gunung berapi, perlindungan terhadap bencana yang diakibatkan adanya jalur sesar. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Empat Lawang berpotensi rawan bencana gerakan tanah. Adapun zona kerentanan gerakan tanah tinggi berada di Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Paemah Air Keruh, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Ulu Musi seluas 11.476 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh enam) hektar.

Wilayah Pagaralam memiliki gunung berapi, yaitu Gunung Api Dempo (GAD). Jika terjadi erupsi, maka dua Kecamatan di Empat Lawang terdampak yakni Kecamatan Lintang kanan dan Kecamatan Muara Pinang seluas 14.857 (empat belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh) hektar. Atas dasar tersebut, masyarakat di sekitar Kecamatan Muara Pinang dan Lintang Kanan harus waspada dalam aktivitas seperti berkebun di sekitar Gunung Dempo dan aktivitas di pinggir aliran sungai.

Kabupaten Empat Lawang cukup banyak dilalui oleh sesar. Perbedaan jenis bencana menimbulkan implikasi penanganan yang berbeda. Sempadan sesar dapat diterapkan untuk sesar yang berjenis *Strike Fault*. Demikian halnya untuk jenis sesar di Kabupaten Empat Lawang perlu penelitian yang lebih mendalam dan detail untuk dapat mengukur kemungkinan resiko bencana yang ditimbulkan. Sesuai dengan sebaran sesar yang ada, maka deliniasi sempadan sesar berada di Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Saling, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Ulu Musi seluas 56.538 (Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan) hektar.

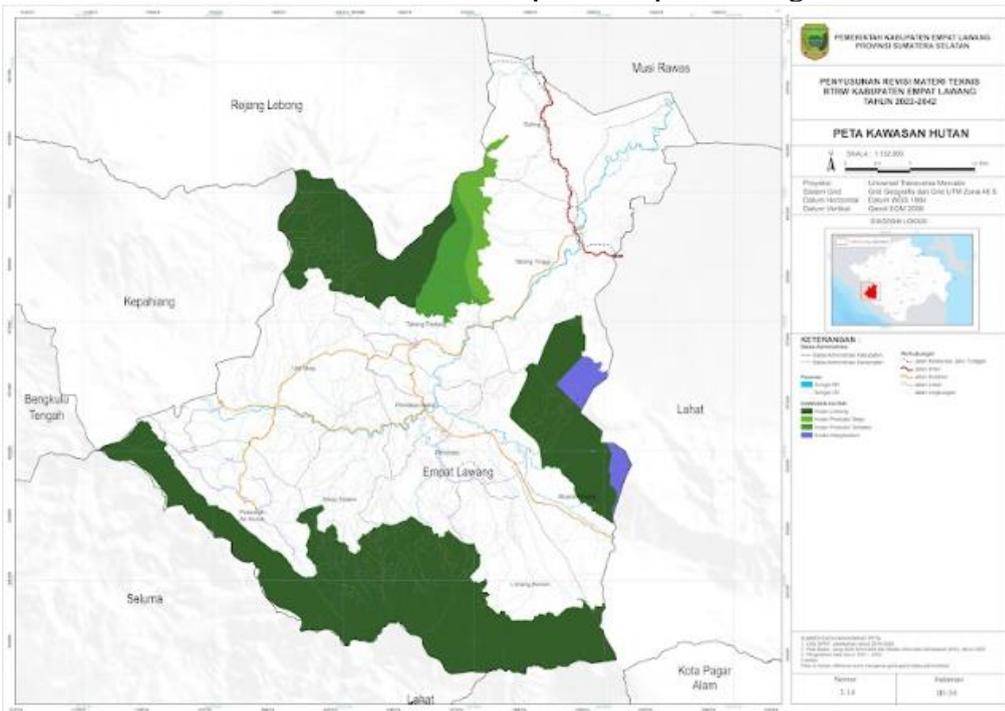
Kabupaten Empat Lawang termasuk daerah rawan bencana banjir. Adapun kawasan rawan bencana banjir tinggi berada di Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Saling, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Ulu Musi seluas 13.870 (Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh) hektar.

Gambar 2.24 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Empat Lawang



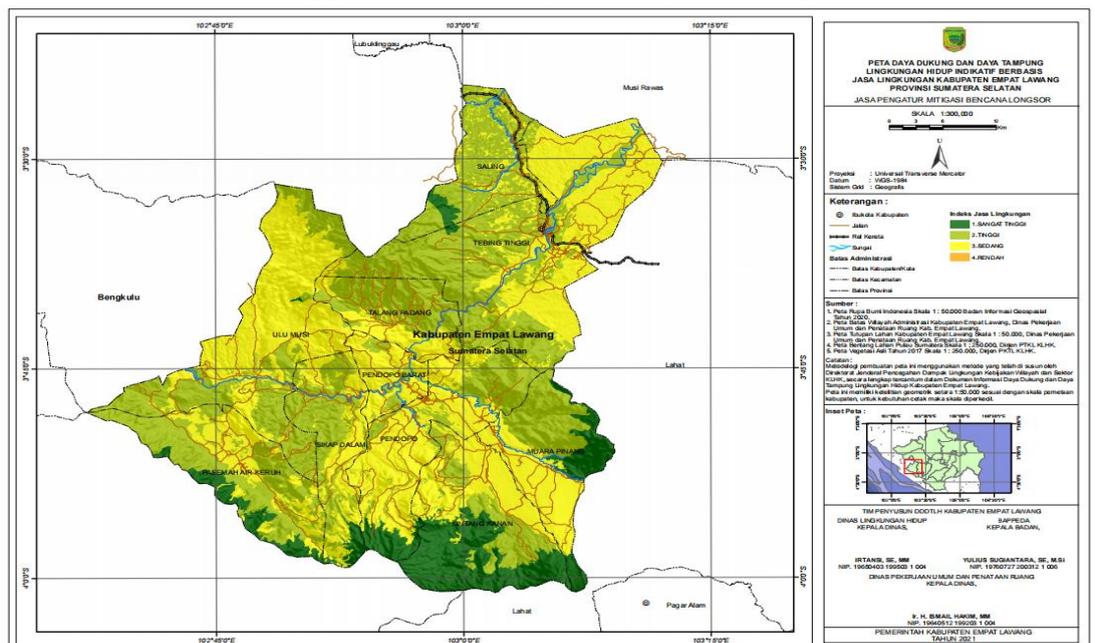
Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah tahun 2023-2024

Gambar 2. 25 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Empat Lawang



Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah tahun 2023-2023

Gambar 2. 26 Peta Ketinggian Tanah Kabupaten Empat Lawang



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Empat Lawang, 2012; diolah tahun 2021

C. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Empat Lawang terdiri atas kawasan peruntukan perikanan tangkap dan kawasan peruntukan perikanan budidaya.

Sub sektor perikanan terbagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Jenis perikanan tangkap terbagi menjadi dua yaitu perikanan laut dan perikanan di perairan umum. Produksi perikanan budidaya di tahun 2020 mencapai 874,68 ton, Perikanan tangkap di Kabupaten Empat Lawang berasal dari tangkapan perairan sungai-sungai yang skalanya tidak terlalu besar.

Tabel 2.9 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Empat Lawang

Produksi Perikanan	Tahun (Ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Empat Lawang	486,59	366,24	874,68	N/A	1162,740

Sumber : Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Empat Lawang, 2023

8) Jenis Tanah

Jenis tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuknya. Faktor-faktor tersebut adalah batuan induk, topografi, umur, iklim dan vegetasi/biologi. Wilayah Kabupaten Empat Lawang didominasi jenis tanah Litosol Tanah yang cocok untuk tanaman rumput-rumputan sehingga potensial untuk pengembangan ternak. Alluvial sepanjang Sungai Musi dan Sungai Lintang tanah berwarna coklat kekuning-kuningan cocok untuk tanaman palawija.

Jenis tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor pembentuknya. Faktor-faktor tersebut adalah batuan induk, topografi, umur, iklim dan vegetasi/biologi. Akibat pengaruh tersebut tanah terus berproses sehingga terbentuk berbagai jenis tanah. Adapun keadaan jenis tanah di Kabupaten Empat Lawang terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Litosol, tanah litosol dianggap tanah yang paling muda, sehingga bahan induknya seringkali dangkal atau tampak di atas permukaan tanah sebagai bahan yang padu sehingga mudah terkena erosi. Oleh karena itu, jenis tanah ini sebaiknya diusahakan untuk hutan. Jenis tanah ini mempunyai tekstur halus, struktur lemah, konsistensi Gembur, kandungan N,P,K (kesuburan) sedang, keasaman tanah pH = 4,5 – 5,5. Jenis tanah ini tersebar di pinggiran pegunungan terjal pada Patahan di sepanjang Bukit Barisan.
2. Alluvial, penyebaran jenis tanah ini terdapat di sepanjang Sungai Air Lintang, Sungai Musi, Sungai Air Keruh dan Sungai Air Saling dari Punggur Bukit Barisan. Tanah Alluvial meliputi tanah-tanah yang masih sering mengalami atau dilanda banjir sehingga dapat dianggap masih muda dan belum ada diferensiasi horizon. Tanah ini terbentuk akibat banjir, dimana bahan-bahan baru dari pedalaman diangkat kemudian diendapkan. Dalam musim kemarau, areal tanah ini kering. Drainase sedang sampai lembab, permeabilitas sedang, daya menahan air sedang, tekstur tanah tanpa struktur, keasaman tanah (pH ≤5,5). Tanah ini cocok untuk tanaman padi, palawija dan tanaman tahunan.

3. Hidromorf, terdapat di dataran rendah seperti di Kecamatan Tebing Tinggi. Kondisi jenis tanah di Kabupaten Empat Lawang sebagian besar tersusun atas lapisan tanah yang masih muda dan mudah mengalami erosi, dikembangkan untuk penggunaan lahan hutan, dengan tanaman-tanaman/pohon yang dapat menahan laju erosi. Sehingga dapat mencegah penggerusan dan penurunan volume tanah maupun mencegah timbulnya sedimentasi akibat pendangkalan sungai yang disebabkan endapan tanah.

a. Potensi Pengembangan Wilayah Struktur Ruang

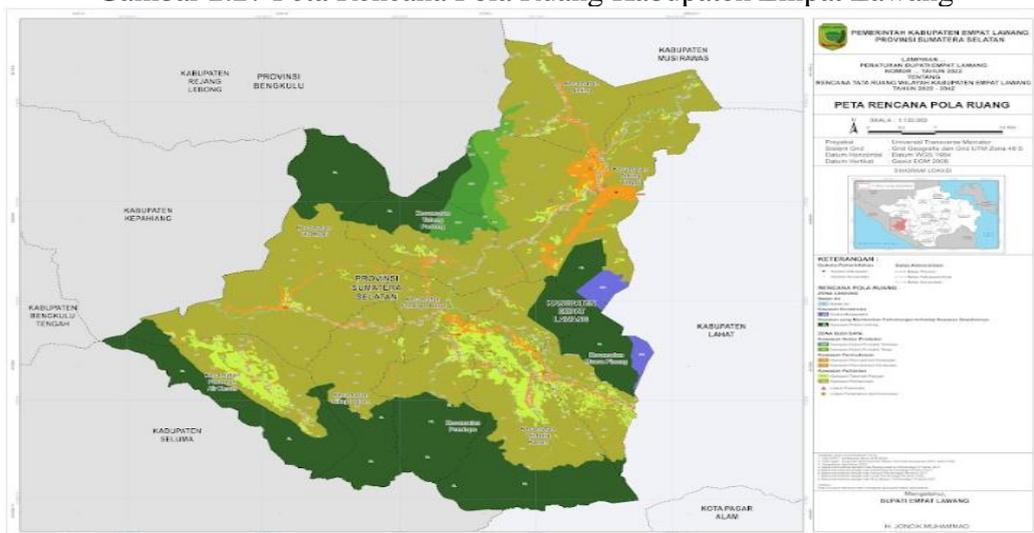
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Hirarki perkotaan yang lebih rendah daripada PKL adalah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Kawasan yang berpotensi sebagai PPK adalah Perkotaan Pendopo. Pola sebaran permukiman di Kabupaten Empat dapat dibentuk menjadi 4 Kluster/ sistem pengembangan wilayah yang meliputi:

- ✓ Kluster Utara, meliputi: Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Barat, Saling;
- ✓ Kluster Tengah, meliputi: Kecamatan Talang Padang, Pendopo Barat dan Pendopo Timur;
- ✓ Kluster Timur, meliputi: Kecamatan Muara Pinang, Semidang dan Lintang Kanan;
- ✓ Kluster Barat, meliputi: Kecamatan Sikap Dalam, Ulu Musi, dan Pasemah Air Keruh.

Gambar 2.27 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Empat Lawang



Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah tahun 2023-2023

Potensi Sumber Daya

Potensi Pengembangan Pertanian

Kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah. Kawasan Pertanian di Kabupaten Empat Lawang terbagi menjadi :

- a) Kawasan tanaman pangan,
- b) Kawasan hortikultura,
- c) Kawasan perkebunan, dan
- d) Kawasan peternakan.

a) Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang penetapannya melalui Peraturan Daerah, dikembangkan di Kawasan pertanian pangan berada di seluruh kecamatan, yaitu Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Saling, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Ulu Musi seluas 13.339 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan) hektar.

Dengan dialokasikannya luas lahan sawah di Kabupaten Empat Lawang tersebut, akan terdapat kelebihan luas lahan sawah yang diharapkan dapat memacu surplus padi di Kabupaten Empat Lawang sehingga dapat menjadi pemasok tanaman pangan bagi wilayah lain di luar Kabupaten Empat Lawang.

Peruntukan kawasan tanaman pangan atau LP2B yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Empat Lawang dengan mempertimbangkan keberadaan, sebagai berikut:

1. Lahan sawah subur dengan irigasi teknis;
2. Lahan sawah subur dengan irigasi sederhana/desa; dan
3. Lahan sawah tadah hujan cukup subur.

Dengan perannya yang relatif besar terhadap pembentukan nilai tambah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tanaman bahan pangan (padi dan palawija) menjadi andalan dan unggulan dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Empat Lawang tahun 2021 sebesar 33,10%.

b) Kawasan Tanaman Hortikultura

Hortikultura merupakan sektor kegiatan yang sangat berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama petani. Komoditas hortikultura juga relatif memiliki kandungan gizi yang baik sehingga juga dapat menunjang kesejahteraan nutrisi masyarakat.

Kawasan budidaya hortikultura berupa tanaman dan buah-buahan. Berikut luas panen dan produksi dari hortikultura tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.10 Luas Panen Tanaman Holtikultura

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Durian	32.653	5.977	818	104.267	106.987
2	Manggis	5.005	3.607	8.252	8.770	5.828
3	Jeruk	5.320	2.688	4.940	5.907	16.996
4	Tomat	26	36	59	33,5	19
5	Terong	50	35	65,25	41,25	31
6	Cabai	322	185	225,65	192,5	104
7	Jahe	7.686	2.353	13,66	5,48	2,97
8	Kunyit	686	1.254	3,57	0,58	0,25
9	Lengkuas	2114	2.246	4,67	11.853	0,59

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang, 2023

Tabel 2.11 Produksi tanaman hortikultura

No	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Durian	8.427	6.384	859	4059	5049,6
2	Manggis	6.303	2.037	348,4	420,8	633,7
3	Jeruk	8.017	1.661	432,9	293,6	497,7
4	Tomat	10,5	15,8	61,8	20	2,8
5	Terong	56,6	20,7	65,38	26,8	4,5
6	Cabai	274,3	172,5	197,8	238,25	15,7
7	Jahe	26.093	88.717	193,34	125,08	30,8
8	Kunyit	6.302	41.009	96,89	23,29	3,53
9	Lengkuas	10.016	63.490	147,18	42,74	8,07

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang, 2023

c) Kawasan Perkebunan

Kawasan yang diperuntukkan bagi perkebunan yang dikelola oleh rakyat maupun pemerintah. Lahan potensial dengan peruntukan pengembangan tanaman tahunan/ perkebunan berupa tanaman kopi, sawit, Karet, kakao tersebar hampir seluruh kecamatan, yaitu Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Saling, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Ulu Musi.

d) Kawasan Peternakan

Rencana pengembangan kawasan budidaya peternakan berupa peternakan unggas dan sapi berada di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Ulu Musi, kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Lintang Kanan seluas 298 hektar.

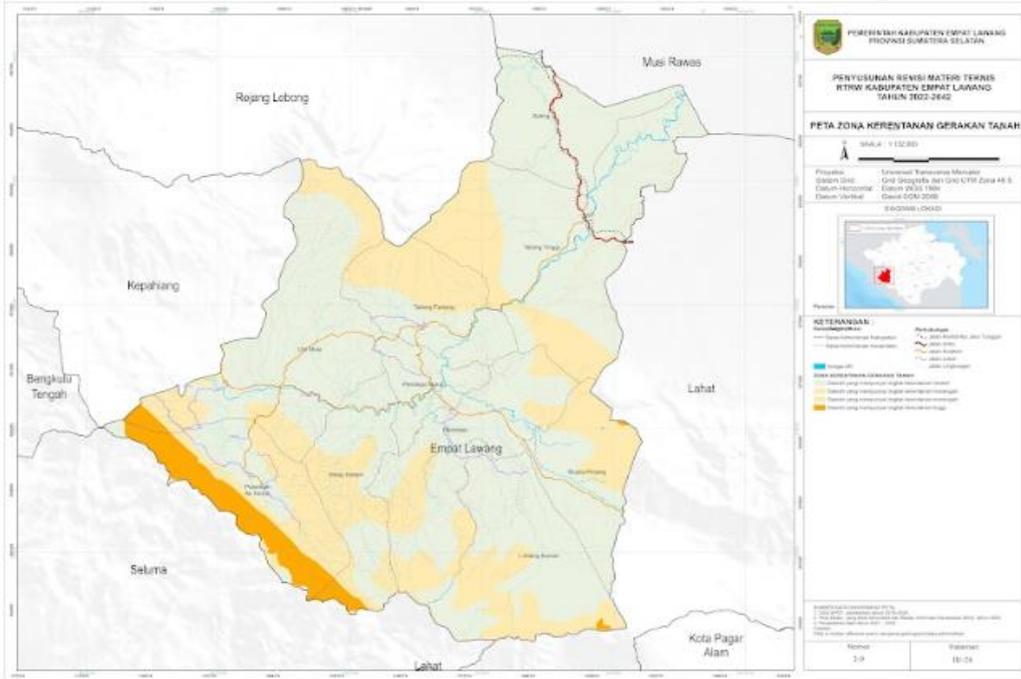
Potensi Pengembangan Pariwisata

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Empat Lawang dilakukan untuk memanfaatkan potensi wisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Peruntukan ruang untuk pengembangan wisata di Kabupaten Empat Lawang meliputi berada di Tebing Tinggi, Pendopo, Lintang Kanan, Talang Padang, dan Pasemah Air keruh seluas 240 hektar.

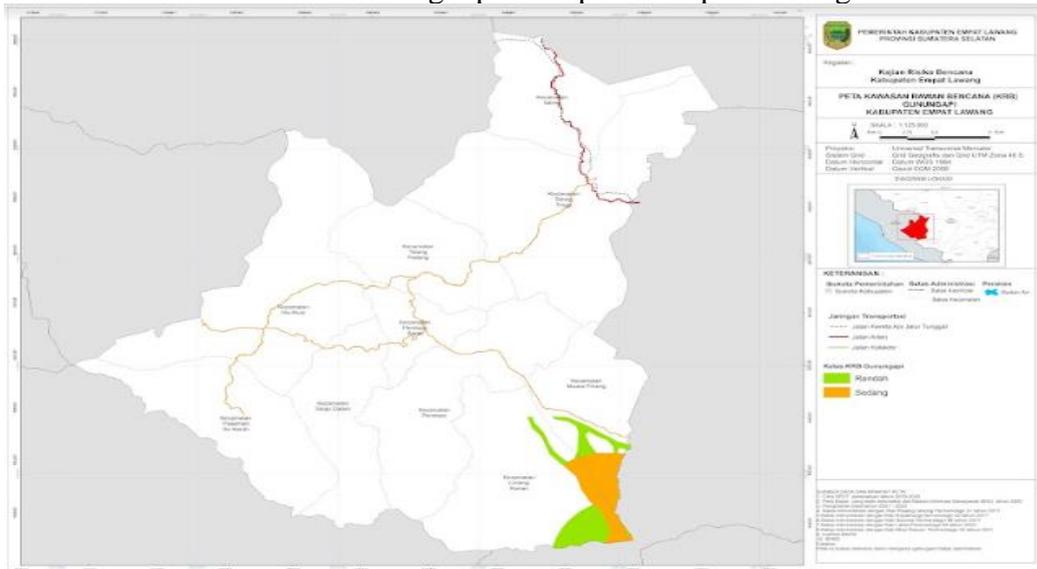
c. Wilayah Rawan Bencana

Gambar 2. 28 Peta Rawan Gerakan Tanah Kabupaten Empat Lawang



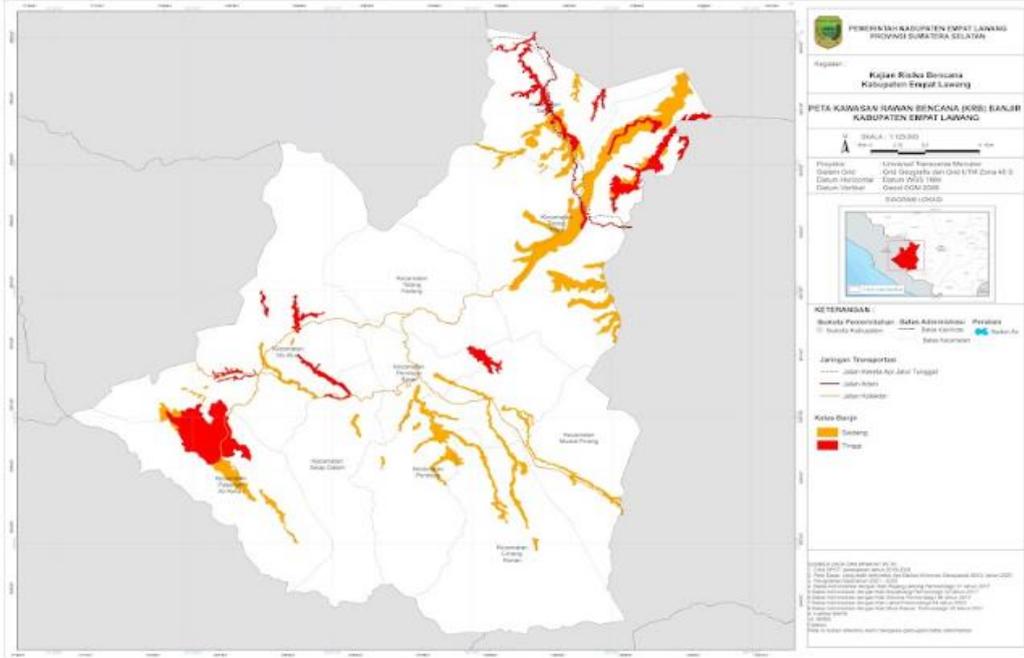
Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah tahun 2023-2043

Gambar 2.29 Peta Rawan Gunung Api Kabupaten Empat Lawang



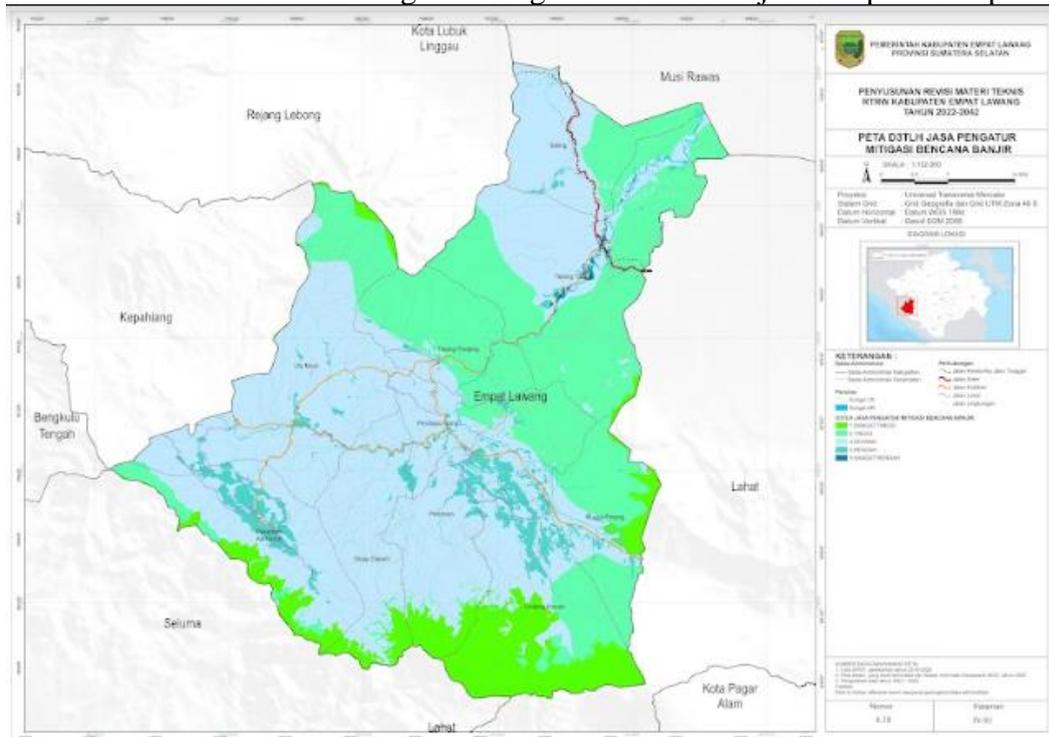
Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah tahun 2023-2043

Gambar 2. 30 Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kabupaten Empat Lawang



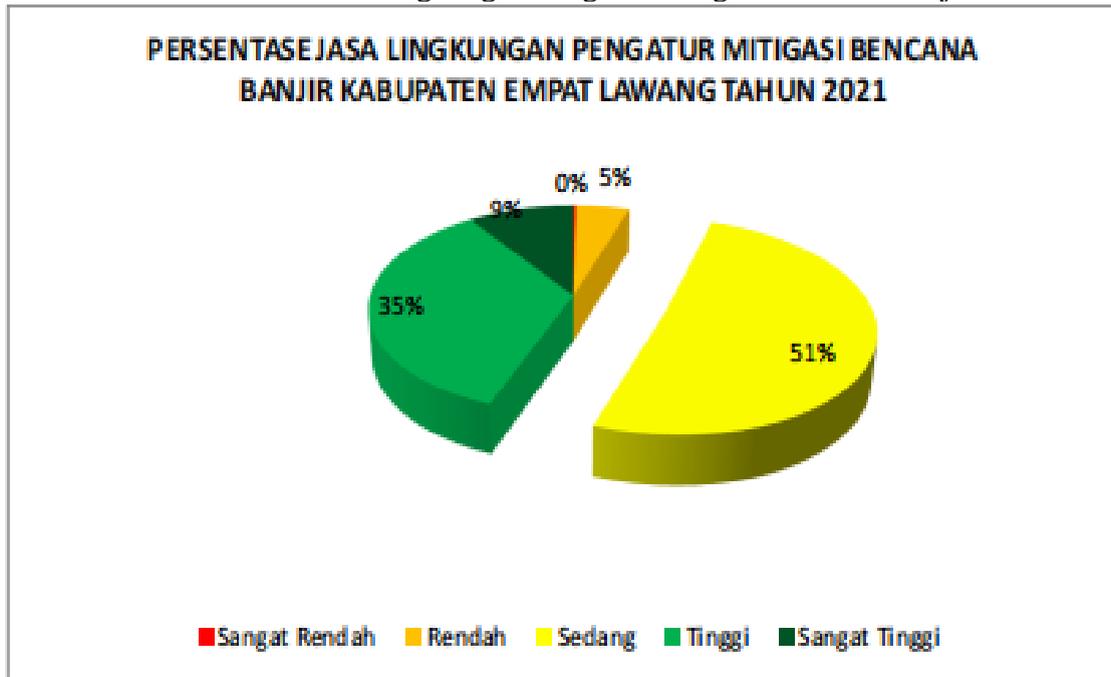
Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah tahun 2023-2043

Gambar 2.31 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Indikatif berbasis Jasa Pengatur Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Empat Lawang



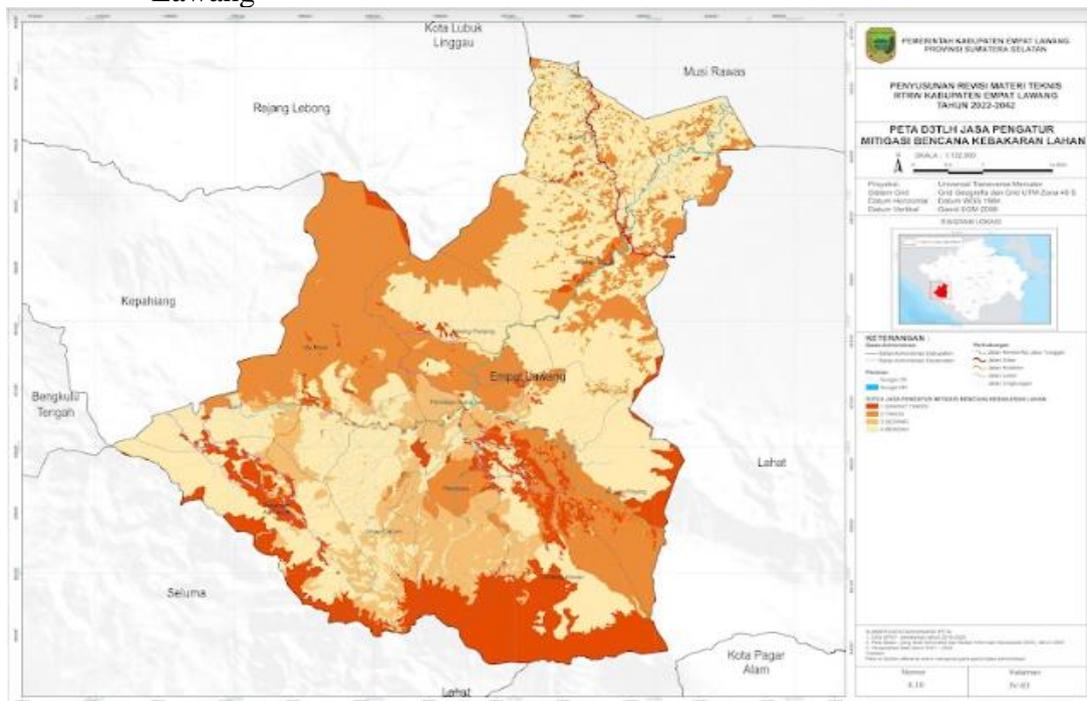
Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah tahun 2023-2043

Gambar 2.32 Persentase Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Banjir Tahun 2021



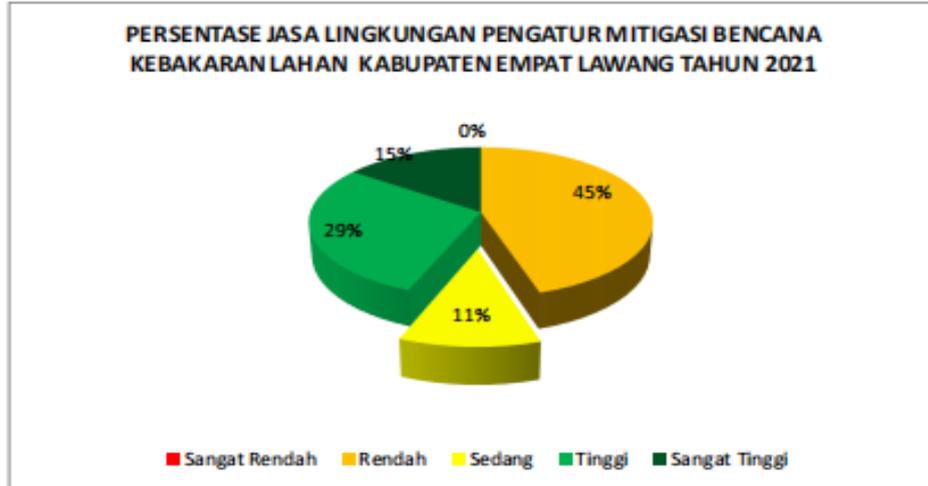
Sumber: Perda RTRW Kabupaten Empat Lawang, 2012; diolah tahun 2021

Gambar 2.33 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Indikatif Berbasis Jasa Pengatur Mitigasi Bencana kebakaran Lahan Kabupaten Empat Lawang



Sumber: Ranperda RTRW Kabupaten Empat Lawang, diolah tahun 2023-2043

Gambar 2.34 Persentase Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Empat Lawang, 2012; diolah tahun 2021

2.1.2 Aspek Demografis

Menurut hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 329.514 ribu jiwa meningkat menjadi 333.622 ribu jiwa pada tahun 2020. Dapat dikatakan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Empat Lawang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 meningkat sebesar 0,29%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, 2019 -2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)				Laju Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ² 2022
		2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Muara Pinang	42.366	43.101	44.312	45.981	3,77	237
2	Lintang Kanan	35.056	35.334	36.348	37.738	3,82	143
3	Pendopo	53.878	54.692	30.980	59.025	4,37	306
4	Pendopo Barat	18.129	18.266	18.747	19.421	3,60	204
5	Pasemah Air Keruh	29.635	30.014	30.980	32.274	4,18	148
6	Ulu Musi	23.099	25.685	26.438	27.467	3,89	83
7	Sikap Dalam	22.675	22.431	22.910	23.617	3,09	102
8	Talang Padang	17.945	17.782	18.352	19.116	4,16	136
9	Tebing Tinggi	67.847	68.484	70.837	73.953	4,4	204
10	Saling	18.884	17.833	18.352	19.081	3,92	84
Jumlah		329.514	333.622	343.839	357.673	4,02	159
Hasil registrasi			334.809

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2023

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Empat Lawang, 2022

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	10.494	9.917	20.411
5-9	13.554	12.763	26.317
10-14	15.574	15.201	30.775
15-19	16.609	15.279	31.888
20-24	15.569	15.231	30.800
25-29	15.311	14.644	29.955
30-34	17.058	15.340	32.398
35-39	14.678	13.585	28.263
40-44	14.513	13.352	27.865
45-49	12.124	11.147	23.271
50-54	10.842	10.116	20.958
55-59	8.492	7.911	16.403
60-64	7.195	6.742	13.937
65-69	4.741	4.476	9.217
70-74	3.706	3.798	7.504
75+	3.412	4.299	7.711
Jumlah	183.872	173.801	357.673

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2022

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Empat Lawang, 2022

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin / Gender										Jumlah / Total				
	Laki-laki / Male					Perempuan / Female									
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja / Economically Active	74.077	...	79.347	78.327	81750	54.595	...	59.822	56.412	52.381	128.672	127.866	139.169	134.739	134.131
Bekerja / Working	2.078	...	75.837	76.324	79437	920	...	58.310	55.168	49.872	2.998	124.484	134.147	131.492	129.309
Pengangguran Terbuka / Unemployment	3.510	2.003	2313	1.512	1.244	2.509	...	3.382	5.022	3.247	4.822
Bukan Angkatan Kerja / Economically Inactive	7.330	...	14.585	17.028	14.760	6.921	...	29.618	34.603	39.562	14.251	50.177	44.203	51.631	54.322
Sekolah / Attending School	2.032	...	5.599	...	7.497	21.048	...	7.331	...	5.839	23.080	11.309	12.930	...	13.390
Mengurus Rumah Tangga / Housekeeping	4.288	...	1.953	...	1.792	2.324	...	20.651	...	30.264	6.612	30.876	22.604	...	32.056
Lainnya / Others	7.033	...	5.471	1.636	...	3.405	...	7.992	8.669	...	8.876
Jumlah / Total	89.805	...	93.932	95.355	96.510	85.808	...	89.440	91.015	91.943	175.613	178.043	183.372	186.370	188.453

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2023

Tabel 2.15 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang, 2022

Kecamatan	Penduduk (Ribuan)	Laju Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2)	(3)
Muara Pinang	45.981	3,77
Lintang Kanan	37.738	3,82
Pendopo	59.025	4,37
Pendopo Barat	19.421	3,60
Pasemah Air Keruh	32.274	4,18
Ulu Musi	27.467	3,89
Sikap Dalam	23.617	3,09
Talang Padang	19.116	4,16
Tebing Tinggi	73.953	4,4
Saling	19.081	3,92
Empat Lawang	357.673	4,04

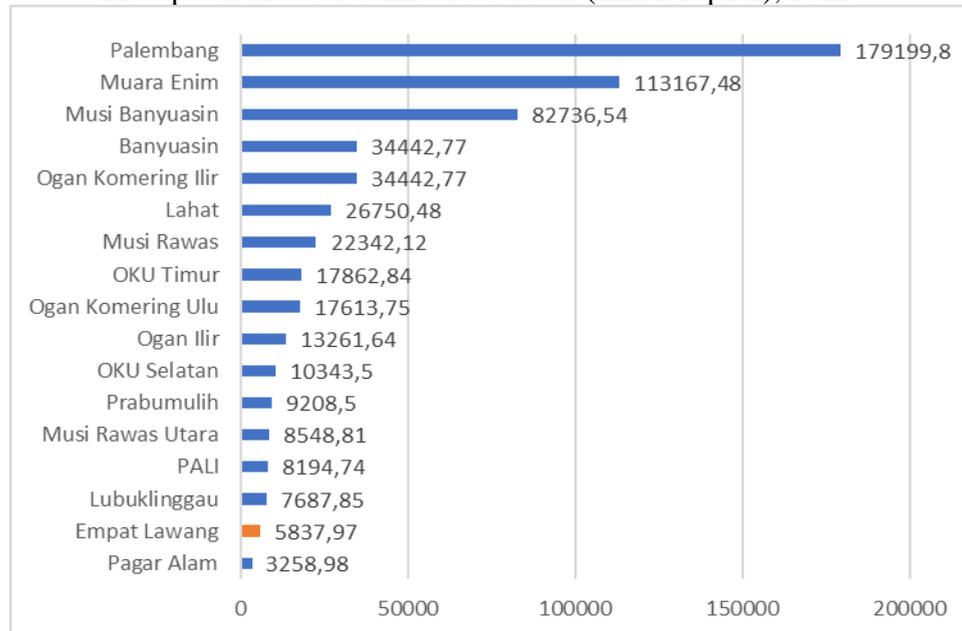
Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2023

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Gambar 2.35 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (miliar rupiah), 2022



Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka, 2023

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Dari Gambar 2.37 dapat dilihat bahwa Kabupaten Empat Lawang menempati urutan nomor dua terendah untuk PDRB atas harga berlaku menurut pengeluaran bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu senilai 5.837,97 miliar rupiah.

Gambar 2.36 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Empat Lawang 2017-2022



Sumber : Daerah Dalam Angka Kabupaten Empat Lawang, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Empat Lawang selama periode 2017-2022 menunjukkan tren positif, meningkat ini terjadi karena selama tiga tahun terakhir data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Empat Lawang meningkat, yaitu 0,09 pada Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 Laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 3,82 dan ditahun 2022 menjadi 4,95. Dampak pandemi di Tahun 2021 terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Empat Lawang sudah mulai pulih. Meningkatnya kemudahan akses transportasi antar wilayah yang dapat diukur dengan ratio konektivitas transportasi wilayah, meningkatnya akses/layanan infrastruktur dalam kondisi baik, meningkatnya peluang investasi daerah, meningkatnya laju pertumbuhan sektor unggulan menjadi faktor-faktor yang menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Empat Lawang.

Dari Angka PDRB Kabupaten Empat Lawang, akan tergambar kondisi ekonomi daerah serta perkembangannya dari tahun ke tahun, berikut nilai kontribusi per sektor penunjang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Empat Lawang pada tabel 2.16 dan Tabel 2.17.

Tabel 2.16 Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 s.d 2022 (dalam juta) Kabupaten Empat Lawang

No	KATEGORI	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.345.810,08	2,43	1.368.690,54	1,70	1.376.945,46	0,60	1.434.078,7	4,08	1.492.524,0	4,15
2	Pertambangan & pengalihan	115.794,66	6,75	122.465,31	5,76	120.306,41	-1,76	126.419,5	5,08	132.805,8	5,05
3	Industri pengolahan	316.542,83	5,86	334.076,25	5,54	335.299,98	0,37	342.677,6	2,20	374.666,0	9,33
4	Listrik & gas	2.505,25	8,72	2.728,59	8,92	2.971,85	8,92	3.113,5	4,77	3.285,1	5,51
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah	1.180,68	4,12	1.226,21	3,86	1.280,63	4,44	1.287,3	0,52	1.277,6	-0,75
6	Konstruksi	355.186,02	3,91	366.129,31	3,08	363.511,61	-0,71	373.897,7	2,86	385.795,7	3,18
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan perawatan mobil dan sepeda motor	533.949,32	7,45	573.601,91	7,43	568.209,97	-0,94	603.146,6	6,15	643.173,0	6,64
8	Transportasi dan perhubungan	56.167,23	5,99	59.656,88	6,21	56.697,09	-4,96	54.046,5	-4,67	59.267,3	7,67
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	45.180,32	8,29	48.950,66	8,35	45.856,23	-6,32	47.254,3	3,05	50.817,2	7,54
10	Informasi dan komunikasi	38.833,64	7,01	41.803,55	7,65	45.895,80	9,79	48.496,9	5,67	51.384,2	5,95
11	Jasa keuangan dan asuransi	76.636,75	1,47	76.279,61	0,47	77.235,15	1,25	81.201,7	5,14	81.229,4	0,03
12	Real estate	172.674,69	7,05	179.910,40	4,19	180.173,81	0,15	182.226,8	1,14	189.888,1	4,20
13	Jasa perusahaan	845,51	6,31	890,80	5,36	868,22	-2,53	876,5	0,96	892,4	1,8
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	160.605,75	2,23	162.051,11	0,90	163.885,93	1,13	168.605,2	2,88	173.511,1	2,91
15	Jasa Pendidikan	65.023,03	1,78	67.041,83	3,10	66.152,91	-1,33	69.706,0	5,37	73.584,4	5,56
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	27.916,23	2,24	29.144,16	4,40	31.706,63	8,79	32.381,7	2,13	33.365,8	3,04
17	Jasa lainnya	34.145,10	4,54	35.685,36	4,51	36.404,22	2,01	36.522,4	0,32	37.020,5	1,36
Produk domestik regional bruto		3.348.997,08	4,23	3.470.332,48	3,62	3.473.401,89	0,09	3.605.938,9	3,82	3.784.487,5	4,95

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2023

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan atau lebih dikenal dengan nilai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Empat Lawang pada Tahun 2022 bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Selatan tergolong tinggi. Pasalnya,

rata-rata pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan Tahun 2022 adalah 5,23% dan nilai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 adalah 4,95%.

Dilihat dari kategori lapangan usahanya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Empat Lawang yang paling tinggi mengalami penurunan dibandingkan Tahun sebelumnya terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi. Pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini menurun dari 5,14 persen pada Tahun 2021 menjadi 0,03 persen di Tahun 2022.

Sedangkan lapangan usaha yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yaitu -2,91 persen di Tahun 2021 menjadi 7,67 persen di Tahun 2022.

Tabel 2.17 Nilai Kontribusi Sektor PDRB Tahun 2018 - 2022 (dalam juta) Kabupaten Empat Lawang Atas Dasar Harga Berlaku

No	Kategori	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.577.061,42	33,59	1.631.443,15	32,68	1.663.694,62	32,70	1.789.354,60	33,10	1.901.459,8	32,57
2	Pertambangan & penggalian	184.319,43	3,93	196.811,49	3,94	195.313,17	3,84	205.994,00	3,81	217.872,3	3,73
3	Industri pengolahan	533.467,85	11,36	568.623,72	11,39	577.826,95	11,36	614.256,40	11,36	701.696,6	12,02
4	Listrik & gas	4.012,34	0,09	4.348,37	0,09	4.872,59	0,10	5.249,30	0,10	5.638,0	0,10
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah	1.722,16	0,04	1.819,09	0,04	1.943,46	0,04	2.016,60	0,04	2.022,8	0,03
6	Konstruksi	547.511,07	11,66	569.873,48	11,42	567.280,16	11,15	602.028,60	11,14	635.273,0	10,88
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan perawatan mobil dan sepeda motor	927.971,02	19,76	1.044.885,95	20,93	1.078.738,52	21,20	1.155.484,10	21,38	1.281.072,8	21,94
8	Transportasi dan pergudangan	84.363,52	1,80	91.336,74	1,83	88.454,79	1,74	84.048,80	1,55	95.933,0	1,64
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	82.010,12	1,75	92.746,84	1,86	90.017,98	1,77	93.775,40	1,73	102.887,4	1,76
10	Informasi dan komunikasi	46.367,55	0,99	50.767,22	1,02	55.982,76	1,10	59.268,60	1,10	63.091,4	1,08
11	Jasa keuangan dan asuransi	104.999,83	2,24	106.544,60	2,13	108.141,37	2,13	116.274,50	2,15	121.385,5	2,08
12	Real estate	238.839,53	5,09	256.851,26	5,15	259.402,20	5,10	266.747,10	4,94	279.474,4	4,79
13	Jasa perusahaan	1.331,89	0,03	1.473,56	0,03	1.495,64	0,03	1.524,20	0,03	1.572,1	0,03
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	202.547,50	4,31	204.485,69	4,10	215.555,89	4,24	225.233,70	4,17	234.018,1	4,01
15	Jasa Pendidikan	78.920,32	1,68	83.759,23	1,68	86.273,92	1,70	89.090,20	1,65	95.971,7	1,64
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	34.599,76	0,74	37.475,48	0,75	42.113,26	0,83	43.400,30	0,80	45.524,1	0,78
17	Jasa lainnya	45.090,77	0,96	48.933,43	0,98	50.644,42	1,00	51.374,70	0,95	53.074,0	0,91
Produk domestik regional bruto		4.695.136,07	100	4.992.179,29	100	5.087.751,68	100	5.405.121,00	100	5.837.967,0	100

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2023

Selama Tahun 2018 s.d 2022 struktur ekonomi Kabupaten Empat Lawang didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Artinya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sektor unggulan utama yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Empat Lawang. Namun, kontribusinya bila dibandingkan dengan Tahun 2018 menurun. Hal ini terlihat pada Tabel 2.23 dan 2.24, dimana pada Tahun 2018 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap pertumbuhan

ekonomi sebesar 33,59 persen kemudian pada Tahun 2019 menurun menjadi 32,68 persen dan terakhir pada Tahun 2022 kontribusinya menjadi 32,57 persen.

Sektor lapangan usaha lainnya yang juga memberikan sumbangan yang besar, yakni lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 21,94 persen, industri pengolahan sebesar 12,02 persen serta lapangan usaha konstruksi sebesar 10,88 persen. Pertumbuhan kontribusi sektor dalam PDRB HB dan PDRB HK Tahun 2018-2022 ditunjukkan oleh Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2018-2022 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Empat Lawang

NO	SEKTOR	2018		2019		2020		2021		2022	
		HB	HK								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	33,59	2,43	32,68	1,70	32,70	0,60	33,10	4,08	32,57	4,15
2	Pertambangan & penggalian	3,93	6,75	3,94	5,76	3,84	-1,76	3,81	5,08	3,73	5,05
3	Industri pengolahan	11,36	5,86	11,39	5,54	11,36	0,37	11,36	2,20	12,02	9,33
4	Listrik & gas	0,09	8,72	0,09	8,92	0,10	8,92	0,10	4,77	0,10	5,51
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah	0,04	4,12	0,04	3,86	0,04	4,44	0,04	0,52	0,03	-0,75
6	Konstruksi	11,66	3,91	11,42	3,08	11,15	-0,71	11,14	2,86	10,88	3,18
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan perawatan mobil dan sepeda motor	19,76	7,45	20,93	7,43	21,20	-0,94	21,38	6,15	21,94	6,64
8	Transportasi dan pergudangan	1,80	5,99	1,83	6,21	1,74	-4,96	1,55	-4,67	1,64	7,67
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,75	8,29	1,86	8,35	1,77	-6,32	1,73	3,05	1,76	7,54
10	Informasi dan komunikasi	0,99	7,01	1,02	7,65	1,10	9,79	1,10	5,67	1,08	5,95
11	Jasa keuangan dan asuransi	2,24	1,47	2,13	-0,47	2,13	1,25	2,15	5,14	2,08	0,03
12	Real estate	5,09	7,05	5,15	4,19	5,10	0,15	4,94	1,14	4,79	4,20
13	Jasa perusahaan	0,03	6,31	0,03	5,36	0,03	-2,53	0,03	0,96	0,03	1,8
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4,31	2,23	4,10	0,90	4,24	1,13	4,17	2,88	4,01	2,91
15	Jasa Pendidikan	1,68	1,78	1,68	3,10	1,70	-1,33	1,65	5,37	1,64	5,56
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	0,74	2,24	0,75	4,40	0,83	8,79	0,80	2,13	0,78	3,04
17	Jasa lainnya	0,96	4,54	0,98	4,51	1,00	2,01	0,95	0,32	0,91	1,36
Produk domestik regional bruto		100	4,23	100	3,62	100	0,09	100	3,82	100	4,95

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2023

Tabel 2.19 Pertumbuhan kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Empat Lawang

NO	SEKTOR	Pertumbuhan	
		HB	HK
		%	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	32,57	4,15
2	Pertambangan & penggalian	3,73	5,05
3	Industri pengolahan	12,02	9,33
4	Listrik & gas	0,10	5,51
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah	0,03	-0,75
6	Konstruksi	10,88	3,18
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan perawatan mobil dan sepeda motor	21,94	6,64
8	Transportasi dan pergudangan	1,64	7,67
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,76	7,54
10	Informasi dan komunikasi	1,08	5,95
11	Jasa keuangan dan asuransi	2,08	0,03
12	Real estate	4,79	4,20
13	Jasa perusahaan	0,03	1,8
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4,01	2,91
15	Jasa Pendidikan	1,64	5,56
16	Jasa kesehatan dan kegiatan social	0,78	3,04
17	Jasa lainnya	0,91	1,36
	Produk domestik regional bruto	100	4,95

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, data diolah 2023

Melalui Tabel 2.24 dan Tabel 2.25 diketahui bahwa pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan (HK) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Empat Lawang sebesar 4,95 persen. Kontribusi sektor terbesar selama periode ini adalah dari sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Artinya, semua kegiatan ekonomi/ lapangan usaha yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanen hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air, hingga jasa penunjang masing-masing kegiatan ini adalah penunjang pertumbuhan ekonomi terbesar di Kabupaten Empat Lawang.

Tabel 2.20 Perkembangan PDRB Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 s.d 2022 atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Kabupaten Empat Lawang

NO	Kabupaten/ Kecamatan	2018		2019		2020		2021		2022	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pendopo barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Pasemah Air Keruh	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Lintang Kanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Pendopo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Muara Pinang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Sikap Dalam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BPS (Data diolah), 2023

Lanjutan Tabel 2.20 Perkembangan PDRB Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 s.d 2022 atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Kabupaten Empat Lawang

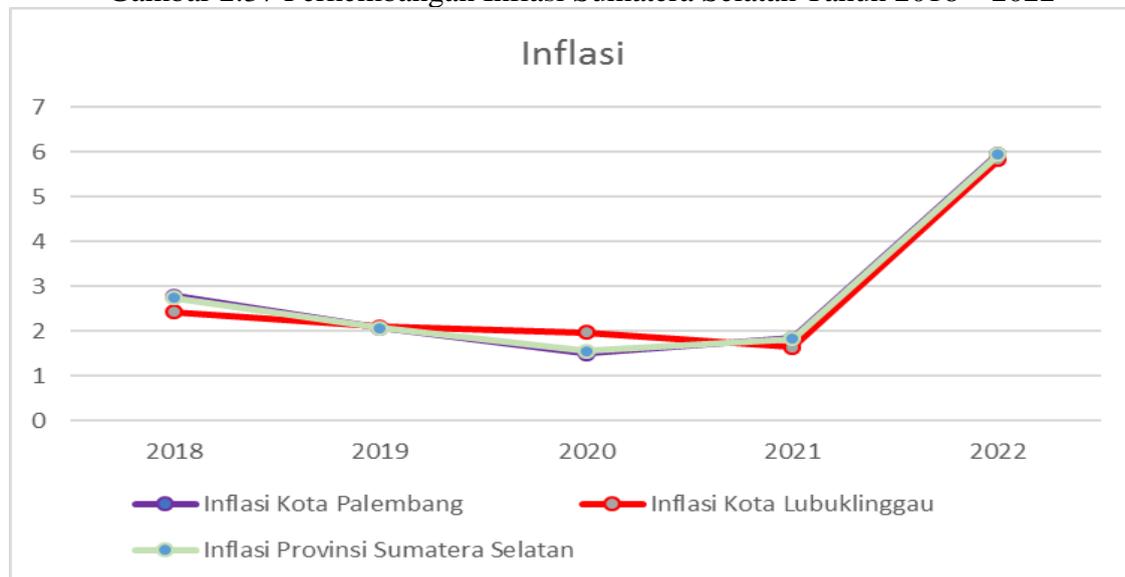
NO	Kabupaten/ Kecamatan	2018		2019		2020		2021		2022	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Ulu Musi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Saling	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Tebing Tinggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Talang Padang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Standar Kabupaten	100	4,23	100	3,62	100	0,09	100	3,82	100	4,95
12	Standar Provinsi	100	6,01	100	5,69	100	-0,11	100	3,58	100	5,23
13	Standar Nasional	100	5,17	100	5,02	100	-2,07	100	3,70	100	5,31

Sumber: BPS (Data diolah), 2023

b. Laju Inflasi

Laju inflasi, merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Berikut perkembangan inflasi di Sumatera Selatan tahun 2018-2022.

Gambar 2.37 Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS, 2023

Perkembangan inflasi dari Tahun 2018 hingga 2022 di Kota Lubuklinggau dan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari Gambar 2.39. Dari gambar diketahui bahwa inflasi baik di Kota Lubuklinggau atau di Provinsi Sumatera Selatan memiliki tren meningkat. Pada Tahun 2022 inflasi yang terjadi di Kota Lubuklinggau adalah 5,830 persen dan di Provinsi Sumatera Selatan senilai 5,940 persen. Sedangkan untuk inflasi di Kota Palembang sendiri pada Tahun 2022 senilai 5,950 persen, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2018 s.d 2022 Provinsi Sumatera Selatan

Uraian/ Kota/Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Inflasi Kota Palembang	2,780	2,060	1,500	1,840	5,950	0,603
Inflasi Kota Lubuklinggau	2,420	2,100	1,970	1,630	5,830	0,597
Inflasi Provinsi Sumatera Selatan	2,740	2,060	1,550	1,820	5,940	0,602

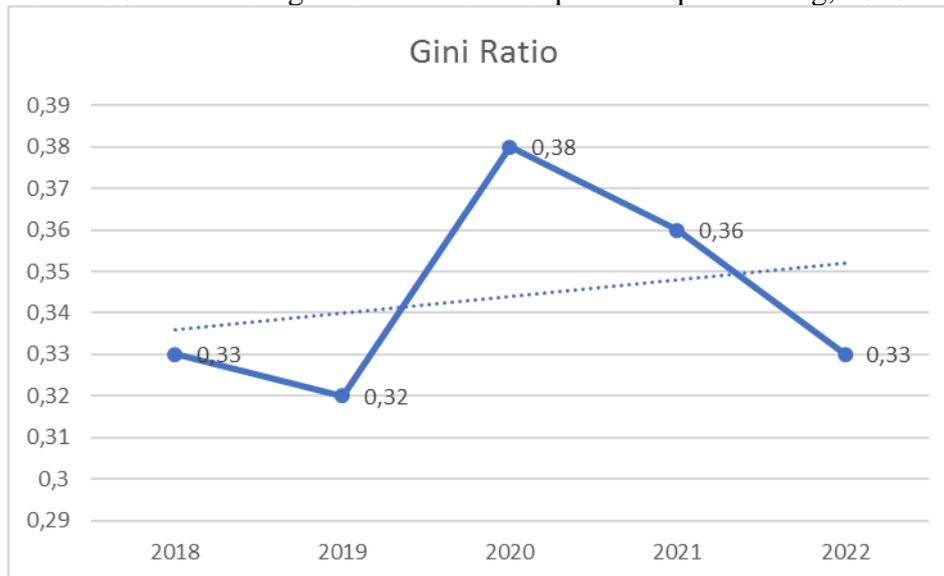
Sumber: BPS Kabupaten Empat Lawang, 2023

Melalui penyajian Tabel 2.21 diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan untuk inflasi dari Kota Lubuklinggau adalah -0,38099 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Tahun 2022, hal ini disebabkan kenaikan harga komoditas bahan makanan dan sandang, makanan jadi, dan bahan bakar.

c. Gini Ratio

Gini rasio Kabupaten Empat Lawang mulai tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.38 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Empat Lawang, 2018 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Empat Lawang, 2023

Gini rasio atau indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Pada tiga tahun terakhir, gini rasio Kabupaten Empat Lawang menunjukkan penurunan, hal ini berarti tingkat ketimpangan selama tiga tahun terakhir pun menurun. Hal ini baik, artinya setelah Tahun 2020 Kabupaten Empat Lawang dapat menurunkan ketimpangan yang terjadi pasca pandemi dengan nilai ketimpangan yang sama besar dengan tahun dasar, yaitu Tahun 2018.

d. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

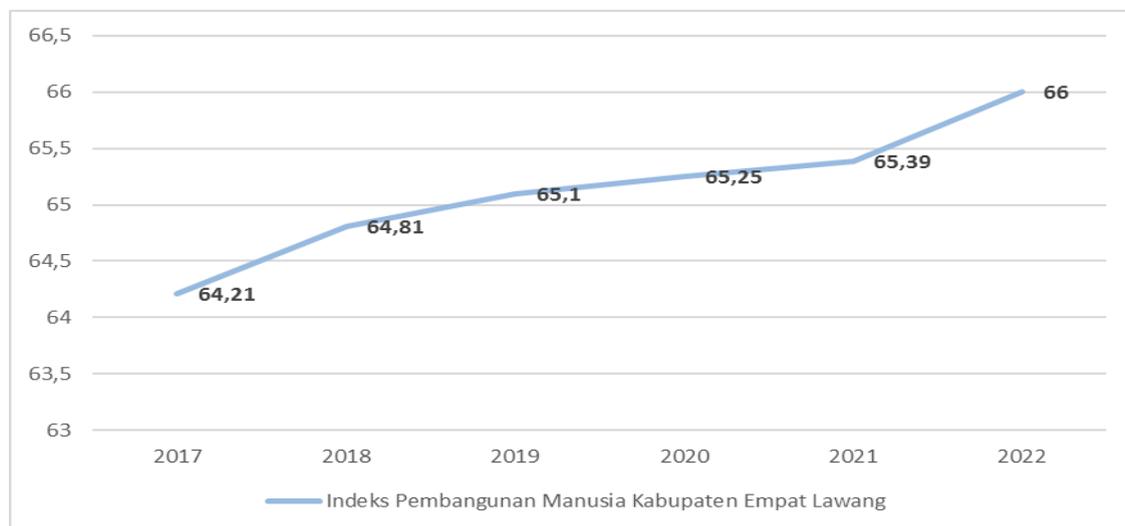
Program pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat merupakan program utama yang masuk ke dalam misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Disebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat harus bisa diwujudkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli.

Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu :

- IPM < 60 : IPM rendah
- 60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang
- 70 ≤ IPM < 80 : IPM tinggi
- IPM ≥ 80 : IPM sangat tinggi

Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Empat Lawang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, pada Tahun 2022 IPM Kabupaten Empat Lawang pada kategori sedang, yaitu 66 namun berada pada ranking 13 se-Sumatera Selatan (cenderung lebih lambat dibandingkan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan), rata-rata peningkatan per tahun hanya 0,333 persen. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut:

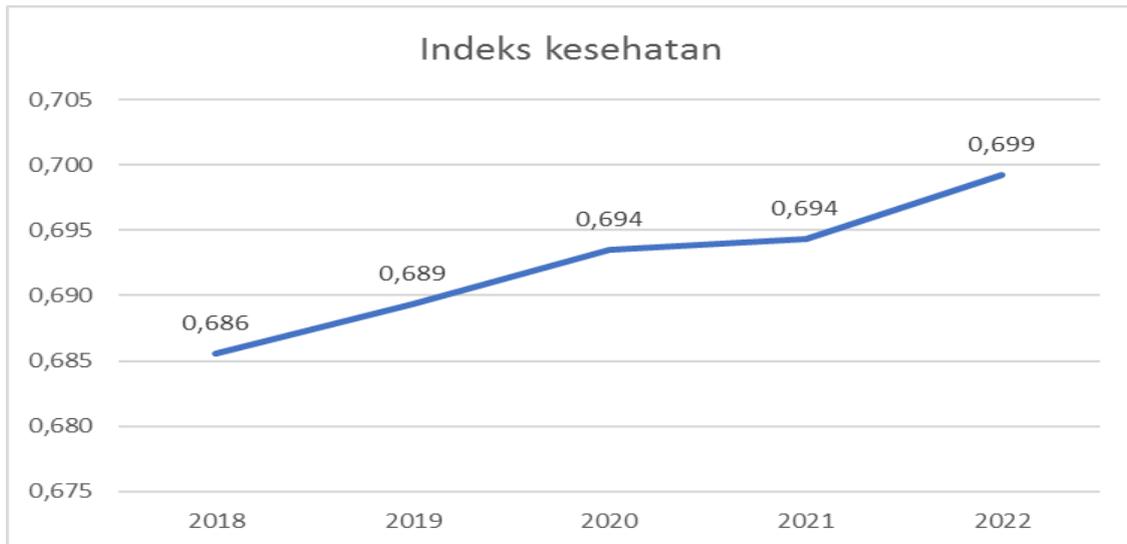
Gambar 2.39 Perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM)



Sumber : Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka 2022

Kenaikan dan penurunan nilai IPM dipengaruhi oleh nilai Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan.

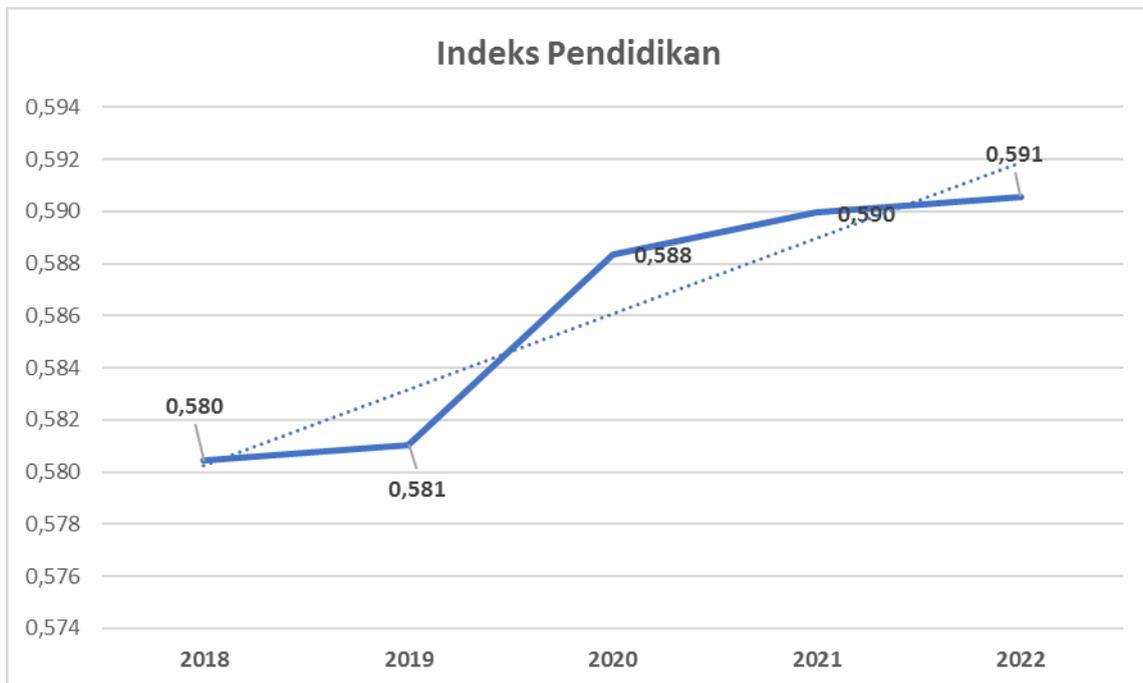
Gambar. 2.40 Indeks Kesehatan Kabupaten Empat Lawang 2018-2022



Sumber: BPS, data diolah, 2023

Indeks kesehatan didapat dari nilai angka harapan hidup. Semakin tinggi nilai angka harapan hidup di Kabupaten Empat Lawang, maka semakin tinggi pula indeks kesehatannya. Dalam lima tahun terakhir nilai indeks kesehatan dan nilai angka harapan hidup di Kabupaten Empat Lawang semakin tinggi. Hal ini tidak lepas dengan upaya Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam meningkatkan indeks kesehatan dengan berbagai program dan kegiatan.

Gambar. 2.41 Indeks Pendidikan Kesehatan Kabupaten Empat Lawang 2018-2022



Sumber: BPS, data diolah 2023

Sama halnya dengan indeks kesehatan, indeks pendidikan Kabupaten Empat Lawang pada Tahun 2018-2022 pun memiliki tren positif, yaitu meningkat. Dimana nilai tertinggi indeks pendidikan berada pada Tahun 2022 yaitu senilai 0,591. Indeks

pendidikan dipengaruhi oleh nilai harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, indeks peningkatan literasi masyarakat, dan persentase kebudayaan daerah yang dikembangkan.

Tabel 2.22 Komponen IPM Kabupaten Empat Lawang, 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angka harapan hidup (Tahun)	64,56	64,81	65,08	65,13	65,45
Harapan Lama Sekolah (Persen)	12.04	12.05	12.06	12,07	12,08
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7.38	7.39	7.60	7,64	7,65
Pengeluaran per Kapita Rumah Tangga Disesuaikan (ribu rupiah)	9.450	9.594	9.350	9.400	9.838

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Empat Lawang, Berita Resmi Statistik No.71/12/16 Th. XXIV, 2022

e. Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan gabungan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan penduduk miskin. Tingkat kemiskinan Kabupaten Empat Lawang sejak tahun 2015 cenderung terus menurun sampai dengan tahun 2018, namun pada tahun 2019 kembali naik sebesar 0,05 persen bahkan tahun 2022 naik sebesar 0,33 persen angka yang cukup signifikan, hal ini mungkin disebabkan salahsatunya terjadinya pandemi covid 19 yang melanda dunia.

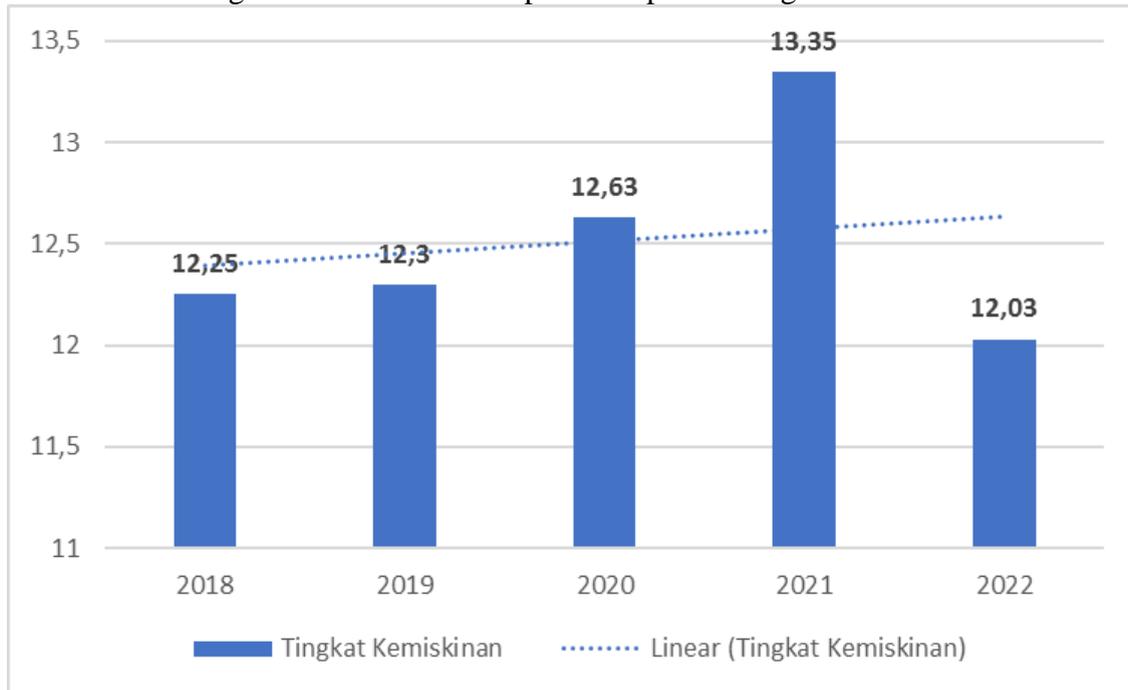
Tabel 2.23 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Empat Lawang, 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (rupiah)	306.546	315.699	343.601	360.378	384.199
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	30,2	30,68	31,89	34,11	31,06
Persentase Penduduk Miskin (P0)	12,25	12,30	12,63	13,35	12,03
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,73	1,87	1,89	1,84	1,98
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,39	0,46	0,49	0,42	0,52

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Empat Lawang, 2022

Dari segi Jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dari tahun 2018 hingga 2022 maka tingkat kemiskinan Kabupaten Empat Lawang mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh nilai dari indeks gini (gini rasio), indeks ketahanan pangan dan tingkat inflasi.

Gambar 2.42 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Empat Lawang



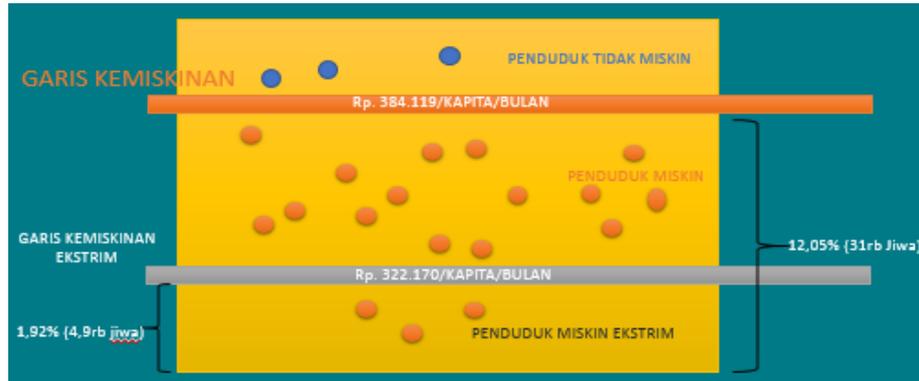
Sumber : Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2023, diolah

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (poverty gap index) dan tingkat keparahan (poverty severity index) dari kemiskinan. Artinya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan berkaitan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2), Indeks Keparahannya Kemiskinan ini memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indek kedalaman kemiskinan digambarkan dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 memiliki tren yang positif, meningkat. Begitu pula dengan indek keparahan kemiskinan. Nilai indek kedalaman kemiskinan di Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 adalah 1,73, Tahun 2019 meningkat menjadi 1,87 dan Tahun 2022 kembali meningkat menjadi 1,98. Nilai indek kedalaman kemiskinan yang meningkat mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Besarnya ketimpangan ini juga ditegaskan dengan data indeks keparahan kemiskinan. Meningkatnya nilai indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Empat Lawang, dimana pada Tahun 2018 indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Empat Lawang senilai 0,39 meningkat di Tahun 2020 menjadi 0,49 dan di Tahun 2022 menjadi 0,52. Semakin tinggi nilai indek, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Kabupaten Empat Lawang.

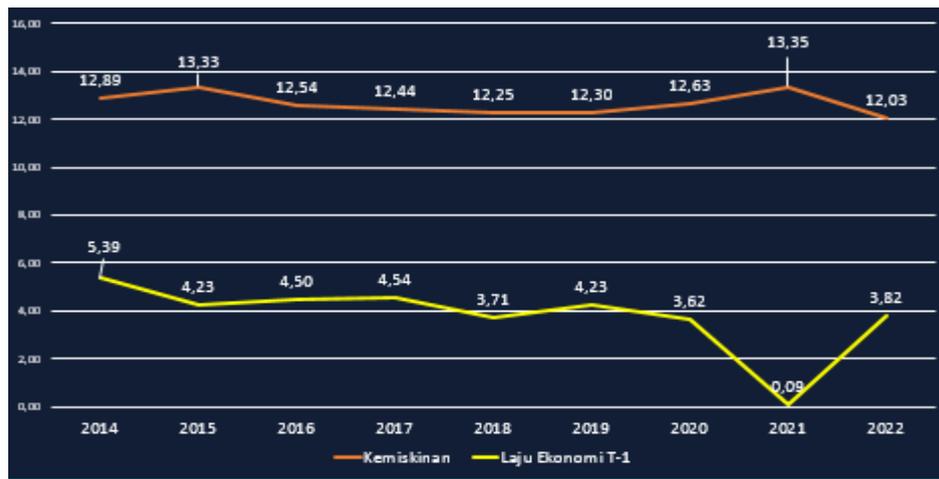
Gambar 2.43 Kemiskinan Ekstrim vs Garis Kemiskinan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022



Sumber : BPS, 2023, diolah

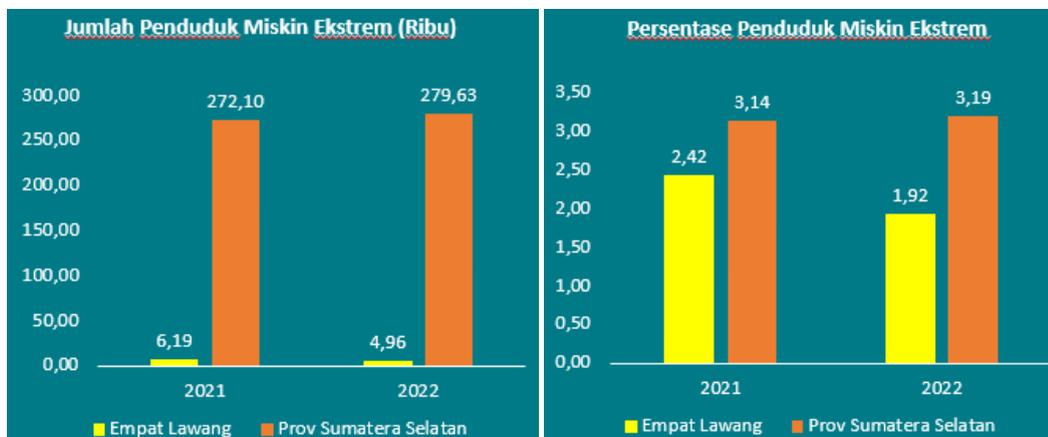
Kemiskinan ekstrim Kabupaten Empat Lawang di Tahun 2022 cukup baik artinya Kabupaten Empat Lawang tidak menjadi batu sandungan dalam kemiskinan ekstrim. Meskipun demikian, kemiskinan ekstrim juga sebagai prioritas nasional. Karenanya akan tetap menjadi perhatian kedepannya di Kabupaten Empat Lawang.

Gambar. 2.44 Laju Pertumbuhan Ekonomi vs Kemiskinan Kabupaten Empat Lawang



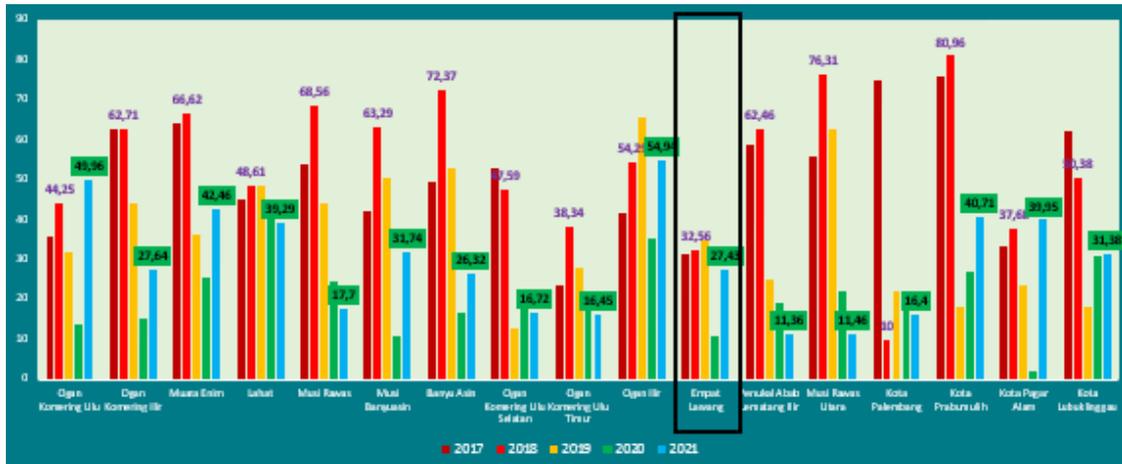
Sumber: BPS, 2023 diolah

Gambar 2.45 Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem



Sumber : world bank, 2022

Gambar 2.46 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapat Bantuan dari Program Pemerintah Menurut Kabupaten /Kota di Sumatera Selatan



Sumber: BPS, 2022

f. Ketenagakerjaan

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja di Kabupaten Empat Lawang mengalami peningkatan, yaitu pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK %), sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menunjukkan tren menurun.

Tabel 2.24 Jumlah penduduk kerja dan Angkatan Kerja di Kabupaten Empat Lawang, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Bukan Angkatan Kerja	14.251	-	44 203	44 203	54 322
TPAK %	74,98	71,72	75,89	72,30	71,17
Laki-laki	84,80	83,74	84,47	82,14	84,71
Perempuan	64,70	59,30	66,89	61,98	56,97
TPT %	2,28	2,64	3,61	2,41	3,59
Laki-laki	2,73	2,38	4,42	2,56	2,83
Perempuan	1,66	2,82	2,53	2,21	84,71

Sumber : Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2023

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Angka Melek Huruf

Hasil capaian angka melek huruf, yaitu proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya. Perkembangan angka melek huruf disajikan dalam tabel 2.25.

Tabel 2.25 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2018 s.d 2022 Kabupaten Empat Lawang

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Penduduk usia di atas 15 Tahun yang bisa membaca dan menulis	266.428	277.019
2	Jumlah Penduduk usia di atas 15 Tahun	268.902	280.170
3	Angka Melek Huruf	98,26	98,55	99,29	99,08	98,87

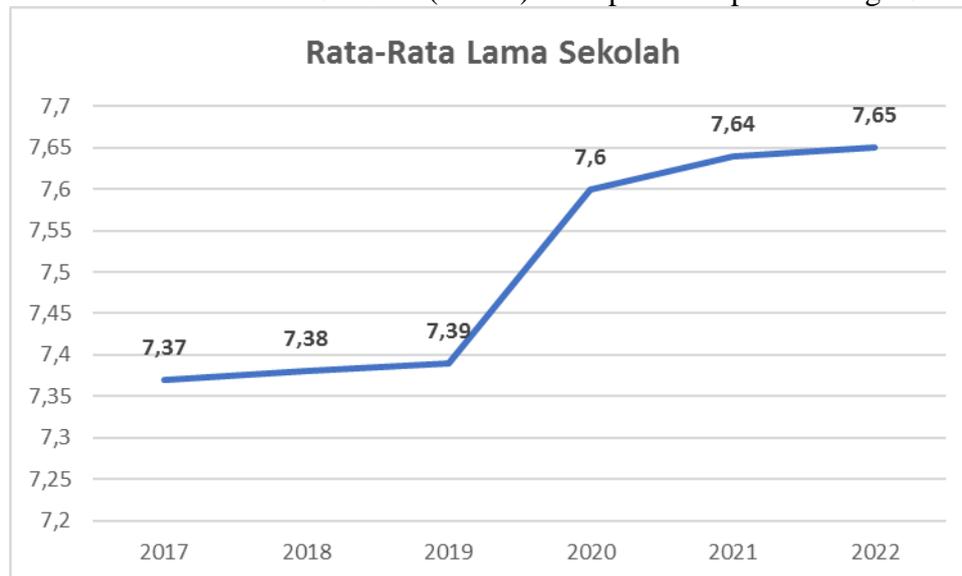
Sumber : BPS Kabupaten Empat Lawang, diolah 2023

Angka melek huruf dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 memiliki tren positif, meningkat, namun tiga tahun terakhir angka melek huruf menurun. Rata-rata peningkatan angka melek huruf di Kabupaten Empat Lawang rata-rata dari tahun 2018 ke tahun 2020 adalah sebesar 0,44 persen. Namun setelah Tahun 2020 angka melek huruf turun 0,21 persen setiap tahunnya.

g. Rata-Rata Lama Sekolah

Hasil analisis angka rata-rata lama sekolah, dapat disajikan dalam gambar 2.49 sebagai berikut:

Gambar 2.47 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Empat Lawang 2017 -2022



Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2022

Menurut BPS, Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Empat Lawang diangka 7,65 tahun, hal ini berarti rata-rata penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Empat Lawang bersekolah hingga SMP kelas satu.

Rata-rata pertumbuhan untuk rata-rata lama sekolah di Kabupaten Empat Lawang tumbuh sebesar 0,75 persen per tahun selama periode 2017 hingga 2022. Pertumbuhan yang positif ini menjadi modal penting dalam membangun kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) Kabupaten Empat Lawang yang lebih baik. Pada Tahun 2022, secara rata-rata penduduk Empat Lawang telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP Kelas 1). Artinya meskipun meningkat, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Empat Lawang terlihat masih rendah, yakni hanya sekitar tujuh tahun. Selain itu masih terdapat penduduk yang berusia 15 tahun ke atas belum tamat SMP. Dalam arti lain berarti program belajar sembilan Tahun Pemerintah belum dapat tercapai di Kabupaten Empat Lawang.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni, budaya dan olahraga di Kabupaten Empat Lawang saat ini belum mengalami kemajuan baik diberbagai kegiatan seni budaya dan kejuaraan olah raga baik Desa, Kecamatan, Kabupaten, nasional maupun internasional. Hal itu disebabkan oleh masih minimnya SDM maupun sarana dan prasarana penunjang kegiatan seni, budaya dan olahraga di kabupaten Empat Lawang.

Tabel 2.26 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2017-2022 Kabupaten Empat Lawang

No	Capaian Pengembangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Grup kesenian per 10.000 penduduk	21	21	21	21	21	21
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah klub olahraga	20	16	16	16	16	16
4	Jumlah gedung olahraga	8	8	9	10	10	10

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2023

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa urusan pemerintahan terdiri dari :

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

A. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

Capaian kinerja atas layanan urusan wajib dengan layanan Dasar meliputi bidang urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial.

1) Urusan Pendidikan

Tabel 2.27 Indikator Kinerja Pendidikan

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Angka Partisipasi Kasar					
	SD/MI	110,65	114,32	114,32	112,38	115,12
	SMP/MTs	93,81	88,07	89,21	91,08	91,20
	SMA/SMK/MA	-	84,96	85,64	88,03	88,45

Lanjutan Tabel 2.27 Indikator Kinerja Pendidikan

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Angka Partisipasi Murni					
	SD/MI	99,59	99,22	99,36	99,14	99,96
	SMP/MTs	86,38	83,17	83,07	83,67	84,65
	SMA/SMK/MA	-	61,36	62,27	61,39	60,68

Sumber : BPS dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

a. Angka partisipasi sekolah

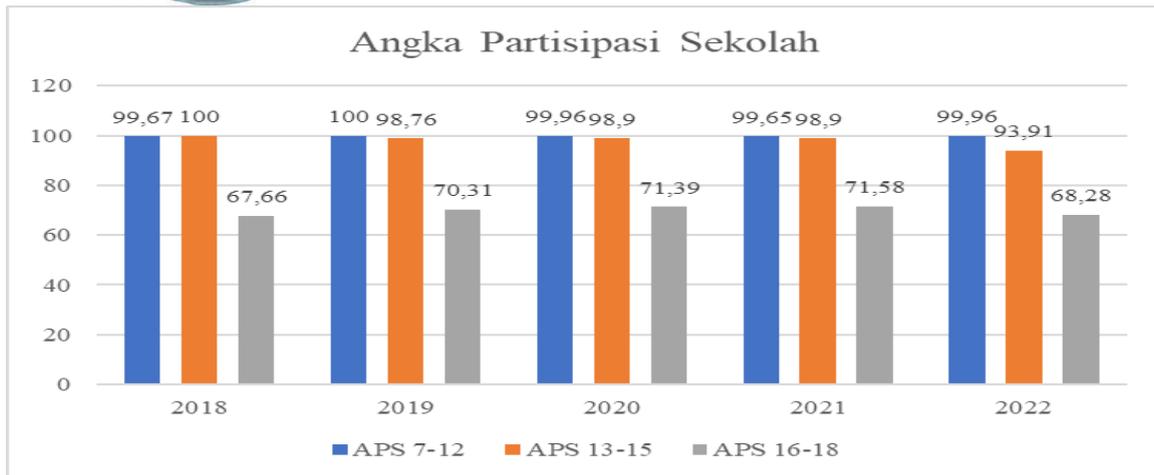
Tabel 2.28 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2018-2022 di Kabupaten Empat Lawang

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SD/MI					
	Angka Partisipasi Sekolah 7-12	99,67	100,00	99,96	99,65	99,96
2	SMP/MTs					
	Angka Partisipasi Sekolah 13-15	100,0	98,76	98,90	98,90	93,91
3	SMA/SMK/MA					
	Angka Partisipasi Sekolah 16-18	67,66	70,31	71,39	71,58	68,28

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Empat Lawang, 2023

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu, lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Adanya peningkatan angka partisipasi sekolah menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pendidikan. APS mempunyai keunggulan dapat mencerminkan partisipasi pendidikan sesuai kelompok usia sekolah sehingga dapat dengan jelas menggambarkan seberapa besar penduduk yang sedang menikmati pendidikan. Namun, APS tidak dapat melihat di jenjang apa seseorang tersebut bersekolah atau menikmati pendidikan.

Gambar 2.48 Angka Partisipasi Sekolah (APS)



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Empat Lawang, 2022

APS umur 7-12 tahun yang berarti usia SD memiliki nilai realisasi yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir, angka yang naik turun setiap tahun ini perlu menjadi perhatian dan evaluasi bersama agar di tahun berikutnya tidak terjadi lagi. baru mencapai angka 99,96.

APS umur 13-15 tahun yang berarti usia SMP/ sederajat memiliki trend nilai realisasi yang menurun dengan rata-rata penurunannya sebesar 1,54 persen setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus pemda bahwa pendidikan dasar sembilan tahun belum berhasil. Pada Tahun 2022 APS anak umur 13-15 tahun adalah 93,91 artinya masih ada 6,9 persen anak usia SMP/ sederajat yang seharusnya bersekolah ternyata sudah berhenti atau putus sekolah.

Pada kelompok umur SLTA (umur 16-18 tahun), APS lebih kecil dibandingkan usia SD dan SMP. Pada Tahun 2022 APS usia SLTA adalah 68,28 persen artinya ada 31,72 persen anak usia SLTA (16-18 tahun) yang seharusnya bersekolah dijenjang SLTA sudah berhenti bersekolah atau putus sekolah.

Masih terdapat anak usia sekolah yang sudah berhenti bersekolah atau putus sekolah tersebut kemungkinan besar karena anak di usia tersebut sudah dapat bekerja membantu pendapatan rumah tangga utamanya di sektor pertanian yang tidak membutuhkan persyaratan pendidikan tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah. Perkembangan fasilitas pendidikan di kabupaten Empat Lawang dapat dilihat dalam Tabel 2.29.

Tabel 2.29 Jumlah Sekolah, Jumlah rombel, Jumlah Ruang Kelas, Jumlah Perpustakaan, Perbandingan ruang kelas terhadap Rombel, Perbandingan Rombel dan Guru, menurut jenjang pendidikan, Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Ketersediaan Sekolah					
SD	184	184	185	185	184
SLTP	38	38	38	38	38

SLTA	19	19	19	19	20
SLB	0	0	0	1	1
Jumlah rombel					
SD	1359	1354	1337	1337	25.111
SMP	373	373	374	374	10.035
Jumlah Ruang Kelas					
SD	1552	1645	1645	1645	1645
SMP	363	367	367	367	367
Jumlah Perpustakaan					
SD	110	132	135	135	135
Pustakawan	0	0	0	0	0
SMP	34	35	35	35	35
Pustakawan	10	10	10	10	10
Jumlah Laboratorium					
SMP	34	35	35	35	35
Laboran	2	2	2	2	2
Rasio Ruang kelas terhadap rombel					
SD	1,14	1,21	1,23	1,23	1,23
SMP	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio Guru Mata Pelajaran di SLTP terhadap rombel					
PAI	N/A	N/A	0,12	0,12	0,12
PKN	N/A	N/A	0,08	0,08	0,08
BHS INDONESIA	N/A	N/A	0,17	0,17	0,17
BHS INGGRIS	N/A	N/A	0,11	0,11	0,11
MATEMATIKA	N/A	N/A	0,16	0,16	0,16
IPA	N/A	N/A	0,10	0,10	0,10
IPS	N/A	N/A	0,14	0,14	0,14
SENI BUDAYA	N/A	N/A	0,03	0,03	0,03
PENJAS	N/A	N/A	0,05	0,05	0,05
PRAKARYA	N/A	N/A	0,03	0,03	0,03

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

SLB merupakan Sekolah Luar Biasa yang dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus untuk anak-anak yang memerlukan. Namun di Kabupaten Empat Lawang yang memiliki 10 kecamatan, tersedia satu SLB yang berada di ibu kota kabupaten, Kecamatan Tebing Tinggi.

Standar sarana prasarana masih kurang baik dari segi kuantitas dan kualitasnya, hal ini ditandai dengan kurangnya jumlah perpustakaan SMP sebanyak kurang dari 50 unit di Tahun 2022. Dari 135 perpustakaan di SD masih belum tersedia pustakawan satu orangpun.

Pada jenjang SMP, jumlah ruang kelas masih kurang sebanyak 7 unit, laboratorium masih kurang, hal ini ditandai dengan jumlah laboratorium yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah SMP.

c. Rasio guru/murid

Tabel 2.30 Jumlah Guru dan jumlah Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Empat Lawang

No	Jenjang Pendidikan	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
----	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	946	920	1023	1088	3451
1.2	Jumlah Siswa	29218	27154	26839	26101	26101
1.3	Rasio	0,032	0,033	0,038	0,041	0,041
2	SLTP/SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	294	356	415	428	428
2.2	Jumlah Siswa	11583	N/A	11176	10689	10689
2.3	Rasio	0,025	N/A	0,037	0,040	0,040

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023



Dilihat dari Rasio murid-guru pada Tahun 2020, pada jenjang SD, satu orang guru mengawasi secara rata-rata 24 orang siswa, sedangkan pada jenjang SLTP rata-rata seorang guru mengawasi 25 orang siswa. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kurangnya jumlah guru kelas maupun guru mata pelajaran pada jenjang SD adalah sebanyak 743 orang dan pada jenjang SLTP adalah 402 orang. Di Tahun 2022 dan 2023 kekurangan tetap terjadi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.32.

d. Rasio Kebutuhan Guru

Tabel 2.32 Rekapitulasi Kebutuhan Guru Mapel dan guru Kelas SD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023

Kecamatan	Keadaan guru	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Mata Pelajaran				Jumlah
				PAI	Penjaskes	Gr Kelas	Kepsek	
Tebing Tinggi	Kebutuhan	5.848	264	44	40	261	31	376
	Yang ada			31	11	196	31	376
	Kelebihan			0	0	0	0	0
	Kekurangan			13	29	65	0	107
Saling	Kebutuhan	1.253	71	11	11	72	11	105
	Yang ada			6	2	39	11	58
	Kelebihan			0	0	0	0	0
	Kekurangan			5	9	33	0	42
Talang Padang	Kebutuhan	1.468	82	12	12	81	12	117
	Yang ada			7	3	58	12	80
	Kelebihan			0	0	0	0	0
	Kekurangan			5	9	23	0	37
Pendopo	Kebutuhan	1.468	209	34	29	208	27	298
	Yang ada			26	5	142	27	200
	Kelebihan			0	0	0	0	0
	Kekurangan			8	24	18	0	29
Pendopo Barat	Kebutuhan	1.300	62	11	11	62	10	94
	Yang ada			7	4	44	10	65
	Kelebihan			0	0	0	0	0
	Kekurangan			4	7	18	0	29
Muara Pinang	Kebutuhan	2.664	157	28	28	157	21	134
	Yang ada			20	5	137	21	183
	Kelebihan			0	0	0	0	0
	Kekurangan			8	23	20	0	51
Lintang Kanan	Kebutuhan	2.333	140	25	25	130	20	200
	Yang ada			21	5	97	20	143
	Kelebihan			0	0	0	0	0
	Kekurangan			4	20	33	0	57

Lanjutan Tabel 2.32 Rekapitulasi Kebutuhan Guru Mapel dan guru Kelas SD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2023

Kecamatan	Keadaan guru	Jumlah Siswa	Jumlah Rombel	Mata Pelajaran				Jumlah
				PAI	Penjaskes	Gr Kelas	Kepsek	
Ulu Musi	Kebutuhan	1.799	101	17	17	101	15	150
	Yang ada			13	5	59	15	92
	Kelebihan			0	0	0	0	0
	Kekurangan			4	12	42	0	58
Sikap Dalam	Kebutuhan	1.390	73	12	12	75	11	110
	Yang ada			9	4	61	11	85
	Kelebihan			0	0	0	0	0
	Kekurangan			3	8	14	0	25
Pasemah Air Keruh	Kebutuhan	2.173	122	20	20	122	17	179
	Yang ada			5	3	89	17	114
	Kelebihan			0	0	0	0	0
	Kekurangan			15	17	33	0	65
Kabupaten Empat Lawang	Kebutuhan	21.696	1.281	214	205	1269	175	1863
	Yang ada			145	47	922	175	1289
	Kelebihan			0	0	0	0	0
	Kekurangan			69	158	347	0	574

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Januari 2023

Jumlah kekurangan guru SD di Kabupaten Empat Lawang per Januari Tahun 2023 sebanyak 574 orang guru. Dengan rincian kekurangan guru PAI sebanyak 69 orang, guru Penjaskes sebanyak 158 orang, guru kelas 347 orang.

e. Rasio Kelas-Murid

Tabel 2.33 Rasio Kelas dan Murid

No	Jenjang Pendidikan	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Kelas	1552	1645	1645	1645	1645
1.2	Jumlah Siswa	29218	27154	26839	26101	26101
1.3	Rasio	0,053	0,061	0,061	0,063	0,063
2	SLTP/SMP/MTs					
2.1	Jumlah Kelas	363	367	367	367	367
2.2	Jumlah Siswa	11583	N/A	11176	10689	10689
2.3	Rasio	0,03	N/A	0,03	0,03	0,03

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

2) Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Kondisi pembangunan kesehatan di Kabupaten Empat Lawang dapat dilihat melalui indikator pada Tabel 2.34 dan Tabel 2.35.

Tabel 2.34 Indikator Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Kabupaten Sehat (persentase)	0	0	20	20	20
2	Persentase Penduduk Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan (UHC)	-	-	55,57	57,13	68,71
3	Angka Kematian Ibu	52,65	34,45	52,85	0,00	38,53
4	Cakupan Layanan Penyakit Menular (%)	100	100	100	100	100
5	Cakupan Diteksi Dini Pnyakit Tidak Menular (%)	100	100	100	100	100
6	Cakupan layanan imunisasi	78,52	97,70	97,16	90,64	107,3
7	Persentase fasilitas kesehatan terstandarisasi	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang, 2023

Melalui Tabel 2.34 diketahui masih terdapat ibu yang meninggal saat hamil dan melahirkan di Kabupaten Empat Lawang pada Tahun 2022. Penyebab masih adanya ibu meninggal saat hamil dan melahirkan ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wanita terhadap bahaya nikah dini hingga edukasi terkait kehamilan. Perlu digalakkannya kegiatan edukasi pra nikah dan edukasi saat posyandu dan inovasi dalam hal terkait dapat menjadi salah satu solusi dalam masalah ini.

Tabel 2.35 Indikator Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD	-	80,14	82,25	82,47	82,38
2	Nilai akreditasi	perdana	perdana	perdana	perdana	Perdana
3	Persentase pencpaian SPM RSUD	*	*	*	63	77
4	Persentase tenaga medik dan para medik yang memiliki sertifikat kompetensi	*	*	*	83	88
5	Persentase tenaga medik, para medik dan non medik yang lulus pelatihan dengan kategori baik	*	*	*	88	83
7	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit pada 4 layanan dasar	*	*	*	87%	94,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang, 2023

Keterangan: * Indikator baru

Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Empat Lawang turun di Tahun 2022. Untuk meningkatkan nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD salah satunya ditunjang dengan kualitas pelayanan baik dari segi sarana dan prasaran rumah sakit. Melalui Tabel 2.35 dapat diketahui bahwa masih ada tenaga medik, para medik dan non medik yang lulus pelatihan dengan kategori tidak baik atau pun masih ada yang belum lulus pelatihan.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.36 Indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	0	0	0	0	0
2	Persentase rumah tangga yang terlayani sanitasi (air limbah aman)	0	0	0	0	1,97
3	Persentase jalan dalam kondisi baik	42,72	41,90	59,31	50,313	55,88
4	Persentase irigasi dalam kondisi baik	80,04	86,21	81,90	70,40	48,01
5	Persentase luas baku daerah irigasi kewenangan kabupaten yang terlayani jaringan irigasi dalam kondisi baik	*	*	*	*	28,7
6	Persentase Kepatuhan PBG	**	**	**	**	100
7	Persentase bangunan gedung dan arsitektur prasarana pemerintah dan kepentingan strategis pemerintah kabupaten yang ditangani	**	**	**	**	0
8	Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	**	**	**	**	0
9	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	**	**	**	45,89	35
10	Persentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	**	**	**	**	100
11	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	**	**	**	**	75
12	Persentase bangunan gedung dan arsitektur prasarana pemerintah dan kepentingan strategis pemerintah kabupaten yang ditangani	**	**	**	24,66	25
13	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	**	**	**	24,78	25

Keterangan: **Indikator baru

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023

Tabel 2.37 Panjang Jalan menurut Pemerintah yang berwenang di Kabupaten Empat Lawang (km)

No.	Jenis jalan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jalan Negara	32,48	32,48	32,48	32,48	32,48
2.	Jalan Provinsi	147,51	147,51	147,51	147,51	147,51
3.	Jalan Kab/Kota	984.597	984.597	984.597	984.597	984.597
4.	Jalan Non Status	-	-	-	-	-
Jumlah		1.164,59	1.164,59	1.164,59	1.164,59	1.164,59

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel. 2.38 Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase rumah layak huni	*	45	51,29	52,74	53,66
2	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	*	*	*	52,74	53,66
3	Luasan kawasan kumuh (Ha)	25,31	32,35	31,41	51,7	95,76
4	Persentase kepemilikan lahan pemerintah yang sah dan bebas konflik	*	*	*	*	39

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023

Keterangan: * Indikator baru

Luasan kawasan kumuh di Tahun 2021 meningkat karena di Tahun 2021 ada *baseland* ulang di beberapa titik di Kabupaten Empat Lawang. Penyempurnaan kajian dilakukan agar masyarakat dapat hidup lebih baik. Namun hal ini bukan prestasi, melainkan hal yang perlu menjadi perhatian. Hal yang membuat suatu kawasan itu menjadi kumuh karena beberapa hal, yaitu, bangunan yang tidak beraturan, masih adanya rumah yang belum ada sanitasi dan air minum layak, belum adanya pemadam kebakaran di kawasan terkait, drainase yang masih buruk yang ditandai dengan banyaknya genangan air, akses jalan yang minim, dan belum ada akses persampahan yang baik.

a. RTLH

Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni masih menjadi permasalahan serius, baik ditingkat Pusat maupun di Daerah, begitu juga di Kabupaten Empat Lawang yang masyarakatnya masih banyak yang berpenghasilan rendah sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan. Setiap tahun diproyeksikan terjadi penambahan kebutuhan akan rumah layak huni sehingga dengan adanya program dari pemerintah pusat yaitu kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Empat Lawang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah layak huni, disamping dana APBD Kabupaten Empat Lawang.

Persentase Rumah Tangga menurut indikator kualitas perumahan yaitu kategori luas lantai per kapita masih rendah sehingga program dan kebijakan rumah layak huni diarahkan untuk kategori luas lantai per kapita kurang dari 10 m². Salah satu kriteria rumah tangga layak huni (RTLH) adalah adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per kapita minimal 7,2 m². Pada tahun 2021, tercatat sebesar 14 persen rumah tangga di Kabupaten Empat Lawang masih tinggal di rumah yang relatif sempit, yaitu berukuran kurang dari 7,2 m² per anggota rumah tangga.

Tabel 2.39 Statistik Perumahan Kabupaten Empat Lawang 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jenis Lantai Terluas					
	Bukan Tanah	100	99,83	99,65	99,09	...
	Tanah	0	0,17	0,35	0,09	...
2	Jenis Atap Terluas					
	Beton	0,92	0,28	1,41	0,86	...
	Genteng	1,28	1,78	2,60	2,56	...
	Bambu/Kayu/Sirap**	0	0,37	0,65
	Seng	96,11	93,86	94,41	94,71	...
	Abses	1,69	3,71	0,94
	Lainnya	0	0	0	1,87	...
3	Jenis Dinding Terluas					
	Tembok	52	51,79	49,35	52,91	...
	Kayu	45,33	43,90	49,71	45,45	...
	Bambu	2,67	4,31	0,93	1,26	...
	Lainnya	0	0	0	0,39	...

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Empat Lawang, 2022

Keterangan: ** Bambu, Kayu/Sirap, Jerami/Ijuk/Daun-daunan/Rumbia masuk kategori lainnya

Kualitas perumahan juga dapat dilihat dari jenis lantai, jenis atap, dan jenis dinding. Jika dilihat berdasarkan lantai terluas, sebagian besar rumah tangga sudah menempati rumah yang berlantai bukan tanah, yakni mencapai 99,09 persen. Di samping itu, semua rumah tangga tinggal di rumah beratap layak (tidak beratap dedaunan) serta rumah tangga yang menempati rumah dengan dinding permanen (dinding tembok dan kayu) mencapai 98,36 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi perumahan di Kabupaten Empat Lawang telah cukup memenuhi standar. Namun, masih perlu perhatian sehingga kelak tidak ada lagi rumah tangga yang tinggal di rumah yang berukuran kurang dari 7,2 m² dengan jenis lantai tanah, beratap tidak layak dan berdinding belum permanen.

b. Kawasan Kumuh

Penanganan kawasan kumuh baru dilakukan pada tahun 2020, tahun 2018 dan 2019 tidak dilakukan penanganan. Data luas kawasan kumuh dan penanganan di tahun 2020 pada Tabel 2.40

Tabel 2.40 Luas Kawasan Kumuh dan Persentase Penanganan di Kabupaten Empat Lawang

Kawasan	Luas (Ha)	2018	2019	2020	2021	2022
Kawasan Pasmaja (Tebing Tinggi)	19,79 Ha	0	0	31,41	51,7	95,76
Kawasan Tanjung Beringin (Tebing Tinggi)	9,38 Ha	0	0			
Kawasan Pendopo	22,53 Ha	0	0			

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

5) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2.41 Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	...	47,88	49,65	31,50	20
Persentase Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban, Ketentraman, Dan Kenyamanan (K3)	50	47,88	49,65	66	14
Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda Dan Perkada Yang Ditindak Lanjuti	5	100	67	100	100

Sumber : Polisi Pamong Praja, 2023

Penanganan ketertiban masyarakat dilaksanakan melalui perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah yang tergabung dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp), berikut rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42 Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,0003	0,0162	0,0212	0,0242	0,0784	0,0886

Sumber : Polisi Pamong Praja, 2023

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam hal penanggulangan bencana Kabupaten Empat Lawang telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menangani semua kejadian yang diakibatkan oleh bencana, sedangkan untuk penanggulangan kebakaran dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Untuk meningkatkan kinerja petugas, BPBD telah mengadakan sosialisasi pencegahan dan penanganan bencana dan meningkatkan pelatihan tenaga sukarela pertolongan bencana di kecamatan-kecamatan. Namun sarana prasarana serta kapasitas SDM dalam menangani bencana dan kebakaran masih minim.

Tabel 2.43 Indikator kinerja BPBD

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase desa tangguh bencana	*	*	*	*	2,12
Nilai desa tangguh bencana di desa rawan bencana	*	*	*	35	35
Persentase kejadian yang ditangani sesuai waktu tanggap	*	*	*	70	70

Lanjutan Tabel 2.43 Indikator kinerja BPBD

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana yang terjadi	*	*	*	*	6

Sumber : BPBD Kabupaten Empat Lawang, 2023

Keterangan: *Indikator baru

c. Dinas Pemadam Kebakaran

Untuk penanganan kebakaran yang dimulai Tahun 2021 ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran, dilakukan dengan cara optimalisasi petugas BPK yang ada di seluruh kecamatan.

Tabel 2.44 Indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai standar	*	*	*	92	92
Persentase sdm pemadam dan penyelamatan yang sesuai standar	*	*	*	0	21
Persentase kejadian yang ditangani sesuai waktu tanggap	*	*	*	94	57

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Empat Lawang, 2023

Keterangan: *Indikator baru

6) Urusan Sosial

Tabel 2.45 Indikator kinerja Dinas Sosial

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio PPKS Terhadap Jumlah Penduduk	*	*	*	*	3,3
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	*	*	*	*	55
Persentase Akurasi Data Kesejahteraan Sosial	*	*	*	*	70
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pasca Bencana Sesuai Standar	*	*	*	*	100
Persentase Sarana Prasarana Sosial Sesuai Standar	*	*	*	*	80

Sumber : Dinas Sosial, 2023

Keterangan: *Indikator baru

2.3.2 Fokus Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Urusan wajib bukan pelayanan dasar yang dilaksanakan Kabupaten Empat Lawang meliputi :1). Urusan Lingkungan Hidup, 2).Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil, 3).Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 4).Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 5).Urusan Perhubungan, 6).Urusan Komunikasi & Informatika, 7).Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 8).Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, 9).Urusan Perpustakaan.

Berikut penjabaran per urusan wajib bukan pelayanan dasar:

1) Urusan Tenaga Kerja

Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)	2.28	2.64	3.61	2,41	3,59
2	Tingkat produktivitas tenaga kerja	*	*	*	*	2,40
3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (pp/pkb/lks/bipartit/skala upah & kepersertaan bpjs yang terdaftar)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, 2023

Keterangan: *Indikator baru

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022

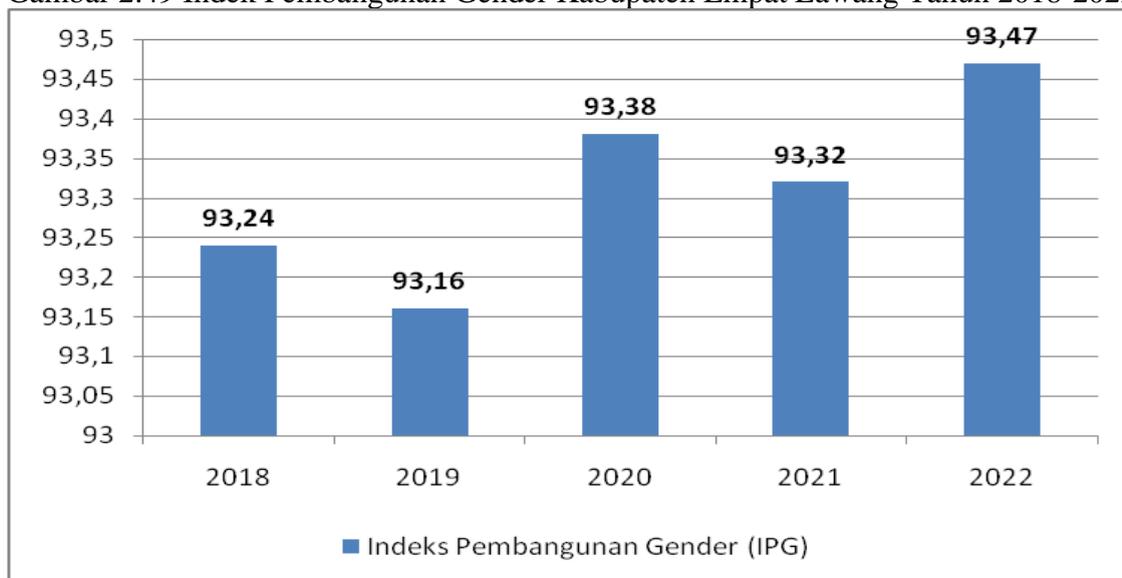
No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,24	93,16	93,38	93,32	93,47
2	Kabupaten Layak Anak	*	*	168,6	-	600
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,7	56,93	55,87	58,3	55,03

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, 2023

Keterangan: *Indikator baru

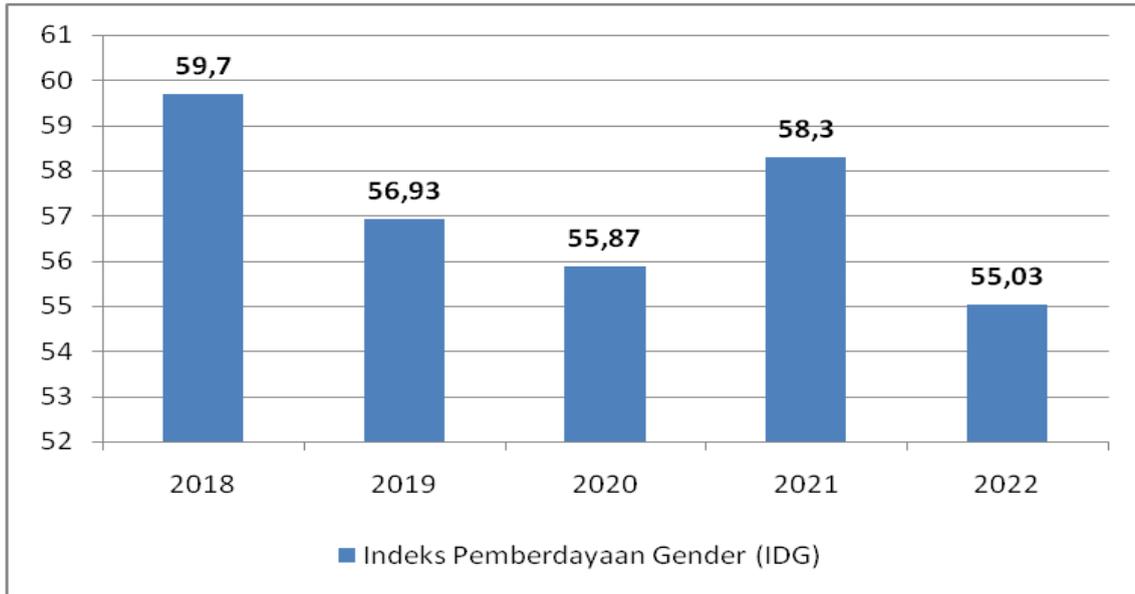
...Nilai belum keluar

Gambar 2.49 Indek Pembangunan Gender Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.50. Indek Pemberdayaan Gender Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 -2022



Sumber: BPS, 2023

Salah satu urusan dan menjadi amanat Undang-Undang adalah pembentukan Kabupaten Layak Anak (KLA). Kabupaten Empat Lawang telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak. Sebagai tindak lanjut Perda dimaksud, maka dibentuk Satgas KLA Kabupaten Empat Lawang, dan dilaksanakan Deklarasi Kabupaten Layak Anak pada 13 Desember 2018, yang beranggotakan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, serta beberapa perwakilan Media Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dunia Perbankan, untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya harus ditindak lanjuti.

3) Urusan Pangan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketahanan Pangan diukur dengan indikator: Regulasi ketahanan pangan dan Ketersediaan pangan utama.

Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Ketahanan Pangan	71,18	66,75	65,75	66,07	65,25
2	Ratio ketersediaan pangan	*	*	*	*	2,14
3	Persentase cadangan pangan	*	*	*	*	31,51
4	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	*	*	*	*	45,66
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80	83,35	86,60	...	88,42
6	Angka kecukupan energi	*	*	*	*	2.208

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023

Keterangan: *Indikator baru

Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum dibawah 1400 kkal perkapita/ perhari diasumsikan sama dengan penduduk miskin. Kualitas konsumsi pangan yang dindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) dan tingkat konsumsi ikan pada tahun 2018 sebesar 80% dan meningkat menjadi 88,42% di tahun 2022.

4) Urusan Lingkungan Hidup

Kabupaten Empat Lawang adalah daerah hulu aliran Sungai Musi sehingga memiliki sumber daya air yang relatif besar bagi masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang masih menggantungkan aktifitas keseharian terhadap Sungai Musi. Indeks kualitas lingkungan dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan, salah satunya melalui pemantauan kualitas air sungai dilakukan sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pada beberapa ruas sungai. Adapun pencapaian indikator lingkungan hidup terlihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49 Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kab. Empat Lawang

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	*	*	67,66	69,45	69,99
2	Indek Kualitas Air	*	*	58,33	63,89	65
3	Indek Kualitas Udara	*	*	89,77	93,93	92,64
4	Indek Kualitas Lahan	*	*	42,79	36,69	36,69
5	Laju penurunan tingkat pencemaran	*	*	*	*	1
6	Persentase Usaha/Kegiatan yang Mematuhi Lingkungan Hidup	*	*	*	*	61,40
7	Laju penurunan kualitas air	*	*	*	*	1
8	Laju penurunan kualitas udara	*	*	*	*	0
9	Tutupan lahan pengurangan timbulan sampah	*	*	*	50	6
10	Laju penurunan kualitas tutupan lahan	*	*	*	*	0
11	Pengurangan timbulan sampah	*	*	*	*	12
12	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup	*	*	*	*	3,90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Keterangan: * Indikator baru

.... data belum keluar

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

TPA Kabupaten Empat Lawang berlokasi di Jalan Poros Noerdin Pandji Km. 13 dengan lahan seluas 6,5 Ha yang mulai pengerjaan tahun 2015 dan sudah mulai beroperasi Penanganan sampah baru terbatas pada sebagian wilayah perkotaan di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Pendopo, dengan kapasitas sampah terangkut perhari sebanyak 25,0 ton/ hari dengan lahan yang terpakai sebanyak 2,5 ha. Namun penanganan sampah baru mencapai 47,7 % diperkotaan, sedangkan di pedesaan baru sebesar 1,5 %. Masih minimnya penanganan sampah ini juga terkait dengan tingkat

memenuhi sarana prasarana persampahan yang baru sekitar 6,2 %. TPS 3R dan bank sampah juga belum beroperasi dalam pengelolaan dan pengurangan sampah.

5) Urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil

Tabel 2.50 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Indeks kepuasan masyarakat disdukcapil	0	76,70	76,80	76,9	84,43
2	Persentase data adminduk yang di validasi	0	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang akurat	0	59,69%	75,54%	75,54%	82,65%
4	Persentase data adminduk yang termuktahirkan	**	**	**	100	100
5	Persentase peningkatan pelayanan SIAK online	**	**	**	19,36	55,14

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Keterangan: * Data/TW III

**Indikator baru

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di Kabupaten Empat Lawang antara lain: Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, implementasi sistem administrasi kependudukan yang dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Indikator kinerja pada urusan kependudukan dan catatan sipil adalah persentase penduduk yang ber-KTP (NIK/Nomor Induk Kependudukan).

Di tahun 2020, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 240.091 jiwa, atau baru sekitar 65% dari total masyarakat usia 17 tahun ke atas Sementara itu jumlah kartu keluarga sebanyak 76.584 keluarga, dengan jumlah akta kelahiran sebesar 90.967 akta (85%).

6) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Desa Membangun	*	*	0,6206	0,6261	0,6408
2	Persentase desa berkembang	*	62,585	78,231	82,313	93,197
3	Persentase Sarana Prasarana yang dikelola Desa	*	*	*	-	82,9
4	Persentase Desa Yang Terlibat dalam Kerjasama dalam Peningkatan Desa	0	0	0	6	7,4
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang Aktif	*	*	*	44,64	59,75
6	Persentase Desa yang melaksanakan Pemerintahan yang baik	*	*	*	*	87,07

Sumber : DPMD, 2023

Keterangan: *Indikator baru

Tabel. 2.52 Status Desa menurut IDM di Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018-2022

Status Desa	Jumlah Desa				
	2018	2019	2020	2021	2022
Maju	*	3	3	3	3
Berkembang	*	92	115	121	137
Tertinggal	*	52	29	23	7
Sangat tertinggal	*	0	0	0	0
Jumlah Desa	*	147	147	147	147

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Keterangan: *Indikator baru

7) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gerakan keluarga berencana merupakan perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran lainnya. Pelayanan keluarga berencana merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mempersiapkan bonus demografi yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Pemenuhan kebutuhan peserta KB aktif di Kabupaten Empat Lawang mencapai 82,1 % namun masih terdapat pasangan usia subur yang ingin ber KB namun tidak terpenuhi (*Unmet Need*) di tahun 2020 sebesar 10,38% dan Drop Out (DO) pada beberapa kecamatan masih tinggi seperti di Kecamatan Pasemah Air Keruh yang mencapai 57,64%.

Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022

No	Indikator	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju pertumbuhan penduduk	1,22	...	0,29	4,04	4,04
2	Indeks pembangunan keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	53,42
3	Persentase keluarga beresiko stunting	*	*	*	68,43	38,508
4	Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 Tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	55
4	Total fertility rate (TFR)	*	6.236	11.917	2,96	2,96
5	Persentase tribina aktif	*	5	47	100	100
6	Persentase UPPKA AKTIF	100	100	100	100	44
7	Persentase Kampung KB Mandiri	0	0	0	0	1,28

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Daerah, 2023

Keterangan: *Indikator baru

Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 diketahui bahwa Kabupaten Empat Lawang baru memiliki kampung KB yang mandiri pada Tahun 2022. Hal ini menjadi perhatian bersama. Begitu pula dengan persentase UPPKA aktif yang pada Tahun 2022 menuruun sebesar 56 persen menjadi 44 persen UPPKA aktif.

Adanya perbedaan yang significant pada penilaian TFR adalah karena perhitungan yang berbeda antara Tahun 2021 ke atas dan di bawah Tahun 2021.

Turunnya angka persentase keluarga beresiko stunting pada Tahun 2022 didukung dengan program Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan. Upaya lainnya yang dilakukan untuk penanggulangan stunting lainnya dari stakeholder terkait antara lain:

1. Pelantikan Duta Cegah Stunting
2. Koordinasi pengendalian pernikahan dini dengan lintas sektoral (KUA)
3. Analisis Situasi dan Pemetaan Program Kegiatan
4. Analisis Hasil Surveilans Gizi
5. Kelas Ibu Balita di Puskesmas
6. Pemicuan 5 Pilar STBM dan Hygiene Sanitas
7. Penyusunan Rencana Program Kegiatan Prioritas

8) Urusan Perhubungan

Untuk prasarana pendukung, sampai saat ini Kabupaten Empat Lawang belum mempunyai terminal angkutan umum sehingga peningkatan layanan publik terutama dalam hal penataan sistem transportasi dan peningkatan aksesibilitas masyarakat di pedesaan terasa kurang optimal.

Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ratio konektivitas transportasi wilayah	*	*	*	0,30	0,50
2.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	*	*	*	46,52	55,45

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Adapun yang termasuk dalam fasilitas perlengkapan jalan adalah : marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dan pagar pengaman jalan. Kabupaten Empat Lawang belum ada termasuk balai uji KIR yang beberapa kali direncanakan untuk dibangun namun belum terealisasi sampai dengan saat ini.

9) Urusan Komunikasi dan Informatika

Saat ini pemerintahan Kabupaten Empat Lawang telah mempunyai domain www.empatlawangkab.go.id. Dengan Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang ataupun situs SKPD yang terintegrasi dengan domain induk memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang menginginkan informasi secara cepat. Situs pemerintah Kabupaten Empat Lawang dapat diakses dari telepon genggam sehingga masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi.

Tabel 2.55 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai/ Indeks SPBE	N/A	1,6	N/A	2,23**	2,66**/1,86
2	Domain Kebijakan SPBE	N/A	1,12	N/A	2,6**	2,6** / 1,8
3	Domain Tata kelola SPBE	N/A	1,29	N/A	1,6**	2,9** /1,1
4	Domain Manajemen SPBE	N/A	1,91	N/A	1**	2,45** / 1
5	Domain Layanan SPBE	N/A	2,08	N/A	2,92**	2,62* */ 2,6
6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi	*	*	*	75	75
7	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan daerah	*	*	*	100	100

Sumber: Dinas Komunkasi, Informatika, Statistika dan Persandian, 2023

Keterangan: * Indikator baru

** dilakukan penilaian mandiri

Peranan *e-government* yang saat ini sedang diintegrasikan menjadi *e-government* merupakan penerapan *smart government* yaitu sistem yang saling terintegrasi satu dan lainnya sehingga antar sistem dapat berinteraksi dan menghasilkan data serta mendukung antar sistem di Kabupaten Empat Lawang baru pada beberapa komponen hal ini dapat dilihat dalam level SPBE Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 yaitu indeks Domain Kebijakan Internal SPBE yaitu di level 1,12, indeks domain tata kelola SPBE yaitu di level 1,29, serta indeks Domain Layanan SPBE yaitu di level 1,91.

SDM, sarana prasarana komunikasi dan informatika juga masih terbatas termasuk belum adanya gedung khusus pengelolaan komunikasi dan informatika sehingga kinerja kominfo di Kabupaten Empat Lawang belum dapat memenuhi standar yang ada.

Domain layanan SPBE pada Tahun 2022 menurun, indikator ini didukung oleh nilai layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.

10) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Koperasi dan UKM diukur dengan indikator: Persentase koperasi aktif, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Tabel 2.56 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022

No	Indikator	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase koperasi sehat (%)	17,40	19,40	19,74	40	28,57
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	3008	4016	17860	28118	28118
3	Persentase peningkatan volume usaha umkm	*	*	*	45	45
4	Persentase produk umkm yang masuk pasar	*	*	*	29	29
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	*	*	*	1,06	1,06
6	Persentase peningkatan laba usaha koperasi	*	*	*	9	0
7	Persentase pelaporan rat koperasi tepat waktu	*	*	*	6,45	0
8	Cakupan bina koperasi	*	*	*	16,12	0

Sumber: Dinas Koperasi UKM, 2023

Keterangan: *Indikator baru

Koperasi yang ada di Kabupaten Empat Lawang adalah koperasi simpan pinjam dimana sebelum dan legalisasi tersebut belum menerapkan prinsip-prinsip perkoprasian, sehingga koperasi belum dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Persentase koperasi sehat pada Tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021, namun menurunnya nilai koperasi sehat ini tidak disertai dengan penurunan jumlah koperasi sehat. Pada Tahun 2021 jumlah koperasi sehat adalah 35 koperasi dan di Tahun 2022 jumlah koperasi sehat adalah 45 koperasi.

11) Urusan Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkan modalnya di suatu daerah berikut serapan tenaga kerja lokal dan asing. Tentu saja untuk tingkat daerah semakin banyak PMDN dan serapan Tenaga kerja lokal lebih diutamakan, agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Penanaman Modal diukur dengan indikator yaitu: Lama proses perizinan dan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha.

Tabel 2.57 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018– 2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Lama proses perizinan (hari)	11	10	9	9	9
2	Jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Empat Lawang	7	7	8	8	9

Lanjutan Tabel 2.57 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018– 2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Nilai investasi (Rupiah)	3,5 T	3,5 T	3,5 T	2 T	1,9 T
4	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Empat Lawang	0	0	0	-41,735	-4,938
5	Realisasi Investasi	1,2 T	1,2 T	3,0 T	195 M	194 M
6	Jumlah Project Investment yang terealisasi	-	-	-	2	1

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023

Keterangan: * Indikator baru

Data nilai investasi di Kabupaten Empat Lawang pada tiga tahun terakhir menurun menurun dari tahun sebelumnya. Nilai investasi didapat dari rencana/target investasi yang termuat pada MoU dengan investor. Sedangkan realisasi investasi adalah investasi yang terealisasi.

Project invesment yang terealisasi di Tahun 2021 adalah dari PT. Sawit Nasional Indonesia dan CV. Aman Jaya Abadi Satu dan di Tahun 2022 adalah dari PT. Daya Indah Yasa.

12) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.58 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase desa yang aktif mengikuti even olahraga	*	*	13,6	15,6	16,6
2.	Persentase kenaikan perolehan medali dalam porprov	-	...	-	7,5	-
3.	Jumlah atlet berprestasi	17	50	67
4.	Persentase desa yang melaksanakan germas olahraga	*	*	*	30,61	32
5.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	N/A	N/A	N/A	17,2	19,53
6.	Jumlah Pemuda yang Berwirausaha	*	*	*	36	36
7.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	*	*	*	2,15	2,76
8.	Sarana dan Prasarana Olahraga					
	Lapangan futsal	2	2	2	2	2
	Panjat Tebing	1	1	1	1	1
	Lapangan Bola	0	0	0	0	2
	Badminton	1	1	1	1	1
	Lapangan Tenis	2	2	2	2	1

Lanjutan Tabel 2.58 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 - 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Lapangan voli	2	2	2	2	1
	Lapangan basket	1	1	1	1	1
	Lapangan tembak	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2023

Keterangan: * Indikator baru

Porprov dilakukan dua tahun sekali, pada periode ini di Tahun 2019 dan 2021.

Sarana dan prasarana olahraga Kabupaten Empat Lawang di Tahun 2022 meningkat, termasuk GOR olahraga yang didanai oleh CSR. Sarana dan prasarana dalam kondisi baik pada Tahun 2022 adalah 70%. Kondisi baik pada Tahun 2022 ini meningkat dibandingkan 2021. Sarana dan Prasarana yang masih dalam kondisi rusak adalah lapangan voli, lapangan basket, dan lapangan tembak.

13) Urusan Kebudayaan

Tabel 2.59 Capaian Kebudayaan di Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase kebudayaan daerah yang dikembangkan	-	-	-	-	-
2	Persentase data budaya yang diakui	*	*	*	*	*
3	Persentase daerah potensial kebudayaan yang terpenuhi sarana dan prasarananya	-	-	-	-	-
4	Persentase potensi kebudayaan daerah yang dikelola	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang, 2023

Keterangan: * Indikator baru

Seperti yang terlihat pada tabel capaian kesenian dan kebudayaan bahwa selama lima tahun terakhir kebudayaan daerah belum dikembangkan, sarana dan prasarannya belum terpenuhi dan belum dikelola.

14) Urusan Perpustakaan

Tabel 2.60 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pengunjung perpustakaan	7200	9993	2275	2290	2610
2	Indeks peningkatan literasi masyarakat	*	*	*	*	50,61
3	Survei Kepuasan Masyarakat	*	80,25	81,47	76,60	85,03
4	Tingkat gemar membaca	*	*	*	...	61,03

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Keterangan: * Indikator baru

Pengunjung perpustakaan di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengalami penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Masih perlu upaya serta program untuk meningkatkan kembali jumlah kunjungan serta minat baca. Disamping diperlukan integrasi program daerah dengan desa sehingga dapat meningkatkan literasi yang signifikan pun diperlukan inovasi untuk merangkul kaula muda dalam menumbuhkan minat baca.

15) Urusan Kearsipan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator: Pengelolaan arsip secara buku dan jumlah pengelola kearsipan serta pengelolaan arsip daerah secara terpadu yang sampai saat ini masih sangat minim dilaksanakan di Kabupaten Empat Lawang.

Tabel 2.61 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase penyelamatan dan pelestarian dokumen daerah	*	*	*	*	0
2	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai standar	*	*	*	4,5	4,5
3	Persentase OPD yang melakukan Pendataan Arsip	*	*	*	4,5	4,5

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

Keterangan: *Indikator baru

Pemenuhan sarana prasarana kearsipan yang belum memadai menjadi salah satu faktor penyumbang terhadap minimnya pengelolaan arsip di Kabupaten Empat Lawang.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan di kabupaten Empat Lawang dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, dan Urusan Perindustrian.

1) Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Empat Lawang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB. Potensi wisata yang ada belum dikembangkan secara maksimal dan difokuskan sebagai sumber pendapatan asli daerah, besaran kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 0,98 % Tahun 2020. Promosi dan pengelolaan yang belum maksimal ini juga menyebabkan objek wisata yang telah dikembangkan perlahan mulai jarang dikunjungi. Untuk itu diperlukan upaya keras guna meningkatkan kinerja pariwisata ini.

Tabel 2.62 Indikator kinerja urusan pariwisata

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,75	1,86	1,77	1,73	1,76
2	Persentase Destinasi Pariwisata Yang dikembangkan	*	*	*	57%	66%
3	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	*	*	*	16%	15%
4	Persentase Rata-rata pertumbuhan volume usaha sektor ekraf	*	*	*	10%	18%
5	Persentase SDM Ekraf yang Berinovasi	*	*	*	10%	0

Sumber: Dinas Pariwisata

Keterangan: *Indikator Baru

Tabel 2.63 Potensi Objek Wisata Alam dan Budaya di Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2023

No	Kecamatan	Wisata alam	Wisata Budaya	Wisata Buatan	Jumlah
1.	Muara Pinang	Air terjun Kaban	Pemandian Putri Mayang Sari		9
		Air terjun Curup Embun	Megalit dan Rumah Batu		
		Air panas			
		Air terjun curup deghian			
		Air Bayau Sapa Panjang			
		Tebat Sekedi			
		Pantai Air Bayau			
2.	Lintang Kanan	Air Terjun Tujuh Panggung	Makam Puyang Buah Manau	Bendungan Karang Tanding	5
		Air Bayau, sumber Air Belerang			
		Air Terjun Pacaran			

Lanjutan Tabel 2.63 Potensi Objek Wisata Alam dan Budaya di Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2023

No	Kecamatan	Wisata alam	Wisata Budaya	Wisata Buatan	Jumlah
3.	Pendopo	Goa Soroman	Makam Pasak Rora	Jerambah Kawat	14
		Goa Batu	Makam Puyang Lambung Mas		
		Air terjun Genting	Situs Megalitikum		
		Goa Kelambit	Batu Berdoroh		
		Bukit Mas	Tungku Raksasa		
		Danau Penantian	Tungku Batu Kapur		
			Batu Betungkup		
			Makam Puyang Kedum		
4.	Pendopo Barat		Makam Puyang Lambung Emas		1
5.	Pasemah Air Keruh	Danau Oge/ Tebat Ghimbe	Rumah Adat Empat Lawang	Bendungan Buatan Dusun Talang Padang Paiker	10
		Pemandian Suban Air Panas	Kampung Anat Paiker		
		Air Terjun Curup Nanjungan			
		Camping Ground Reban Kucing (Negeri di atas awan)		Tebing Air Keruh	
		Danau Sungai Aro		Desa Wisata Bandar Agung	
		Air Terjun Sungai Melancaagh			
6.	Talang Padang	Sungai Kemaang	Makam Puyang Putri Rambut Mas		5
		Air Terjun Curup			
		Air Terjun Batu Betiang (telah dikembangkan)			
		Air Gelegah			
7.	Saling	Lubuk Tudung		Bendungan Cekdam (DAM Proyek)	3
		Air Terjun Saling			
8.	Tebing Tinggi	Air Terjun Rindu Betuntun	Makam Puyang Gadis	Tugu Mas	19
		Pantai Terusan	Makam Puyang Anak Dirut	Kuliner 2 lemon	
		Air Terjun Macang	Makam Puyang Rajo Tingkis	Jembatan Musi II	
		Pulomas	Desa Wisata Terusan baru	Terowongan Kereta Api	

Tabel 2.63 Potensi Objek Wisata Alam dan Budaya di Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2023

No	Kecamatan	Wisata alam	Wisata Budaya	Wisata Buatan	Jumlah
	Tebing Tinggi	Pantai Muare		Jembatan Musi I (2 lintasan, kereta & Mobil)	
				Para Cafe park	
				Taman Bunga Buaksi	
				Bendungan Cekdam (DAM Proyek)	
				RTI (Rantau Tenang Indah)	
9.	Sikap Dalam	Air Terjun Semanau			2
		Pama Lebar			
10.	Ulu Musi	Batu Galang			2
		Landscape Sawah-Bukit Barisan			
Jumlah					71

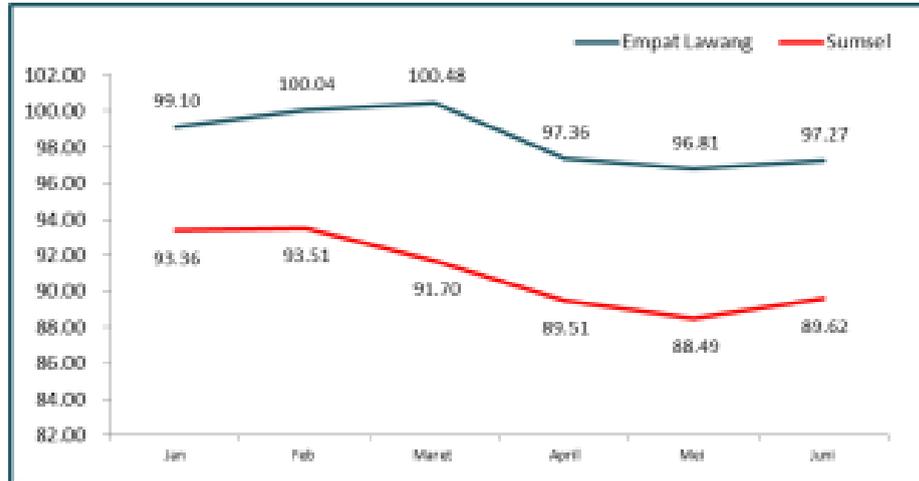
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Empat Lawang, 2023

Pada Tahun 2022 wisata di Kabupaten Empat Lawang mulai mencuat, dimulai saat pasca covid-19, dimana banyak masyarakat yang mulai jenuh dengan keadaan. Hingga terpilihnya tempat wisata di Kecamatan Pasemah Air Keruh sebagai salah satu inovasi di Indonesia sebagai nominator. Banyaknya bermunculan tempat wisata membuat pemerintah harus lebih memperhatikan sarana dan prasarana, akses jalan dan lain-lain untuk menunjang wisata di Kabupaten Empat Lawang agar lebih dilirik oleh masyarakat luar, dan meningkatkan PAD Kabupaten Empat Lawang sendiri.

2) Urusan Pertanian

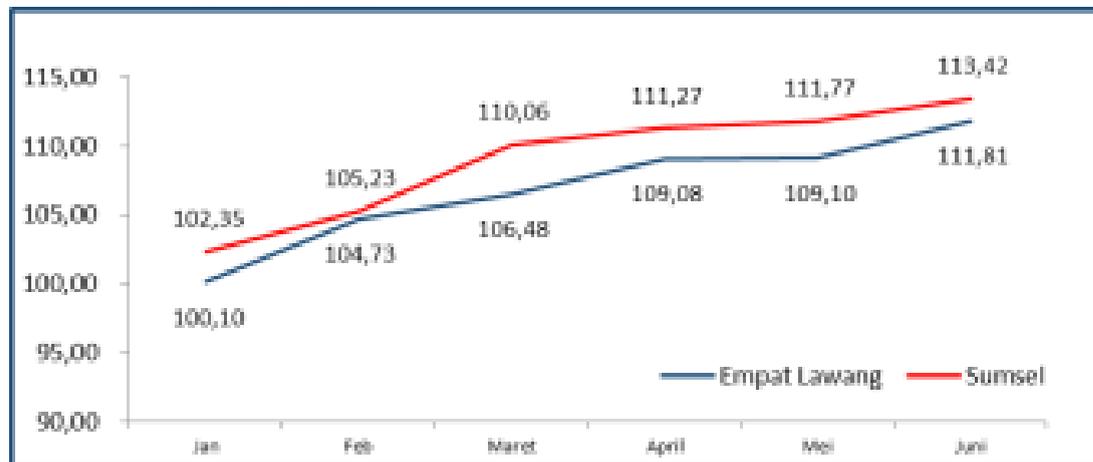
Peran sektor pertanian yang relatif besar terhadap pembentukan nilai tambah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tanaman bahan pangan (padi dan palawija) menjadi andalan dan unggulan dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan.

Gambar 2.51 Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan Kabupaten Empat Lawang dan Provinsi Sumatera Selatan, Januari-Juni Tahun 2021



Sumber: Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Empat Lawang Per Sub Sektor, 2021

Gambar 2.52 Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Empat Lawang dan Provinsi Sumatera Selatan, Januari-Juni Tahun 2021



Sumber: Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Empat Lawang Per Sub Sektor, 2021

Tabel 2.64 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi tanaman pangan					
	Padi (Ton)	120.413	99.256	130.159	136.125	168.038
	Jagung (Ton)	20.497	10.769	18.130	22874	56.013
2	Produksi tanaman hortikultura (Ton/Tahun)	141.350,40	203.507,00	2.402,69	5.250,36	6.246,40
3	Produksi tanaman perkebunan (Ton/Tahun)	110,2	110,2	76.062,7	...	76.022
4	Populasi ternak	8.597	165.250	142.872	151.154	135.856

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang, 2018 -2022

Tabel 2.65 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi (Padi dan Jagung) di Kabupaten Empat Lawang, 2018 -2022

Tahun	Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produktifitas (Ton / Ha)	Produksi (Ton)
2018	Padi	29.456	4,09	120.413
	Jagung	3.849	5,32	20.497
2019	Padi	25.324	3,92	99.256
	Jagung	2.673	4,03	10.769
2020	Padi	29.707	4,38	130.159
	Jagung	4.422	4,09	18.130
2021	Padi	30.385	4,48	136.125
	Jagung	3.877	5,90	22.874
2022	Padi	26.678	6,30	168.038
	Jagung	7.785	7,19	56.103

Sumber : Dinas Pertanian, 2023

Dinas Pertanian Kabupaten Empat Lawang juga mencakup urusan perikanan di Kabupaten Empat Lawang. Jumlah produksi perikanan di Kabupaten Empat Lawang mengalami tren peningkatan, semakin meningkat yaitu sekitar 508 ton.

3) Urusan Perdagangan

Capaian penyelenggaraan urusan perdagangan dapat diukur dengan beberapa indikator diantaranya: (1) kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB; (2) Ekspor Bersih Perdagangan (belum terjadi); dan (3) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (tahun 2020 adalah 65,4). Indikator tersebut tidak lain merupakan ukuran untuk mengetahui capaian sasaran dalam meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian.

Tabel 2.66 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	LPE PDRB sektor perdagangan	7,45	7,43	-0,94	6,15	6,64

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang, 2023

Keterangan: *Indikator baru

4) Urusan Perindustrian

Tabel 2.67 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018 – 2021

No	Indikator	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	LPE PDRB sektor perindustrian	5,86	5,54	0,37	2,20	9,33
2	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	*	*	*	*	2,02
3	Persentase produk ikm yang dipasarkan	*	*	*	*	4,05

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Empat Lawang, 2023

3) Transmigrasi

Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase desa di wilayah ex transmigrasi yang masuk kategori berkembang	*	2,04	2,72	2,72	2,72
2	Persentase industr transmigrasi yang berkembang	*	*	*	60	60
3	Persentase Kelompok Transmigrasi Yang di berdayakan	*	*	*	45	45

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Empat Lawang, 2021

Keterangan: * Indikator baru

6) Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Empat Lawang tidak memiliki daerah laut, karenanya urusan yang diampu hanya perikanan saja.

Tabel 2.69 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perikanan Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	LPE perikanan	2,43	1,70	0,60	4,08	4,15
2	Produksi perikanan budidaya	*	*	*	*	1163
3	Produksi perikanan tangkap	*	*	*	*	781
4	Angka Konsumsi Ikan (AKI) (%)	*	*	*	20	29,98

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Empat Lawang, 2021

Keterangan: * Indikator baru

2.3.4 Fokus Fungsi Penunjang

Urusan Fungsi Penunjang Kabupaten Empat Lawang Meliputi : 1). Urusan Administrasi Pemerintahan, 2). Urusan Pengawasan, 3). Urusan Perencanaan, 4). Urusan Keuangan, 5). Urusan Kepegawaian.

1) Urusan Administrasi Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Tabel. 2.70 Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022

No	Indikator	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	*	*	37,15	38,21	42,73
2.	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi				
3.	Nilai persepsi kualitas pelayanan publik	N/A	77,31	77,31	83,73	92,70
4.	Indeks hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik -DPM-PTSP -Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*	*	*	*	4 3,8
5.	IKM kabupaten	*	68,228	80,495	77,812	91
6.	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	*	*	*	29,33	21,3

Sumber : Sekretariat Daerah, 2023

Keterangan: * Indikator Baru

... Nilai belum keluar

Selama periode tahun 2013-2017 belum dilaksanakan survei penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hal ini akan dilakukan dalam rangka penilaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang.

b. Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD tahun 2020 digabungkan dalam Penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Capaian kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71 Realisasi Indikator Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022

No	Indikator	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Dewan	*	79,37	83,58	83,58	83,92
2.	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	*	*	*	*	98
3.	Persentase pembahasan Anggaran sesuai tahapan dan tepat waktu	*	*	*	*	95
4.	Persentase keberatan terhadap LKPJ dan LPPD yang difasilitasi untuk ditindaklanjuti	*	*	*	*	98

Sumber : Sekretariat DPRD, 2023

Keterangan : * Indikator baru

c. Kecamatan

Pada awal terbentuknya Kabupaten Empat Lawang jumlah Kecamatan ada 7 Kecamatan, pada Tahun 2013 menjadi 8 Kecamatan, dan pada tahun 2014 menjadi 10 Kecamatan. Pada Tahun 2020 mulai dirintis pemekaran tiga kecamatan yang saat ini tinggal menunggu penetapan (permendagri) oleh kemendagri. Berikut daftar nama sepuluh Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang dan luas wilayahnya secara rinci di ditampilkan pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72 Jarak dari ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan di Kabupaten Empat Lawang

No.	Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan (km)	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Muara Pinang	58	193,72	8,59
2.	Lintang Kanan	66	264,55	11,72
3.	Pendopo	46	192,86	8,55
4.	Pendopo Barat	41	95,20	4,22
5.	Paseman Air Keruh	74	217,90	9,66
6.	Ulu Musi	55	329,62	14,61
7.	Sikap Dalam	55	230,76	10,23
8.	Talang Padang	32	140,90	6,24
9.	Tebing Tinggi	0	362,93	16,08
10.	Saling	18	228,00	10,10
	Total		2.256,44	100

Sumber: Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2023

Bila dibandingkan dengan data Tahun 2022 didapatkan bahwa jarak dari ibu kota kabupaten yaitu Tebing Tinggi, ke ibu kota kecamatan di Kabupaten Empat Lawang semakin jauh.

d. Pelayanan Perizinan Terpadu

Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perizinan Terpadu digabungkan dalam Penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Tabel 2.73 Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022

No	Indikator	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	65	70	75	76,6	85,36

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Penilaian IKM terhadap pelayanan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan survei yang dilakukan di Tahun 2018 hingga 2022 meningkat. Rata-rata pertumbuhannya adalah 7,10%. Untuk mempertahankan dan meningkatkan lagi nilai IKM ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus meningkatkan kualitas mutu pelayanannya, beberapa cara diantaranya adalah kemudahan akses pelayanan, keramahan dalam hal pelayanan, keterbukaan informasi pelayanan, hingga menerima masukan terhadap pelayanan yang ada.

2) Urusan Pengawasan

Capaian Inspektorat dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.74 Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022

No	Indikator	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Level Maturitas SPIP	1,7	1,7	1,7	1,7	3
2	Level Kapabilitas APIP	2	2	2	2	2+
3	Persentase OPD yang menuju maturitas SPIP level 3	*	*	*	*	84
4	Nilai program preventif pencegahan korupsi (MCP)	*	*	*	*	58
5	Indeks Integritas Daerah	*	*	*	*	62,74

Sumber : Inspektorat, 2023

Keterangan: *Indikator Baru

Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur pemeriksa di Kabupaten Empat Lawang, menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah, dengan mulai dilakukan pembinaan dan pelatihan (diklat) auditor sejak tahun 2013, namun penempatan aparatur masih tersebar di Perangkat Daerah selain Inspektorat. Saat ini jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebanyak 13 orang dengan level kapabilitas APIP 2, dan maturitas SPIP yang baru pada level 1,7.

3) Urusan Perencanaan

Penyelenggaraan Perencanaan merupakan salah satu penunjang Urusan Pemerintahan daerah. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan pencapaian Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023. Pencapaian kinerja bidang Perencanaan Pembangunan tersajikan melalui Tabel 2.75.

Tabel 2.75 Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2018 – 2022

No	Indikator	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	20,88	32,77	36,08	36,37	40,81
2.	Persentase Kesesuaian Sasaran Antar Dokumen Perencanaan Daerah	100	100	100	100	100
3.	Persentase capaian sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi	*	*	*	*	56
4.	Indek Inovasi Daerah	0	0	1722	44,45	56,37
6.	Persentase Inovasi Daerah Yang Difasilitasi Sesuai Standar	0	0	0	0	80
7	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	0	0	100	100	100

Sumber : Bappeda dan Litbang, 2023

Keterangan: * Indikator baru

4) Urusan Keuangan

a. BPKAD

Tabel 2.76 Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang

Tahun	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total
2018	4,468	20	0,2586	15	3,0546	5,01	47,7912
2019	8,199	20	0,2586	15	0,725	-	44,1826
2020	6,923	-	0,2586	15	4,2558	-	26,4374
2021	4,6054	19,6552	0	15	3,5722	15	57,8328
2022

Sumber : BPKAD, 2023

Salah satu yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yakni terkait dengan alat ukur yang digunakan. Dalam regulasi itu menjelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Enam dimensi itu yakni (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dimensi-dimensi tersebut melihat dari proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan. Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD.

Secara umum selama lima tahun terakhir nilai indeks IPKD meningkat dengan rata-rata peningkatan 23,67 persen setiap tahunnya. Namun dari Tahun 2018 hingga 2020 nilai indeks IPKD menurun, baru pada Tahun 2021 nilai IPKD mulai meningkat dari 26,4374 menjadi 57,8328.

b. Badan Pendapatan Daerah

Tabel 2.77 Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Keuangan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022

No	Indikator	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Derajat fiskal otonomi daerah	3,29	3,93	3,16	2,67	3,40
2	Nilai Pendapatan Daerah	...	1.057.873.519.762,13	1.067660.574.419,07	1.041.111.083.451,10	1.241.898.944.678,91
3	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	...	41.672.141.481,16	33.740.140.713,07	27.846.959.236,30	31.513.950.023,71
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Pendapatan Daerah	*	*	*	83,58	84,39

Sumber : BP2RD, 2023

Derajat fiskal otonomi daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Koromath, 2015). Rata-rata peningkatan derajat fiskal otonomi daerah selama lima tahun terakhir Kabupaten Empat Lawang adalah 2,92 persen.

Nilai Pendapatan Daerah didapatkan melalui Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari data yang ada didapatkan bahwa nilai pendapatan daerah selama lima tahun meningkat dengan rata-rata peningkatan nilai pendapatan daerah 5,91%.

Nilai Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan melalui nilai realisasi pendapatan pajak daerah, realisasi retribusi daerah, realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Nilai Realisasi PAD selama lima tahun ini fluktuatif dan cenderung menurun.

1) Urusan Kepegawaian

Capaian kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.78 Realisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pengisian jabatan struktural dalam struktur organisasi	71	83	84	71	83
2	Persentase pejabat yg telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	80,31	81,17	80,06	80,31	81,17
3	Indeks Merit Sistem	*	*	*	137	145
4	Indeks profesionalisme ASN	*	*	*	*	*
5	Indeks NSPK	*	*	*	*	*

Sumber : BKPSDM, 2023

Keterangan: Indikator Baru

Persentase pemenuhan pengisian jabatan struktural diperlukan peningkatan, termasuk jabatan yang sesuai kompetensi, sehingga diharapkan kinerja pegawai lebih maksimal. Layanan kepegawaian yang terpenuhi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 94,73%, dan tahun 2020 mencapai 100%.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya, baik yang berdekatan, domestik ataupun internasional. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, sumber daya manusia, dan fasilitas wilayah atau infrastruktur. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui aspek daya saing daerah terdiri dari:

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Fokus kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Empat Lawang. Sektor yang cepat tumbuh perlu didorong ke titik yang optimal dan sektor yang mengalami penurunan perlu dilakukan evaluasi kondisi dan rasional penurunannya. Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Empat Lawang dapat ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Angka Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK).

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur

Analisis kinerja infrastruktur dilakukan terhadap beberapa indikator meliputi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel. Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon. Infrastruktur yang tersedia dapat menunjang daya saing daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor di daerah dan antar wilayah.

Aksesibilitas Daerah

Kabupaten Empat Lawang belum mempunyai terminal, dermaga maupun bandara, sehingga belum dapat dilakukan perhitungan jumlah orang atau barang serta belum dilakukan perhitungan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan.

a. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Selama dua tahun terakhir, persentase ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Empat Lawang dalam kondisi baik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kondisi ketaatan terhadap RTRW dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik.

b. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

2.4.3 Fokus Iklim Investasi

Iklim investasi di dukung oleh berbagai macam pajak dan retribusi daerah. Kemudahan Perizinan Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama dan sudah satu pintu.

Iklim usaha, juga dipengaruhi kondisi keamanan suatu daerah. Berikut adalah beberapa indikator yang terkait kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang.

Tabel 2.79 Realisasi indikator terkait kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tindak pidana (kasus)*	179	184	56	84	228

Lanjutan Tabel 2.79 Realisasi indikator terkait kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang, Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah laporan gangguan Ketertiban, Ketentraman, dan Kenyamanan (K3)**	307	160	147	73	50

Sumber : BPS dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Keterangan: * Data dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Direktorat Lalu Lintas Polri melalui website BPS <https://sumsel.bps.go.id/indicator/34/246/1/jumlah-tindak-pidana.html>)

** Data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang

Melalui data Tabel 2.79 diketahui bahwa jumlah tindak pidana (kasus) dan jumlah laporan gangguan K3 selama lima tahun memiliki tren menurun. Rata-rata penurunan untuk indikator jumlah tindak pidana (kasus) adalah 0,06% setiap tahunnya. Untuk rata-rata penurunan jumlah laporan gangguan K3 adalah 0,34% setiap tahunnya.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah modal dan kekayaan yang penting dari setiap kegiatan manusia agar kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya manusia menyangkut dimensi jumlah karakteristik (kualitas) dan persebaran penduduk. Maka, pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan Perguruan Tinggi)

Tabel 2.80 Jumlah Angkatan Kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bekerja						
	≤ Sekolah Dasar (SD)/≤	Jiwa	72.766	-	-	59.931	63.203
	Sekolah Menengah Pertama	Jiwa	19.844	-	-	26.426	27.704
	Sekolah Menengah Atas	Jiwa	26.794	-	-	31.553	33.311
	Jumlah lulusan Perguruan Tinggi	Jiwa	11.268	-	-	13.582	5.091
	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Jiwa	131.670	127.866	139.169	134.739	134.131
	Rasio lulusan Perguruan Tinggi	Angka	0,086	-	-	0,101	0,038
2.	Pengangguran						
	≤ Sekolah Dasar (SD)/≤	Jiwa	650	-	-	174	526
	Sekolah Menengah Pertama	Jiwa	269	-	-	1.382	977
	Sekolah Menengah Atas	Jiwa	1.493	-	-	1.691	2.524
	Jumlah lulusan Perguruan Tinggi	Jiwa	586	-	-	0	795
	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Jiwa	131.670	127.866	139.169	134.739	134.131

Kerja						
Rasio lulusan Perguruan Tinggi	Angka	0,004	-	-	0,000	0,006

Sumber : Kabupaten Empat Lawang Dalam Angka, 2019-2023

Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 program bursa kerja dan kemitraan, penempatan tenaga kerja tidak terlaksana, yang ada hanya sosialisasi. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran.

Berdasarkan data, pengangguran di Kabupaten Empat Lawang adalah pengangguran terdidik terutama yang tamat SMA yang jumlahnya mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2022, sementara pengangguran yang tingkat pendidikannya adalah SMP justru mengalami penurunan yang cukup besar.

b. Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa produktif. Penduduk usia 15 tahun sampai dengan 65 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Tabel 2.81 Rasio Ketergantungan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk < 15 tahun dan > 64 tahun	Jiwa	72.160	-	73.163	97.312	101.935
Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	Jiwa	162.394	-	23.9794	246.527	357.673
Rasio Ketergantungan	%	52,27	52,05	51,83	39,47	28,50

Sumber : BPS Kabupaten Empat Lawang, diolah, 2023

Bila dilihat dari tabel ketergantungan maka perlu adanya arah kebijakan pembekalan ketrampilan dan kompetensi angkatan kerja. penciptaan lapangan kerja bagi usia produktif.

2.5 Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rencana, Kebijakan dan Program Pembangunan

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, dan/atau Program. Selanjutnya pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 ditegaskan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan an Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis yang

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

2.6 Analisis Capaian Kinerja

Capaian SPM

Tabel 2.82 Hasil Capaian Kinerja untuk indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
		Indikator	Nilai			
I.	Urusan Pendidikan					
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	48798	36767	75%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	1640	750	46%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	3190	2748	86%
II	Urusan Kesehatan					
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	6017	5812	97%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	5812	5196	89%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	5534	5191	94%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	32722	20746	63%



Lanjutan Tabel 2.82 Hasil Capaian Kinerja untuk indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
		Indikator	Nilai			
5	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah warga negarausia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	31141	31141	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negarausia produktifyang mendapatkan layanan kesehatan	100%	59988	52905	88%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negarausia lanjut yangmendapatkan layanan kesehatan	100%	11611	9733	84%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negarapenderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	3682	3470	94%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah warga negarapenderita diabetes mellitus yangmendapatkan layanan kesehatan	100%	1197	1197	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negaradengan gangguanjiwa berat yangmendapatkan layanan kesehatan	100%	633	633	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah warga negaraterduga tuberculosisyang mendapatkan layanan kesehatan	100%	3958	2290	58%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negaradengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	7794	616	8%



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Lanjutan Tabel 2.82 Hasil Capaian Kinerja untuk indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
		Indikator	Nilai			
III	Urusan Pekerjaan Umum					
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negarayang memperoleh kebutuhan pokokair minum sehari-hari	100%	2288	2288	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negarayang memperoleh layanan pengolahan airlimbah domestik	100%	649	649	100%
IV	Urusan Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yang layak Huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	7	7	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	7	7	100%
V	Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	3000	3000	100%



Lanjutan Tabel 2.82 Hasil Capaian Kinerja untuk indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
		Indikator	Nilai			
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	109616	90657	82,70%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1921	1921	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1921	1921	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	86	86	100%
VI	Urusan Sosial					
1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	136	136	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	100%	4	4	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	100%	3000	3000	100%

	diluar panti	diluar panti				
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna social diluar panti	100%	8	8	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	33	33	100%

Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Tapem, 2023

Pada jenis pelayanan dasar urusan pendidikan di capai dengan melakukan program pengelolaan pendidikan, pengembangan kurikulum, program untuk pendidik dan tenaga kependidikan (baik melakukan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan).

Program yang dilakukan untuk menunjang SPM urusan kesehatan antara lain program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, pelayanan kesehatan pada pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, diabetes melitus, Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa/ ODMK, orang terduga tuberkulosis hingga pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV).

Capaian SPM untuk urusan Pekerjaan Umum sudah baik, hal ini dicapai dengan mengupayakan pelaksanaan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), dan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.

Capaian PDAM

Hingga saat ini cakupan Pelayanan SPAM pada PDAM Kabupaten Empat Lawang mencakup 2 (Dua) kecamatan yang beroperasi sedangkan 3 (Tiga) kecamatan tidak beroperasi. Dua kecamatan yang beroperasi tersebut adalah Kecamatan Pendopo, dan Kecamatan Tebing Tinggi. Sedangkan 3 (Tiga) Kecamatan lagi adalah Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Muara Pinang, dan Kecamatan Pasemah Air Keruh tidak beroperasi.

Sumber air yang digunakan Perumda Tirta Seguring Betung adalah Sungai Betung dan Sungai Seguring dengan kapasitas 110 lpd. Rincian unit produksi Perumda Tirta Seguring Betung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83 Unit Produksi Perumda Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang

No	SPAM	Sumber Air	Kapasitas (lpd)	Volume Reservoir	Tahun Pembangunan	Kondisi
1.	Tebing tinggi	Sungai Seguring	60	400	2016	Baik
2.	Pendopo	Sungai Betung	50	400	2012	Baik
Total			110	800		

Sumber : Perumda Tirta Seguring Betung Tahun 2021

Sistem penyediaan air minum Perumda Tirta Seguring Betung memiliki 2 SPAM yang beroperasi dengan maksimal, yaitu SPAM IKK Tebing Tinggi dan SPAM IKK Pendopo. Sistem pengaliran distribusi pada kedua SPAM tersebut adalah sistem gravitasi.

Tingkat pelayanan PDAM di Kabupaten Empat Lawang sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar 3,22% dari jumlah penduduk administratif Kabupaten Empat Lawang atau 2.504 unit pelanggan.

Tabel 2.84 Pelanggan Perumda Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang

No	SPAM	Jumlah Pelanggan (Unit)		
		Domestik	Non Domestik	Jumlah
1.	Tebing tinggi	974	37	1011
2.	Pendopo	1469	24	1493
Total			61	2504

Sumber : Perumda Tirta Seguring Betung Tahun 2021

Sedangkan penduduk yang belum mendapatkan pelayanan air PDAM saat ini memenuhi kebutuhan air dari non PDAM baik berupa jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan diantaranya sumur dangkal, sumur bor dan terminal air. Pelayanan air bersih perpipaan non PDAM adalah 60%. Masih terdapat masyarakat yang menggunakan dua jaringan yaitu Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. Sedangkan terdapat tingkat pelayanan kurang dari 100% karena sarana air minum yang tidak termasuk dalam kategori layak. Melihat hal ini perlu dukungan lebih untuk mendorong kinerja dari PDAM Kabupaten Empat Lawang agar tercapai target di akhir perencanaan adalah 50%.

Tingkat pemakaian air pelanggan Perumda Tirta Seguring Betung pada tahun 2021 sebesar 50.228 m³/bulan untuk pelanggan sebanyak 2.504 unit. Tingkat pemakaian rata-rata sebesar 20,06 m³/bulan/SR. Rincian pemakaian air pelanggan Perumda Tirta Seguring Betung per kelompok pelanggan dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85 Konsumsi Air Perumda Tirta Seguring Betung Kabupaten Empat Lawang

No.	Uraian		Jumlah Pelanggan	Pemakaian Air (m3/bulan)	Tingkat konsumsi (m3/bulan/SR)
Pelanggan Domestik					
1	III1	Rumah Selain RSS & Rumah Mewah	2.101	35.383	16,84
2	III2	Rumah Mewah	342	8.008	23.42
Pelanggan Non Domestik					
3	I3	Tempat Ibadah	32	738	23.05
4		Sekolah Negeri	15	575	38.36
5	II5	Rumah Sakit Pemerintah	1	69	68,67
6	II6	Instansi Pemerintah Tingkat Kabupaten	2	203	101,4
7	III3	Industri Rumah Tangga dan Niaga Kecil	3	1503	501,12
8	III4	Instansi Pemerintah Tingkat Kabupaten	8	3750	468,7
Total			2.504	50.228	20.04

Sumber : Perumda Tirta Seguring Betung Tahun 2021

Daerah pelayanan SPAM Ibu Kota Kabupaten Tebing Tinggi baru melayani 1011 sambungan rumah atau sekitar 7,14% dari jumlah penduduk ibu kota tebing tinggi. Adapun daerah layanan yaitu Desa Rantau Tenang, Desa Lampar Baru, Desa Kemang Manis, Kelurahan Pasar, Kelurahan Tanjung Beringin, Kelurahan Tanjung Kupang, Kelurahan Kupang, Jalan Poros, dan Desa Mekar Jaya. Untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.86 Data Jumlah Pelanggan PDAM pada SPAM Ibu Kota Kabupaten Tebing Tinggi

NO	WILAYAH	JUMLAH PELANGGAN
1	RANTAU TENANG	78
2	LAMPAR BARU	55
3	KEMANG MANIS	65
4	SEKIP	71
5	KUPANG	61
6	TALANG JAWA	28
7	LORONG SAWAH	9
8	ABUBAKARDIN	124
9	PJKA	9
10	LORONG TALANG PADANG	33
11	KOPRAL DANIL	20
12	LORONG KELURAHAN	5
13	LORONG ARABIA	3

14	PEREUMNAS SEJAHTERA	33
15	JAYALOKA	40
16	PERUMNAS CROSS	102
17	GRAHA EMAS	75
18	TANJUNG BERINGIN	124
19	TEBING BENTENG	25
20	JALAN POROS	11
21	A3 / DESA MEKAR JAYA	16
22	LORONG POMPA	24
TOTAL		1011

Sumber : Perumda Tirta Seguring Betung ,2021

Tabel 2.87 Data Jumlah Pelanggan Berdasarkan Kelompok Pelanggan pada SPAM Ibu Kota Kabupaten Tebing Tinggi Tahun 2021

NO	KELOMPOK PELANGGAN	JUMLAH PELANGGAN
1.	I.3 TEMPAT IBADAH	15
2.	II.4 SEKOLAH NEGERI	8
3.	II.5 RUMAH SAKIT PEMERINTAH	1
4.	II.6 INSTANSI PEMERINTAH & TNI/POLRI KECAMATAN	2
5.	III.1 RUMAH RSS & RS	710
6.	III.2 RUMAH MEWAH	264
7.	III.3 INDUSTRI RUMAH TANGGA & NIAGA KECIL	3
8.	III.4 INSTANSI PEMERINTAH & TNI/POLRI KABUPATEN	8
TOTAL		1011

Sumber : Perumda Tirta Seguring Betung ,2021

Tabel 2.88 Data capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Empat Lawang

NO	OPD	NAMA INDIKATOR	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan	Persentase SD / MI berakreditasi minimal B.	120	130
		Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	23	26
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	52,05	3,10
		Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik.	85	76
		Pengeluaran untuk layanan pokok (Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	30,3	20,21
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	114,65	112
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs /sederajat	102,31	91,08
		Rata-rata lama sekolah penduduk umur >=15 Tahun	42,5	30,45
		Proporsi sekolah dengan akses air minum layak	0	0
		Proporsi sekolah dengan akses fasilitas dasar per jenis kelamin	75	65
		Proporsi sekolah dengan akses fasilitas cuci tangan	95	86
		Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	40	10
		Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	80	87



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

2	Dinas Kesehatan	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	94	NA
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	80	67,8
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	100	62,7
		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	16,5	0,7
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	27,5	1,2
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	16,5	78
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe.	16,5	0,7
		Prevalensi anemia pada ibu hamil.	29	40,8
		Angka Kematian Ibu (AKI).	115/100.000	160/100.000
		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	100	90
		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran	19	1



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

hidup.		
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	16	2
Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	0,21	0,01
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,05	0,01
Kejadian TB per 1000 orang.	1,27	0,79
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	730	200
Kejadian Malaria per 1000 orang.	≤ 1	0,61
Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	≤ 50	6,5
Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta),	0	8
Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.	0	0
Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 15 tahun.	0	0,63
Jumlah penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan	0	0
Jumlah rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan / dibantu.	0	0
Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan	0	0



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

	rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan		
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),	52	54
	Angka kematian akibat keracunan,	0	0
	Proporsi kematian akibat keracunan,	0	0
	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun,	72	36,36
	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan	100	NA
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100	100
	Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan		
	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	100	65
	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	NA	NA
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100	62,7
	Jumlah desa / kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	156	138
	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation	156	13

		Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)		
		Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	100	99,94
3	Dinas PU PR	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan,	15	3,18
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100	48,88
		Proporsi rumah tangga yang terlayani Sistem pengelolaan lumpur tinja.	15	10,78
		Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).	NA	80
		Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	NA	1
		Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	NA	2
		Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur, resmi biaya)	NA	1



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

		untuk infrastruktur.		
		Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	NA	3
		Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik	NA	55,88%
4	Dinas Perkim	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	450	NA
		Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	2,9	NA
		Jumlah fasilitas terbangun infrastruktur air limbah dengan system terpusat skala kota, kawasan dan komunal	NA	NA
		Jumlah fasilitas yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)	NA	NA
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	NA	NA
5	Dinas Sosial	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	10,12	NA
		Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok	NA	NA



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

	anak		
	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas,	NA	NA
	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	3,1	NA
	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana,	NA	NA
	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan	NA	NA
	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	NA	NA
	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah,	NA	NA
	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagi dimensi, sesuai dengan definisi nasional	NA	NA
	Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	NA	NA
	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	NA	NA



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

		Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	NA	NA
6	BPBD	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0
		Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	75	65
		Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	100	105
		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	65	50
7	Dinas Lingkungan Hidup	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	15	NA
		Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	20	NA
		Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah,	NA	NA
		Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	0	NA
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	85	12,73
		Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	2	0,2
		Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.	25	13
		Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI	2	4



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

		ISO 14001.		
		Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik	NA	NA
		Kualitas air danau	NA	NA
		Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota	NA	NA
		Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam Kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya	NA	NA
8	CAPIL	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran,	92	95,69
		Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan public	96	94
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh Lembaga pencatatan	13,5%	6,33
		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	80%	95,69
9	DPMDP3A	Jumlah kebijakan yang dibuat lembaga, berdasarkan gender yang mendukung pemberdayaan perempuan.	NA	NA



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	5	NA
	Ketersediaan Lembaga untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	NA	NA
	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	NA	NA
	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	NA	NA
	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	7:00	NA
	Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.	10	NA
	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir,	NA	NA
	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	4	NA
	Proporsi perempuan dan	NA	NA



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

		laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		
		Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	NA	NA
		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	5	NA
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen	3	3
		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	NA	NA
		Jumlah Desa Tertinggal	51	23
10	DPPKBD	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	85	83,6
		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	55	55,68
		Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	NA	NA
		Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga	9,53	11,88



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

		Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		
		Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	NA	NA
		Proporsi pasangan usia subur (umur 15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (metneed KB/ Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) cara modern)	23,63	28,4
		Total Fertility Rate (TFR)	2,17	2,95
		Unmet need pelayanan kesehatan		
11	DISHUB	Jumlah penumpang menurut jenis transportasi.	525.000	498.960
		Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi public, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas	NA	NA
12	KOMINFO	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-Undangan,	18	0
		Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	NA	NA



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

		Proporsi individu yang menggunakan internet.	NA	NA
		Proporsi rumah tangga terlayani <i>mobile broadband</i>	NA	NA
		Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	NA	NA
		Jumlah kepemilikan sertifikat penjabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	18	0
13	Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	NA	NA
		Persentase tenaga kerja formal.	40,55	39,53
		Persentase tenaga kerja informal Sektor pertanian.	NA	NA
		Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	NA	NA
		Upah rata-rata per jam pekerja.	74.426 Rupiah	NA
		Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak),	NA	NA
		Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, Jenis pekerjaan dan status	NA	NA



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

		migran,		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	2 Perusahaan	NA
		Proporsi lapangan kerja informasi sector non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	NA	NA
		Persentase akses layanan keuangan formal UMKM	NA	NA
		Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	NA	NA
		Jumlah peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	NA	7.006
14	Dinas Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara	1300	NA
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	3188	NA
		Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	NA	1,14
		Jumlah devisa sektor pariwisata	NA	NA
15	Dinas Pertanian	Penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan	1	1
		Terlaksananya distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh tani dan nelayan	1	1
		Berkembangnya usaha sector pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu	25	25
		Tersalurkannya sarana produksi pertanian,	5	5



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

		peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian / perikanan		
		Penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan	1	1
		Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	NA	NA
16	Dinas Ketahanan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment),	NA	NA
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	NA	NA
		Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal / kapita / hari.	NA	NA
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	86,67	88,20
17	Disperindag	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industry.	3,59%	NA
		Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	1,55%	NA
		Proporsi nilai tambah sector industry manufaktur	NA	NA



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

		terhadap PDB dan perkapita		
		Laju pertumbuhan PDB manufaktur	NA	NA
18	Setda Bagian Ortala	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	0,25%	0,98%
19	Setda Bagian ULP	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan	NA	NA
20	Setda	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	2	NA
		Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui siding di luar Gedung pengadilan ; pembebasan biaya perkara; dan pos layanan hukum	NA	NA
		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	NA	NA
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk pemerintah daerah	NA	38,21
		Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	NA	NA



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

21	Setwan	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	8,6%	8,57%
22	Bappeda dan Litbang	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam forum dialog perencanaan pembangunan kota berkelanjutan	8	8
23	BPKAD	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	92	98
		Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	WTP	WTP
		Pengeluaran untuk layanan pokok (Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	30,5	37
		Proporsi sumber daya yang di alokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	28	28
24	BAPENDA	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB,	NA	NA
		Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	NA	NA



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

25	Satpol PP	Angka Korban kejahatan pembunuhan per 100000 penduduk	NA	1:100.000
		Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	NA	4
		Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	10	0,06
		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	NA	NA
26	Inspektorat	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	55	70,04

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terkait dengan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota dapat dirangkum dalam bentuk tabel, yang terlihat pada Tabel 2.88.

Tabel 2.89 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022

No	Aspek /Fokus/urusan/Capaian kinerja pembangunan daerah	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku (juta rupiah)					
1.1.1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.577.061,42	1.631.443,15	1.663.694,62	1.789.354,60	1.901.459,8
1.1.2	Pertambangan dan Penggalian	184.319,43	196.811,49	195.313,17	205.994,00	217.872,3
1.1.3	Industri pengolahan	533.467,85	568.623,72	577.826,95	614.256,40	701.696,6
1.1.4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.012,34	4.348,37	4.872,59	5.249,30	5.638,0
1.1.5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang	1.722,16	1.819,09	1.943,46	2.016,60	2.022,8
1.1.6	Konstruksi	547.511,07	569.873,48	567.280,16	602.028,60	635.273,0
1.1.7	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	927.971,02	1.044.885,95	1.078.738,52	1.155.484,10	1.281.072,8
1.1.8	Transportasi dan Pergudangan	84.363,52	91.336,74	88.454,79	84.048,80	95.933,0
1.1.9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82.010,12	92.746,84	90.017,98	93.775,40	102.887,4
1.1.10	Informasi dan Komunikasi	46.367,55	50.767,22	55.982,76	59.268,60	63.091,4
1.1.11	Jasa Keuangan dan Asuransi	104.999,83	106.544,60	108.141,37	116.274,50	121.385,5
1.1.12	Real Estat	238.839,53	256.851,26	259.402,20	266.747,10	279.474,4
1.1.13	Jasa Perusahaan	1.331,89	1.473,56	1.495,64	1.524,20	1.572,1
1.1.14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	202.547,50	204.485,69	215.555,89	225.233,70	234.018,1
1.1.15	Jasa Pendidikan	78.920,32	83.759,23	86.273,92	89.090,20	95.971,7
1.1.16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34.599,76	37.475,48	42.113,26	43.400,30	45.524,1
1.1.17	Jasa lainnya	45.090,77	48.933,43	50.644,42	51.374,70	53.074,0
	Total	4.695.136,07	4.992.179,29	5.087.751,68	5.405.121,00	5.837.967,0
1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,23	3,62	0,09	3,82	4,95
1.3	Laju Inflasi Kota Lubuklinggau	2,42	2,10	1,97	1,630	5,830
1.4	PDRB Perkapita (juta rupiah) atas harga berlaku	18,99	19,92	15,61	15,68	16,32
1.5	Indeks Gini	0,33	0,32	0,38	0,36	0,33
2	Fokus Kesejahteraan Sosial					
2.1	Pendidikan					
2.1.1	Angka Melek Huruf (%)	98,26	98,55	99,29	99,08	98,87
2.1.2	Angka Rata-rata lama sekolah (Th)	7,38	7,39	7,60	7,64	7,65
2.1.3	APK SD/MI/Paket A (%)	110,65	114,32	114,32	112,38	115,12
2.1.4	APK SMP/MTs/Paket B (%)	93,81	88,07	89,21	91,08	91,20
2.1.5	APK SMA/SMK/MA/Paket C (%)	-	84,96	85,64	88,03	88,45
2.1.6	APM SD/MI/Paket A (%)	99,59	99,22	99,36	99,14	99,96
2.1.7	APM SMP/MTs/Paket B (%)	86,38	83,17	83,07	83,67	84,65
2.1.8	APM SMA/SMK/MA/Paket C (%)	-	61,36	62,27	61,39	60,68
2.2	Kesehatan					
2.2.1	Angka kematian bayi	5,08	2,06	3,69	1,73	1,35
2.2.2	Angka Harapan Hidup (Th)	64,56	64,81	65,08	65,13	65,45
2.2.3	Angka Kematian Ibu	52,65	34,45	52,85	0,00	38,53
B.	Aspek Pelayanan Umum					
1	Pelayanan Urusan Wajib					
1.1	Pendidikan					
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah					
1.1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah 7-12	99,67	100,00	99,96	99,65	99,96
1.1.1.2	Angka Partisipasi Sekolah 13-15	100,0	98,76	98,90	98,90	93,91
1.1.1.3	Angka Partisipasi Sekolah 16-18	67,66	70,31	71,39	71,58	68,28
1.1.2	Rasio Ruang kelas terhadap rombel					
1.1.3	SD	1,14	1,21	1,23	1,23	1,23
1.1.4	SMP	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98
1.1.5	Rasio Guru Mata Pelajaran di SLTP terhadap rombel					
1.1.5.1	PAI	N/A	N/A	0,12	0,12	0,12
1.1.5.2	PKN	N/A	N/A	0,08	0,08	0,08

1.1.5.3	BHS INDONESIA	N/A	N/A	0,17	0,17	0,17
1.1.5.4	BHS INGGRIS	N/A	N/A	0,11	0,11	0,11
1.1.5.5	MATEMATIKA	N/A	N/A	0,16	0,16	0,16
1.1.5.6	IPA	N/A	N/A	0,10	0,10	0,10
1.1.5.7	IPS	N/A	N/A	0,14	0,14	0,14
1.1.5.8	SENI BUDAYA	N/A	N/A	0,03	0,03	0,03
1.1.5.9	PENJAS	N/A	N/A	0,05	0,05	0,05
1.1.5.10	PRAKARYA	N/A	N/A	0,03	0,03	0,03
1.1.6	Rasio Kelas terhadap murid					
1.1.6.1	SD/MI	0,053	0,061	0,061	0,063	0,063
1.1.6.2	SLTP/SMP/MTs	0,03	N/A	0,03	0,03	0,03
1.2	Kesehatan					
1.2.1	Angka Kematian Ibu	52,65	34,45	52,85	0,00	38,53
1.2.2	Angka Kematian Bayi (neonata) per 1000 KH	5,08	2,06	3,69	0,2	0,2
1.2.4	Nilai Kabupaten Sehat (persentase)	*	*	20	20	20
1.2.5	Persentase Penduduk Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan (UHC)	55,57	57,13	68,71
1.2.6	Cakupan Layanan Penyakit Menular (%)	*	100	100	100	100
1.2.7	Cakupan Diteksi Dini Pnyakit Tidak Menular (%)	*	100	100	100	100
1.2.8	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD	-	80,14	82,25	82,47	82,38
1.2.9	Nilai akreditasi	perdana	perdana	perdana	perdana	perdana
1.2.10	Persentase pencapaian SPM RSUD	*	*	*	63	77
1.2.11	Persentase tenaga medik dan para medik yang memiliki sertifikat kompetensi	*	*	*	83	88
1.2.12	Persentase tenaga medik, para medik dan non medik yang lulus pelatihan dengan kategori baik	*	*	*	88	83
1.2.13	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit pada 4 layanan dasar	*	*	*	87%	94,4
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.3.1	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum aman	0	0	0	0	0
1.3.2	Persentase rumah tangga yang terlayani sanitasi (air limbah aman)	0	0	0	0	1,97
1.3.3	Persentase jalan dalam kondisi baik	42,72	41,90	59,31	50,313	55,88
1.3.4	Persentase irigasi dalam kondisi baik	80,04	86,21	81,90	70,40	48,01
1.3.5	Persentase luas baku daerah irigasi kewenangan kabupaten yang terlayani jaringan irigasi dalam kondisi baik	*	*	*	*	28,7
1.3.6	Persentase Kepatuhan PBG	*	*	*	*	100
1.3.7	Persentase bangunan gedung dan arsitektur prasarana pemerintah dan kepentingan strategis pemerintah kabupaten yang ditangani	*	*	*	*	0
1.3.8	Persentase Tenaga Jasa Konstruksi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	*	*	*	*	0
1.3.9	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	*	*	*	45,89	35
1.3.10	Persentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	*	*	*	*	100
1.3.11	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	*	*	*	*	75
1.3.12	Persentase bangunan gedung dan arsitektur prasarana pemerintah dan kepentingan strategis pemerintah kabupaten yang ditangani	*	*	*	24,66	25
1.3.13	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	*	*	*	24,78	25
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
1.4.1	Persentase rumah layak huni	*	45	51,29	52,74	53,66

1.4.2	Persentase rumah tidak layak huni tertangani	*	*	*	52,74	53,66
1.4.3	Luasan industri kumuh (Ha)	25,31	32,35	31,41	51,7	95,76
1.4.4	Persentase kepemilikan lahan pemerintah yang sah dan bebas konflik	*	*	*	*	39
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
1.5.1	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	...	47,88	49,65	31,50	20
1.5.2	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban, Ketentraman, Dan Kenyamanan (K3)	50	47,88	49,65	66	14
1.5.3	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda Dan Perkada Yang Ditindak Lanjuti	5	100	67	100	100
1.5.4	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	0,0162	0,0212	0,0242	0,0784	0,0886
1.5.5	Persentase desa rawan bencana	*	*	*	*	2,12
1.5.6	Nilai desa rawan bencana di desa rawan bencana	*	*	*	35	35
1.5.7	Persentase kejadian yang ditangani sesuai waktu tanggap	*	*	*	70	70
1.5.8	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana yang terjadi	*	*	*	*	6
1.5.9	Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai standar	*	*	*	92	92
1.5.10	Persentase sdm pemadam dan penyelamatan yang sesuai standar	*	*	*	0	21
1.5.11	Persentase kejadian yang ditangani sesuai waktu tanggap	*	*	*	94	57
1.6	Sosial					
1.6.1	Rasio PPKS Terhadap Jumlah Penduduk	*	*	*	*	3,3
1.6.2	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	*	*	*	*	55
1.6.3	Persentase Akurasi Data Kesejahteraan Sosial	*	*	*	*	70
1.6.4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pasca Bencana Sesuai Standar	*	*	*	*	100
1.6.6	Persentase Sarana Prasarana Sosial Sesuai Standar	*	*	*	*	80
2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
2.1	Tenaga Kerja					
2.1.1	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (%)	2,28	2,64	3,61	2,41	3,59
2.1.2	Tingkat produktivitas tenaga kerja	*	*	*	*	2,40
2.1.3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (pp/pkb/lks/bipartit/skala upah & kepersertaan bpjs yang terdaftar)	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,24	93,16	93,38	93,32	93,47
2.2.2	Kabupaten Layak Anak	*	*	168,6	-	600
2.2.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,7	56,93	55,87	58,3	55,03
2.1	Lingkungan Hidup					
2.1.1	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	*	*	67,66	67,66	69,99
2.1.2	Indek Kualitas Air	*	*	58,33	58,33	65
2.1.3	Indek Kualitas Udara	*	*	89,77	89,77	92,64
2.1.4	Indek Kualitas Lahan	*	*	42,79	42,79	36,69
2.1.5	Laju penurunan tingkat pencemaran	*	*	*	*	1
2.1.6	Persentase Usaha/Kegiatan yang Mematuhi Lingkungan Hidup	*	*	*	*	61,40
2.1.7	Laju penurunan kualitas air	*	*	*	*	1
2.1.8	Laju penurunan kualitas udara	*	*	*	*	0
2.1.9	Tutupan lahan pengurangan timbulan sampah	*	*	*	50	6

2.1.10	Laju penurunan kualitas tutupan lahan	*	*	*	*	0
2.1.11	Pengurangan timbulan sampah	*	*	*	*	12
2.1.12	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup	*	*	*	*	3,90
2.2	Administrasi Kependudukan dan Capil					
2.2.1	Indeks kepuasan masyarakat disdukcapil	0	76,70	76,80	76,9	84,43
2.2.2	Persentase data adminduk yang di validasi	0	100%	100%	100%	100%
2.2.3	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang akurat	0	59,69%	75,54%	75,54%	82,65%
2.2.4	Persentase data adminduk yang termuktahirkan	*	*	*	100	100
2.2.5	Persentase peningkatan pelayanan SIAK online	*	*	*	19,36	55,14
2.3	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
2.3.1	Indeks Desa Membangun	*	*	0,6206	0,6261	0,6408
2.3.2	Persentase desa berkembang	*	62,585	78,231	82,313	93,197
2.3.3	Persentase Desa Yang Terlibat dalam Kerjasama dalam Peningkatan Desa	0	0	0	6	7,4
2.3.4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang Aktif	*	*	*	44,64	59,75
2.4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
2.4.1	Laju pertumbuhan penduduk	1,22	...	0,29	4,04	4,04
2.4.2	Indeks pembangunan keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	53,42
2.4.3	Persentase keluarga beresiko stunting	*	*	*	68,43	38,508
2.4.4	Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 Tahun	N/A	N/A	N/A	N/A	55
2.4.5	Total fertility rate (TFR)	*	6,236	11,917	2,96	2,96
2.4.6	Persentase tribina aktif	*	5	47	100	100
2.4.7	Persentase UPPKA AKTIF	100	100	100	100	44
2.4.8	Persentase Kampung KB Mandiri	0	0	0	0	1,28
2.5	Perhubungan					
2.5.1	Ratio konektivitas transportasi wilayah	*	*	*	0,30	0,50
2.5.2	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	*	*	*	46,52	55,45
2.6	Komunikasi dan Informatika					
2.6.1	Nilai/ Indeks SPBE	N/A	1,6	1,6	2,23***	2,66***/1,86
2.6.2	Domain Kebijakan SPBE	N/A	1,12	N/A	2,6***	2,6***/1,8
2.6.3	Tata kelola SPBE	N/A	1,29	N/A	1,6***	2,9***/1,1
2.6.4	Manajemen SPBE	N/A	1,91	N/A	1***	2,45***/1
2.6.5	Layanan SPBE	N/A	2,08	N/A	2,92***	2,62***/2,6
2.6.6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi	*	*	*	75	75
2.6.7	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan daerah	*	*	*	100	100
2.7	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
2.7.1	Persentase koperasi sehat (%)	17,40	19,40	19,74	40	28,57
2.7.2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	3008	4016	17860	28118	28118
2.7.3	Persentase peningkatan volume usaha umkm	*	*	*	45	45
2.7.4	Persentase produk umkm yang masuk pasar	*	*	*	29	29
2.7.5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	*	*	*	1,06	1,06
2.7.6	Persentase peningkatan laba usaha koperasi	*	*	*	9	0
2.7.7	Persentase pelaporan rat koperasi tepat waktu	*	*	*	6,45	0
2.7.8	Cakupan bina koperasi	*	*	*	16,12	0
2.8	Kepemudaan dan Olahraga					
2.8.1	Persentase desa yang aktif mengikuti even olahraga	*	*	13,6	15,6	16,6
2.8.2	Persentase kenaikan perolehan medali dalam porprov	7,5	-
2.8.3	Jumlah atlet berprestasi	17	50	67

2.8.4	Persentase desa yang melaksanakan germas olahraga	*	*	*	30,61	32
2.8.5	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	N/A	N/A	N/A	17,2	19,53
2.8.6	Jumlah Pemuda yang Berwirausaha	*	*	*	36	36
2.8.7	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	*	*	*	2,15	2,76
2.9	Perpustakaan					
2.9.1	Jumlah pengunjung perpustakaan	7200	9993	2275	2290	2610
2.9.2	Indeks peningkatan literasi masyarakat	*	*	*	*	50,61
2.9.3	Survei Kepuasan Masyarakat	*	80,25	81,47	76,60	85,03
2.9.4	Tingkat gemar membaca	*	*	*	...	61,03
3	Urusan Pilihan					
3.1	Pariwisata					
3.1.1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,75	1,86	1,77	1,73	1,76
3.1.2	Persentase Destinasi Pariwisata Yang dikembangkan	*	*	*	57%	66%
3.1.3	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	*	*	*	16%	15%
3.1.4	Persentase Rata-rata pertumbuhan volume usaha sektor ekraf	*	*	*	10%	18%
3.1.5	Persentase SDM Ekraf yang Berinovasi	*	*	*	10%	0
3.2	Pertanian					
3.2.1	Produksi tanaman pangan					
3.2.1.1	padi	120.413	99.256	130.159	136.125	168.038
3.2.1.2	jagung	20.497	10.769	18.130	22874	56.013
3.2.2	Produksi tanaman hortikultura	141.350,40	203.507,00	2.402,69	5.250,36	6.246,40
3.2.3	Produksi tanaman perkebunan	110,2	110,2	76.062,7	...	76.022
3.2.4	Populasi ternak	8.597	165.250	142.872	151.154	135.856
3.2.5	Produksi tanaman pangan					
3.2.5.1	padi	120.413	99.256	130.159	136.125	168.038
3.2.5.2	jagung	20.497	10.769	18.130	22874	56.013
3.3	Perindustrian					
3.3.1	LPE PDRB sektor perindustrian	5,86	5,54	0,3	2,20	9,33
3.3.2	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	*	*	*	*	2,02
3.3.3	Persentase produk ikm yang dipasarkan	*	*	*	*	4,05
4	Urusan Fungsi Penunjang					
4.1	Administrasi Pemerintahan					
4.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	*	*	37,15	38,21	42,73
4.1.2	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi				
4.1.3	Nilai persepsi kualitas pelayanan publik	N/A	77,31	77,31	83,73	92,70
4.1.4	Indeks hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik -DPM-PTSP -Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*	*	*	*	4 3,8
4.1.5	IKM kabupaten	*	68,228	80,495	77,812	91
4.1.6	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	*	*	*	29,33	21,3
4.1.7	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM) Pelayanan Perizinan Terpadu	65	70	75	76,6	85,36
4.2	Pengawasan					
4.2.1	Level Maturitas SPIP	1,7	1,7	1,7	1,7	3
4.2.2	Level Kapabilitas APIP	2	2	2	2	2+
4.2.3	Persentase OPD yang menuju maturitas SPIP level 3	*	*	*	*	84
4.2.4	Nilai program preventif pencegahan korupsi (MCP)	*	*	*	*	58

4.2.5	Indeks Integritas Daerah	*	*	*	*	62,74
4.3	Perencanaan					
4.3.1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	20,88	32,77	36,08	36,37	40,81
4.3.2	Persentase Kesesuaian Sasaran Antar Dokumen Perencanaan Daerah	100	100	100	100	100
4.3.3	Persentase capaian sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi	*	*	*	*	56
4.3.4	Indek Inovasi Daerah	0	0	1722	44,45	56,37
4.3.5	Persentase Inovasi Daerah Yang Difasilitasi Sesuai Standar	0	0	0	0	80
4.3.6	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	0	0	100	100	100
4.4	Keuangan					
4.4.1	Indeks IPKD	47,7912	44,1826	26,4374	57,8328	Nilai belum keluar
4.4.2	Derajat fiskal otonomi daerah	3,29	3,93	3,16	2,67	3,40
4.4.3	Nilai Pendapatan Daerah	...	1.057.873.51 9.762,13	1.067660.574 .419,07	1.041.111.08 3.451,10	1.241.898.94 4.678,91
4.4.4	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	...	41.672.141.4 81,16	33.740.140.7 13,07	27.846.959.2 36,30	31.513.950.0 23,71
4.4.5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Pendapatan Daerah	*	*	*	83,58	84,39
4.5	Kepegawaian					
4.5.1	Persentase pengisian jabatan struktural dalam struktur organisasi	71	83	84	71	83
4.5.2	Persentase pejabat yg telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	80,31	81,17	80,06	80,31	81,17
4.5.3	Indeks Merit Sistem	*	*	*	137	145
C	Aspek Daya Saing Daerah					
1	Rata-rata Pengeluaran konsumsi RT (Rumah Tangga) per kapita dalam sebulan	431.863	383.151	428.302	442.209	509.938
2	Rata-rata Pengeluaran konsumsi RT (Rumah Tangga) per kapita non pangan dalam sebulan	311.921	269.977	356.945	328.729	398.837
D	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
1	Jumlah Org/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun	0	0	0	0	0
E	Fokus Iklim Berinvestasi					
1	Jumlah tindak pidana (kasus)*	179	184	56	84	228
2	Jumlah laporan gangguan Ketertiban, Ketentrangan, dan Kenyamanan (K3)**	307	160	147	73	50
F	Fokus Sumber Daya Manusia					
1	Rasio Ketergantungan	52,27	52,05	51,83	39,47	28,50
2	Rasio lulusan Perguruan Tinggi	0,086	-	-	0,101	0,038
3	Rasio lulusan Perguruan Tinggi	0,004	-	-	0,000	0,006

Sumber: Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, 2023

Keterangan: * Indikator baru

*) Data dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Direktorat Lalu Lintas Polri melalui website BPS <https://sumsel.bps.go.id/indicator/34/246/1/jumlah-tindak-pidana.html>)

**) Data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Empat Lawang



**BAB
III**

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kabupaten Empat Lawang dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan (*money follow priority program*). Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk memberi gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2019–2020 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu analisis pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 mulai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Analisis tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun 2024-2026 untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Empat Lawang 2018-2023

Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu sebelum penentuan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Empat Lawang lima tahun kedepan harus melihat kinerja keuangan 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

Oleh karena itu, supaya penjelasan kinerja pengelolaan keuangan daerah lima tahun lalu dapat disinkronisasi dengan proyeksi tahun 2024-2026 mendatang, maka analisis kinerja pelaksanaan APBD untuk tahun 2018-2022 dikonversikan dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Empat Lawang dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2018-2022 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PENDAPATAN	978.525.924.037,40	1.057.873.519.762,13	1.067.660.574.419,07	1.041.111.083.451,10	1.256.726.813.858,91	6,814377978
1.1	Pendapatan Asli Daerah	32.127.399.527,96	41.672.141.481,16	33.740.140.713,07	27.846.959.236,30	51.607.398.805,75	19,63335896
1.1.1	Pajak daerah	10.420.395.313,18	10.910.863.344,00	8.103.812.852,00	8.673.215.044,00	10.757.093.204,00	2,508158813
1.1.2	Retribusi daerah	463.950.000,00	566.364.750,00	593.078.000,00	627.345.000,00	574.248.000,00	6,026299644
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	4.864.464.953,01	5.293.816.014,69	6.301.213.492,36	7.277.639.481,78	8.258.532.910,09	14,2074998
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	16.378.589.261,77	24.901.097.372,47	18.742.036.368,71	11.268.759.710,52	32.017.524.691,66	42,88809245
1.2	Pendaatan Transfer	864.007.169.628,45	764.373.334.875,00	936.080.194.958,00	959.904.540.703,80	1.200.170.946.027,16	9,626875543
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	857.460.415.901,00	708.650.914.858,00	843.267.529.751,00	803.929.909.129,00	979.315.726.469,00	4,698164274
1.2.1.1	Dana perimbangan	745.236.496.901,00	708.650.914.858,00	705.454.756.751,00	673.205.039.129,00	842.332.177.469,00	3,79773033
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	557.318.484.618,00	581.621.212.006,00	568.845.967.478,00	489.901.162.728,00	616.553.064928,00	3,534660691
1.2.1.1.1.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	132.507.141.618,00	138.637.063.006,00	168.298.019.478,00	104.919.260.708,00	219.746.022.615,00	24,45127883
1.2.1.1.1.2	Dana alokasi umum (DAU)	424.811.343.000,00	442.984.149.000,00	400.547.948.000,00	384.981.902.020,00	396.807.042.313,00	-1,529086471
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	187.918.012.283,00	127.029.702.852,00	136.608.789.273,00	183.303.876.401,00	225.779.112.541,00	8,123235338
1.2.1.1.2.1	Dana alokasi khusus (DAK)	187.918.012.283,00	127.029.702.852,00	136.608.789.273,00	183.303.876.401,00	225.779.112.541,00	8,123235338



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

1.2.1.2	Dana Insetif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	11.438.388.000,00	25
1.2.1.3	Dana Otonomi khusus	112.223.919.000,00	0,00	137.812.773.000,00	0,00	0,00	-25
1.2.1.4	Dana Desa	0,00	0,00	0,00	130.724.870.000,00	125.545.161.000,00	24,00942548
1.2.2	Transfer Antar Daerah	6.546.753.727,45	55.722.420.017,00	92.812.665.207,00	155.974.631.574,80	220.855.219.558,16	231,8395968
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	50.116.237.564,00	57.710.665.961,23	28,78840709
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	6.546.753.727,45	55.722.420.017,00	92.812.665.207,00	105.858.394.010,80	163.144.553.596,93	221,4700365
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	6.546.753.727,45	55.722.420.017,00	92.812.665.207,00	105.858.394.010,80	163.144.553.596,93	221,4700365
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	82.391.354.880,99	1.050.611.964.092,00	328.465.676.955,00	53.359.583.511,00	4.948.469.026,00	232,9828611
1.3.1	Hibah	34.944.357.418,00	45.969.384.400,47	48.355.753.755,00	11.153.717.979,00	4.825.148.126,00	-24,2330365
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	47.446.997.462,99	77.717.568.952,91	49.484.484.993,00	0,00	0,00	-18,1322732
1.3.4	Lain-lain pendapatan	0,00	128.141.090.052,59	0,00	42.205.865.532,00	123.320.900,00	0,073047252
	Total Pendapatan	978.525.924.037,40	1.057.873.519.762,13	1.067.660.574.419,07	1.041.111.083.451,10	1.256.726.813.858,91	6,814377978
2	Belanja Daerah				1.147.048.256.792,70	1.254.319.518.330,28	
2.1	Belanja Operasi	719.642.801.055,99	606.033.184.391,00	590.994.045.323,82	600.815.722.794,76	625.943.634.733,20	-3,106081319
2.1.1	Belanja pegawai	461.598.852.992,00	288.112.805.166,00	284.016.796.347,00	278.273.358.814,00	298.390.429.397,00	-8,449591042
2.2.2	Belanja barang dan jasa	257.993.948.063,99	310.245.279.225,00	297.422.498.976,82	311.415.716.762,96	305.358.976.606,00	4,719935416
	Belanja bunga				2.675.746.952,80	12.221.707.180,20	114,1896767
2.1.3	Belanja subsidi	0,00	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	8,333333333
2.1.4	Belanja Hibah	0,00	7.150.300.000,00	8.387.750.000,00	8.050.900.265,00	9.654.521.550,00	33,30220702
2.1.4	Belanja bantuan sosial	50.000.000,00	224.800.000,00	767.000.000,00	0,00	318.000.000,00	147,6980427
2.2	Belanja modal	248.436.146.175,13	253.146.653.391,00	278.168.446.646,35	376.713.981.326,94	444.846.270.831,08	16,32322144
2.3	Belanja tidak terduga	0,00	375.079.850,00	10.505.979.367,00	2.433.375.671,00	0,00	656,0399721
2.4	Belanja Transfer	151.768.598.787,00	191.057.046.460,00	187.446.882.750,00	167.085.177.000,00	183.529.612.766,00	5,744198281
2.4.1	Belanja bagi hasil	1.142.209.163,00	2.317.209.163,00	1.150.088.930,00	1.640.940.000,00	4.785.732.000,00	71,70712381
2.4.2	Belanja bantuan keuangan	150.626.389.624,00	188.739.837.297,00	186.296.793.820,00	165.444.237.000,00	178.743.880.766,00	5,213614634
	Total Belanja	968.028.947.231,12	1.050.611.964.092	1.067.115.354.087,17		1.254.319.518.330,28	6,736095669
	Surplus/Defisit	10.498.289.306,28	7,261,555,670	545,220,331,90	(105.937.173.341,60)	2.407.295.528,63	-4938,938346
3.	Pembiayaan						
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	16.262.553.827,91	26.831.570.408,80	23.044.576.478,93	147.176.607.988,83	56.521.680.347,23	131,9851082
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	15.896.175.305,67	26.831.570.408,80	22.736.413.478,93	21.589.922.703,83	39.244.434.647,23	32,5649077



	a						
3.1.2	Penerimaanpiutang daerah	0,00	0,00	308.163.000,00	178.644.000,00	17.277.245.700,00	2407,324446
3.1.3	Penerimaan Dana Talangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	11.303.708.300,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	10.780.000.000,00	114,1733272
3.2.1	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah/ BUMD	0,00	5.650.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5.780.000.000,00	56,09955752
	Pembayaran Pokok Utang	0,00	5.653.708.300,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	25
3.2.2	Jaminan Kredit Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.2.3	Dana Talangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Pembiayaan Netto	366.378.522,24	15,527,862,109	21,044,576,478,93	145.176.807.988,83	45.741.680.347,23	1173,772817
	Sisa Lebih Anggaran	26.760.843.134,19	22,789,417,779	21,589,796,810,83	39.239.434.647,23	48.148.975.875,86	21,08777737

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang

a. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar Kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan daerah. Pendapatan daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- 2) Pendapatan Transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat, dan transfer antar-daerah.
- 3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah dari tahun 2018 sampai dengan 2022 rata-rata pertumbuhan mengalami kenaikan.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah ini meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas umum Daerah



yang tidak perlu diterima Kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan social.

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari :

1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempoh, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Defisit Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

3.1.2 Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan mengenai perkembangan neraca daerah, analisis Rasio Likuiditas, Analisis rasio Solvabilitas dan analisis Aktivitas.



Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018– 2022

NO	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
1	Aset	2.075.363.736.688,74	2.138.643.391.091,73	2.180.137.712.261,57	2.409.967.303.294,75		-21,11718
2	AsetLancar	105.528.787.615,15	109.186.513.396,02	84.228.113.618,73	67.634.572.270,26	117.546.996.595,58	8,6760205
3	Kas Di Kas Daerah	24.117.919.356,12	13.938.820.259,19	17.750.106.696,51	37.509.897.761,91	29.551.013.816,54	18,8103565
4	Kas Di BendaharaPengeluaran	1.315.512,00	674.046.515,00	1.580.853.844,00	0,005.083,00	5.000,00	12792,8099
5	Kas di BendaharaPenerimaan	0,00			0,00	53.257.600,00	25
	Kas di BLUD	878.281.375,00	2.647.103.684,00	205.644.477,00	1.022.219.589,00	3.260.388.801,00	
6	KasDibendahara FKTP	1.275.722.568,00	1.058.728.043,00	1.708.938.519,00	184.348.257,00	368.416.215,00	13,7600036
7	Kas dibendahara BOS	91.659.059,68	5.158.694.512,15	11.911.011,73	11.062.359,73	11.184.807,73	1355,58666
8	Kas dibendahara DSG	21.308.984,00	23.181.396,59	23.181.396,59	23.200.680,59	23.200.680,59	2,21753766
9	Kas Lainnya	476.552.479,00	726.430,00	309.371.017,00	503.238.459,00	15.267.688.496,00	11346,14211
10	Piutang Dana Jamkesmas dan Jampersal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10	PiutangPendapatan	69.078.592.966,91	79.936.539.945,65	30.792.081.853,65	20.955.615.083,15	29.655.922.374,15	-
11	PiutangRetribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	PenyisihanPiutang	(3.235.096.846,00)	(3.710.371.488,00)	(4.227.001.997,53)	(4.575.878.848,31)	(5.495.725.091,80)	14,24268899
12	Beban dibayarDimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	468.958.778,56	25
13	PiutangLainnya	20.175.567,00	12.687.129,00	573.143.601,00	23.529.100,99	33.711.460,00	1081,946147
14	Persediaan	12.802.356.593,44	8.841.740.492,44	34.829.850.197,22	11.977.334.744,00	44.348.973.657,81	116,9127322
15	JumlahAsetLancar	105.528.787.615,15	109.186.513.396,02	84.228.113.618,73	67.634.572.270,26	117.546.996.595,58	8,676020498
16	InvestasiJangka Panjang	49.082.270.982,26	52.385.284.441,36	54.161.644.529,36	65.019.914.721,00	69.325.069.343,00	9,19741989
17	InvestasiNonpermanen	290.111.500,00	290.111.500,00	0,00	0,00	0,00	-25
18	Investasi Non Permanen - Dana Bergulir	290.111.500,00	290.111.500,00	0,00	0,00	0,00	-25
19	Investasi Non Permanen - Dana BergulirDiragukan Tertagih	0,00			0,00	0,00	0
20	JumlahInvestasiNonpermanen	290.111.500,00	290.111.500,00	0,00	0,00	0,00	-25
21	InvestasiPermanen						
22	Penyertaan Modal Pada Pemerintah	48.792.159.482,26	52.095.172.941,36	54.161.644.529,36	65.019.914.721,00	69.325.069.343,00	9,351365948
23	InvestasiPermanenLainnya	0,00					
24	JumlahInvestasiPermanen	48.792.159.482,26	52.095.172.941,36	54.161.644.529,36	65.019.914.721,00	69.325.069.343,00	9,351365948
25	JumlahInvestasiJangka Panjang	49.082.270.982,26	52.385.284.441,36	54.161.644.529,36	65.019.914.721,00	69.325.069.343,00	9,19741989
26	AsetTetap	1.839.633.742.621,53	1.922.935.046.868,53	1.991.342.117.459,40	2.217.269.740.206,42	2.659.539.703.342,50	9,844418263
27	Tanah	153.990.020.740,00	155.772.241.740,00	162.830.305.763,00	161.103.072.047,00	161.003.072.047,00	1,141386909
28	Peralatan Dan Mesin	275.749.931.329,28	308.490.774.215,24	362.951.721.463,24	402.709.630.746,94	446.812.608.907,59	12,85824608
29	Gedung Dan Bangunan	539.634.828.990,22	580.541.282.659,22	610.080.852.053,87	677.362.498.865,96	738.230.879.414,95	8,170769742
30	Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	1.561.831.383.881,48	1.705.901.335.970,48	1.821.202.458.034,70	1.972.280.854.309,83	2.272.507.508.739,32	9,875304419
31	AsetTetapLainnya	21.504.695.546,42	28.225.012.847,42	31.174.496.431,42	33.601.034.656,42	35.299.325.658,42	13,63459203
32	KonstruksiDalamPengerjaan	21.479.933.194,79	16.672.722.660,79	22.378.960.617,79	140.751.850.812,61	33.064.329.189,43	116,0708568
	AkumulasiPenyusutan	(734.557.051.060,66)	(872.668.323.224,62)	(1.019.276.676.904,62)	(1.170.539.201.232,34)	(1.342.438.830.601,29)	6,292067322
33	JumlahAsetTetap	1.839.633.742.621,53	1.922.935.046.868,53	1.991.342.117.459,40	2.217.269.740.206,42	2.344.478.893.355,42	6,292067322
34	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	AsetLainnya	81.118.935.469,80	54.136.546.385,82	50.405.836.654,08	60.043.076.097,07	60.431.938.351,93	-5,09677878
37	Tagihan TuntutanGantiKerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TagihanJangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	AsetTakBerwujud	4.718.489.500,00	4.647.556.412,00	197.226.817,00	700.734.380,00	700.734.380,00	39,50850699
39	Aset Lain-Lain	76.400.445.969,80	49.488.989.973,82	50.187.964.337,08	66.111.978.955,07	68.325.079.398,21	0,316106262



40	JumlahAsetLainnya	81.118.935.469,80	54.136.546.385,82	50.405.836.654,08	60.043.076.097,07	60.431.938.351,93	-5.09677878
41	JumlahAset	2.075.363.736.688,74	2.138.643.391.091,73	2.180.137.712.261,57	2.409.967.303.294,75	2.591.783.397.645,92	5.76890 4705
42	Kewajiban						
43	KewajibanJangkaPendek	6.364.299.820,17	23.633.987.260,17	10.637.843.125,71	36.397.468.636,27	149.570.971.901,00	192,3629922
44	Utang PerhitunganPihakKetiga (PFK)	38.677.363,00	61.883.061,00	130.151,00	9.537.543,00	386.679.541,00	2785,6392 52
45	Utang JangkaPendekLainnya	5.315.366.300,00	18.978.289.687,00	4.126.087.078,63	22.454.470.491,00	2.326.220.400,00	133,33848 68
46	Pendapatanditerimadimuka	42.275.339,17	18.248.154,17	17.889.711,58	35.039.907,00	36.921.157,00	10,608967
46	Utang kepadaPihakKetiga						
46	Utang Beban	967.980.818,00	4.575.566.358,00	6.493.736.184,50	6.225.899.326,00	9.135.863.818,00	114,30724 6
47	JumlahKewajibanJangkaPe ndek	6.364.299.820,17	23.633.987.260,17	10.637.843.125,71	36.397.468.636,27	149.570.971.901,00	192,3629922
48	KewajibanJangka Panjang	0,00			120.408.041.285,00		0
49	JumlahKewajibanJangka Panjang	0,00			120.408.041.285,00	137.685.286.985,00	28,58722838
50	JumlahKewajiban	6.364.299.820,17	23.633.987.260,17	10.637.843.125,71	156.805.509.921,27	176.785.994.019,27	346,6942526
51	Ekuitas Dana						
52	Ekuitas Dana Lancar						
53	SisaLebihPembiayaanAnggara n (Silpa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
54	Pendapatan Yang Ditangguhkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
55	Cadangan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
56	Cadangan Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
57	Dana Yang Harus DisediakanUntukMembayarH utangJangkaPendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
NO	Uraian						
58	Dana Yang Harus DisediakanUntukMembayarH utangJangkaPendekLainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
59	JumlahEkuitas Dana Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60	Ekuitas Dana Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
61	DiinvestasikanDalamInvestasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
62	DiinvestasikanDalamAsetTeta p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
63	DiinvestasikanDalamAsetLain nya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
64	JumlahEkuitas Dana Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
65	Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
66	JumlahEkuitas Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
67	Ekuitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
67	JumlahEkuitas Dana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	JumlahKewajiban Dan Ekuitas Dana	2.075.363.736.688,74	2.138.643.391.091,73	2.180.137.712.261,57	2.409.967.303.294,75	2.591.783.397.645,92	
67	Ekuitas	2.068.999.436.868,57	2.115.009.403.831,56	2.169.499.869.135,86	2.253.161.793.373,48	2.442.212.425.744,92	
67	JumlahEkuitas Dana	2.068.999.436.868,57	2.115.009.403.831,56	2.169.499.869.135,86	2.253.161.793.373,48	2.442.212.425.744,92	
68	JumlahKewajiban Dan Ekuitas Dana	2.075.363.736.688,74	2.138.643.391.091,73	2.180.137.712.261,57	2.409.967.303.294,75	2.591.783.397.645,92	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan pada kurun waktu 2018-2022 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan Pendapatan Transfer termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Sebagaimana diuraikan dalam visi misi dan prioritas program pembangunan yang telah diselenggarakan pemerintahan 5 (lima) tahun

sebelumnya disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup, salah satunya tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai melalui penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Dalam upaya terwujudnya *good governance* dibutuhkan pendanaan pemenuhan kebutuhan aparatur yang profesional sebagai penunjang pelayanan publik.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai program prioritas antara lain :

1. Untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Untuk menyelenggarakan urusan wajib dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
3. Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap organisasi perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah akibat dampak pandemic covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah;

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan / pemeriksaan sampai dengan pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik.

Gambaran proporsi realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah
Tahun 2018 – 2022

Belanja Daerah	Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasi										
Belanja Pegawai	297.823.130.863,85	269.723.946.515,00	316.263.422.932,76	288.112.805.166,00	305.687.126.146,00	284.016.796.347,00	281.796.352.058,00	278.273.358.814,00	316.487.921.222,00	298.390.429.397,00
Belanja Barang Jasa	274.896.011.290,65	257.782.366.543,28	346.697.494.332,00	310.245.279.225,00	323.264.313.915,00	297.422.498.976,82	355.876.457.851,00	311.415.716.762,96	341.716.424.736,00	305.358.976.606,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085.768.750,00	2.675.746.952,80	12.236.235.668,00	12.221.707.180,20
Belanja Subsidi	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	57.895.227.950,00	40.322.557.690,00	7.766.500.000,00	7.150.300.000,00	8.387.800.000,00	8.387.750.000,00	8.065.999.565,00	8.050.900.265,00	9.907.951.806,00	9.654.521.550,00
Belanja Bantuan Sosial	75.000.000,00	50.000.000,00	232.000.000,00	224.800.000,00	767.000.000,00	767.000.000,00	0,00	0,00	935.600.000,00	318.000.000,00
Belanja Modal	264.934.088.338,00	248.436.146.175,13	288.896.919.505,00	253.146.653.391,00	293.149.598.016,00	278.168.446.646,35	455.091.035.839,00	376.713.981.326,94	462.520.938.368,00	444.846.270.831,08
Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0,00	2.743.000.000,00	375.079.850,00	14.467.500.000,00	10.505.979.367,00	4.467.147.054,00	2.433.375.671,00	2.214.822.488,00	0,00
Belanja Transfer							167.219.987.791,00	167.085.177.000,00	183.727.293.500,00	183.529.612.766,00
Belanja Bagi Hasil	1.142.209.163,00	1.142.209.163,00	2.317.209.163,00	2.317.209.163,00	1.150.009.163,00	1.150.008.930,00	1.679.202.671,00	1.640.940.000,00	4.961.000.000,00	4.785.732.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	150.945.454.380,00	150.626.389.624,00	192.828.617.649,30	188.739.837.297,00	186.360.437.533,00	186.296.793.820,00	165.540.785.120,00	165.444.237.000,00	178.766.293.500,00	178.743.880.766,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Empat Lawang



Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2018–2022 proporsi rata- rata penggunaan anggaran belanja tidak langsung terhadap jumlah anggaran belanja sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan belanja modal.

Adapun analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebagaimana dapat dijelaskan dalam tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018– 2022

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur(Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase $\frac{3}{4} \times 100\%$
1	2	3	4	5
1	2018	269.723.946.515,00	816.315.016.923,41	26.67%
2	2019	288.762.805.166,00	870.858.625.932,00	25.40%
3	2020	284.016.796.347,00	881.668.471.337,17	25.10%
4	2021	281.796.352.058,00	1.282.502.748.908	21,97%
5	2022	316.488.062.622,00	1.340.847.187.788	23,60%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Empat Lawang

Berdasarkan hasil analisis proporsi total belanja untuk kebutuhan Aparatur terhadap total pengeluaran selama 5 (lima) tahun yang lalu tercermin bahwa proporsi belanja pemenuhan aparatur secara umum mengalami penurunan terhadap total pengeluaran. Persentase yang semakin besar menunjukkan bahwa proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur masih lebih besar dibandingkan dengan total pengeluaran. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Empat Lawang belum sepenuhnya menerapkan efisiensi anggaran yang tersedia. Belum efisiennya pengelolaan keuangan daerah dari proporsi belanja pemenuhan aparatur dengan total belanja disebabkan oleh total pendapatan daerah masih didominasi dari Dana Perimbangan dibandingkan dengan total Pendapatan Asli Daerah.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja

sejenis lainnya. Sedangkan, belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Dalam bagian ini diuraikan mengenai analisis pembiayaan. Pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan ditampilkan pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Defisit Anggaran Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	978.617.329.498,15	1.057.873.519.762,13	1.067.660.574.419,07	1.041.111.083.451,10	1.256.726.813.858,91
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	816.315.016.923,41	860.204.917.632,00	879.668.471.337,17	1.147.048.256.792,70	1.254.319.518.330,28
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	10.653.708.300,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5.780.000.000,00
A	Defisit riil	162,302,312,575	187,014,893,830	185,992,103,082	(107.937.173.341,60)	(3.372.704.471,37)

Untuk menutupi defisit Riil ditampilkan tabel 3.6

Tabel 3.6
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	16.329.045.546,06	26.831.570.408,80	22.736.413.478,93	21.589.922.703,83	39.244.434.647,23
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	125.408.041.285,00	17.277.245.700,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	308.163.000,00	178.644.000,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang



Selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2022 tahun 2018, 2019 dan 2020 yang tidak mengalami defisit sedangkan pada tahun anggaran 2021 mengalami defisit sebesar Rp. 107.937.173.341,60 yang akan ditutupi dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenan sebesar Rp 147.176.607.988,83. Sementara pada tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp. 3.372.704.471,37 yang akan ditutupi dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenan sebesar Rp. 56.521.680.347,23 Secara umum bahwa peningkatan sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya mencerminkan belum optimalnya penyerapan anggaran yang dialokasikan dan penetapan defisit anggaran berada pada batas aman dalam 5 (lima) tahun berjalan.

Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ditampilkan dalam tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Empat Lawang

NO	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022		Rata-rata pertum buhan
		Rp	% dari Silpa									
1	Jumlah SiLPA	26.862.759.333,80	100	22.789.417.778,93	100	21.589.876.810,83	100	39.239.434.647,23	100	48.148.975.875,86	100	21,007
2	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pelampauan penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Empat Lawang

3.3 Kerangka Pendanaan

Setelah menganalisis kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai kerangka keuangan, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan periode tahun 2024-2026. Perkiraan kapasitas riil kemampuan daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk daerah dapat menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) Pendapatan Transfer; dan c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Proyeksi APBD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 disajikan dalam tabel 3.8 di bawah ini :

Tabel 3.8
Proyeksi APBD Kabupaten Empat Lawang 2024-2026

No	Uraian	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	1.108.595.484.222	1.134.723.802.208	1.166.316.728.160
4,1	Pendapatan Asli Daerah	88.510.000.000	93.909.200.000	99.096.552.000
4.1.01	Pajak daerah	45.060.000.000	48.214.200.000	51.107.052.000
4.1.02	Retribusi daerah	4.950.000.000	5.445.000.000	5.989.500.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	8.500.000.000	8.750.000.000	9.000.000.000
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	30.000.000.000	31.500.000.000	33.000.000.000
4,2	Pendapatan Transfer	1.005.885.484.222	1.026.114.602.208	1.052.520.176.160
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	940.522.073.725	960.751.191.711	987.156.765.663
4.2.1.1	Dana Perimbangan	814.980.850.725	835.209.968.711	861.615.542.663
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	576.519.467.425	590.932.454.111	605.705.765.463
4.2.1.1.1.1	Dana Bagi hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	152.230.979.725	156.036.754.218	159.937.673.074
4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	424.288.487.700	434.895.699.893	445.768.092.390
4.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	238.461.383.300	244.277.514.600	255.909.777.200
4.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus	238.461.383.300	244.277.514.600	255.909.777.200
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-
4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
4.2.1.4	Dana Desa	125.541.223.000	125.541.223.000	125.541.223.000
4.2.2.	Transfer Antar Daerah	65.363.410.497	65.363.410.497	65.363.410.497
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	65.363.410.497	65.363.410.497	65.363.410.497
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-
4,3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	14.200.000.000	14.700.000.000	14.700.000.000
4.3.1	Hibah	5.000.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
4.3.2	Dana Darurat			
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	9.200.000.000	9.200.000.000	9.200.000.000
5	BELANJA DAERAH	1.122.595.484.222	1.137.223.802.207	1.167.816.728.161
5,1	Belanja Operasi	688.800.149.916	654.100.441.461	675.828.183.392



5.1.1	Belanja Pegawai	338.452.601.366	346.913.916.400	355.586.764.310
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	286.151.158.000	302.885.224.747	315.832.586.260
5.1.3	Belanja Bunga	-		
5.1.4	Belanja Subsidi	-		
5.1.5	Belanja Hibah	63.822.265.550	3.917.822.189	4.015.767.743
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	374.125.000	383.478.125	393.065.078
5,2	Belanja Modal	233.359.803.454	280.859.197.615	287.880.677.555
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.148.824.100	1.177.544.703	1.206.983.320
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.428.269.000	36.313.975.725	37.221.825.118
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.337.425.000	24.695.860.625	25.313.257.141
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.189.852.854	216.359.998.250	221.768.998.206
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.255.432.500	2.311.818.313	2.369.613.770
5,3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
5,4	Belanja Transfer	190.435.530.852	192.264.163.131	194.107.867.214
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.001.000.000	5.365.920.000	5.709.655.200
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	185.434.530.852	186.898.243.131	188.398.212.014
5.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
5.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	185.434.530.852	186.898.243.131	188.398.212.014
	Suplus / Defisit	(14.000.000.000)	(2.500.000.000)	(1.500.000.000)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
6.1.1	SILPA	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah			
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
6,2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.000.000.000	7.500.000.000	8.500.000.000
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang Jatuh Tempo	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000	7.500.000.000	8.500.000.000
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	Pembiayaan Netto	14.000.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0	0	0

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Empat Lawang

Berdasarkan data pada Tabel 3.8 diatas Pendapatan Daerah di proyeksikan mengalami peningkatan setiap tahun nya dimana pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.108.595.484.222, lalu pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat lagi menjadi Rp. 1.134.723.802.208, dan pada tahun 202 diproyeksikan kembali meningkat sebesar Rp. 1.166.316.728.160.

Selain sumber pendanaan APBD dan APBN Kabupaten Empat Lawang juga melakukan kerjasama dengan beberapa Bank dan perusahaan yang ada di Empat Lawang melalui pendanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Empat Lawang.

Berdasarkan hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Forum CSR kab. Empat Lawang Tahun 2023 yang Dituangkan Dalam Berita Acara Nomor : 50/201.a/BAPPEDALITBANG/2022, Program Prioritas Forum CSR sebagai berikut : Bakti Sosial Sembako Bersubsidi, Khitanan Massal, Bupati Cup (Lomba Bola Voly & Bola Kaki), dan Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran.

Berikut proyeksi pendanaan melalui CSR untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Empat Lawang seperti terlihat pada tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9

**Proyeksi Pendanaan melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*
Tahun 2024-2026**

NO	PROGRAM PRIORITAS CSR	2024	2025	2026
1	Bakti Sosial Sembako Bersubsidi	610.000.000	620.000.000	630.000.000
2	Khitanan Massal	280.000.000	300.000.000	320.000.000
3	Bupati Cup (Lomba Bola Voly & Bola Kaki)	115.000.000	125.000.000	135.000.000
4	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	100.000.000	150.000.000	180.000.000
	TOTAL	1.105.000.000	1.195.000.000	1.265.000.000

Berdasarkan data pada Tabel 3.8 diatas Pendapatan Daerah di proyeksikan mengalami peningkatan setiap tahun nya dimana pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 1.108.595.484.222, lalu pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat lagi menjadi Rp. 1.134.723.802.208, dan pada tahun 202 diproyeksikan kembali meningkat sebesar Rp. 1.166.316.728.160.

Selain sumber pendanaan APBD dan APBN Kabupaten Empat Lawang juga melakukan kerjasama dengan beberapa Bank dan perusahaan yang ada di Empat Lawang melalui pendanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Empat Lawang.

Berdasarkan hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Forum CSR kab. Empat Lawang Tahun 2023 yang Dituangkan Dalam Berita Acara Nomor : 50/201.a/BAPPEDALITBANG/2022,Program Prioritas Forum CSR sebagai berikut : Bakti Sosial Sembako Bersubsidi, Khitanan Massal, Bupati Cup (Lomba Bola Voly & Bola Kaki), dan Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran.

Berikut proyeksi pendanaan melalui CSR untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Empat Lawang seperti terlihat pada tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9

**Proyeksi Pendanaan melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*
Tahun 2024-2026**

NO	PROGRAM PRIORITAS CSR	2024	2025	2026
1	Bakti Sosial Sembako Bersubsidi	610.000.000	620.000.000	630.000.000
2	Khitanan Massal	280.000.000	300.000.000	320.000.000
3	Bupati Cup (Lomba Bola Voly & Bola Kaki)	115.000.000	125.000.000	135.000.000
4	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	100.000.000	150.000.000	180.000.000
	TOTAL	1.105.000.000	1.195.000.000	1.265.000.000



3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Setelah menganalisis kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai kerangka keuangan, selanjutnya akan digambarkan kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan periode tahun 2024-2026. Perkiraan kapasitas riil kemampuan daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Penghitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah, yaitu total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja yang bersifat mengikat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belanja yang bersifat wajib seperti pelayanan dasar Pendidikan dan Kesehatan sementara belanja yang bersifat mengikat seperti gaji dan tunjangan, serta operasional sehari-hari.

Selengkapnya secara indikatif tersaji pada Tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang
Tahun Anggaran 2024-2026

Uraian	Proyeksi		
	2024	2025	2026
Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan	1.128.595.488.222	1.144.723.802.208	1.176.316.728.160
Pendapatan	1.108.595.484.222	1.134.723.802.208	1.166.316.728.160
Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Prioritas 1 (Belanja yang Bersifat Mengikat)	338.452.601.366	346.913.916.400	355.586.764.310
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	790.142.886.856	797.809.885.808	820.729.963.850

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Empat Lawang

Dengan melihat proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan Tabel 3.10 di atas, maka dalam mengalokasikan anggaran harus benar-benar sesuai prioritas daerah agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat dimanfaatkan seefektif mungkin.

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang akan digunakan/dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 158 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Kapasitas riil keuangan Daerah, dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga; dengan penjelasan: (i) Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; (ii) Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah; serta (iii) Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah. disajikan dalam tabel 3.11

Tabel 3.11
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Uraian	2024	2025	2026
Prioritas I	338.452.601.366	346.913.916.400	355.586.764.310
Prioritas II	519.510.158000	583.744.422.362	603.713.263.815
Prioritas III	259.630.921.402	201.199.543.445	202.807.044.835

Terkait pemenuhan Mandatory Spending seperti urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, urusan Pegawai dan Infrastruktur Kabupaten Empat Lawang sudah memenuhi besaran sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Permendagri 84 Tahun 2022 dengan besaran Urusan Pendidikan sebesar 20% sudah terpenuhi setiap tahunnya, urusan kesehatan 10% juga sudah terpenuhi, urusan pengawasan sebesar 0,75% sudah terpenuhi, dan infrastruktur paling rendah 40% juga sudah terpenuhi, berikut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.12 terkait besaran anggaran tahun 2023 terkait mandatory spending

Tabel 3.12
Besaran Anggaran Pemenuhan Mandatory Spending
Kabupaten Empat Lawang
Tahun 2023

NO	URUSAN	ANGGARAN (Rp)	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Pendidikan	233.586.642.934	Regulasi Permendagri 84 Tahun 2022	-
2	Kesehatan	162.208.747.210	Regulasi Permendagri 84 Tahun 2022	-
3	Pengawasan	9.475.464.991	Regulasi Permendagri 84 Tahun 2022	-
4	Infrastruktur	378.967.487.306	Regulasi Permendagri 84 Tahun 2022	-

**BAB
IV**

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan *stakeholder* kabupaten, provinsi, nasional dalam proses perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi ialah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi.

Dari hasil analisa gambaran umum kondisi daerah dan capaian kinerja pada Bab II dapat dirumuskan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPD karena menjadi dasar utama pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- 1) Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran pembangunan Daerah.
- 2) Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.
- 3) Dari rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan.
- 4) Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

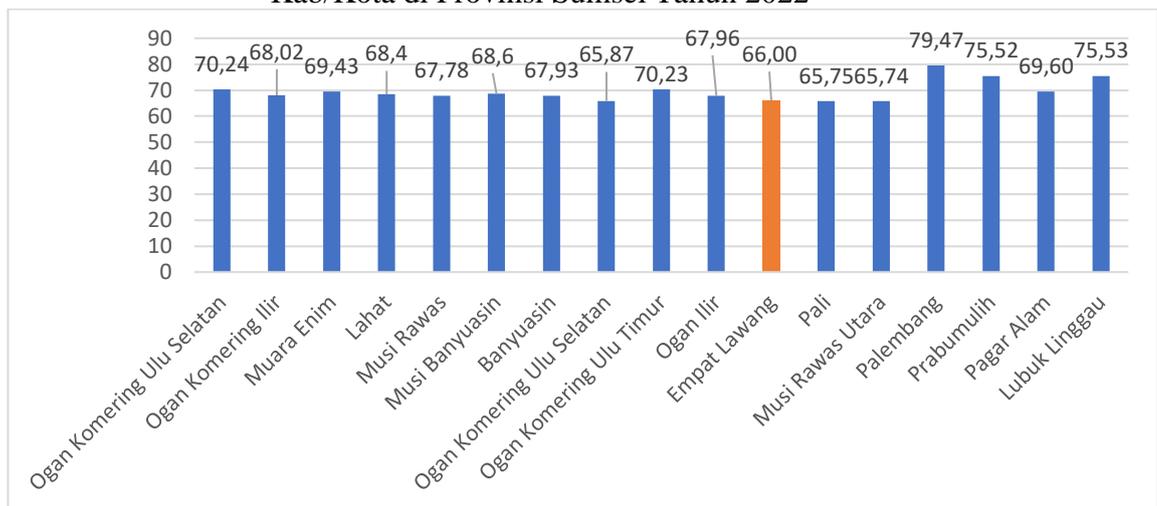
Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

4.1.1 Identifikasi Permasalahan Utama Kabupaten Empat Lawang

A. Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Empat Lawang

Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Empat Lawang yang belum optimal terlihat dari rata - rata peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Empat Lawang selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang belum signifikan yaitu sebesar 0,37 % dengan capaian Tahun 2022 ini adalah 66,00. Peringkat IPM di Kabupaten Empat Lawang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya adalah di kisaran peringkat 15 dari 17 kabupaten/kota di Sumsel.

Gambar 4.1 Perbandingan IPM Kabupaten Empat Lawang terhadap IPM Kab/Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2022

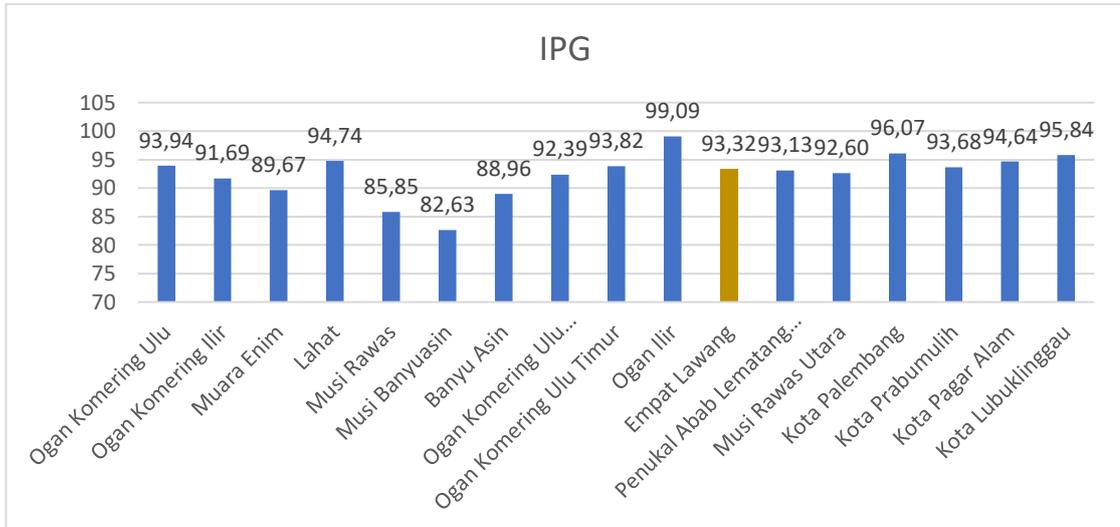


Sumber data : BPS Sumatera Selatan Tahun 2022

Capaian tertinggi adalah Kota Palembang di angka 79,47 melebihi angka provinsi sebesar 70,90.

Kualitas Sumber Daya Manusia yang merupakan hasil dari Pembangunan sumber daya manusia dapat terlihat juga pada Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Kabupaten Empat Lawang, yang pada dasarnya sudah mencapai hasil yang baik Tahun 2021 yaitu 93,32 walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 93,38.

Gambar 4.2 Perbandingan IPG Kabupaten Empat Lawang terhadap IPG Kab/Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2022

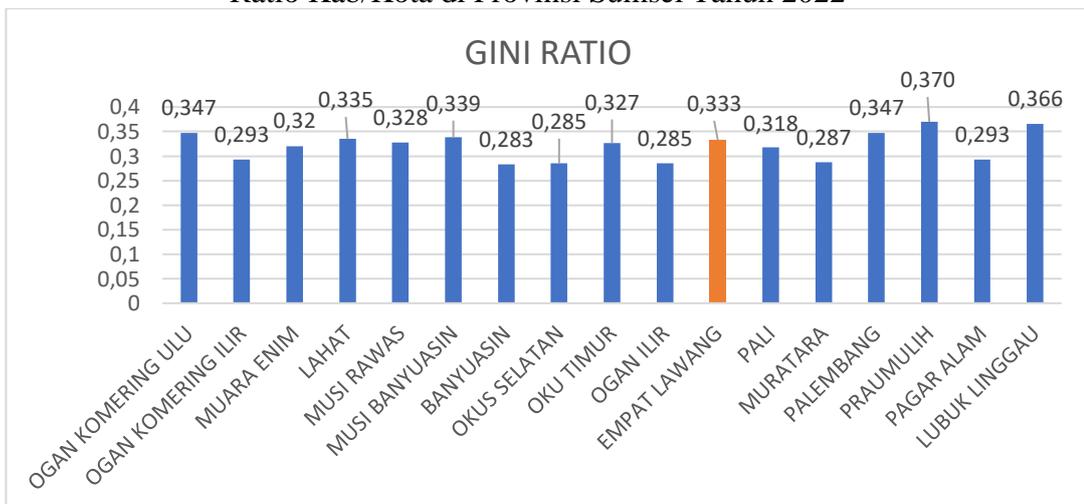


Sumber : BPS Sumatera Selatan Tahun 2022

Terlihat dalam perbandingan capaian Kabupaten/Kota se Provinsi Sumsel capaian IDG Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 di peringkat 9 dari 17 kabupaten/kota yang ada.

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Empat Lawang yang belum baik dan merata, terlihat dari tingkat kemiskinan dan gini ratio Kabupaten Empat Lawang yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Gini ratio Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 adalah sebesar 0,33 (dalam kategori sedang) turun sebesar 0,024 dibandingkan Tahun 2021, dengan rata - rata laju penurunannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebesar 0,42 % dan capaian ini lebih kecil/lebih baik dibandingkan capaian Provinsi yaitu sebesar 0,339. Sedangkan capaian Empat Lawang dibandingkan Kabupaten /Kota di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut (terlihat pada grafik).

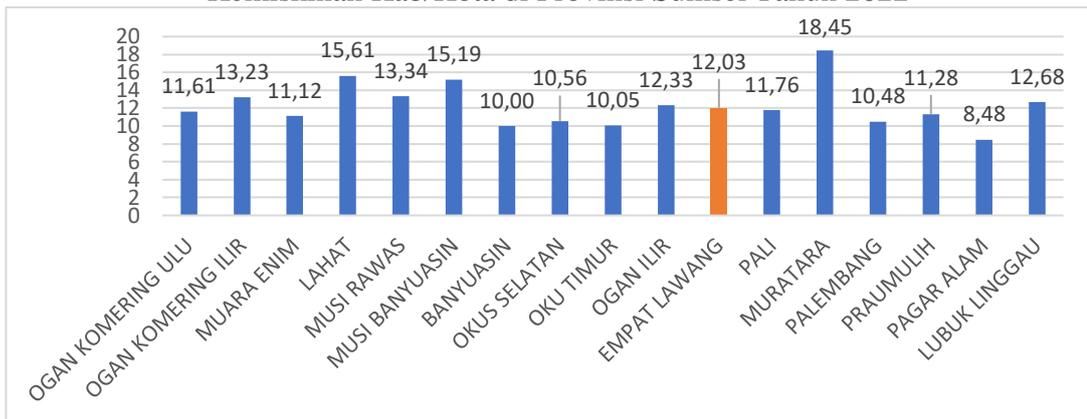
Gambar 4.3 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Empat Lawang terhadap Gini Ratio Kab/Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2022



Sumber : BPS Sumatera Selatan Tahun 2022

Tingkat kesejahteraan masyarakat Empat Lawang yang belum baik juga terlihat dari tingkat kemiskinan di Kabupaten Empat Lawang yang cenderung fluktuatif (diluar faktor terjadinya pandemi covid 19 beberapa tahun lalu). Rata - rata penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Empat Lawang kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebesar 0.22 % walaupun pada Tahun 2022 ini tingkat kemiskinan Kabupaten Empat Lawang cukup baik yaitu 12,03 %, turun cukup signifikan yaitu dari tahun sebelumnya sebesar 13,35 %, namun capaian ini masih berada di bawah capaian provinsi yaitu sebesar 11,90 % pada tahun 2022.

Gambar 4.4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Empat Lawang terhadap Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Sumsel Tahun 2022

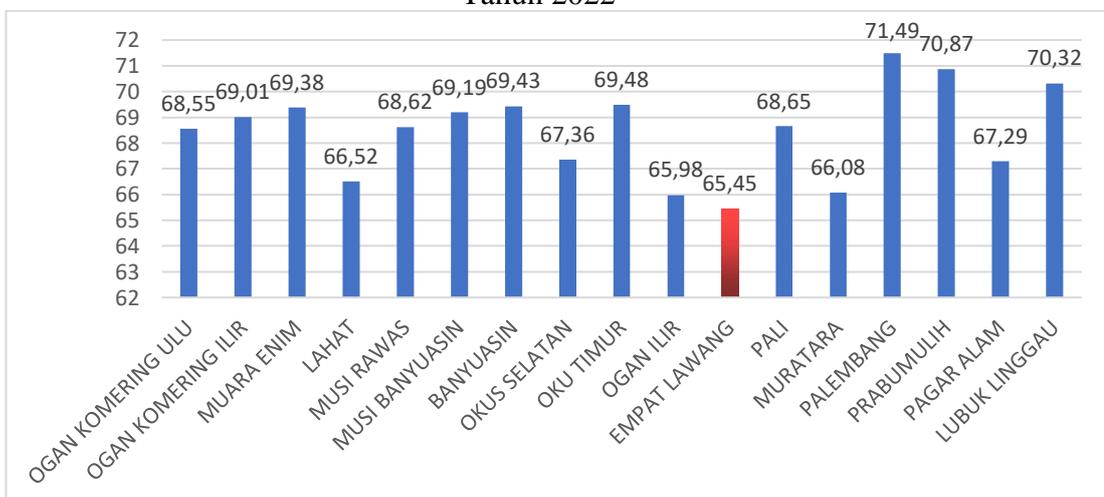


Sumber : BPS Sumatera Selatan Tahun 2022

Pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Empat Lawang yang belum optimal tersebut disebabkan capaian indikator - indikator berikut juga belum tercapai dengan baik, yaitu :

1. Derajat Kesehatan masyarakat yang belum baik terlihat dari Angka Harapan Hidup kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 sebesar 65,45 berada di urutan terendah se Provinsi Sumsel begitu juga pada Tahun 2020 dan 2021. Dan capaian ini masih cukup jauh di bawah capaian Provinsi yang capaiannya 70,32 Tahun.

Gambar 4.5 Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022



Sumber : BPS Sumatera Selatan, 2022

2. Kualitas dan pemerataan pendidikan daerah yang belum optimal terlihat dari capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Empat Lawang kurun waktu 2017 – 2022. Indeks Pendidikan Kabupaten Empat Lawang terus mengalami peningkatan, terlihat pada tahun 2017 indeks Pendidikan mencapai angka 0,580 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,591

Gambar 4.6 Indeks Pendidikan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Empat Lawang diolah, 2022

3. Standar hidup layak yang belum baik terlihat dari pengeluaran perkapita rumah tangga di Kabupaten Empat Lawang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

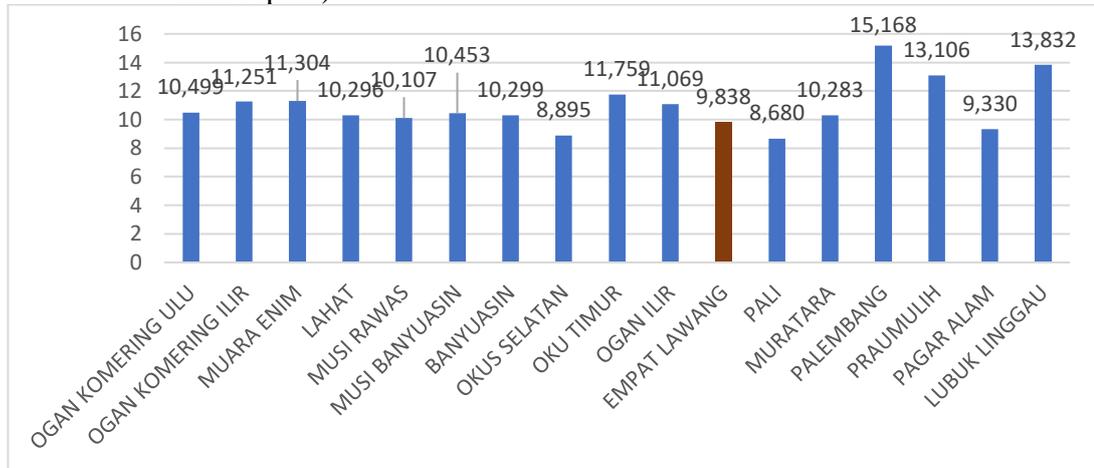
Gambar 4.7 Pengeluaran Perkapita Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 -2022



Sumber : BPS Empat Lawang, 2022

Dari Gambar tersebut terlihat bahwa secara rata-rata pendapatan perkapita mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Penurunan terjadi pada tahun 2020, dimana dapat diasumsikan hal tersebut terjadi dikarenakan pandemi covid-19. Pada akhir tahun 2022 pendapatan perkapita kabupaten Empat Lawang menyentuh angka Rp. 9.838.000.

Gambar 4.8 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Empat Lawang dengan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2022 (dalam ribu rupiah)

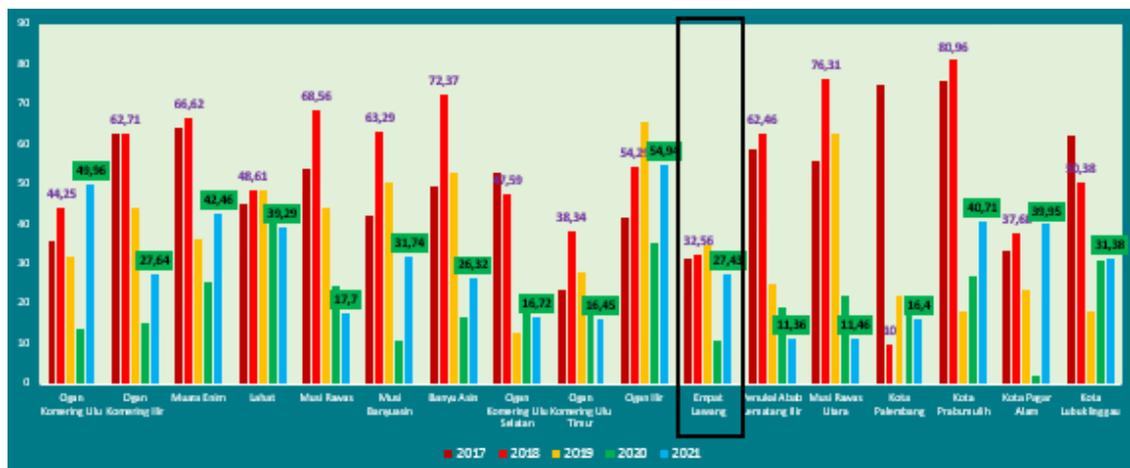


Sumber : BPS Sumatera Selatan,2022

Telihat pada grafik, besaran pengeluaran perkapita Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 9.838.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) yaitu pada peringkat 14 dar 17 Kabupaten/ Kota di Sumsel.

- Pengurangan beban rumah tangga miskin yang belum optimal terlihat dari Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapat Bantuan Program Pemerintah masih fluktuatif, Tahun 2021 sebesar 27,43 %.

Gambar 4.9 Persentase Rumah Tangga Miskin Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan Yang Mendapat Bantuan Program Pemerintah Tahun 2022



Sumber : BPS Sumatera Selatan,2022

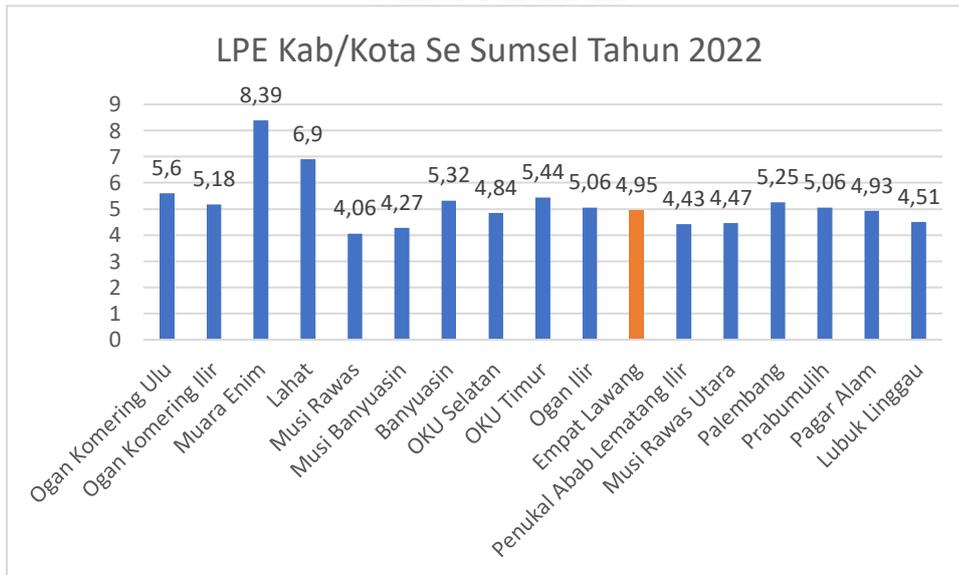
Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga yang membutuhkan perhatian dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

B. Pertumbuhan ekonomi yang masih cenderung fluktuatif

Rata-rata peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Empat Lawang dalam kurun waktu 5 tahun terkahir (diluar Tahun 2020) adalah sebesar 1,28 %.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2022 sebesar 4,93 % merupakan capaian yang cukup baik setelah pada Tahun 2020 diangka 0,09 % karena dampak covid 19 yang melanda dunia. Capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2022 ini lebih kecil dari capaian Provinsi sebesar 5,23 %. Sebagai perbandingan capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Sumsel Tahun 2022 seperti terlihat pada Gambar 4.10.

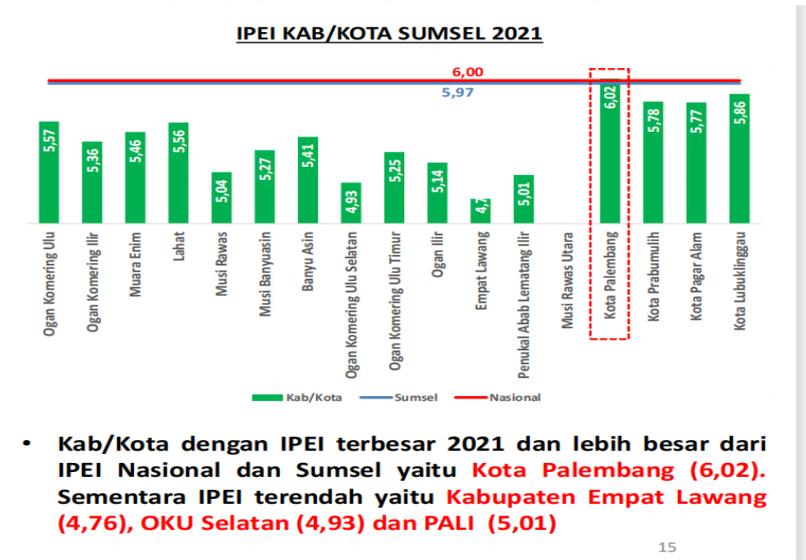
Gambar 4.10 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Sumsel Tahun 2022



Sumber : BPS Sumatera Selatan,2022

Namun pertumbuhan ekonomi inklusif Kabupaten Empat Lawang masih sangat rendah, capaiannya pada Tahun 2021 berada di posisi paling bawah di antara kabupaten/kota di provinsi Sumsel, yaitu sebesar 4,7.

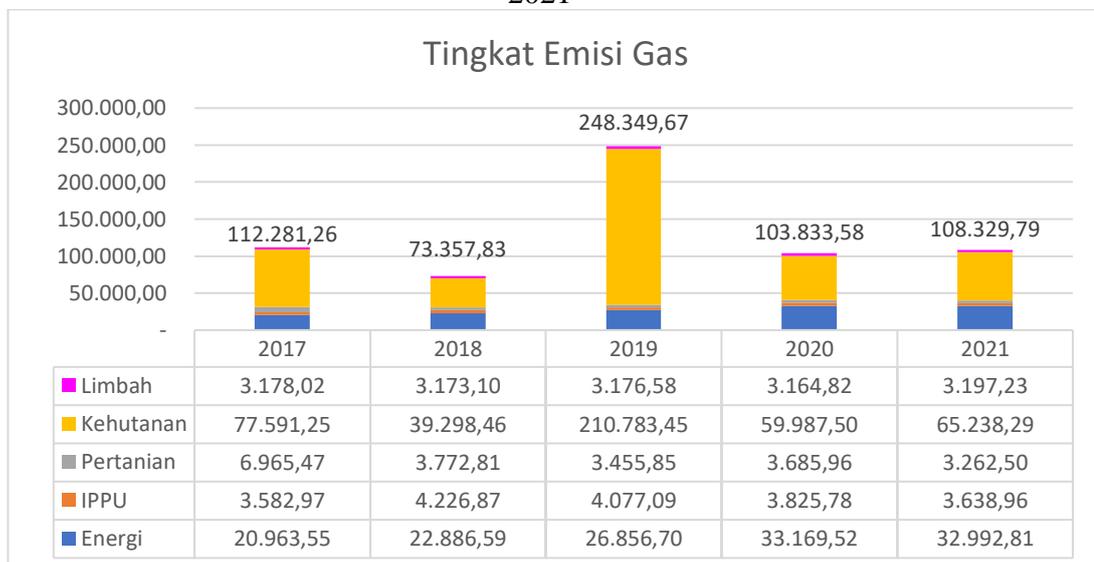
Gambar 4.11 Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021



Sumber : BPS Sumatera Selatan,2022

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu juga memperhatikan lingkungan yang merupakan aspek terpenting yang terdampak dari pembangunan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut, aspek lingkungan yang terdampak pembangunan tersebut dan menjadi perhatian serius baik nasional maupun internasional adalah emisi gas rumah kaca. Penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sumatera Selatan masih belum signifikan, Kabupaten Empat Lawang yang juga berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan tingkat emisi gas rumah kaca Provinsi sebagai capaian penurunan. Dan angka penurunannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir baru sebesar 0,03519. Penurunan emisi gas rumah kaca Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 4.12 Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021



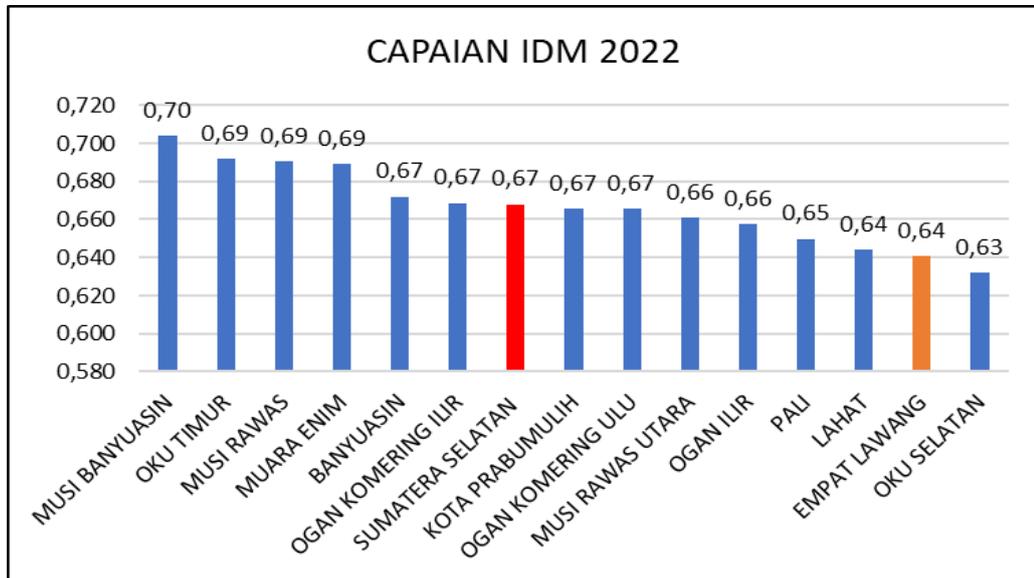
Sumber: <https://signsmart.menlhk.go.id/v2.1/app/frontend/data/tingkatemisi#content>

Pertumbuhan ekonomi yang masih cenderung fluktuatif diakibatkan karena indikator-indikator yang mendukungnya juga masih cenderung fluktuatif, Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Ex-Transmigrasi, wilayah yang merupakan wilayah ex-transmigrasi di Kabupaten Empat Lawang adalah Desa Mekar Jaya, Desa Mekarti Jaya, Desa Pancur Mas, Desa Tanjung Ning dan Desa Lubuk Tubing. Dari data yang dikeluarkan oleh Kemendes dalam Laporan Indeks Desa Membangun, dari 5 (lima) desa tersebut, 4 (empat) diantaranya masuk kedalam kategori berkembang dan 1 (satu) lainnya yaitu desa Pancur Mas masih dalam kategori tertinggal.
2. Masih rendahnya pembangunan desa, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi tentang Indeks Desa Membangun di Indonesia Pada Tahun 2022, Kabupaten Empat Lawang berada pada posisi 328 dari 434 Kabupaten dengan nilai 0,6408 dan nomor 2 (dua) terendah se-Sumatera Selatan. Pada data tersebut dari 147 desa yang ada di Kabupaten Empat Lawang, 3 desa diantaranya masuk kategori maju, 137 masuk kategori berkembang, dan 7 desa masuk kategori tertinggal.

Berikut adalah capaian IDM seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.

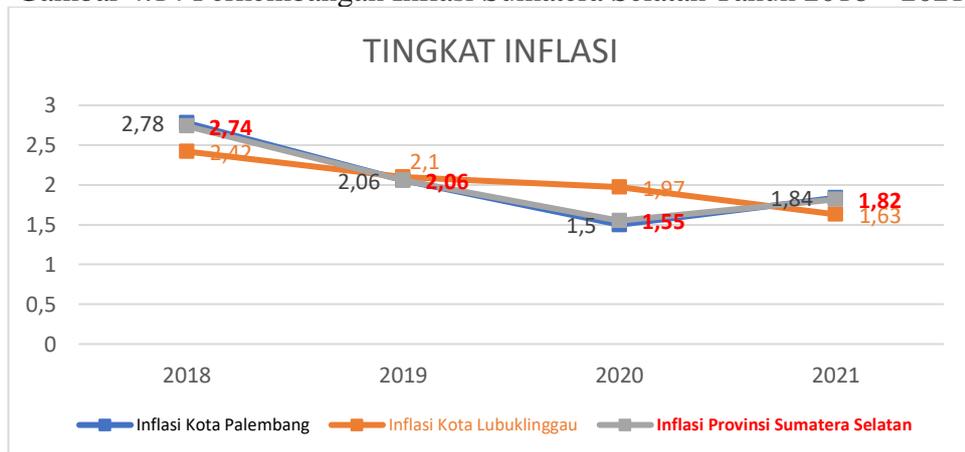
Gambar 4.13 Capaian IDM Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2022



Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

- Harga barang kebutuhan pokok yang masih belum dapat dikendalikan, harga barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali dapat menyebabkan perputaran ekonomi yang tidak stabil sehingga akan menyebabkan inflasi, yang jika inflasi ini terlalu tinggi maka akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah. Berikut adalah tingkat inflasi di sekitar wilayah Kabupaten Empat Lawang.

Gambar 4.14 Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2021



Sumber : BPS, 2022

- Masih rendahnya kemudahan akses transportasi antarwilayah, hal ini dapat dilihat dari belum adanya trayek resmi yang dilayani di Kabupaten Empat Lawang.
- Masih kurangnya layanan infrastruktur dalam kondisi baik terlihat dari Persentase jalan dalam kondisi baik Tahun 2022 yaitu 77,04%, dengan tingkat

konektivitas jalan sebesar 41,5 % dan Persentase irigasi dalam kondisi baik Tahun 2022 adalah 48,01%, serta Persentase bangunan gedung dan arsitektur prasarana Pemerintah dan kepentingan strategis Pemerintah sesuai standar 56,25 %.

- Masih rendahnya investasi di Kabupaten Empat Lawang, hal ini dapat terlihat pada nilai investasi yang tidak ada kenaikan dalam kurun waktu 3 tahun (2018 -2020) dan turun signifikan pada tahun 2021 dan 2022 karena dampak pandemi covid-19. Investasi di Kabupaten Empat Lawang adalah pada bidang Perkebunan dan 1 Perusahaan arang kayu. Berikut adalah nilai investasi di Kabupaten Empat Lawang selama 5 (lima) tahun terakhir.

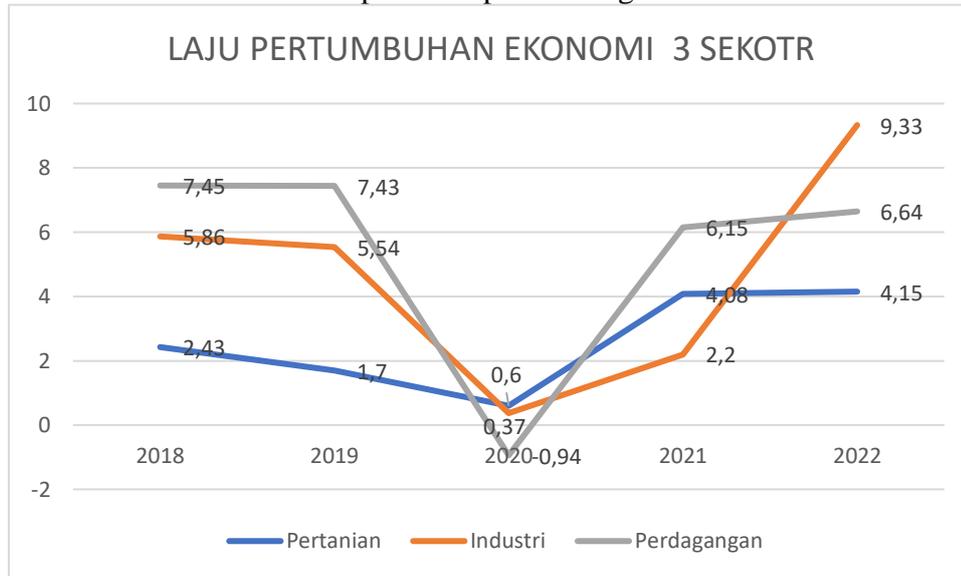
Tabel 4.15 Nilai Investasi Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Empat Lawang, 2022

- Masih belum optimalnya laju pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan, sektor unggulan yang dimaksud adalah sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan. Rata-rata laju pertumbuhan pada sektor pertanian yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar di Kabupaten Empat Lawang saat ini selama 5 tahun terakhir adalah 2,59 %. Sedangkan sektor perindustrian dan perdagangan rata - rata laju pertumbuhannya selama 5 tahun terakhir masing -masing adalah 4,66 % dan 5,34%

Gambar 4.16 Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2022



Sumber : DDA Empat Lawang, 2023

8. Masih sangat perlu ditingkatkannya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Empat Lawang. Pelestarian lingkungan merupakan salah satu aspek terpenting dalam mengimplementasikan program pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Di era globalisasi ini, pembangunan tidak dapat dikatakan berhasil jika mengakibatkan lingkungan semakin buruk, pembangunan di era globalisasi harus searah dan sejalan dengan pelestarian lingkungan disekitarnya. Untuk mengukur kualitas lingkungan digunakan suatu indeks, yang terdiri dari beberapa unsur penilaian kualitas lingkungan, yaitu penilaian terhadap kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2022 adalah sebesar 69,99 (nilai ini masuk kedalam kategori baik) lebih kecil dibandingkan Tahun 2021 adalah 71,03, dan dari capaian komponen pembentuk IKLH Kabupaten Empat Lawang yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan belum mencapai target yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup , terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.1 Komponen Pembentuk IKLH

No	Komponen	2022	Target KLHK	Keterangan
1	Indek Kualitas Air	65	52,70	Terdapat 3 titik yang Cemar Ringan
2	Indek Kualitas Udara	92,64	88,79	
3	Indek Kualitas Tutupan Lahan	36,69	44,84	Artinya tidak tercapai

Pelestarian lingkungan harus terus ditingkatkan agar pembangunan dapat terus dilanjutkan tanpa merusak ekosistem yang ada didalamnya.

C. Tata kelola Pemerintah di Kabupaten Empat Lawang

Belum optimalnya Tata kelola Pemerintah di Kabupaten Empat Lawang terlihat dari penilaian Indek Reformasi Birokrasi. IRB Kabupaten Empat Lawang baru mencapai kategori C nilai 37,15 Tahun 2020 dan Tahun 2021 baru naik 1,06 yaitu menjadi 38,21 dengan kenaikan pada komponen pengungkit sedangkan pada komponen hasil justru mengalami penurunan.

Berikut adalah capaian setiap komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Empat Lawang.

Tabel 4.2 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2020-2021

No	Komponen Penilaian	2020	2021
A	Komponen Pengungkit	7,42	10,11
I	Pemenuhan	1,74	3
II	Hasil Antara Area Perubahan	3,94	4,32
III	Reform	1,74	2,79
B	Komponen Hasil	29,73	28,10
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6,71	6,67
2	Kualitas Pelayanan Publik	9,53	8,37
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	9,75	8,4
4	Kinerja Organisasi	3,74	4,66
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		37,15	38,21

Sumber : Kemenpan RB,2022

Tata Kelola pemerintahan yang belum optimal juga ditandai dengan:

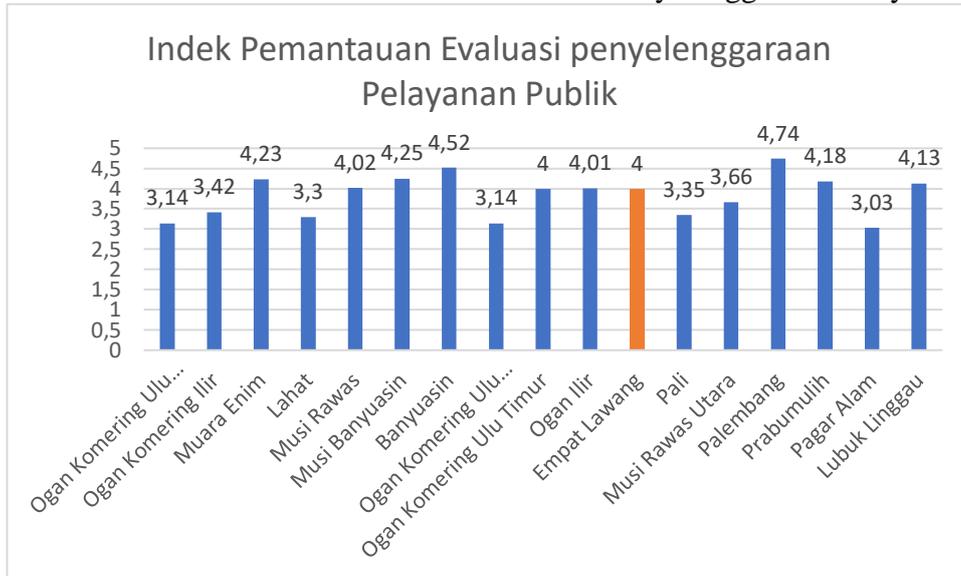
1. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah terlihat dari nilai SAKIP saat ini baru mencapai kategori B dengan nilai 61,02, walaupun opini BPK kategori WTP selama 5 (lima) tahun terakhir. Berikut adalah capaian SAKIP dan opini BPK.

Tabel 4.3 Capaian Nilai SAKIP dan Opini BPK Tahun 2018-2021

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai SAKIP	41,93	52,99	60,04	61,02
2.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP

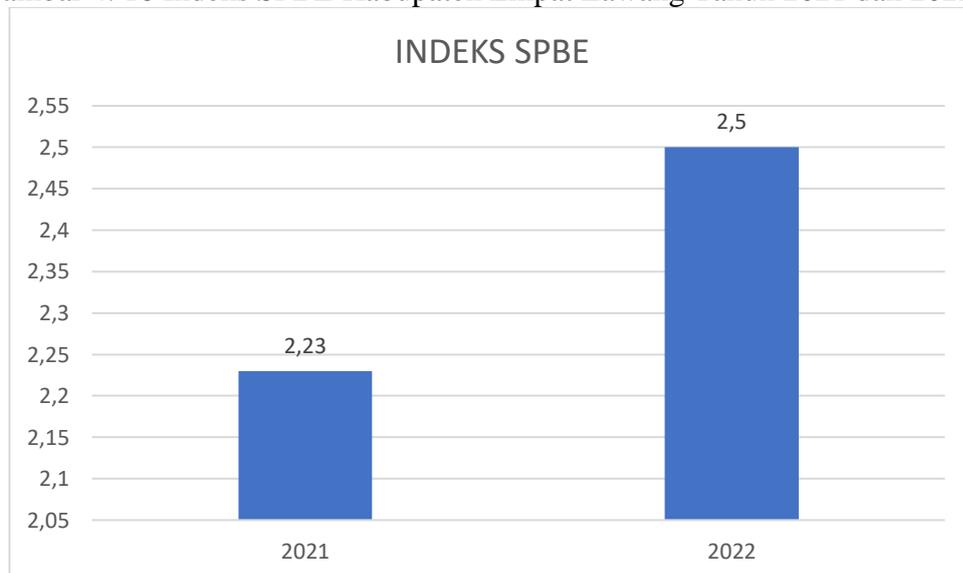
2. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal ditandai dengan capaian indek pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 adalah 4 kategori B, Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumsel pelayanan publik Kabupaten Empat Lawang di urutan 10 (sepuluh). Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Empat Lawang mencapai 83,73 %, Kualitas Pelayanan publik sangat perlu untuk ditingkatkan agar masyarakat dapat terus merasakan pelayanan yang maksimal oleh aparatur negara.

Gambar 4.17 Indeks Pemantauan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik



3. Masih kurangnya kapabilitas birokrasi di Kabupaten Empat Lawang, hal ini terlihat dari nilai indeks SPBE Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2022 sebesar 2,5 dari nilai maksimal 5 dan masuk kedalam kategori cukup. Berikut capaian Indeks SPBE Kabupaten Empat Lawang

Gambar 4. 18 Indeks SPBE Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 dan 2022



Sumber : Diskominfo Kabupaten Empat Lawang

4.1.2 Identifikasi Permasalahan Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Permasalahan Pendidikan menjadi salah satu isu yang harus diperhatikan dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Isu utama dalam urusan Pendidikan di Kabupaten Empat Lawang yaitu masih rendahnya kualitas dan pemerataan Pendidikan di Kabupaten Empat

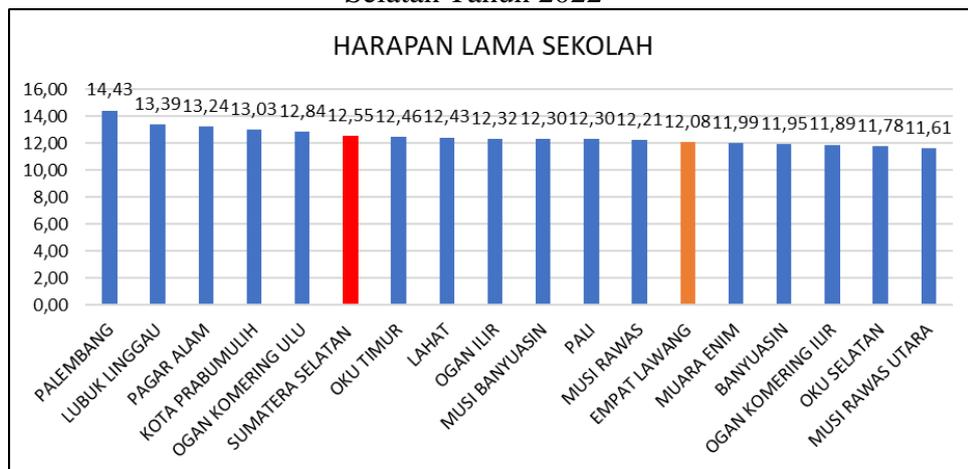
Lawang, yang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu masih rendahnya kuantitas masyarakat yang melanjutkan Pendidikan dan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk sekolah.

Pada faktor yang pertama yaitu rendahnya kuantitas masyarakat yang melanjutkan Pendidikan, hal ini dapat terlihat dari harapan lama sekolah yang masih berkisar di angka 12 selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2022 capaian angka harapan lama sekolah Kabupaten Empat Lawang berada pada 12,08 dan berada pada urutan ke-6 (enam) paling bawah diantara seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut yaitu:

1. Masih rendahnya pemerataan fasilitas Pendidikan, hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya jumlah sekolah dasar dan menengah yang ada di kabupaten Empat Lawang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada.
2. Masih rendahnya ketersediaan fasilitas Pendidikan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak nya sekolah yang masih belum memiliki fasilitas yang memadai yang dapat menunjang proses pembelajaran di sekolah seperti listrik, perpustakaan, laboratorium, internet, sanitasi, dan tempat ibadah.

Berikut adalah capaian harapan lama sekolah Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2022.

Gambar 4.19 Harapan Lama Sekolah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2022

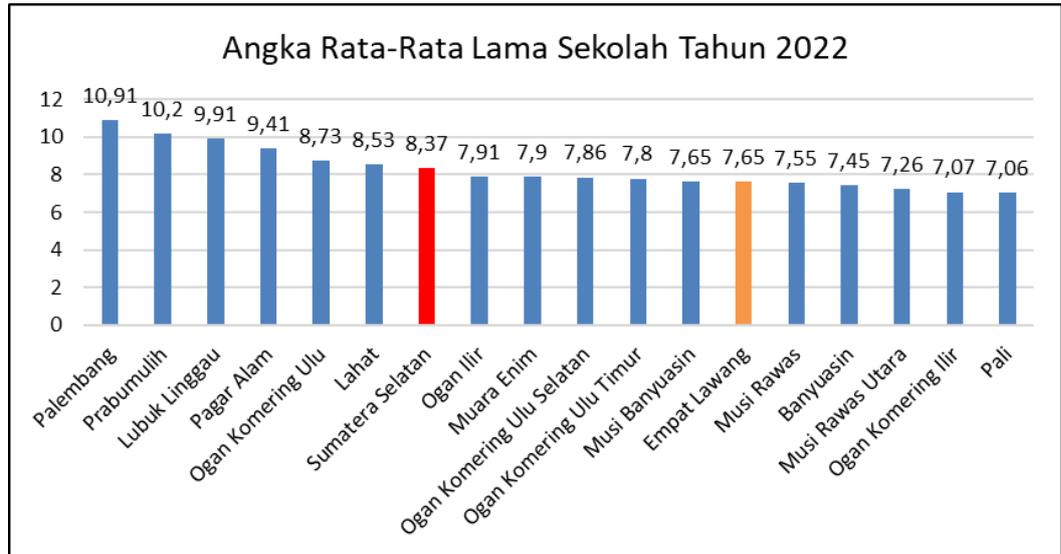


Sumber : BPS Sumatera Selatan

Faktor yang kedua yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk sekolah, hal ini dapat dilihat pada perkembangan rata-rata lama sekolah selama 5 (lima) tahun ini yang masih dibawah angka 9 (Sembilan) tahun. Pada Tahun 2022 capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Empat Lawang berada pada angka 7,65 dan berada pada posisi 6 terbawah.

Berikut adalah capaian rata-rata lama sekolah seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.

Gambar 4.20 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022



Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan rata-rata lama sekolah ini, yaitu:

1. Masih rendahnya kesadaran untuk belajar, yang dilihat dari angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan angka melek huruf.
2. Masih rendahnya kualitas pendidikan, yang dilihat dari rasio antara sekolah dan guru, rasio antara guru dan murid, dan rasio kelas dan murid.

B. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia yang ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor di bidang kesehatan.

Penyelenggaraan bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar termasuk di dalam urusan pemerintahan konkuren, dimana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan wajib untuk menyelenggarakannya.

Salah satu isu permasalahan pada bidang Kesehatan yaitu masih rendahnya kualitas pelayanan Kesehatan daerah yang dalam hal ini di ukur dari persentase penduduk yang mendapat pelayanan kesehatan (UHC) di Kabupaten Empat Lawang masih sebesar 68,71, selain kualitas pelayanan Kesehatan di Kabupaten Empat Lawang disebabkan juga oleh angka kematian ibu. Pada tahun 2022 ada 38,53 kasus angka kematian ibu. Selain itu permasalahan indikator SPM yang masih perlu di tingkatkan diantaranya:

1. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan di angka 96,59
2. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di angka 89,40
3. Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan di angka 93,80
4. Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan s di angka 80,56
5. Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan di angka 88,19
6. Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan di angka 83,83

7. Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan di angka 94,24
8. Jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan di angka 65,44; dan
9. Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan di angka 63,72

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara umum kinerja infrastruktur daerah menunjukkan realisasi yang positif. Penanganan jalan di Kabupaten Empat Lawang termasuk pada jalur horizontal dan vertikal serta menangani jalan-jalan non status pada jalur tersebut. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sedang meningkatkan beberapa ruas jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Empat Lawang terus berorientasi pada visi yang ingin dicapai dimana diharapkan kondisi jalan dan jembatan yang mantap, aman dan nyaman di Kabupaten Empat Lawang secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta dapat meningkatkan konektivitas jalan di daerah Kabupaten Empat Lawang.

Capaian kinerja layanan infrastruktur dalam kondisi baik di Kabupaten Empat Lawang masih tergolong rendah, hal ini dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu :

1. Persentase kondisi jalan dalam kondisi baik yang masih pada Tahun 2022 adalah 77,04%, yang artinya pada beberapa daerah yang ada di Kabupaten Empat Lawang jalannya masih berada pada kategori rusak ringan maupun rusak berat.
2. Persentase irigasi dalam kondisi baik pada Tahun 2022 adalah 48,01%, mengingat perekonomian Kabupaten Empat Lawang yang sangat di dominasi oleh pertanian, angka ini jelas masih sangat kurang dari kata cukup.
3. Tingkat konektivitas jalan yang masih relatif rendah yaitu pada angka 42,5% yang mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah Kabupaten Empat Lawang.
4. Persentase bangunan Gedung dan arsitektur prasarana pemerintah dan kepentingan strategis pemerintah kabupaten yang sesuai standar yang masih pada angka 56,25%, dan
5. Tingkat kinerja jasa konstruksi pada kondisi sedang.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Empat Lawang yaitu:

1. Masih rendahnya tertib pemanfaatan ruang sesuai peruntukan sebesar 35%, yang artinya masih ada Kawasan di daerah Kabupaten Empat Lawang peruntukannya masih belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Empat Lawang.
2. Kualitas dan Konektivitas Jaringan Jalan Daerah/Kabupaten yang masih relatif rendah, hal ini terlihat pada masih rendahnya persentase jalan yang ditangani dan masih banyaknya jalan yang masih perlu dibangun untuk mendukung setiap aktivitas di Kabupaten Empat Lawang.
3. Masih rendahnya pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan kabupaten.

4. Sistem Pengembangan dan Pengelolaan Serta Pembangunan Bangunan Gedung dan Arsitektur yang masih belum maksimal, yang dapat dilihat dari masih rendahnya kepatuhan PBG yang dicapai.
5. Kinerja Jasa Konstruksi yang masih rendah, sehingga masih perlunya peningkatan tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi dan peningkatan pengawasan proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.
6. Persentase rumah tangga yang terlayani air minum layak pada Tahun 2022 masih mencapai 66,8% sehingga masih perlu ditingkatkan kembali.
7. Masih rendahnya persentase rumah tangga yang terlayani sanitasi (air limbah layak) pada Tahun 2022 pada angka 56,4% hal ini masih perlu untuk ditingkatkan kembali.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah terkait urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki wewenang :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
4. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
5. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman.
6. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
7. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.
8. Penyelenggaraan PSU perumahan.
9. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Namun isu yang ada di bidang ini bahwa Kabupaten Empat lawang memiliki kelemahan, yaitu keterbatasan akan lahan terbangun, khususnya untuk permukiman. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengoptimalan pembangunan kawasan permukiman dan pengembangan di wilayah perkotaan. Pengoptimalan pembangunan dan pengembangan di atas keterbatasan lahan tersebut juga disertai dengan pengaturan-pengaturan dalam rencana pengembangan kawasan permukiman tersebut dan dituangkan dalam beberapa strategi. Selain itu masih belum optimalnya pengembangan kualitas permukiman ditandai dengan persentase rumah layak huni masih 53,66%. Faktor lain yang menjadi permasalahan ini diantaranya

1. Masih rendahnya persentase rumah tidak layak huni tertangani yaitu masih pada angka 53,66%
2. Luasan kawasan kumuh masih sangat tinggi sebesar 95,76%
3. Persentase kepemilikan lahan pemerintah yang sah dan bebas konflik masih di angka 39%.

E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penanganan ketertiban masyarakat dilaksanakan melalui perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah yang tergabung dalam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp). Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Empat Lawang masih belum optimal. Pada tahun 2022 persentase penurunan gangguan keamanan masih sebesar 20%, persentase peningkatan Pemeliharaan Ketertiban, Ketentraman, Dan Kenyamanan (K3) pada tahun 2022 sebesar 14% dan Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda Dan Perkada Yang Ditindak Lanjuti sudah mencapai 100%. Sehingga masih perlu di tingkatkan lagi stabilitas keamanan dengan ditandai penurunan gangguan keamanan. Selain itu kurangnya stabilitas keamanan juga dipengaruhi oleh indikator persentase gangguan ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan (K3) yang diselesaikan dan persentase perda dan perkada yang ditegakkan.

Dalam hal penanggulangan bencana Kabupaten Empat Lawang telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menangani semua kejadian yang diakibatkan oleh bencana. Namun sarana prasarana serta kapasitas SDM dalam menangani bencana dan kebakaran masih minim. Masih rendahnya persentase desa tangguh bencana di angka 2,12%, masih rendahnya nilai desa tangguh bencana di desa rawan bencana di angka 35, masih rendahnya Persentase kejadian yang ditangani sesuai waktu tanggap masih di angka 70%, dan masih rendahnya Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana yang terjadi di angka 6% .

Sedangkan untuk penanggulangan kebakaran dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Namun isu yang ada Persentase SDM pemadam dan penyelamatan yang sesuai standar masih di katakan rendah dengan angka 21%, masih rendahnya Persentase penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai standar di angka 92%. Masih rendahnya Persentase kejadian yang ditangani sesuai waktu tanggap di angka 57%.

F. Urusan Sosial

Bidang sosial merupakan hal penting dalam instansi pemerintah karena melakukan pemetaan kemiskinan suatu daerah, melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan penanganan kemiskinan bagi fakir miskin. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada fakir miskin/ keluarga kurang mampu dan wanita rawan sosial ekonomi, dan melaksanakan pengawasan program penanganan fakir miskin. Namun, salah satu permasalahan bidang sosial Kabupaten Empat Lawang belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial ditandai dengan rasio PPKS masih 3.3%. Rendahnya pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Empat Lawang dibuktikan beberapa faktor diantaranya:

1. Persentase pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPK) masih pada angka 55%.
2. Persentase akurasi data kesejahteraan sosial sudah cukup baik, sudah mencapai angka 70%.
3. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pasca Bencana Sesuai Standar sudah baik yaitu mencapai 100%

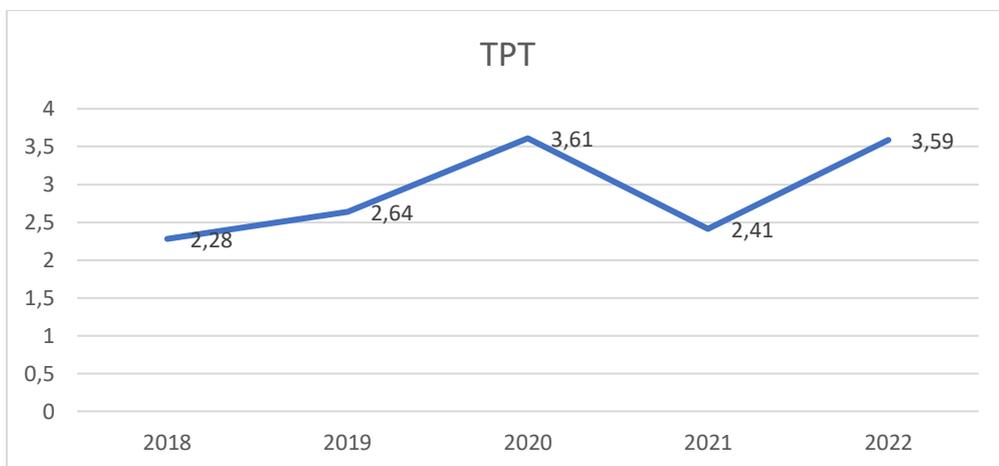
4. Persentase Sarana Prasarana Sosial Sesuai Standar sudah cukup baik yaitu mencapai 80%

4.1.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

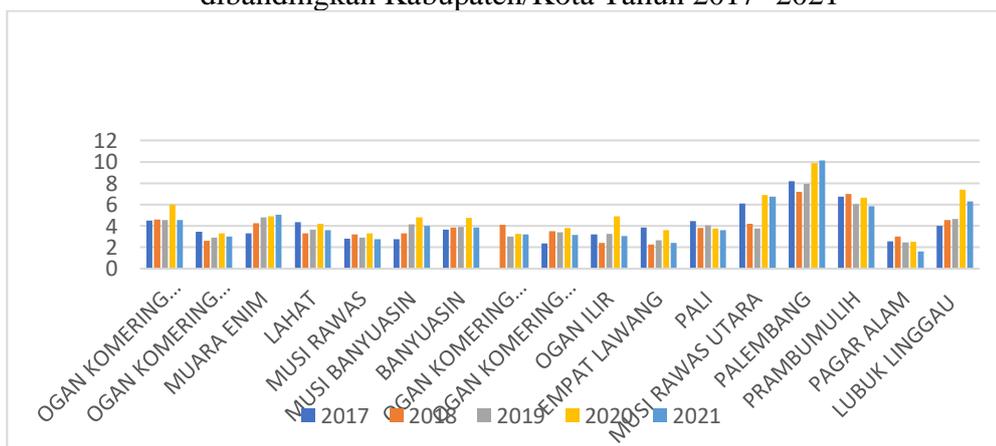
Penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Empat Lawang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masih cenderung fluktuatif, walaupun capaiannya memang lebih baik dibandingkan Provinsi.

Gambar 4.21 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 -2022



Dari grafik tersebut, diperoleh rata penurunan pertahunnya adalah sebesar - 0,28 %

Gambar 4.22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Empat Lawang dibandingkan Kabupaten/Kota Tahun 2017 -2021



Terlihat capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Empat Lawang dibandingkan dengan Kabupaten/kota di Provinsi Sumsel adalah pada peringkat 2 (dua) terbaik dan lebih baik dari capaian provinsi.

B. Urusan Lingkungan Hidup

Kelestarian lingkungan pada era globalisasi ini telah menjelma menjadi bagian dari wajah pembangunan suatu daerah, pembangunan dipandang baik dan berhasil jika dalam proses nya tetap melestarikan lingkungan dan menjaga ekosistem disekitar lokasi pembangunan tersebut.

Sehingga isu tentang pelestarian lingkungan hidup harus terus dibunyikan, agar lingkungan tetap terjaga kelestariannya. Indikator yang dapat menunjukkan kelestarian lingkungan tersebut adalah menurunnya tingkat pencemaran di suatu daerah yang menjadi objek pembangunan.

Pembangunan yang berkelanjutan dengan berasas pelestarian lingkungan dapat dilaksanakan jika Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dan berkomitmen untuk menjalankannya. Pembangunan yang selaras ini dapat dilaksanakan jika setiap elemen dalam pembangunan mematuhi regulasi yang berlaku. Pengendalian pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan diharapkan dapat menurunkan pencemaran lingkungan disekitarnya, baik pencemaran air, tanah, udara dan tutupan lahan.

Isu permasalahan pada bidang ini masih belum terkendalinya kualitas lingkungan hidup ditandai dengan masih rendahnya tingkat penurunan pencemaran. Indikator lain juga yang menjadi faktor belum terkendalinya kualitas lingkungan hidup diantaranya

1. Laju penurunan kualitas air masih di angka 1
2. Laju penurunan kualitas udara 0
3. Laju penurunan kualitas tutupan lahan 0
4. Pengurangan timbulan sampah masih 12 ton/pertahun
5. Belum optimalnya persentase usaha/kegiatan yang mematuhi lingkungan hidup berada di angka 61,40%
6. Masih rendahnya persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu sebesar 3,90%.

C. Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

Data kependudukan dan pencatatan sipil merupakan bagian penting guna untuk memastikan status seseorang agar lebih jelas dimata hukum. Bidang administrasi kependudukan dan capil di Kabupaten Empat Lawang sudah cukup namun masih perlu di tingkatkan. Kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan dan capil dengan indikator indeks kepuasan masyarakat sebesar 84.43. Nilai ini sudah cukup baik namun masih perlu di tingkatkan atau dipertahankan. Namun indikator kepemilikan dokumen kependudukan masih perlu ditingkatkan ditandai dengan angka sebesar 82.65%. Persentase penduduk ber-KTP elektronik masih perlu di tingkatkan dengan angka 65%, persentase keluarga ber-kartu keluarga juga sudah baik dengan angka 80%, dan juga hampir penduduk Kabupaten Empat Lawang sudah memiliki akte kelahiran dengan persentase sebesar 85%. Namun persentase kepemilikan KIA masih di bilang kurang ditandai dengan angka sebesar 42% dan persentase pelayanan yang dilaporkan dalam SIAK ONLINE juga dibilang belum optimal pada angka 55,14%.

D. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang indeks desa membangun. Bahwa

diperlukan ketersediaan data dasar pembangunan desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian desa di Empat Lawang pada tahun 2022 indeks desa membangun dari 147 desa 3 desa berstatus desa maju 137 desa berkembang 7 desa tertinggal. Setiap tahunnya diperlukan peningkatan indeks desa membangun dan diharapkan tidak ada lagi desa tertinggal. Nilai indeks desa membangun Kabupaten Empat Lawang pada Tahun 2022 sebesar 0,6408. Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat desa ditandai dengan presentase peningkatan sarana dan prasarana yang dikelola desa 82,9% kemudian persentase desa yang terlibat dalam kerjasama desa hanya sebesar 7,4%, persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat yang aktif sebesar 59,75% selain itu kapasitas pemerintah masih belum optimal dengan ditandai persentase peningkatan desa yang melaksanakan pemerintah yang baik sebesar 87,07%.

E. Urusan Perhubungan

Penggunaan ukuran indikator sasaran rasio konektivitas transportasi wilayah pada Kabupaten Empat Lawang semakin penting dalam upaya memberikan jaminan terhadap efektifitas dan efisiensi akses transportasi antar wilayah. Indikator rasio konektivitas transportasi wilayah merupakan instrument penting untuk mengetahui tingkat kemudahan akses transportasi wilayah dan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi. Dalam upaya melakukan perbandingan kinerja keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Empat Lawang dengan daerah lainnya maka perlu dikembangkan paling tidak 3 indikator sasaran yang dapat menggambarkan konektivitas transportasi wilayah yaitu :

1. Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 kendaraan

Seiring dengan meningkatnya permintaan akan transportasi, tingkat kejadian kecelakaan cenderung menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana peluang terjadinya kecelakaan secara kuantitatif dan tingkat keparahan maupun fatalitas secara kualitatif juga cenderung meningkat. Sehingga rasio fatalitas kecelakaan 10.000 kendaraan harus di tingkatkan kembali yang saat ini masih berada di angka 3.

2. Indeks Konektivitas Transportasi

Konektivitas daerah prioritas pengembangan di Kabupaten Empat Lawang dikategorikan belum begitu baik sehingga dilakukan upaya peningkatan penambahan jalan dan penambahan marka jalan untuk mengarahkan arus kendaraan. Keberadaan marka atau tanda yang membentuk garis memiliki peranan yang sangat penting di jalur lalu lintas. Khususnya dalam mengarahkan arus lalu lintas agar lebih teratur. Saat ini indeks konektivitas transportasi masih berada di angka 0.7 sehingga masih perlu untuk di tingkatkan kembali.

3. Rasio moda transportasi angkutan umum yang memenuhi standar terhadap masyarakat pengguna

Alat transportasi mampu meningkatkan produktivitas dan nilai jual suatu kawasan, lewat pengiriman dan penyebaran hasil industri, hasil pertanian, tanah, atau lainnya. Maka dari itu dibutuhkan standar penggunaan alat dukung transportasi dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Empat Lawang, kapasitas serta frekuensi. Namun Rasio moda transportasi angkutan umum yang memenuhi standar terhadap masyarakat

pengguna masih belum optimal ditandai dengan masih berada diangka angka 364.

F. Urusan Kominfo

Komunikasi dan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang demokratis. Saat ini setiap orang dengan bantuan teknologi dapat berkomunikasi dalam waktu yang cepat dan juga tanpa ada batasan jarak. Namun isu permasalahan masih rendahnya kapabilitas birokrasi ditandai dengan nilai SPBE sebesar 2,5 dengan predikat cukup. Selain itu kurangnya teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan nilai domain kebijakan SPBE sebesar 2,6, nilai domain tata kelola SPBE sebesar 1,6, nilai domain manajemen SPBE sebesar 1, dan nilai domain layanan SPBE sebesar 2,92. Tidak hanya itu indikator indeks EPSS masih perlu ditingkatkan evaluasi penyelenggaraan EPSS nya dan akan terus dijaga tingkat keamanan informasi pemerintah.

G. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan UMKM memiliki kontribusi pada pendapatan daerah Kabupaten Empat Lawang, sehingga sangat perlu untuk dikembangkan kedepannya agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Jumlah UMKM yang terdaftar pada aplikasi ODS pada tahun 2022 sebanyak 1.538 UMKM dan Koperasi sehat pada tahun 2022 adalah sebanyak 35 koperasi dari 157 koperasi yang terdata pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hal ini mengindikasikan keberadaan koperasi dan UMKM tidak bisa dipandang sebelah mata. Akan tetapi kurangnya profesionalisme koperasi dan UMKM dalam manajerial menyebabkan tidak terpromosikannya perkembangan koperasi dan UMKM.

Isu permasalahan yang ada di bidang ini masih rendahnya koperasi dan UMKM yang berkualitas ditandai dengan persentase koperasi sehat di angka 19,74% dan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil diangka 28118. Selain itu indikator lain yang mempengaruhi rendahnya koperasi dan UMKM adalah:

1. Persentase peningkatan volume usaha umkm di angka 45 masih perlu di tingkatkan
2. Persentase produk umkm yang masuk pasar di angka 29 masih perlu di tingkatkan
3. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha di angka 1,06 masih perlu di tingkatkan
4. Masih rendahnya persentase peningkatan laba usaha koperasi di angka 0
5. Masih rendahnya Persentase pelaporan rat koperasi tepat waktu diangka 0; dan
6. Masih rendahnya cakupan bina koperasi di angka 0

H. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Olahraga adalah bentuk aktivitas fisik yang biasanya bersifat kompetitif dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik seseorang seraya memberikan hiburan bagi pemain dan penonton. Dalam

kehidupan bersosial, olahraga merupakan suatu fenomena sekaligus bentuk ekspresi manusia.

Dalam bidang kepemudaan dan olahraga isu permasalahan yang terjadi masih rendahnya kapasitas daya saing pemuda dalam bidang ekonomi ditandai dengan masih kurangnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri yaitu sebesar 2,76%. Selain itu juga masih rendahnya prestasi olahraga daerah ditandai dengan masih kurangnya persentase desa yang mengikuti event olahraga yaitu sebesar 16,6% dan masih rendahnya persentase kenaikan perolehan medali dalam porprov yaitu sebesar 7,5%. Tidak hanya itu dua tujuan diatas juga di pengaruhi indikator dibawah ini:

1. Masih rendahnya jumlah pemuda yang berwirausaha sebanyak 36 orang
2. Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial sebesar 2,76%
3. Masih rendahnya jumlah atlet berprestasi sebanyak 67 orang
4. Masih rendahnya persentase desa yang melaksanakan germas olahraga sebesar 32%.

Selain sarana dan prasarana olahraga yang masih perlu di tingkatkan hal ini ditandai dengan jumlah lapangan futsal ada 1, panjat tebing ada 1, lapangan bola ada 2, badminton ada 1, lapangan tenis ada 1, lapangan voli ada 1, lapangan basket ada 1, dan lapangan tembak ada 1.

I. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan adalah salah satu lembaga pendidikan yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat. Namun, di era digital ini, minat baca masyarakat semakin menurun dan peran perpustakaan semakin terpinggirkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan peningkatan perpustakaan di suatu daerah harus mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

Masalah menurunnya minat baca masyarakat ini dikarenakan terbatasnya akses masyarakat terhadap perpustakaan. Selain itu, dampak dari perkembangan teknologi semakin menggerus keberadaan Perpustakaan di masyarakat, jika Perpustakaan tidak dapat mengembangkan layanannya dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada maka, sudah dapat dipastikan perpustakaan akan semakin ditinggalkan dan pada akhirnya tingkat minat baca masyarakat di Kabupaten Empat Lawang akan semakin rendah.

Sehingga isu permasalahan yang ada di bidang ini kurangnya pembangunan masyarakat ditandai dengan masih rendahnya indeks peningkatan literasi masyarakat sebesar 50,61 dan juga masih rendahnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah ditandai dengan masih rendahnya kategori hasil pengawasan kearsipan yaitu D. Selain itu indikator lain yang juga mempengaruhi adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat gemar membaca sebesar 61,03
2. Survei kepuasan masyarakat sudah cukup bagus yaitu sebesar 85,03
3. Jumlah pengunjung perpustakaan yang masih rendah yaitu sebesar 2610
4. Akreditasi pusda yang masih rendah yaitu masih C

4.1.4 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Berdasarkan Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan modal dasar bagi pembangunan ekonomi suatu daerah melalui potensi yang dimiliki yang harus digali dan dimanfaatkan. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tak kalah penting antara lain budidaya perikanan serta potensi lainnya. Pemanfaatan sumberdaya perikanan harus dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan kelestarian agar usaha perikanan dapat berlanjut. Akan tetapi isu permasalahan di bidang kelautan dan perikanan yaitu masih belum optimalnya laju pertumbuhan subsektor perikanan ditandai dengan produksi perikanan budidaya yang berada di angka 1162.74 ton dengan LPE perikanan di angka 4,15. Kurangnya produksi perikanan tangkap yaitu pada angka 781 ton, dan masih rendahnya angka konsumsi ikan suatu masyarakat pada angka 29.98%.

B. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata bersifat multidimensional terhadap pembangunan sektor-sektor lainnya terutama bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Majunya industri pariwisata di daerah tergantung dari jumlah kedatangan pengunjung yang berwisata di tempat wisata tersebut. Untuk melaksanakan program-program kepariwisataan dibutuhkan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan agar tersusun secara sistematis. Aturan tersebut sebagai bentuk wewenang yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut dibuat agar jelas bidang-bidang mana saja yang mengelola sarana dan prasarana obyek wisata.

Banyak potensi wisata di Kabupaten Empat Lawang yang belum dikelola dengan standar yang baik atau bahkan kurang layak untuk di jadikan sebagai tempat berkunjung para wisatawan. Selain memerlukan pembentukan peraturan yang lebih kondusif untuk dapat diterapkan di tempat wisata, perlu juga adanya peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan tempat wisata, strategi pemosisian (*positioning*), dan pengiklanan tempat wisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Sehingga isu permasalahan yang terjadi di bidang ini masih rendahnya potensi pariwisata daerah ditandai dengan persentase peningkatan PAD pariwisata yang masih rendah. Selain itu indikator lain yang mempengaruhi diantaranya:

1. Persentase pestinasi pariwisata yang dikembangkan pada tahun 2022 masih di angka 66%
2. Masih rendahnya persentase peningkatan kunjungan wisatawan yaitu sebesar 15% pada tahun 2022
3. Rendahnya persentase rata-rata pertumbuhan volume usaha sektor ekraf pada tahun 2022 di angka 18%
4. Rendahnya Persentase SDM Ekraf yang Berinovasi, dilihat dari pada tahun 2022 tidak ada sama sekali atau di angka 0.

C. Urusan Pertanian

Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta

sumber pendapatan masyarakat. Di Kabupaten Empat Lawang pertanian salah satu pekerjaan mayoritas dari penduduk Kabupaten Empat Lawang, produk unggulan kabupaten empat lawang berasal dari petani, namun walaupun begitu isu permasalahan yang terjadi di bidang ini masih rendahnya kesejahteraan petani ditandai dengan masih rendahnya nilai tukar petani (NTP). Selain itu indikator lain yang mempengaruhi rendahnya kesejahteraan petani diantaranya:

1. Masih rendahnya produksi tanaman pangan padi yang berada di angka 168.038 ton
2. Masih rendahnya produksi tanaman pangan jagung yang berada di angka 56.013
3. Masih kurangnya produksi tanaman hortikultura di angka 6.246,40 ton
4. Kurangnya produksi tanaman perkebunan yaitu sebesar 76.022 ton
5. Masih sedikitnya populasi ternak yang berada pada angka 135.856 ekor
6. Masih kurangnya persentase produk pertanian yang bersertifikasi, dimana jumlah Produk Pertanian yang Bersertifikat yang didapatkan: 2 Jenis (Benih Padi dan Kopi), jumlah Target Produk Pertanian yang bersertifikat: 5 Jenis (Benih padi, beras local, kopi, dendeng sapi, nugget). Persentase Produk Pertanian yang Bersertifikasi pada angka 40%.

D. Urusan Perindustrian

Bidang perindustrian di Kabupaten Empat Lawang terdapat isu permasalahan diantaranya masih rendahnya laju pertumbuhan sektor perdagangan dan sektor industri ditandai dengan masih rendah LPE PDRB sektor perdangan di angka 6,64 dan LPE PDRB sektor industri di angka 9,33.

Capaian indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan dan sektor industri yang masih rendah ini terjadi disebabkan beberapa indikator dibawah ini:

1. Masih rendahnya persentase pertumbuhan industri kecil menengah yang ditandai dengan masih berada di 2,02%
2. Masih belum optimalnya persentase produk IKM yang dipasarkan ditandai dengan masih berada di 4,05%
3. Indeks keberdayaan konsumen (IKK) pada angka 12
4. Masih belum optimalnya persentase pengawasan barang yang masih berada pada angka 68% sehingga masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
5. Selain itu persentase volume usaha yang masih belum optimal

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

A. Urusan Administrasi Pemerintahan

Isu permasalahan yang terjadi pada bidang ini diantaranya:

1. Masih perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan (clean government dan good governance)
2. Perlu adanya komitmen dalam proses penyusunan APBD agar tepat waktu dan tepat guna
3. Diperlukan ketegasan dalam menumbuhkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Diperlukan peningkatan pengelolaan BUMD untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah
5. Belum Optimalnya Investasi di Kabupaten Empat Lawang

B. Urusan Pengawasan

Pengawasan perlu adanya dikarenakan membantu menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan. Kualitas penyelenggaraan pengendalian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Empat Lawang sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan kembali guna mencapai level yang lebih tinggi. Level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sudah berada di level 3 namun masih perlu ditingkatkan kembali. Belum optimalnya kualitas pengendalian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah juga disebabkan beberapa faktor dibawah ini:

1. Level kapabilitas APIP yang masih perlu ditingkatkan dimana nialinya masih berada di level 2+
2. Persentase OPD yang menuju maturitas SPIP level 3 perlu ditingkatkan lagi dimana nilainya masih berada di angka 84 persen
3. Niali program preventif pencegahan korupsi/MCP masih belum optimal ditandai dengan nilai sebesar 58.

C. Urusan Perencanaan

Penyelenggaraan Perencanaan merupakan salah satu penunjang Urusan Pemerintahan daerah. Perencanaan sangat menentukan keberhasilan pencapaian Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018-2023. Namun, kualitas perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal ditandai dengan nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang masih di angka 40,81. Selain itu indikator yang menjadi penyebab faktor masih belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah diantaranya:

1. Masih belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ditandai dengan persentase capaian sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi di angka 56%
2. Nilai indeks inovasi daerah yang perlu di tingkatkan di angka 56,37
3. Persentase inovasi daerah yang difasilitasi sesuai standar yang perlu di tingkatkan di angka 80%.

D. Urusan Keuangan

Bidang keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Namun isu permasalahan di bidang keuangan belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan indeks pengelolaan masih perlu ditingkatkan, dan juga masih rendahnya pengelolaan aset ditandai dengan asset management yang belum optimal. Adapun indikator yang juga ikut menyebabkan rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset sebagai berikut:

1. Persentase BMD yang dipelihara dan diawasi masih belum optimal
2. Belum optimalnya persentase pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahan tanganan BMD yang sesuai aturan
3. Persentase BMD yang terinventarisir yang belum optimal.

E. Urusan Kepegawaian

Isu permasalahan dibidang ini belum optimalnya manajemen pengelolaan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Empat Lawang ditandai dengan nilai indeks merit sistem itu sebesar 145 dari 400 dengan kategori buruk. Adapun indikator yang menjadi faktor selain itu:

1. Belum optimal profesionalisme ASN di Kabupaten Empat Lawang ditandai dengan nilai indeks profesionalisme ASN sebesar 65 dari 100.
2. Nilai indeks NSPK masih sangat perlu ditingkatkan dikarenakan nilai indeks NSPK sebesar 38 dengan kategori D
3. Masih perlu di tingkatkan Persentase pejabat yg telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan di angka 81,17
4. Masih perlu di tingkatkan Persentase pengisian jabatan struktural dalam struktur organisasi di angka 83

4.2 Isu Strategis

1) Isu Global

Isu prediksi terjadinya Resesi dunia

Resesi merupakan penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh ekonomi, berlangsung lebih dari beberapa bulan, biasanya terlihat dalam PDB riil, pendapatan riil, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir-eceran. Hal yang menyebabkan terjadinya resesi adalah:

1. Guncangan ekonomi Peristiwa tak terduga yang menyebabkan gangguan ekonomi yang meluas, seperti bencana alam atau serangan teroris. Contoh terbaru adalah Pandemi Covid-19 yang melanda semua negara.
2. Kehilangan kepercayaan konsumen
3. Suku bunga tinggi
4. Deflasi
5. Gelembung aset

Diperparah oleh perang Rusia dan Ukraina dan perubahan kebijakan moneter oleh sederet negara maju seperti Amerika Serikat (AS). Risiko baru yang muncul dalam bentuk ketegangan geopolitik di Eropa yang menimbulkan banyak sekali dampak negatif, dari krisis pangan, energi dan potensi krisis keuangan. Walaupun telah disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa resesi yang diprediksi akan terjadi di Tahun 2023 ini telah dapat diantisipasi oleh negara - negara maju dengan melakukan berbagai kebijakan ekonomi sehingga akhirnya diprediksi perekonomian negara- negara maju tersebut akan Soft Landing (Inflasi turun tanpa Resesi), Namun isu ini masih harus menjadi perhatian dan antisipasi bersama.

2) Isu yang bersumber dari Nasional

Pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024

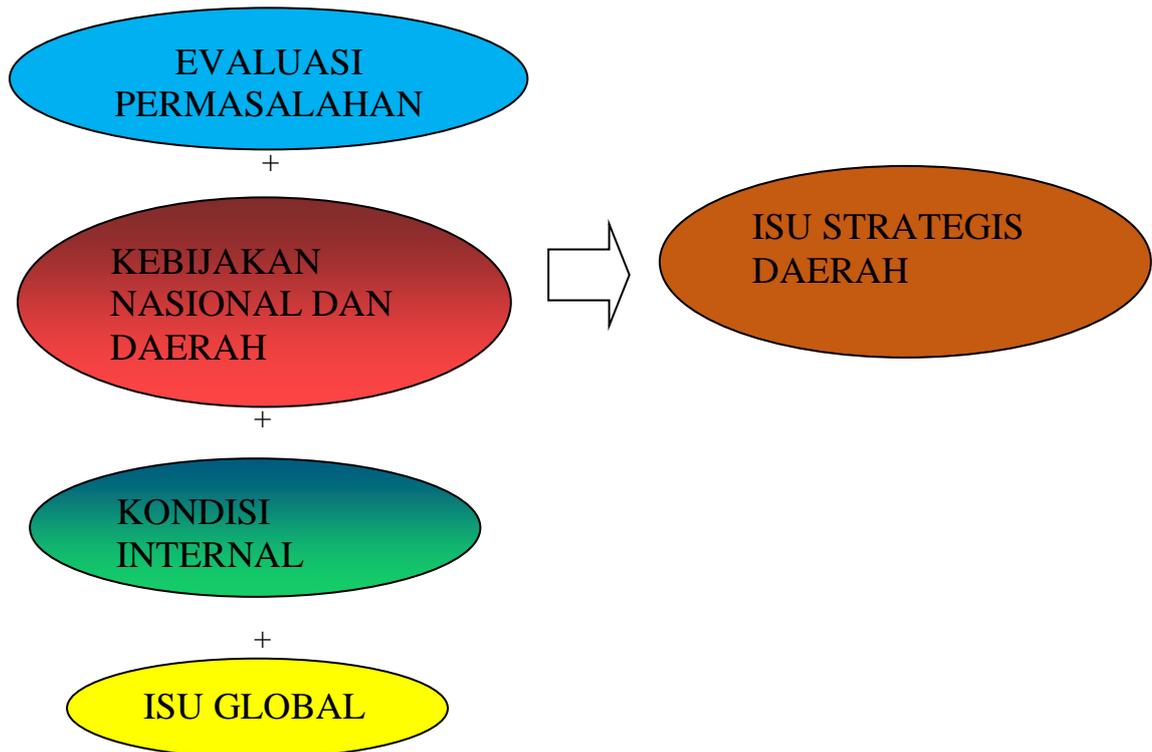
Dalam rangkaian **Pelaksanaan Pileg Tahun 2023 dan** Pemilu serentak Tahun 2024, terdapat sejumlah kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pelaksanaan Pemilu, sehingga akan diisi dengan pejabat sementara kepala daerah yang akan ditunjuk oleh Presiden. Pada Tahun 2022 dan 2023 terdapat 171 kepala daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, yang akan berakhir masa jabatannya. Kondisi itu harus dikelola dengan baik karena berpotensi menimbulkan perselisihan politik yang dapat menjadi pemicu timbulnya konflik di

kemudian hari, terutama pada pemilu 2024 dan apabila perselisihan politik benar - benar terjadi tentunya akan berdampak pada seluruh sektor yang ada.

3) Isu yang bersumber dari Dalam Kabupaten Empat Lawang

Isu strategis merupakan permasalahan perlu diatasi secara bertahap yang berkaitan dengan fenomena dan memiliki dampak jangka panjang pelaksanaan pembangunan. Adapun isu -isu strategis yang tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Gambar 4.23 Kerangka Pikir Perumusan Isu Strategis Daerah



Sumber : Bappeda Kabupaten Empat Lawang

a. Peningkatan Keamanan dan Kondusifitas wilayah

Pelaksanaan pesta demokrasi Tahun 2023 dan 2024 harus disikapi dengan cerdas dan bijaksana oleh seluruh elemen yang ada. Pentingnya edukasi masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah, tidak mudah terpancing dengan situasi yang ada. Berpijak pada pelaksanaan pilkada Kabupaten Empat Lawang Tahun 2013 lalu dimana seluruh elemen kurang mampu menyikapi dan mengantisipasi situasi yang ada. Karena ketidak Kondusifan wilayah ini tentu saja akan berpengaruh pada seluruh aktivitas yang ada bahkan pada akhirnya berdampak pada ekonomi masyarakat.

Disamping itu keamanan wilayah di Kabupaten Empat yang sudah cukup baik dengan pemberdayaan pol pp desa, perlu terus ditingkatkan karena akan berdampak pada pertumbuhan berbagai sektor yang ada. Dalam hal penanggulangan bencana Kabupaten Empat Lawang telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menangani semua kejadian yang diakibatkan oleh bencana, sedangkan untuk penanggulangan kebakaran dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Kabupaten Empat Lawang memiliki

daerah rawan banjir dan rawan bencana, sehingga perlu peningkatan dalam hal penanganan bencana tersebut. Untuk meningkatkan kinerja petugas, BPBD telah mengadakan sosialisasi pencegahan dan penanganan bencana dan meningkatkan pelatihan tenaga sukarela pertolongan bencana di kecamatan-kecamatan. Namun sarana prasarana serta kapasitas SDM dalam menangani bencana dan kebakaran masih minim.

b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Empat Lawang

Era globalisasi dan digitalisasi menuntut Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan (mental spiritual dan akademis) dan ketrampilan. Pendidikan mental spiritual mempunyai peran yang sangat penting dalam menyelamatkan generasi muda dari dampak negatif pada era globalisasi ini. Sedangkan pendidikan akademis dan ketrampilan mutlak dibutuhkan guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Generasi yang religius. Kompeten dan terampil akan menjadi modal besar pembangunan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang efisiensi dan efektif dalam era global ini.

Kualitas sumber daya manusia merupakan merupakan komponen penting dalam setiap gerak dari strategi pembangunan daerah. Dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dapat mempercepat pembangunan daerah. Agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh penduduk harus mempunyai kualitas yang memadai sehingga dapat menjadi modal pembangunan yang efektif. Tanpa adanya peningkatan kualitas, jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan berbagai masalah dan menjadi beban pembangunan. Melalui pengembangan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan agama, formal dan non formal serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan yang bermutu, mudah, murah, cepat dan tepat, serta peningkatan penanganan penyakit menular (*Aids dan Tuberculosis*) dan penyakit tidak menular (*Malaria (ATM)* dan diabetes melitus dan penguatan sistem kesehatan. Kualitas Sumber daya manusia yang berkorelasi dengan Indeks Pembangunan Manusia peningkatannya dari tahun ketahun belum optimal, menempati urutan 15 se Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

c. Peningkatan harmonis sosial

Peningkatan harmonis sosial acaman terhadap degradasi nilai-nilai religiusitas dan nilai-nilai luhur budaya menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Diperlukan internalisasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya dalam masyarakat.

d. Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap anak harus benar - benar menjadi perhatian Pemerintah Daerah karena separuh dari potensi sumber daya pembangunan ada pada anak sebesar 31% sebagai generasi penerus bangsa, maka harus dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang optimal dan memiliki kualitas hidup yang baik. Perlindungan terhadap anak merupakan salahsatu Hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak

asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua sebagai lingkungan yang pertama dan utama. Selain itu, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga berperan dalam memenuhi hak anak. Hak-hak anak antara lain, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak.

"Pemenuhan hak-hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai tunas bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur," isu anak yang menonjol di tingkat nasional terkait perlindungan dan hak anak seperti stunting, rendahnya akses PAUD, putus sekolah, dan perkawinan anak. Sehingga tidak boleh ada seorang anak yang diabaikan dalam memperoleh haknya dimanapun dia berada, dan bagaimanapun kondisinya, termasuk anak penyandang disabilitas, karena anak-anak tersebut juga mempunyai hak yang sama di berbagai bidang kehidupan.

Selain perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap perempuan juga sangat penting karena perempuan menjadi bagian dari modal pembangunan yaitu sebanyak 49,4% . Kasus kekerasan yang menimpa para korban terjadi di berbagai tempat, paling banyak kasus kekerasan terjadi di rumah tangga, fasilitas umum, dan tempat yang masuk dalam kategori lainnya, sedangkan kasus kekerasan di sekolah dan tempat kerja jumlahnya kecil. Dari segi jumlah korban rumah tangga memiliki korban kekerasan terbanyak, disusul oleh tempat yang masuk dalam kategori lainnya, sekolah, tempat kerja, dan lembaga pendidikan kilat. Sementara itu, dari jenis kekerasan yang dialami, kekerasan seksual menempati urutan pertama (hal ini tentunya sangat memprihatikan) disusul oleh kekerasan fisik, psikis, kekerasan yang masuk dalam kategori lainnya, penelantaran, trafficking, dan eksploitasi. Berdasarkan usia, korban yang mengalami kekerasan terbanyak adalah dalam rentang usia 13-17 tahun, disusul oleh usia 25-44 tahun, 6-12 tahun, 18-24 tahun, 0-5 tahun, 45-59 tahun, dan 60 tahun lebih. Kemudian, berdasarkan pendidikan, korban yang mengenyam bangku SMA tercatat paling banyak. Disusul oleh SMP, SD, perguruan tinggi, tidak sekolah, kategori lainnya, TK, dan PAUD.

Berpijak dari kondisi ini maka Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Empat Lawang harus meningkatkan kinerjanya dalam dan berperan aktif dalam pelayanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, akses penampungan sementara, pelayanan mediasi, dan pelayanan pendampingan korban kekerasan anak dan perempuan tersebut, disamping memberikan pemahaman, pengetahuan, dan edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak kita

e. Peningkatan nilai tambah (value Added) produk pertanian dan Penguatan rantai nilai (Value chain) tata niaga Pertanian untuk penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan

Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Empat Lawang yaitu sebesar 33%, dan rata - rata masyarakat di Kabupaten Empat Lawang adalah Petani. Namun tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten belum meningkat terutama kesejahteraan petani. Strategi yang dapat dilakukan adalah perubahan orientasi pembangunan

pertanian yang bernilai rendah (*low value added*) ke yang bernilai tinggi (*high value added*).

Tantangan pembangunan nilai tambah sektor industri pertanian ke depan adalah bagaimana memproduksi hasil-hasil pertanian yang lebih banyak, lebih berkualitas, dan lebih berkelanjutan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Masih tergantungnya petani terhadap kontrak farming/ pengumpul dalam menjual produknya, menjadi salahsatu penyebab harga produk pertanian yang kurang sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan/Nilai Tukar petani cenderung rendah. Sehingga Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mengendalikan sistem distribusi tata niaga tersebut, mulai dari petani sampai dengan konsumen dan bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk menjadikan komoditas andalan kabupaten menjadi referensi harga nasional bahkan internasional.

f. Peningkatan pemenuhan Infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah untuk pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta peningkatan kelestarian Lingkungan Hidup

Pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi air merupakan kebutuhan mendasar seluruh rakyat dan menyangkut kualitas kehidupan rumah tangga. Pembangunan infrastruktur air dan sanitasi berhubungan tak hanya pada kesejahteraan tapi kualitas hidup dasar seluruh warga karena merupakan kebutuhan dasar dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan Daerah dengan pendapatan per kapita rendah memerlukan porsi infrastruktur yang besar untuk irigasi, listrik, dan air bersih sehingga pembangunan dan aksesibilitas air bersih dan sanitasi harus jadi prioritas. Kabupaten Empat Lawang menduduki posisi bawah dalam pemenuhan air bersih dan sanitasi ini/ cakupan pemenuhannya masih rendah, dan ini menjadi salahsatu PR besar Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Disamping pemenuhan air bersih dan sanitasi, infrastruktur wilayah memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Infrastruktur tidak hanya berperan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengatasi kesenjangan antardaerah. Ketimpangan antardaerah yang tercermin dalam perbedaan pendapatan per kapita juga menandakan perbedaan kebutuhan akan infrastruktur.

Kelestarian Lingkungan yang menjadi tugas bersama harus menjadi perhatian dalam pengelolaannya hal ini juga karena secara geografis Kabupaten Empat Lawang berada di hulu sungai Musi sehingga kelestarian lingkungan Kabupaten Empat Lawang menjadi pengungkit sampai hilir. Diantara isu kelestarian lingkungan di Kabupaten Empat Lawang adalah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Empat Lawang sampai saat ini masih menjadi PR besar. Cakupan pelayanan sampah Rumahtangga dan kesadaran masyarakat yang cenderung masih rendah menyebabkan sampah belum tertangani dengan maksimal disamping pengelolaan terhadap sampah - sampah tersebut (*Reduce, Reuse dan Recycle*) melalui pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang. Selain sampah, isu tentang emisi gas yang menjadi isu internasional dan capaian

Indek Tutupan Lahan Kabupaten Empat Lawang yang tidak memenuhi target nasional Tahun 2022. Selain itu keterbatasan lahan terbangun khususnya untuk permukiman menjadikan lingkungan yang kurang kondusif.

g. Penurunan Kemiskinan dan Keluarga Beresiko Stunting

Penurunan kemiskinan dan keluarga beresiko stunting sangat di perlukan. Hasil Riset Kesehatan Dasar RI Tahun 2018 menunjukkan prevalensi balita stunting di Kabupaten Empat Lawang sebesar 36,0%, menempati posisi ke-4 tertinggi se-Sumatera Selatan. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab ibu dan anak tak memperoleh gizi yang cukup. "Memang tidak semua orang miskin anaknya stunting, tetapi sebagian besar stunting itu diakibatkan karena kemiskinan. Bahkan, anak yang mengalami stunting memiliki risiko mengalami kerusakan sel otak. Akibat pertumbuhan otak yang terganggu, anak-anak yang mengalami stunting akan mengalami kesulitan belajar karena kemampuan kognitifnya terbatas. Dampak pertumbuhan otak yang terhambat ini akan berlanjut ke usia produktif. Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11 persen GDP (*Gross Domestic Products*).

h. Penguatan teknologi informasi daerah dalam pelayanan publik.

Peningkatan kandungan teknologi informasi dan komunikasi dalam birokrasi pemerintah memiliki peran yang strategik bukan hanya meningkatkan kinerja pemerintah daerah baik dalam upaya penyebaran informasi, efektifitas dan efisiensi anggaran, pengendalian korupsi, meluasnya akses informasi masyarakat, memperpendek hubungan kerja antar institusi dan personal, sehingga optimalisasi E - Government sangat perlu dilakukan didukung dengan infrastruktur jaringan.

**BAB
V**

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 – 2026 bertujuan menjelaskan dan menguraikan tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Empat Lawang yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Empat Lawang 2008 – 2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi.

Sesuai dengan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rancangan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pernyataan Visi Misi serta Arah Kebijakan RPJPD periode terakhir serta Tujuan dan Sasaran Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

5.1 TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi didasarkan pada urutan pilihan dalam melakukan tindakan dimasa depan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai arah kebijakan RPJPD periode terakhir. Berikut keterkaitan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan dengan Tujuan RPD Tahun 2024-2026.

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan dengan Tujuan

No	Visi	No	Tujuan
1	2	3	4
1	Mandiri	1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2	Terdepan	2	Meningkatnya Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang
3	Strategis	3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup
No	Misi	No	Tujuan
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Maju dan Berdaya Saing	1	Meningkatnya Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang

2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing	2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup
3	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri, Lestari, dan Berkelanjutan	3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup
4	Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kabupaten yang Memadai dan sesuai perkembangan	4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
No	Arah Kebijakan	No	Tujuan
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Meningkatnya Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang
2	Pengetasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial	2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup
3	Peningkatan Daya Saing Perekonomian	3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup
4	Peningkatan Kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas publik	4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5	Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	5	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup
6	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

5.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan arah kebijakan RPJPD dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 3 (tiga) tahun. Untuk mengukur keberhasilan tujuan maka ditetapkan Indikator Tujuan. Adapun indikator tujuan disajikan dalam tabel 5.1

Tabel 5.2 Indikator Tujuan

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	Ukuran
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka

2	Meningkatnya Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang	2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka
		3	Indeks Pembangunan Gender	Angka
		4	Tingkat Kemiskinan	%
		5	Gini Rasio	Angka
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup	6	Perumbuhan Ekonomi	%
		7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%

5.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Keterkaitan tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	No	Sasaran
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah
		2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		3	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
2	Meningkatkan Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang	4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		5	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Daerah
		6	Meningkatnya Standar Hidup Layak
		7	Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup	8	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Ex-Transmigrasi
		9	Meningkatnya Pembangunan Desa
		10	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok
		11	Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Antar Wilayah
		12	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik
		13	Meningkatnya Peluang Investasi Daerah
14	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan		

		15	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup
--	--	----	---

Untuk mengukur keberhasilan sasaran digunakan indikator Sasaran. Indikator sasaran disajikan dalam tabel 5.3 di bawah ini.

Tabel 5.4 Sasaran dan Indikator Sasaran

No 1	Sasaran 2	No 3	Indikator Sasaran 4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Nilai SAKIP
		2	Persentase Peningkatan IPKD
		3	Indeks Integritas Daerah (SPI)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	4	Indeks Pemantauan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	5	Indeks SPBE
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6	Angka harapan hidup
		7	Nilai kabupaten sehat
5	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Daerah	8	Indeks pendidikan
6	Meningkatnya Standar Hidup Layak	9	Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga
7	Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin	10	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapat Bantuan Program Pemerintah
8	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Ex-Transmigrasi	11	Presentase Desa di Wilayah Ex-Transmigrasi yang Masuk Kategori Berkembang
9	Meningkatnya Pembangunan Desa	12	Indeks Desa Membangun
10	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok	13	Tingkat Inflasi
11	Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Antar Wilayah	14	Ratio Konektivitas Transportasi Wilayah
12	Meningkatnya layanan infrastruktur dalam kondisi	15	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik

	baik	16	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik
		17	Tingkat Konektivitas Jalan
		18	Persentase Bangunan Gedung Dan Arsitektur Prasarana Pemerintah Dan Kepentingan Strategis Pemerintah Kabupaten Yang Sesuai Standar
13	Meningkatnya Peluang Investasi Daerah	19	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten
14	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor unggulan	20	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Pertanian
		21	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Perdagangan
		22	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Industri
15	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 5.5
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	42,73	46,25	48,25	50,25	50,25
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	63,10	64,20	65,30	66,40	66,40
			Persentase Peningkatan IPKD	Persentase	NA	0,008	0,010	0,012	0,012
			Indeks Integritas Daerah (SPI)	Angka	62,74	65,56	68,74	71,24	71,24
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pemantauan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Angka	4	4,03	4,06	4,10	4,10

		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	Angka	3	3,20	3,35	3,50	3,50	
2	Meningkatkan Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	66,00	66,45	66,90	67,35	67,35	
			Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,32	93,66	94,00	94,34	94,34	
			Tingkat Kemiskinan	%	12,06	11,40	11,07	10,74	10,74	
			Gini rasio	Angka	0,33	0,31	0,29	0,27	0,27	
			Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin	Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapat Bantuan Program Pemerintah	%	27,14	35	40	50	50
			Meningkatnya Standar Hidup Layak	Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga	Rupiah	9.838	9.904	9.970	10.036	10.036

		Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Pendidikan Daerah	Indeks Pendidikan	Angka	0,603	0,609	0,615	0,62	0,62
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,45	65,58	65,72	65,85	65,85
			Nilai Kabupaten Sehat	Angka	45	50	55	60	60
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	5,55	5,85	6,15	6,15
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	17,00	19,00	21,00	23,00	23,00
		Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71,04	73,13	74,97	76,81	76,81

	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan	LPE PDRB Sektor Pertanian	%	4,15	4,22	4,29	4,36	4,36
		LPE PDRB Sektor Perdagangan	%	6,64	6,7625	6,885	7,01	7,01
		LPE PDRB Sektor Industri	%	9,33	9,76	10,20	10,63	10,63
	Meningkatnya Peluang Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Di Kabupaten	%	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08
	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	70,36	78,46	79,81	81,26	81,26
		Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	52,35	64,35	69,5	74,5	74,5

		Tingkat Konektivitas Jalan	%	42.21	44.1	46.1	48.1	48.1
		Persentase Bangunan Gedung Dan Arsitektur Prasarana Pemerintah Dan Kepentingan Strategis Pemerintah kabupaten yang sesuai standar	%	66	75	83	90	90
	Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Antar Wilayah	Ratio Konektivitas Transportasi Wilayah	Angka	0,50	0,60	0,80	0,90	0,90
	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok	Tingkat inflasi	%	1,63	1,62	1,61	1,60	1,60

	Meningkatnya Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Angka	0,6408	0,6559	0,6710	0,6862	0,6862
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Ex-Transmigrasi	Presentase Desa Di Wilayah Ex-Transmigrasi yang Masuk Kategori Berkembang	%	80	80	80	100	100



**BAB
VI**

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

6.1.1 Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis selain mengagendakan aktivitas pembangunan, juga mengakomodasi segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan perumusan isu strategis yang ada dalam bab sebelumnya menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi, faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola (*manageable, controllable*) mencakup kekuatan dan kelemahan (*Strength and Weakness*). Sedangkan dalam lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan (*uncontrollable*), yang meliputi peluang dan ancaman (*Opportunity dan thereath*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.



Tabel 6.2 SWOT Pertumbuhan Ekonomi

STRENGTH		WEAKNESS	
1	Pendanaan yang memadai	1	Pemetaan prioritas perencanaan dan penganggaran yang belum baik
2	Jumlah ASN yang memadai	2	Value Added produk Pertanian yang masih kurang
		3	Belum kuatnya rantai nilai (Value chain) tata niaga Pertanian
		4	Belum kuatnya karakter dan pondasi ekonomi pedesaan dan pemberdayaan
		5	Lemahnya pengembangan infrastruktur dalam mendukung perekonomian khususnya Pertanian dan Pariwisata
		6	Lambatnya pertumbuhan wirasusaha baru
OPPORTUNITY		THREAT	
1	Letak geografis yang berada di jalur lintas Sumatera	1	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan
2	Potensi Pertanian yang besar	2	Kondisi Ekonomi dunia, isu resesi
3	Potensi Perikanan yang cukup baik	3	Perubahan iklim ekstrim yang mempengaruhi produksi pertanian
4	Fungsi Kebijakan dan Regulasi	4	Sumber energi listrik masih terbatas dan bergantung daerah tetangga
5	Banyaknya Peluang Pembiayaan Pembangunan alternatif termasuk Adanya Dana Desa	5	Produk pasar luar daerah yang masuk dan lebih diminati
6	Proporsi Penduduk usia produktif yang lebih besar dari usia non produktif	6	Sarana Prasarana pendukung yang belum memadai (Kelistrikan)
7	Banyaknya program - program pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah		

INTERNAL

EXTERNAL



Tabel 6.3 SWOT Indeks Reformasi Birokrasi

INTERNAL

EKSTERNAL

STRENGTH

1	Pendanaan yang memadai
2	Kepemilikan berbagai sistem informasi yang cukup memadai
3	Jumlah ASN yang memadai

WEAKNESS

1	Minimnya inovasi dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah daerah
2	Kurangnya kemauan dalam mereformasi birokrasi
3	Kurangnya integritas ASN
4	Budaya kerja ASN yang kurang baik
5	Rendahnya kinerja dan pengukuran kinerja ASN
6	Kurangnya kemauan ASN dalam meningkatkan kapasitasnya
7	Penempatan ASN yang tidak sesuai kompetensi dan kebutuhan

OPPORTUNITY

1	Besarnya upaya pemerintah pusat dalam Reformasi Birokrasi
2	Fungsi Kebijakan dan Regulasi
3	Banyaknya program - program pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah

THREAT

	Image kurang baik masyarakat terhadap birokrasi pemerintah

Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut :

1. Strategi S-O ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi yang harus diterapkan adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth Oriented Strategi*).
2. Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara Meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang pembiayaan pembangunan yang besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal.
3. Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat *defensive* atau strategi untuk *survive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi ini dikenal sebagai *damage control*, yang diartikan sebagai

upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki.

4. Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai *mobilization strategy*, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada pemerintah di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang.

**Tabel 6.4 Analisis SWOT dalam penentuan Strategi Daerah
Indek Pembangunan Manusia**

<p>Strategi S - O</p> <p>Peningkatan integrasi program pemerintah pusat dan lainnya dalam peningkatan kompetensi angkatan kerja dan penciptaan wirausaha baru</p>	<p>Strategi W - O</p> <p>Peningkatan inovasi dalam pendidikan, kesehatan dan ekonomi melalui pendanaan kolaboratif</p>
<p>Strategi S-T</p> <p>Optimalisasi pendanaan mandatori, pusat dan lainnya untuk penguatan SDM melalui akses pendidikan formal/non formal dan kesehatan serta kesetaraan gender</p>	<p>Strategi W-T</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internalisasi nilai agama dan nilai luhur budaya dalam masyarakat sebagai modal dasar pembangunan - Transformasi Pola pikir dan perilaku masyarakat guna peningkatan kualitas hidup masyarakat, percepatan penurunan kemiskinan dan keluarga berisiko stunting

**Tabel 6.5 Analisis SWOT dalam penentuan Strategi Daerah
Pertumbuhan Ekonomi**

<p>Strategi S -O</p> <p>Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sektor pertanian dan sektor potensial lainnya dari hulu hingga hilir</p>	<p>Strategi W - O</p> <p>Peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan guna mendorong interkoneksi antar wilayah, Pertanian dan Sektor Potensial pendukung perekonomian lainnya</p>
<p>Strategi S-T</p> <p>Peningkatan rantai nilai (value chain) tata niaga perdagangan</p>	<p>Strategi W-T</p> <p>Peningkatan pembangunan yang pro enviroment</p>

**Tabel 6.6 Analisis SWOT dalam penentuan Strategi Daerah
Indek Reformasi Birokrasi**

<p>Strategi S -O</p> <p>Akselerasi reformasi birokrasi yang didukung ASN profesional dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan digitaliasi pelayanan publik</p>	<p>Strategi W - O</p> <p>Peningkatan ASN yang inovatif, cerdas dan kreatif dengan memanfaatkan besarnya upaya pemerintah pusat dalam reformasi birokrasi</p>
<p>Strategi S-T</p> <p>Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi teknologi informasi dan membangun sistem pengendalian yang berorientasi pada hasil</p>	<p>Strategi W-T</p> <p>Percepatan pelaksanaan revolusi mental ASN melalui Gerakan Indonesia Melayani (GIM) yang fokus pada penciptaan budaya baru di lingkungan unit kerja dan organisasi aparatur negara.</p>



Tabel 6.7 Tujuan, Sasaran dan Strategi

No	Tujaun	Sasaran	Strategi
	Meningkatnya pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat empat lawang	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Optimalisasi pendanaan mandatori, pusat dan lainnya untuk penguatan SDM
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan daerah	melalui akses pendidikan formal/non formal dan kesehatan serta kesetaraan gender
			<p>Peningkatan inovasi dalam pendidikan, kesehatan dan ekonomi melalui pendanaan kolaboratif</p> <p>Transformasi Pola pikir dan perilaku masyarakat guna peningkatan kualitas hidup masyarakat, percepatan penurunan kemiskinan dan keluarga berisiko stunting</p> <p>Optimalisasi penggunaan anggaran dibidang Kesehatan dan monitoring secara berkala program dan kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja di bidang Kesehatan</p> <p>Penyusunan prioritas pemecahan masalah di bidang Kesehatan dan penguatan SOP Pelaksanaan setiap kegiatan bidang Kesehatan</p>
		Meningkatnya standar hidup layak	Peningkatan integrasi program pemerintah



			pusat dan lainnya dalam peningkatan kualitas SDM usia produktif yang berdaya saing
		Pengurangan beban rumah tangga miskin	Transformasi Pola pikir dan perilaku masyarakat guna peningkatan kualitas hidup masyarakat, percepatan penurunan kemiskinan dan keluarga berisiko stunting
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis lingkungan hidup	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ex-transmigrasi	Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sektor pertanian dan sektor potensial lainnya dari hulu hingga hilir
		Meningkatnya pembangunan desa	
		Terkendalnya harga barang kebutuhan pokok	Peningkatan rantai nilai (value chain) tata niaga perdagangan
		Meningkatnya kemudahan akses transportasi antar wilayah	Peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan guna mendorong interkoneksi antar wilayah, Pertanian dan Sektor Potensial pendukung perekonomian lainnya
		Meningkatnya layanan infrastruktur dalam kondisi baik	
		Meningkatnya peluang investasi daerah	
		Meningkatnya laju pertumbuhan sektor unggulan	Peningkatan rantai nilai (value chain) tata niaga perdagangan
			Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sektor pertanian dan sektor potensial lainnya dari hulu hingga hilir
			Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup



	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Akselerasi reformasi birokrasi yang didukung ASN profesional dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan digitalisasi pelayanan publik
			Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi teknologi informasi dan membangun sistem pengendalian yang berorientasi pada hasil
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan ASN yang inovatif, cerdas dan kreatif dengan memanfaatkan besarnya upaya pemerintah pusat dalam reformasi birokrasi
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Percepatan pelaksanaan revolusi mental ASN melalui Gerakan Indonesia Melayani (GIM) yang fokus pada penciptaan budaya baru di lingkungan unit kerja dan organisasi aparatur negara.

6.1.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan.

Tabel 6.8 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
		2024	2025	2026
1.1 1.2		Optimalisasi pendanaan mandatori, pusat dan lainnya untuk penguatan SDM melalui akses pendidikan formal/non formal dan kesehatan serta kesetaraan gender		
		Peningkatan inovasi dalam pendidikan, kesehatan dan ekonomi melalui pendanaan kolaboratif		
		Transformasi Pola pikir dan perilaku masyarakat guna peningkatan kualitas hidup masyarakat, percepatan penurunan kemiskinan dan keluarga berisiko stunting		
1.3		Peningkatan integrasi program pemerintah pusat dan lainnya dalam peningkatan kualitas SDM usia produktif yang berdaya saing		
1.4		Transformasi Pola pikir dan perilaku masyarakat guna peningkatan kualitas hidup masyarakat, percepatan penurunan kemiskinan dan keluarga berisiko stunting		
2.1 2.2		Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sektor pertanian dan sektor potensial lainnya dari hulu hingga hilir		
2.3		Peningkatan rantai nilai (value chain) tata niaga perdagangan		
2.4 2.5 2.6		Peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan guna mendorong interkoneksi antar wilayah, Pertanian dan Sektor Potensial pendukung perekonomian lainnya		
2.7 2.8		Peningkatan rantai nilai (value chain) tata niaga perdagangan		
		Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sektor pertanian dan sektor potensial lainnya dari hulu hingga hilir		
2.9		Peningkatan pembangunan yang pro environment		
3.1		Akselerasi reformasi birokrasi yang didukung ASN profesional dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan digitaliasi pelayanan publik		
		Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi teknologi informasi dan membangun sistem pengendalian yang berorientasi pada hasil		

3.2	➔	Peningkatan ASN yang inovatif, cerdas dan kreatif dengan memanfaatkan besarnya upaya pemerintah pusat dalam reformasi birokrasi
3.3	➔	Percepatan pelaksanaan revolusi mental ASN melalui Gerakan Indonesia Melayani (GIM) yang fokus pada penciptaan budaya baru di lingkungan unit kerja dan organisasi aparatur negara.

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang beserta pagu indikatifnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Menigkatnya Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	66 Angka	66,35 Angka		66,63 Angka		66,91 Angka		66,91 Angka	
	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	93,32 Angka	93,66 Angka		94 Angka		94,34 Angka		94,34 Angka	
	Tingkat kemiskinan	12,06 %	12 %		11,95 %		11 %		11 %	
	Gini Ratio	0,36 Angka	0,35 Angka		0,34 Angka		0,34 Angka		0,34 Angka	
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Harapan Hidup	65,45 Angka	65,58 Angka		65,72 Angka		65,85 Angka		65,85 Angka	
	Nilai Kabupaten Sehat	45 Nilai	50 Nilai		55 Nilai		60 Nilai		60 Nilai	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat dengan Jaminan Pelayanan Kesehatan	68,79	98	80.816.631.329,00	98	84.842.446.998,00	98	89.260.422.753,00	98	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/Kelurahan Ber- PHBS	75	79	1.046.787.400,00	83	1.141.466.140,00	87	1.245.612.754,00	87	DINAS KESEHATAN
MENINGKATNYA KUALITAS DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DAERAH	Indeks Pendidikan	0,603 Angka	0,609 Angka		0,615 Angka		0,62 Angka		0,62 Angka	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar mendekati 100	104,31	104,50		105		105,25		105,25	DINAS PENDIIDKAN DAN KEBUDAYAAN
	Angka Partisipasi Murni	92,38	92,50	14.000.000.000,00	93	14.000.000.000,00	93	14.000.000.000,00	93	

	Angka Melek Huruf	98,97	99,00		99,25		99,25		99,25	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rasio Guru Terhadap Siswa	366,9	366,9	180.000.000,00	367	180.000.000,00	367	180.000.000,00	367	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rasio Guru Terhadap Pelajaran	200	200		210		210		210	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Sekolah Terhadap guru	6,45 Angka	6,5 Angka	5.203.030.000,00	6,6 Angka	5.203.030.000,00	6,7 Angka	5.203.030.000,00	6,7 Angka	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rasio Guru Terhadap Murid	9,39 Angka	9,45 Angka		9,5 Angka		10 Angka		10 Angka	
	Rasio Kelas Terhadap Murid	0,02 %	0,05 %		0,05 %		0,05 %		0,05 %	
MENINGKATNYA STANDAR HIDUP LAYAK	Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga (dalam ribu)	9.838 Rp	9.904 Rp		9.970 Rp		10.036 Rp		10.036 Rp	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Wirausaha Baru	40	50	230.000.000,00	60	300.000.000,00	70	400.000.000,00	70	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	3,3	4		5		6		6	

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pekerjaan	52	60	160000000	70	220000000	80	280.000.000,00	80	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan yang menerapkan hasil pelatihan pengembangan ekonomi	50	70	1.220.500.000,00	80	1.478.750.000,00	100	1.626.625.000,00	100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGURANGAN BEBAN RUMAH TANGGA MISKIN	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN YANG MENDAPAT BANTUAN PROGRAM PEMERINTAH	27,14	35		40		50		50	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial Terhadap PSKS	100	100	308.500.000,00	100	394.668.000,00	100	445.000.000,00	100	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Fasilitas Pelayanan Rehabilitasi dan Pendampingan Sosial Sesuai Standar	70	80	1.281.500.000,00	85	1.277.502.900,00	90	1.345.000.000,00	90	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100	100	275.000.000,00	100	1.129.000.000,00	100	1.180.000.000,00	100	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Pasca Bencana	100	100	1.781.450.000,00	100	1.065.017.000,00	100	1.125.000.000,00	100	DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM Yang Bermitra Dengan Pelaku Usaha Lain	2,73	2,73	332.000.000,00	3,51	362.000.000,00	3,9	382.000.000,00	3,9	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENGAH
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup	Pertumbuhan Ekonomi	4,95	4,97		4,99		5		5	
	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca		7,25 %		10,87%		14,50%		14,50%	
MENINGKATNYA PELUANG INVESTASI DAERAH	PERSENTASE PENINGKATAN INVESTASI DI KABUPATEN	0,021%	0,042%		0,063%		0,084%		0,0840%	

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Peluang Investasi yang Dipromosikan	1	3	400.000.000,00	4	600.000.000,00	5	800.000.000,00	5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah MOU Project Investment yang terealisasi	0	1	440.000.000,00	2	440.000.000,00	3	440.000.000,00	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Realisasi Investasi Penanaman Modal) (Dalam Milyar)	195	225	100.000.000,00	250	150.000.000,00	300	200.000.000,00	300	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MENINGKATNYA LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR UNGGGULAN	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Pertanian	32,57	32,61		32,63		32,65		32,65	
	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Perdagangan	21,94	22,30		22,48		22,66		22,66	
	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Industri	12,02	12		12		12		12	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian Sesuai Standar	100	100	1.983.279.000,00	100	2.150.000.000,00	100	2.080.000.000,00	100	DINAS PERTANIAN
	Persentase Pemenuhan Prasarana Sesuai Kebutuhan (Non Infrastruktur)	33,33	70		75		80		80	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Prasarana Sesuai Kebutuhan (Infrastruktur)	87	90	15.509.125.000,00	95	16.625.559.000,00	100	17.511.079.000,00	100	DINAS PERTANIAN
	Persentase Produk Pertanian Yang Difasilitasi Standar Jual	-	71		86		100		100	

	Persentase Promosi Produk Pertanian Yang Terselenggara	-	100		100		100		100	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pembangunan Pasar Rakyat Sesuai Standar yang sudah difungsikan	92,59	92,59	256.250.000,00	92,59	306.250.000,00	96,29	336.875.000,00	96,29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Rasio Sebaran Pasar Terhadap Jumlah Penduduk	0,000075	0,000078		0,000081		0,000083		0,000083	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Kerjasama Perdagangan yang ditindak Lanjuti	65	66,75	1.082.166.000,00	66,75	1.274.379.500,00	75	1.401.817.450,00	75	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Produk IKM yang Terpenuhi Legalitas Sesuai Standar	2,02	2,68	415.390.000,00	3,29	750.000.000,00	4,55	825.000.000,00	4,55	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase Produk IKM yang dipasarkan di pasar lokal/nasional	0	2		2,91		3,84		3,84	
	Persentase Produk Kerajinan Daerah yang Dipromosikan	0	10		14,28		18,18		18,88	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Petumbuhan IKM Baru	2,06	2,35	40.000.000,00	2,67	50.000.000,00	3,29	55.000.000,00	3,29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
MENINGKATYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	71,04 Angka	73,13 Angka		74,97 Angka		76,81 Angka		76,81 Angka	

MENINGKATNYA KEMUDAHAN AKSES TRANSPORTASI ANTAR WILAYAH	RATIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI WILAYAH		80 Angka		80 Angka		90 Angka		90 Angka	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI WILAYAH	70	80	19.002.475.700,00	80	22.802.970.840,00	90	27.363.565.008,00	90	DINAS PERHUBUNGAN
MENINGKATNYA LAYANAN INFRASTRUKTUR DALAM KONDISI BAIK	PERSENTASE JALAN DALAM KONDISI BAIK		78,46 %		79,81 %		81,26 %		81,26 %	
	PERSENTASE IRIGASI DALAM KONDISI BAIK		64,35 %		69,5 %		74,5 %		74,5 %	
	TINGKAT KONEKTIVITAS JALAN		44,1 %		46,1 %		48,1 %		48,1 %	
	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG DAN ARSITEKTUR PRASARANA PEMERINTAH DAN KEPENTINGAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN YANG SESUAI STANDAR		75 %		83 %		100 %		100 %	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah di Kawasan Startegis	43,59	53,85	8.000.000.000,00	64,1	7.330.000.000,00	71,79	7.150.000.000,00	71,79	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Rating Jalan Mantap Kabupaten		71	151.880.000,00	73	174.185.000.000,00	75	196.220.000.000,00	75	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	rata-rata waktu tempuh dari ibu kota kabupaten ke kecamatan		1		1		1		1	

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kawasan dan Zonasi yang Sesuai Potensi		100	2.400.000.000,00	100	2.300.000.000,00		2.400.000.000,00	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
--	--	--	-----	------------------	-----	------------------	--	------------------	-----	---

7.1 Penyusunan Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah menguraikan cara penyusunan pendanaan, perumusan prioritas serta penghitungan alokasi dana untuk masing-masing program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian Program Pembangunan Daerah. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah sangat penting dalam penyusunan RPD, sebab pada Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah menunjukkan program apa saja yang akan dilaksanakan selama 3 Tahun yakni 2024-2026, walaupun tidak semua program itu berkaitan langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah, dengan kata lain Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah merupakan perluasan Program Pembangunan daerah pada Bab VI. Dengan kata lain, program pada Bab VI pasti masuk dalam Bab VII, tetapi program Bab VII tidak pasti ada pada bab VI.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diamanatkan bahwa Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, serta Pendanaan Daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Mengingat Urusan terkait dengan sifat strategis yang memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategis (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah dalam mendukung keberhasilan kepala daerah sebagai pemegang kebijakan. Perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Dalam menyusun Rencana Program Perangkat daerah perlu memperhatikan: a) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan, b) Penggunaan sumber dayanya lebih efisien efisien dan/atau c) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Urusan Pemerintahan daerah meliputi, Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan wajib non

Pelayanan dasar, Urusan pilihan dan sejumlah urusan penunjang pemerintahan daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan ;
4. Pertanahan;
5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Perhubungan;
9. Komunikasi dan Informatika;
10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
11. Penanaman Modal;
12. Kepemudaan dan Olahraga;
13. Statistik;
14. Persandian;
15. Perpustakaan;
16. Kearsipan;

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. Kelautan dan Perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Perdagangan;
5. Perindustrian.
6. Transmigrasi;

Disamping Urusan Wajib Layanan Dasar, Urusan Wajib Non Layanan Dasar, Urusan Pilihan, juga terdapat sejumlah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yaitu:

- 1). Sekretariat Daerah
- 2). Sekretariat DPRD
- 3). Perencanaan
- 4). Keuangan
- 5). Kepegawaian
- 6). Pendidikan dan Pelatihan

- 7). Penelitian dan Pengembangan
- 8). Pengawasan
- 9). Kewilayahan
- 10). Pemerintahan Umum

Program dan pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 7.1 di bawah berikut ini:

**Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
KABUPATEN EMPAT LAWANG
RPD 20242026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				571.029.498.167,00		760.077.681.102,00		799.163.409.567,00		2.130.270.588.836,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				184.986.725.910,00		184.986.725.910,00		185.179.925.910,00		555.153.377.730,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	4 Nilai	4 Nilai	165.603.695.910,00	4 Nilai	165.603.695.910,00	4 Nilai	165.796.895.910,00	4 Nilai	497.004.287.730,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar mendekati 100	104,31 Angka	104,5 Angka	14.000.000.000,00	105 Angka	14.000.000.000,00	105,25 Angka	14.000.000.000,00	105,25 Angka	42.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Angka Partisipasi Murni	92,38 Angka	92,5 Angka	0,00	93 Angka	0,00	93,25 Angka	0,00	93,25 Angka	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Angka Melek Huruf	98,97 Angka	99 Angka	0,00	99,25 Angka	0,00	99,5 Angka	0,00	99,5 Angka	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rasio Guru Terhadap Siswa	366,9 Angka	3.669 Angka	180.000.000,00	367 Angka	180.000.000,00	367 Angka	180.000.000,00	367 Angka	540.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rasio Guru Terhadap Pelajaran	200 Angka	200 Angka	0,00	210 Angka	0,00	210 Angka	0,00	210 Angka	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Sekolah Terhadap guru	6,45 Angka	6,5 Angka	5.203.030.000,00	6,6 Angka	5.203.030.000,00	6,7 Angka	5.203.030.000,00	6,7 Angka	15.609.090.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rasio Guru Terhadap Murid	9,39 Angka	9,45 Angka	0,00	9,5 Angka	0,00	10 Angka	0,00	10 Angka	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Rasio Kelas Terhadap Murid	0,02 %	0,05 %	0,00	0,05 %	0,00	0,05 %	0,00	0,05 %	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			162.778.100.564,00		174.488.939.550,00		187.838.734.600,00		525.105.774.714,00		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,86 Nilai	3,91 Nilai	70.120.572.175,00	3,96 Nilai	74.219.116.723,00	4,01 Nilai	78.923.007.996,00	4,01 Nilai	223.262.696.894,00	DINAS KESEHATAN
		Maturitas SPIP	3,85 Nilai	3,85 Nilai	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PRASARANA RUMAH SAKIT DALAM KONDISI BAIK	72,1 %	75,7 %	80.816.631.329,00	79,31 %	84.842.446.998,00	82,91 %	89.260.422.753,00	82,91 %	254.919.501.080,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Persentase Masyarakat dengan Jaminan Pelayanan Kesehatan	68,79 %	98 %	0,00	98 %	0,00	98 %	0,00	98 %	0,00	DINAS KESEHATAN
		PERSENTASE PEMENUHAN ALAT KESEHATAN SESUAI STANDAR	43,74 %	69,57 %	0,00	85,81 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		PERSENTASE KELENGKAPAN PENGISIAN BERKAS REKAM MEDIK 24 JAM SELESAI PELAYANAN RAWAT JALAN	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		PRESENTASE INDIKATOR SPM YANG MEMENUHI TARGET	76,84 %	89,47 %	0,00	90,53 %	0,00	91,58 %	0,00	91,58 %	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Persentase Cakupan Desa yang Melakukan STBM	90,38 %	93,58 %	0,00	96,79 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	DINAS KESEHATAN

		Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Status Gizi	82,95 Aduan	88,57 Aduan	0,00	94,19 Aduan	0,00	100 Aduan	0,00	100 Aduan	0,00	DINAS KESEHATAN
		Persentase Cakupan Pelayanan Penyakit Menular	64,29 Aduan	76,2 Aduan	0,00	88,12 Aduan	0,00	100 Aduan	0,00	100 Aduan	0,00	DINAS KESEHATAN
		Persentase Cakupan Pelayanan Penyakit Tidak Menular	96,15 %	97,42 %	0,00	98,69 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	DINAS KESEHATAN
		Persentase Capaian Desa UCI	83,33 %	89,1 %	0,00	94,87 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PRESENTASE PENINGKATAN SDM YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL DAN NON FORMAL SESUAI KOMPETENSI	25 %	33,33 %	10.429.932.660,00	50 %	13.921.732.689,00	75 %	18.009.093.397,00	75 %	42.360.758.746,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
		Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	75 %	83,33 %	0,00	91,66 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Industri Rumah Tangga yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Sesuai Standar	35,71 %	64,29 %	364.177.000,00	78,57 %	364.177.000,00	100 %	400.597.700,00	100 %	1.128.951.700,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/Kelurahan Ber- PHBS	75 %	79 %	1.046.787.400,00	83 %	1.141.466.140,00	87 %	1.245.612.754,00	87 %	3.433.866.294,00	DINAS KESEHATAN
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				164.669.507.085,00		340.335.000.000,00		364.795.000.000,00		869.799.507.085,00	

1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,77 Nilai	3,78 Nilai	6.092.627.085,00	3,8 Nilai	6.250.000.000,00	3,85 Nilai	6.500.000.000,00	3,85 Nilai	18.842.627.085,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi Yang Terpelihara Sesuai Standar	2,35 %	2,47 %	123.300.000.000,00	2,59 %	125.900.000.000,00	2,7 %	128.500.000.000,00	2,7 %	377.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sesuai Standar	25,07 %	26,32 %	0,00	27,58 %	0,00	28,83 %	0,00	28,83 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Pengamanan Terhadap SDA Yang dilakukan Sesuai Standar	74,38 %	78,09 %	0,00	81,81 %	0,00	85,53 %	0,00	85,53 %	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Minum Layak	66,8 %	67,71 %	2.900.000.000,00	70,84 %	2.745.000.000,00	71,27 %	2.200.000.000,00	71,27 %	7.845.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kapasitas Sampah Pada Prasarana yang Dibangun	1,66 %	3,33 %	2.000.000.000,00	6,66 %	1.600.000.000,00	100 %	1.600.000.000,00	100 %	5.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sanitasi (Air Limbah Layak)	56,4 %	56,6 %	1.725.000.000,00	56,7 %	1.725.000.000,00	56,9 %	1.725.000.000,00	56,9 %	5.175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jalan Lingkungan Bebas Genangan	%	14,52 %	3.950.000.000,00	24,34 %	4.050.000.000,00	34,17 %	4.250.000.000,00	34,17 %	12.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah di Kawasan Startegis	43,59 Angka	53,85 Angka	8.000.000.000,00	64,10 Angka	7.330.000.000,00	71,79 Angka	7.150.000.000,00	71,79 Angka	22.480.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Pembangunan kawasan strategis Kabupaten	Angka	1 Angka	13.600.000.000,00	1 Angka	13.600.000.000,00	1 Angka	13.600.000.000,00	1 Angka	40.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Rating Jalan Mantap Kabupaten	%	71 %	151.880.000,00	73 %	174.185.000.000,00	75 %	196.220.000.000,00	75 %	370.556.880.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

		rata-rata waktu tempuh dari ibu kota kabupaten ke kecamatan	Jam	1 Jam	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelaksanaan Konstruksi yang Terkendali	%	57,5 %	550.000.000,00	80 %	650.000.000,00	100 %	650.000.000,00	100 %	1.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kawasan dan Zonasi yang Sesuai Potensi	%	100 %	2.400.000.000,00	100 %	2.300.000.000,00	100 %	2.400.000.000,00	100 %	7.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				15.599.300.000,00		15.617.300.000,00		15.752.300.000,00		46.968.900.000,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	2,49 Nilai	2,75 Nilai	2.509.300.000,00	2,85 Nilai	2.272.300.000,00	2,95 Nilai	2.382.300.000,00	2,95 Nilai	7.163.900.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Kawasan Rawan Bencana yang ditangani	33,33 %	33,33 %	225.000.000,00	66,67 %	255.000.000,00	100 %	275.000.000,00	100 %	755.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
		Persentase Rumah Korban Bencana yang ditangani	5,11 %	8,76 %	0,00	13,14 %	0,00	18,25 %	0,00	18,25 %	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Kumuh yang Tertangani	2,15 %	3,92 %	2.690.000.000,00	5,69 %	2.915.000.000,00	7,45 %	2.915.000.000,00	7,45 %	8.520.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Hampir Kumuh)	3 %	6 %	500.000.000,00	9 %	500.000.000,00	12 %	500.000.000,00	12 %	1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

		Persentase Patroli Dan Operasi K3 Yang Dilakukan Bersama POLRI Dan TNI	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap PERDA dan PERKADA	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Sarana Dan Prasarana Penunjang Penegakan PERDA Dan PERKADA Yang Terpenuhi Sesuai Standar	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Nilai Desa Tangguh Bencana	26 poin	27 poin	2.040.000.000,00	28 poin	1.819.000.000,00	30 poin	1.990.900.000,00	30 poin	5.849.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase Kapasitas Anggota Penangan Bencana	5,75 %	6,37 %	0,00	6,95 %	0,00	7,65 %	0,00	7,65 %	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase Kejadian yang ditangani sesuai dengan waktu tanggap	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	20 %	0,00	30 %	0,00	40 %	0,00	40 %	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase penanggulangan kebakaran sesuai standar	100 %	100 %	5.103.314.000,00	100 %	5.353.314.000,00	100 %	5.395.000.000,00	100 %	15.851.628.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.636.593.000,00		7.142.496.085,00		7.046.592.945,00		20.825.682.030,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,8 Nilai	3,85 Nilai	2.990.143.000,00	3,9 Nilai	3.276.308.185,00	3,95 Nilai	2.951.592.945,00	3,95 Nilai	9.218.044.130,00	DINAS SOSIAL

1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial Terhadap PSKS	100 %	100 %	308.500.000,00	100 %	394.668.000,00	100 %	445.000.000,00	100 %	1.148.168.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Fasilitas Pelayanan Rehabilitasi dan Pendampingan Sosial Sesuai Standar	70 %	80 %	1.281.500.000,00	85 %	1.277.502.900,00	90 %	1.345.000.000,00	90 %	3.904.002.900,00	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	100 %	100 %	275.000.000,00	100 %	1.129.000.000,00	100 %	1.180.000.000,00	100 %	2.584.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Pasca Bencana	100 %	100 %	1.781.450.000,00	100 %	1.065.017.000,00	100 %	1.125.000.000,00	100 %	3.971.467.000,00	DINAS SOSIAL
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				88.387.383.731,00		108.521.860.984,00		111.150.784.340,00		308.060.029.055,00	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				525.000.000,00		675.000.000,00		850.000.000,00		2.050.000.000,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Wirausaha Baru	%	1 %	230.000.000,00	1,5 %	300.000.000,00	2 %	400.000.000,00	2 %	930.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	37,67 %	37,87 %	0,00	37,91 %	0,00	38,41 %	0,00	38,41 %	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pekerjaan	90 %	92 %	160.000.000,00	93 %	220.000.000,00	96 %	280.000.000,00	96 %	660.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan Perlindungan/jaminan	4,30 %	4,50 %	135.000.000,00	4,80 %	155.000.000,00	5 %	170.000.000,00	5 %	460.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		Persentase hubungan industrial yang terselesaikan	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

					4.808.035.381,00		6.168.232.312,00		7.015.324.568,00		17.991.592.261,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,4 Nilai	3,5 Nilai	1.918.908.531,00	3,5 Nilai	2.302.690.237,00	3,6 Nilai	2.763.228.285,00	3,6 Nilai	6.984.827.053,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Nilai / Predikat APE	Pratama Predikat Predikat	Pratama Predikat Predikat	1.220.500.000,00	Madya Predikat Predikat	1.478.750.000,00	Madya Predikat Predikat	1.626.625.000,00	Madya Predikat Predikat	4.325.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase perempuan yang menerapkan hasil pelatihan pengembangan ekonomi	50 %	70 %	0,00	80 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase edukasi masyarakat terhadap kekerasan perempuan yang dilakukan sesuai standa	100 %	100 %	468.538.250,00	100 %	719.592.075,00	100 %	791.551.283,00	100 %	1.979.681.608,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase laporan kekerasan perempuan yang dilakukan secara mandiri	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Lembaga Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan Aktif	13,73 %	16,93 %	0,00	20,12 %	0,00	20,12 %	0,00	20,12 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data yang terupdate	40 %	40 %	210.000.000,00	50 %	265.000.000,00	60 %	291.500.000,00	60 %	766.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase lembaga pemenuhan hak anak aktif	20 %	50 %	446.000.000,00	80 %	654.700.000,00	100 %	720.170.000,00	100 %	1.820.870.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

		Persentase Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak	75 %	80 %	0,00	90 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Pemenuhan indikator KLA yang dilakukan oleh lembaga swasta dan organisasi masyarakat	45 %	50 %	0,00	55 %	0,00	60 %	0,00	60 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase edukasi masyarakat terhadap kekerasan Anak yang dilakukan sesuai standar	100 %	100 %	544.088.600,00	100 %	747.500.000,00	100 %	822.250.000,00	100 %	2.113.838.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase laporan kekerasan Anak yang dilakukan secara mandiri	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Lembaga Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak Aktif	13,73 %	16,93 %	0,00	20,12 %	0,00	20,12 %	0,00	20,12 %	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				3.825.000.000,00		3.818.000.000,00		4.038.650.000,00		11.681.650.000,00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	4,14 Nilai	4,2 Nilai	2.345.000.000,00	4,3 Nilai	2.187.000.000,00	4,4 Nilai	2.244.550.000,00	4,4 Nilai	6.776.550.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok PerKap/Tahun	214 Kg/KAP/TH	215 Kg/KAP/TH	1.050.000.000,00	277 Kg/KAP/TH	1.153.000.000,00	284 Kg/KAP/TH	1.268.300.000,00	284 Kg/KAP/TH	3.471.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase pengendalian desa rawan pangan yang teratasi	11 %	11 %	200.000.000,00	13 %	220.000.000,00	15 %	242.000.000,00	15 %	662.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang aman dikonsumsi	80 %	80 %	230.000.000,00	85 %	258.000.000,00	90 %	283.800.000,00	90 %	771.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				1.875.000.000,00		1.875.000.000,00		1.875.000.000,00		5.625.000.000,00	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa dan Konflik Tanah Garapan yang difasilitasi	%	100 %	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	100.000.000,00	100 %	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
		Persentase Sengketa dan Konflik Lahan Pemerintah yang difasilitasi	39 %	59 %	0,00	79 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Lahan untuk Pembangunan Pemerintah Daerah	%	33 %	1.500.000.000,00	67 %	1.500.000.000,00	100 %	1.500.000.000,00	100 %	4.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Lahan Pemerintahan yang diinventarisasi	39 %	59 %	275.000.000,00	79 %	275.000.000,00	100 %	275.000.000,00	100 %	825.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				6.674.478.682,00		6.767.029.932,00		7.393.256.250,00		20.834.764.864,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,45 Nilai	3,5 Nilai	2.395.298.682,00	3,55 Nilai	2.661.599.932,00	3,6 Nilai	2.846.420.000,00	3,6 Nilai	7.903.318.614,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup yang disusun sesuai standar	50 %	50 %	241.000.000,00	100 %	166.000.000,00	100 %	366.000.000,00	100 %	773.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Sample Kualitas Lingkungan yang tidak melebihi Baku mutu	75 %	100 %	430.000.000,00	100 %	496.250.000,00	100 %	532.656.250,00	100 %	1.458.906.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/kegiatan terhadap penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	81,82 %	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rasio (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup daerah) PPLHD thdp kebutuhan PPLHD persetujuan lingkungan sesuai standar	41,18 Angka	52,94 Angka	110.000.000,00	64,71 Angka	160.000.000,00	70,59 Angka	210.000.000,00	70,59 Angka	480.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan Pengawasan pengelolaan LH yang diterima daerah	%	100 %	250.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	150.000.000,00	100 %	550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan terkait persetujuan lingkungan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	30.000.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	80.000.000,00	100 %	140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	24,39 %	25 %	3.188.180.000,00	35 %	3.073.180.000,00	50 %	3.178.180.000,00	50 %	9.439.540.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.148.990.000,00		4.352.389.000,00		4.820.226.900,00		14.321.605.900,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	4 Nilai	4 Nilai	4.033.990.000,00	4 Nilai	3.220.139.000,00	4 Nilai	3.642.012.900,00	4 Nilai	10.896.141.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase peningkatan cetak KK	1,87 %	2,76 %	280.000.000,00	2,91 %	291.000.000,00	2,94 %	302.000.000,00	2,94 %	873.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk 0 - 18 tahun ber-akta kelahiran	95,70 %	96,16 %	90.000.000,00	96,19 %	90.000.000,00	97,21 %	90.000.000,00	97,21 %	270.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase kk yang mengalami perbaikan	11,04 %	11,13 %	615.000.000,00	11,23 %	619.250.000,00	11,29 %	651.175.000,00	11,29 %	1.885.425.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan cetak KTP	1,16 %	2,1 %	130.000.000,00	3,7 %	132.000.000,00	3,9 %	135.039.000,00	3,9 %	397.039.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5.271.104.000,00		6.727.556.000,00		7.413.056.000,00		19.411.716.000,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,45 Nilai	3,7 Nilai	2.645.558.000,00	3,95 Nilai	2.692.759.000,00	4,2 Nilai	2.816.259.000,00	4,2 Nilai	8.154.576.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	PERSENTASE SARANA PRASARANA YANG DIKELOLA DESA	82,99 %	90,47 %	110.000.000,00	95,23 %	120.000.000,00	100 %	130.000.000,00	100 %	360.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PERSENTASE DESA YANG TERLIBAT DALAM KERJASAMA DALAM PENINGKATAN DESA	7,4 %	53,56 %	60.000.000,00	63,94 %	70.000.000,00	70,74 %	80.000.000,00	70,74 %	210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK	87,07 %	88,43 %	455.749.000,00	91,83 %	1.825.000.000,00	96,59 %	2.237.000.000,00	96,59 %	4.517.749.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKA TAN DESA DAN LEMBAGA ADAT YANG AKTIF	59,75 %	60,57 %	1.999.797.000,00	62,32 %	2.019.797.000,00	69,85 %	2.149.797.000,00	69,85 %	6.169.391.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				10.794.334.600,00		11.588.058.660,00		12.212.861.820,00		34.595.255.080,00	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,51 Nilai	3,53 Nilai	3.165.093.600,00	3,55 Nilai	3.514.593.560,00	3,59 Nilai	3.605.837.710,00	3,59 Nilai	10.285.524.870,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase PD yang Menerapkan Dokumen GDPK	Aduan	11,36 Aduan	990.000.000,00	15,91 Aduan	1.047.000.000,00	20,45 Aduan	1.103.700.000,00	20,45 Aduan	3.140.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase PD yang menerapkan dokumen GDPK	26,47 %	29,41 %	0,00	32,35 %	0,00	35,29 %	0,00	35,29 %	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang dengan kriteria Paripurna	%	0,2 %	0,00	0,4 %	0,00	0,6 %	0,00	0,6 %	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase Akurasi Data keluarga berisiko stunting	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Perentase Desa/Kelurahan yang memiliki data Kependudukan	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevelensi Kontrasepsi MOfdern (Modern Contraceptive Prevelance rate/MCPR	0,14 Angka	66,44 Angka	4.448.241.000,00	68,44 Angka	4.737.365.100,00	70,44 Angka	5.112.114.110,00	70,44 Angka	14.297.720.210,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				22.121.567.700,00		26.545.881.240,00		31.855.057.488,00		80.522.506.428,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,8 Nilai	3,85 Nilai	3.119.092.000,00	3,9 Nilai	3.742.910.400,00	3,95 Nilai	4.491.492.480,00	3,95 Nilai	11.353.494.880,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI WILAYAH	70 Angka	80 Angka	19.002.475.700,00	80 Angka	22.802.970.840,00	90 Angka	27.363.565.008,00	90 Angka	69.169.011.548,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7.300.000.000,00		8.615.000.000,00		9.265.000.000,00		25.180.000.000,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	4,05 Nilai	4,05 Nilai	3.325.000.000,00	4,06 Nilai	3.990.000.000,00	4,06 Nilai	3.990.000.000,00	4,06 Nilai	11.305.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi	75 %	80 %	3.025.000.000,00	82 %	3.425.000.000,00	85 %	3.825.000.000,00	85 %	10.275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks penilaian mandiri SPBE (Angka)	2 Angka	3 Angka	950.000.000,00	3 Angka	1.200.000.000,00	3 Angka	1.450.000.000,00	3 Angka	3.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3.012.302.375,00		3.037.302.375,00		3.257.302.375,00		9.306.907.125,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,35 Nilai	3,36 Nilai	1.850.302.375,00	3,38 Nilai	1.875.302.375,00	3,45 Nilai	1.975.302.375,00	3,45 Nilai	5.700.907.125,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang berjalan sesuai AD/ART	4,3 %	4,3 %	100.000.000,00	6 %	120.000.000,00	7,4 %	150.000.000,00	7,4 %	370.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Pelaporan RAT Koperasi Tepat Waktu	10,9 %	12,7 %	200.000.000,00	15,4 %	240.000.000,00	17,7 %	300.000.000,00	17,7 %	740.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang di fasilitasi pengelolaan manajemen koperasi	22,3 %	23,6 %	150.000.000,00	24,8 %	100.000.000,00	25,5 %	100.000.000,00	25,5 %	350.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pertumbuhan modal koperasi	25 Aduan	25 Aduan	180.000.000,00	30 Aduan	190.000.000,00	31 Aduan	200.000.000,00	31 Aduan	570.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM Yang Bermitra Dengan Pelaku Usaha Lain	2,73 %	2,73 %	332.000.000,00	3,51 %	362.000.000,00	3,9 %	382.000.000,00	3,9 %	1.076.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Produk UMKM yang berstandar	67,6 %	69,7 %	200.000.000,00	71,4 %	150.000.000,00	72,2 %	150.000.000,00	72,2 %	500.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				5.817.112.141,00		6.155.000.000,00		8.115.000.000,00		20.087.112.141,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	2,09 Nilai	2,1 Nilai	3.627.112.141,00	2,2 Nilai	3.715.000.000,00	2,3 Nilai	4.125.000.000,00	2,3 Nilai	11.467.112.141,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten	5 %	5 %	900.000.000,00	7 %	650.000.000,00	10 %	1.800.000.000,00	10 %	3.350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Peluang Investasi yang Dipromosikan	1 Angka	3 Angka	400.000.000,00	4 Angka	600.000.000,00	5 Angka	800.000.000,00	5 Angka	1.800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,75 Angka	86 Angka	350.000.000,00	86,5 Angka	600.000.000,00	87 Angka	750.000.000,00	87 Angka	1.700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah MOU Project Investment yang terealisasi	Angka	1 Angka	440.000.000,00	2 Angka	440.000.000,00	3 Angka	440.000.000,00	3 Angka	1.320.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Realisasi Investasi Penanaman Modal) (Dalam Milyar)	195 Rp	225 Rp	100.000.000,00	250 Rp	150.000.000,00	300 Rp	200.000.000,00	300 Rp	450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				6.297.172.724,00		6.591.896.724,00		6.889.232.724,00		19.778.302.172,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,68 Nilai	3,68 Nilai	2.192.691.724,00	3,88 Nilai	2.210.191.724,00	3,93 Nilai	2.227.691.724,00	3,93 Nilai	6.630.575.172,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi pemuda dalam pelatihan kewirausahaan	Orang	2,90 Orang	1.044.481.000,00	3,87 Orang	1.096.705.000,00	4,84 Orang	1.151.541.000,00	4,84 Orang	3.292.727.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Atlet yang dibina	67 Orang	68 Orang	2.760.000.000,00	69 Orang	2.985.000.000,00	70 Orang	3.210.000.000,00	70 Orang	8.955.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Persentase Iven yang menghasilkan Atlet (umum dan disabilitas)	%	33 %	0,00	66 %	0,00	66 %	0,00	66 %	0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pemuda dan Organisasi Pemuda yang mendapat Pelatihan ekonomi	0,15 %	0,18 %	300.000.000,00	0,21 %	300.000.000,00	0,24 %	300.000.000,00	0,24 %	900.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				275.000.000,00		350.000.000,00		425.000.000,00		1.050.000.000,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase PD Yang Menggunakan Data Statistik Sektoral Dalam Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	275.000.000,00	100 %	350.000.000,00	100 %	425.000.000,00	100 %	1.050.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				450.000.000,00		575.000.000,00		700.000.000,00		1.725.000.000,00	

3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				50.537.330.034,00		55.059.397.940,00		57.861.861.319,00		163.458.589.293,00	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				6.015.000.000,00		5.871.000.000,00		6.767.000.000,00		18.653.000.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	4,25 Nilai	4,3 Nilai	4.370.000.000,00	4,35 Nilai	3.771.000.000,00	4,4 Nilai	4.222.000.000,00	4,4 Nilai	12.363.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Perikanan (RTP) Nelayan (%)	- %	2 %	450.000.000,00	5 %	650.000.000,00	8 %	850.000.000,00	8 %	1.950.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Luas Lahan Perikanan Budidaya	1,01 %	1,20 %	700.000.000,00	1,25 %	855.000.000,00	1,30 %	1.010.000.000,00	1,30 %	2.565.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		Persentase Peningkatan PAD BBI	%	10 %	0,00	15 %	0,00	20 %	0,00	20 %	0,00	DINAS PERTANIAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Hasil Pengawasan Illegal Fishing yang Ditindaklanjuti (%)	- %	60 %	150.000.000,00	70 %	160.000.000,00	80 %	170.000.000,00	80 %	480.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Jumlah Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan (%)	25 %	50 %	345.000.000,00	60 %	435.000.000,00	70 %	515.000.000,00	70 %	1.295.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				5.786.064.656,00		5.896.814.656,00		6.184.477.656,00		17.867.356.968,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,8 Nilai	3,85 Nilai	2.011.714.656,00	3,9 Nilai	2.009.214.656,00	3,95 Nilai	2.118.714.656,00	3,95 Nilai	6.139.643.968,00	DINAS PARIWISATA
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pemenuhan amenities Pariwisata	%	30 %	550.000.000,00	37,5 %	550.000.000,00	43,75 %	620.000.000,00	43,75 %	1.720.000.000,00	DINAS PARIWISATA

		Persentase Pelaku/usaha Pariwisata yang memenuhi standar (Tipe, Kriteria)	12 %	24 %	0,00	28 %	0,00	31 %	0,00	31 %	0,00	DINAS PARIWISATA
		Persentase Peningkatan Kelompok Sadar Wisata	%	50 %	0,00	62 %	0,00	67 %	0,00	67 %	0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi pemasaran pariwisata yang diikuti dan Dilaksanakan	50 %	66 %	2.132.500.000,00	70 %	2.250.750.000,00	75 %	2.139.825.000,00	75 %	6.523.075.000,00	DINAS PARIWISATA
		Jumlah Mou Pemasaran yang ditindaklanjuti	1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	3 Dokumen	0,00	4 Dokumen	0,00	4 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan Produk usaha sektor ekraf	%	14 %	1.091.850.000,00	25 %	1.086.850.000,00	40 %	1.305.938.000,00	40 %	3.484.638.000,00	DINAS PARIWISATA
		Persentase Event Kreatif yang difasilitasi	%	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	DINAS PARIWISATA
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				31.099.047.994,00		32.987.295.994,00		33.787.015.994,00		97.873.359.982,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,7 Nilai	3,75 Nilai	11.092.683.994,00	3,8 Nilai	10.163.683.994,00	3,85 Nilai	9.980.683.994,00	3,85 Nilai	31.237.051.982,00	DINAS PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian Sesuai Standar	100 %	100 %	1.983.279.000,00	100 %	2.150.000.000,00	100 %	2.080.000.000,00	100 %	6.213.279.000,00	DINAS PERTANIAN
		Persentase Pemenuhan Prasarana Sesuai Kebutuhan (Non Infrastruktur)	33,33 %	70 %	0,00	75 %	0,00	80 %	0,00	80 %	0,00	DINAS PERTANIAN
		Persentase Laporan Data Pertanian Tepat Waktu	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	DINAS PERTANIAN

3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.816.166.000,00		3.171.113.000,00		3.347.975.950,00		8.335.254.950,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pembangunan Pasar Rakyat Sesuai Standar yang sudah difungsikan	92,59 %	92,59 %	256.250.000,00	92,59 %	306.250.000,00	96,29 %	336.875.000,00	96,29 %	899.375.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Rasio Sebaran Pasar Terhadap Jumlah Penduduk	0,000075 Angka	0,000078 Angka	0,00	0,000081 Angka	0,00	0,000083 Angka	0,00	0,000083 Angka	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Resume Update Data Harga Produk yang ditindaklanjuti	16,16 %	16,16 %	393.750.000,00	25 %	1.402.483.500,00	33,33 %	1.402.483.500,00	33,33 %	3.198.717.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Kerjasama Perdagangan yang ditindak Lanjuti	65 %	66,67 %	1.082.166.000,00	66,67 %	1.274.379.500,00	75 %	1.401.817.450,00	75 %	3.758.362.950,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase Kerjasama Perdagangan Melalui Iven Promosiyang ditindaklanjuti	65 %	66,67 %	0,00	66,67 %	0,00	75 %	0,00	75 %	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha/Pedagang yang melakukan Tera Ulang	50 %	58,33 %	84.000.000,00	66,67 %	188.000.000,00	75 %	206.800.000,00	75 %	478.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase Pelaku Usaha Perdagangan dengan Tingkat Kepatuhan Baik	26 %	26,4 %	0,00	26,8 %	0,00	27,2 %	0,00	27,2 %	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				3.496.051.384,00		4.682.174.290,00		5.150.391.719,00		13.328.617.393,00	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,83 Nilai	3,86 Nilai	3.040.661.384,00	3,89 Nilai	3.882.174.290,00	3,92 Nilai	4.270.391.719,00	3,92 Nilai	11.193.227.393,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Produk IKM yang Terpenuhi Legalitas Sesuai Standar	2,02 %	2,68 %	415.390.000,00	3,29 %	750.000.000,00	4,55 %	825.000.000,00	4,55 %	1.990.390.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase Produk IKM yang dipasarkan di pasar lokal/nasional	%	2 %	0,00	2,91 %	0,00	3,84 %	0,00	3,84 %	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase Produk Kerajinan Daerah yang Dipromosikan	%	10 %	0,00	14,28 %	0,00	18,18 %	0,00	18,18 %	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Petumbuhan IKM Baru	2,06 %	2,35 %	40.000.000,00	2,67 %	50.000.000,00	3,29 %	55.000.000,00	3,29 %	145.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				2.325.000.000,00		2.451.000.000,00		2.625.000.000,00		7.401.000.000,00	
3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,72 Nilai	3,8 Nilai	2.185.000.000,00	3,85 Nilai	2.291.000.000,00	3,9 Nilai	2.445.000.000,00	3,9 Nilai	6.921.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pertumbuhan Lembaga ekonomi Masyarakat ex Transmigrasi	%	50 %	140.000.000,00	66,66 %	160.000.000,00	80 %	180.000.000,00	80 %	480.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		Persentase Potensi wilayah Ex Transmigrasi yang layak dikembangkan	16,66 %	25 %	0,00	33,30 %	0,00	58 %	0,00	58 %	0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				154.889.633.100,00		170.378.596.410,00		187.416.456.051,00		512.684.685.561,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				63.881.188.100,00		70.269.306.910,00		77.296.237.601,00		211.446.732.611,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,9 Nilai	4 Nilai	40.649.428.100,00	4 Nilai	44.714.370.910,00	4 Nilai	49.185.808.001,00	4 Nilai	134.549.607.011,00	SEKRETARIAT DAERAH

5.03	KEPEGAWAIAN				6.151.285.990,00		6.747.226.392,00		7.198.237.050,00		20.096.749.432,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,13 Nilai	3,38 Nilai	3.505.859.940,00	3,63 Nilai	3.958.290.342,00	3,88 Nilai	4.227.146.000,00	3,88 Nilai	11.691.296.282,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK	38 Indeks	50 Indeks	2.645.426.050,00	55 Indeks	2.788.936.050,00	60 Indeks	2.971.091.050,00	60 Indeks	8.405.453.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				2.974.167.910,00		3.271.584.701,00		4.210.050.000,00		10.455.802.611,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesional ASN	65 Indeks	67 Indeks	2.974.167.910,00	69 Indeks	3.271.584.701,00	71 Indeks	4.210.050.000,00	71 Indeks	10.455.802.611,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				930.000.000,00		1.050.000.000,00		980.000.000,00		2.960.000.000,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan sesuai isu strategis daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	930.000.000,00	5 Dokumen	1.050.000.000,00	5 Dokumen	980.000.000,00	5 Dokumen	2.960.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		Persentase OPD yang menerapkan Inovasi	45,45 %	54,55 %	0,00	59,09 %	0,00	63,64 %	0,00	63,64 %	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN				540.000.000,00		594.000.000,00		653.400.000,00		1.787.400.000,00	
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Segmen Batas yang telah tuntas	100 %	100 %	540.000.000,00	100 %	594.000.000,00	100 %	653.400.000,00	100 %	1.787.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				10.231.404.800,00		11.202.225.040,00		11.258.592.452,00		32.692.222.292,00	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				10.231.404.800,00		11.202.225.040,00		11.258.592.452,00		32.692.222.292,00	

6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	3,92 Nilai	3,94 Nilai	6.007.138.600,00	3,95 Nilai	6.758.745.530,00	3,97 Nilai	6.602.867.952,00	3,97 Nilai	19.368.752.082,00	INSPEKTORAT
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan yang dilakukan sesuai standar Internal Audit Capability Model (IACM)	83 %	85 %	3.746.466.200,00	90 %	3.938.789.510,00	95 %	4.133.050.000,00	95 %	11.818.305.710,00	INSPEKTORAT
		Persentase Kesesuaian Aktivitas APIP dengan Standar	83 %	87 %	0,00	92 %	0,00	95 %	0,00	95 %	0,00	INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang telah memenuhi unsur SPIP	100 Aduan	100 Aduan	477.800.000,00	100 Aduan	504.690.000,00	100 Aduan	522.674.500,00	100 Aduan	1.505.164.500,00	INSPEKTORAT
		Indeks Persepsi Korupsi	73,08 Angka	74 Angka	0,00	75 Angka	0,00	76 Angka	0,00	76 Angka	0,00	INSPEKTORAT
		Persentase Pemenuhan Dokumen MCP	65 %	70 %	0,00	75 %	0,00	80 %	0,00	80 %	0,00	INSPEKTORAT
7	UNSUR KEWILAYAHAN				29.035.965.519,00		30.613.538.150,00		29.904.408.197,00		89.553.911.866,00	
7.01	KECAMATAN				29.035.965.519,00		30.613.538.150,00		29.904.408.197,00		89.553.911.866,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	1,45 Nilai	1,55 Nilai	25.014.749.017,00	1,65 Nilai	26.379.045.480,00	1,75 Nilai	25.429.739.848,00	1,75 Nilai	76.823.534.345,00	KECAMATAN TEBING TINGGI
		Maturitas SPIP	Nilai	1,45 Nilai	0,00	1,55 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	KECAMATAN PENDOPO
		Maturitas SPIP	Nilai	1,46 Nilai	0,00	1,55 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	KECAMATAN MUARAPINANG
		Maturitas SPIP	Nilai	1,45 Nilai	0,00	1,55 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	KECAMATAN TALANG PADANG
		Maturitas SPIP	Nilai	1,45 Nilai	0,00	1,55 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH
		Maturitas SPIP	Nilai	1,45 Nilai	0,00	1,55 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	KECAMATAN LINTANG KANAN
		Maturitas SPIP	Nilai	1,45 Nilai	0,00	1,55 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	KECAMATAN PENDOPO BARAT
		Maturitas SPIP	Nilai	1,45 Nilai	0,00	1,55 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	KECAMATAN ULU MUSI

		Maturitas SPIP	2,19 Nilai	2,44 Nilai	0,00	2,69 Nilai	0,00	2,94 Nilai	0,00	2,94 Nilai	0,00	KECAMATAN SALING
		Maturitas SPIP	Nilai	1,45 Nilai	0,00	1,55 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	1,65 Nilai	0,00	KECAMATAN SIKAP DALAM
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Pelayanan Sesuai SOP	100 %	100 %	2.360.755.102,00	100 %	2.574.031.270,00	100 %	2.814.206.949,00	100 %	7.748.993.321,00	KECAMATAN TEBING TINGGI
		Persentase Pemenuhan pelayanan Sesuai SOP	75 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN PENDOPO
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Sesuai SOP	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN MUARAPINANG
		Persentase Pemenuhan pelayanan Sesuai SOP	67 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN TALANG PADANG
		Persentase Pemenuhan pelayanan Sesuai SOP	67 %	83 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Sesuai SOP	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN LINTANG KANAN
		Persentase Pemenuhan pelayanan Sesuai SOP	40 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN PENDOPO BARAT
		Persentase Pemenuhan pelayanan Sesuai SOP	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN ULU MUSI
		Persentase Pemenuhan pelayanan Sesuai SOP	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN SALING
		Persentase Pemenuhan pelayanan Sesuai SOP	67 %	83 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN SIKAP DALAM
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	75 %	75 %	957.060.700,00	75 %	957.060.700,00	75 %	957.060.700,00	75 %	2.871.182.100,00	KECAMATAN TEBING TINGGI

		Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	20 %	50 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN PENDOPO
		Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	97 %	97 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN MUARAPINANG
		Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	79 %	87 %	0,00	92 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN TALANG PADANG
		Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	%	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH
		Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	97 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN LINTANG KANAN
		Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	20 %	50 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN PENDOPO BARAT
		Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	97 %	97 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN ULU MUSI
		Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN SALING
		Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN SIKAP DALAM
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penurunan angka kriminalitas (Korcam Pol PP Desa)	85 %	85 %	427.552.200,00	85 %	427.552.200,00	85 %	427.552.200,00	85 %	1.282.656.600,00	KECAMATAN TEBING TINGGI

		persentase penurunan angka kriminalitas (Korcam Pol PP Desa)	-50 %	50 %	0,00	33 %	0,00	50 %	0,00	50 %	0,00	KECAMATAN PENDOPO
		persentase penurunan angka kriminalitas (Korcam Pol PP Desa)	-75 %	11 %	0,00	29 %	0,00	40 %	0,00	40 %	0,00	KECAMATAN MUARAPINANG
		persentase penurunan angka kriminalitas (Korcam Pol PP Desa)	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN TALANG PADANG
		persentase penurunan angka kriminalitas (Korcam Pol PP Desa)	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH
		persentase penurunan angka kriminalitas (Korcam Pol PP Desa)	-100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN PENDOPO BARAT
		persentase penurunan angka kriminalitas (Korcam Pol PP Desa)	-40 %	25 %	0,00	33 %	0,00	50 %	0,00	50 %	0,00	KECAMATAN ULU MUSI
		persentase penurunan angka kriminalitas (Korcam Pol PP Desa)	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN SALING
		persentase penurunan angka kriminalitas (Korcam Pol PP Desa)	-25 %	33 %	0,00	50 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN SIKAP DALAM
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang Melaksanakan Pengelolaan Pemerintahan Desa Sesuai Standar	100 %	100 %	275.848.500,00	100 %	275.848.500,00	100 %	275.848.500,00	100 %	827.545.500,00	KECAMATAN TEBING TINGGI

		Persentase desa yang Melaksanakan Pengelolaan Pemerintahan Desa Sesuai Standar	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN PENDOPO
		Persentase desa yang Melaksanakan Pengelolaan Pemerintahan Desa Sesuai Standar	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN MUARAPINANG
		Persentase desa yang Melaksanakan Pengelolaan Pemerintahan Desa Sesuai Standar	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN TALANG PADANG
		Persentase desa yang Melaksanakan Pengelolaan Pemerintahan Desa Sesuai Standar	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH
		Persentase desa yang Melaksanakan Pengelolaan Pemerintahan Desa Sesuai Standar	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN LINTANG KANAN
		Persentase desa yang Melaksanakan Pengelolaan Pemerintahan Desa Sesuai Standar	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN ULU MUSI
		Persentase desa yang Melaksanakan Pengelolaan Pemerintahan Desa Sesuai Standar	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN SALING

		Persentase desa yang Melaksanakan Pengelolaan Pemerintahan Desa Sesuai Standar	100 %	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	0,00	KECAMATAN SIKAP DALAM
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				91.985.500.000,00		10.156.500.000,00		10.414.000.000,00		112.556.000.000,00	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				91.985.500.000,00		10.156.500.000,00		10.414.000.000,00		112.556.000.000,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Maturitas SPIP	1,44 Nilai	1,45 Nilai	2.725.500.000,00	1,5 Nilai	2.886.500.000,00	1,55 Nilai	3.084.000.000,00	1,55 Nilai	8.696.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase FPK AKtif	90 %	100 %	1.800.000.000,00	100 %	1.925.000.000,00	100 %	1.970.000.000,00	100 %	5.695.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Angka Sengketa Pemilu	30 %	20 %	84.660.000.000,00	10 %	2.420.000.000,00	10 %	2.350.000.000,00	10 %	89.430.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas Aktif	80 %	80 %	450.000.000,00	90 %	470.000.000,00	90 %	470.000.000,00	90 %	1.390.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik Agama yang terselesaikan	90 %	90 %	750.000.000,00	100 %	815.000.000,00	100 %	900.000.000,00	100 %	2.465.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	80 %	85 %	1.600.000.000,00	90 %	1.640.000.000,00	90 %	1.640.000.000,00	90 %	4.880.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
---------	--	--	------	------	------------------	------	------------------	------	------------------	------	------------------	---

**BAB
VIII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**

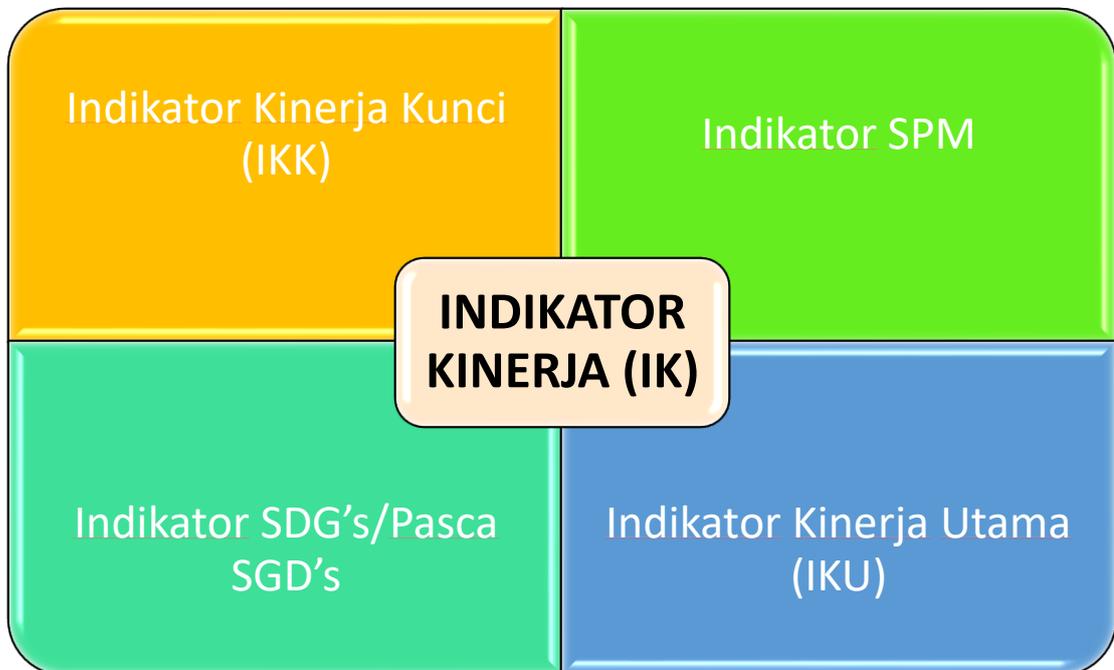
8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja merupakan suatu variabel yang digunakan untuk mengukur sebuah perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu kondisi, yaitu berfungsi untuk memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan termasuk dalam menilai kinerjanya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja yang akan menjadi perjanjian kinerja kepala perangkat daerah dengan Pj. Bupati. Mekanisme penetapan/penyusunan IKU dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 8.1
Keterkaitan Indikator Kinerja**



Sumber : Kemendagri Tahun 2015

**Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Empat Lawang**

NO	Indikator Kinerja	Target Tahun			
		Data Awal	2024	2025	2026
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	42,73	46,25	48,25	50,25
2.	Indeks Pembangunan Manusia	66,00	66,45	66,90	67,35
3.	Indeks Pembangunan Gender	93,32	93,66	94	94,34
4.	Tingkat Kemiskinan	12,03	11,40	11,07	11,74
5.	Gini Rasio	0,33	0,31	0,29	0,27
6.	Pertumbuhan Ekonomi	4,95	5,55	5,85	6,15
7.	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	17,00	19,00	21,00	23,00
8.	Nilai SAKIP	63,10	64,20	65,30	66,40
9.	Persentase Peningkatan IPKD	NA	0,008	0,010	0,012
10.	Indeks Integritas Daerah (SPI)	62,74	65,56	68,74	71,24
11.	Indeks Pemantauan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4	4,03	4,06	4,10
12.	Indeks SPBE	3	3,20	3,35	3,50
13.	Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapat Bantuan Program Pemerintah	27,14	35	40	50
14.	Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga	9.838	9.904	9.970	10.036
15.	Indeks Pendidikan	0,603	0,609	0,615	0,62
16.	Angka Harapan Hidup	65,45	65,58	65,72	65,85
17.	Nilai Kabupaten Sehat	45	50	55	60
18.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,04	73,13	74,97	76,81
19.	LPE PDRB Sektor Pertanian	4,15	4,22	4,29	4,36
20.	LPE PDRB Sektor Perdagangan	6,64	6,7625	6,885	7,01
21.	LPE PDRB Sektor Industri	9,33	9,76	10,20	10,63
22.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Di Kabupaten	0,05	0,06	0,07	0,08
23.	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	70,36	78,46	79,81	81,26
24.	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	52,35	64,35	69,5	74,5
25.	Tingkat Konektivitas Jalan	42,21	44,1	46,1	48,1
26.	Persentase Bangunan Gedung Dan Arsitektur Prasarana Pemerintah Dan Kepentingan Strategis Pemerintah Kabupaten Yang Sesuai Standar	66	75	83	90
27.	Ratio Konektivitas Transportasi Wilayah	0,50	0,60	0,80	0,90
28.	Tingkat Inflansi	1,63	1,62	1,61	1,60
29.	Indeks Desa Membangun	0,6408	0,6559	0,6710	0,6862
30.	Persentase Desa Di Wilayah Ex Transmigrasi Yang Masuk Kategori Berkembang	80	80	80	100

Hasil proyeksi dionah

8.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.. Kaidah imperatif pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan merumuskan pedoman evaluasi daerah yang meliputi: evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Ide dasar dikembangkannya sistem EKPOD dalam rangka mengevaluasi kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu menciptakan **Kesejahteraan Masyarakat (KM)**, **Daya Saing Daerah (DSD)** dan **Pelayanan Publik (PP)**. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka sistem pengukuran EKPOD ini dikembangkan dengan tujuan untuk:

1. Membantu pemerintah dalam membangun data awal (*baseline*) EKPOD pemerintah daerah yang *reliable* (Ps 43, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008);
2. Menyediakan data dan informasi terstruktur kepada pemerintah guna menilai kemampuan suatu daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah (pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008)
3. Mendukung proses pembuatan kebijakan terkait kemampuan suatu pemerintahan daerah dalam rangka pencapaian tujuan desentralisasi (misalnya pengembangan kapasitas, penghapusan dan penggabungan suatu pemerintahan daerah, atau kebijakan nasional lainnya).

Ada tiga aspek yang dievaluasi dalam Sistem EKPOD yaitu: **Kesejahteraan Masyarakat (KM)**, **Daya Saing Daerah (DSD)** dan **Pelayanan Publik (PB)**. Ketiga aspek EKPOD dijabarkan dalam 9 fokus dan 119 Indikator. Aspek, fokus dan Indikator EKPOD dapat digambarkan dalam bentuk diagram Struktur Dimensi EKPOD, sebagai berikut:

Gambar 8.2 Struktur Dimensi EKPOD



Sumber : Sistem EKPOD oleh Kemendagri

Pendekatan dalam evaluasi data EKPOD adalah *performance benchmarking*. *Performance benchmarking* maksudnya pendekatan evaluasi, dengan cara melakukan perbandingan kinerja satu kinerja dengan kinerja lainnya. *Performance benchmarking* bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: perbandingan internal dan perbandingan eksternal (kompetitif).

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Derah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Empat lawang

No	Aspek /fokus/ururan/ indikator kinerja pembangunan daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada Akhir RPD	Penanggung jawab
			2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	PDRB atas dasar harga berlaku (miliar rupiah)	5.837,97	6.187,97	6.537,97	6.887,97	6.887,97	
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,95	4,97	4,99	5,00	5,00	
3	PDRB Perkapita (juta rupiah) atas harga berlaku	15.719	17.601	18.542	19.483	19.483	
4	Indeks Gini	0,33	0,31	0,29	0,27	0,27	
2	Fokus Kesejahteraan Sosial						
2.1	Pendidikan						
5	APK SD/MI	114,32	116,14	117,96	119,78	119,78	DIKBUD
6	APK SMP/MTs	89,21	92,64	96,087	99,525	99,525	DIKBUD
7	APM SD/MI	99,36	99,64	99,92	100	100	DIKBUD
8	APM SMP/MTs	83,07	84,00	84,93	85,86	85,86	DIKBUD
9	Angka Putus Sekolah SD	1,82	1,432	1,044	0,656	0,656	DIKBUD
10	Angka Putus Sekolah SMP	9,4	7,136	4,872	2,608	2,608	DIKBUD
2.2	Kesehatan						
11	Presentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar kesehatan	75	82	84	85	85	DINKES
12	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	38,53	38,15	37,77	37,4	37,4	DINKES
13	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	1,35	0,95	0,57	0,37	0,37	DINKES
B	Aspek Pelayanan Umum						
1	Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar						
1.1	Pendidikan						
14	Harapan Lama Sekolah	12,08	12,44	12,54	12,63	12,63	DIKBUD
15	Rata-Rata Lama Sekolah	7,65	7,77	7,78	7,79	7,79	DIKBUD

16	Persentase Guru Yang Bersertifikat	40,94	43,94	45,99	47	47	DIKBUD
1.2	Kesehatan						
17	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan (UHC)	45	50	55	60	60	DINKES
18	Cakupan Layanan Penyakit Menular	100	100	100	100	100	DINKES
19	Cakupan Diteksi Dini Penyakit Tidak Menular	100	100	100	100	100	DINKES
20	Cakupan Pelayanan Imunisasi	90	92	94	96	96	DINKES
21	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan TB	65,44	70,11	79,99	85,02	85,02	DINKES
22	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan HIV	63,72	65,00	70	75,01	75,01	DINKES
23	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Hypertensi	94,24	96,01	97,99	100	100	DINKES
24	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan ODMK	100	100	100	100	100	DINKES
25	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	100	100	100	100	100	DINKES
26	Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	96,59	97,99	99	100	100	DINKES
27	Cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89,40	92	94	96,01	96,01	DINKES
28	Cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93	94	94,99	95,99	95,99	DINKES
29	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80,56	84	88	92	92	DINKES

30	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	DINKES
31	Cakupan penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88,19	88,19	90	92	92	DINKES
32	Cakupan penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83,83	87	90	93	93	DINKES
33	Persentase Fasilitas Kesehatan Terstandarisasi	100	100	100	100	100	RSUD
34	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD	82,38	82,50	82,80	83	83	RSUD
35	Nilai Akreditasi	Perdana	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	RSUD
36	Persentase Pencapaian SPM RSUD	77	84	92	100	100	RSUD
37	Persentase Tenaga Medik Dan Para Medik Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	83	100	100	100	100	RSUD
38	Persentase Tenaga Medik, Para Medik Dan Non Medik Yang Lulus Pelatihan Dengan Kategori Baik	100	100	100	100	100	RSUD
39	Pemenuhan 4 Dokter Spesialis Dasar Dan 4 Dokter Spesialis Penunjang Pada 4 Pelayanan Rawat Jalan Dan Rawat Inap	100	100	100	100	100	RSUD
40	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Pada 4 Layanan Dasar	94	100	100	100	100	RSUD
41	Persentase Pengurangan Rujukan	0,1	0,2	0,3	0,4	0,4	RSUD
42	Presentase Peningkatan Jumlah Pasien Sembuh	1	2	3	4	4	RSUD

43	Waktu Tanggap Pelayanan Dokter Di Gawat Darurat < 5 Menit	6	<5	<5	<5	<5	RSUD
1.3	Pekerjaan Umum dan Tata ruang						
44	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	55,584	55,589	55,892	55,895	55,895	DPUPR
45	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	52,39	62,39	67,39	72,39	2,39	DPUPR
46	Indeks Konektivitas Jalan	24,2	25,7	27,2	28,7	28,7	DPUPR
47	Persentase Bangunan Gedung Dan Arsitektur Prasarana Pemerintah Dan Kepentingan Strategis Pemerintah Kabupaten Yang Sesuai Standar	56,25	81,25	93,75	100	100	DPUPR
48	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan	75	90	90	90	90	DPUPR
49	Persentase Jalan Yang Di Tangani	0,17	0,20	0,36	0,69	0,69	DPUPR
50	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Dilayani Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	28,7	30,13	31,57	33,01	33,01	DPUPR
51	Persentase Kepatuhan PBG	100	100	100	100	100	DPUPR
52	Persentase Tenaga Jasa Kontruksi Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	0	30	65	100	100	DPUPR
53	Persentase Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100	100	100	100	100	DPUPR
54	Persentase Rumah Tangga Yang Menjadi Cakupan Layanan SPAM Perpipaan	29,78	30,35	30,92	31,49	31,49	DPUPR
55	Persentase Rumah Tangga Yang Menjadi Cakupan Layanan SPAM Non Perpipaan	37,02	37,36	37,70	38,05	38,05	DPUPR
56	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani	56,40	56,57	56,74	56,91	56,91	DPUPR

	Sanitasi (Air Limbah Layak)						
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
57	Persentase Perumahan dan Permukiman yang ditangani	18	32	45	59	59	PERKIM
58	Persentase Rumah Layak Huni	98,18	96,61	97,09	97,57	97,57	PERKIM
59	Persentase Perumahan yang telah menyerahkan PSU kepada Pemda	0	25	50	75	75	PERKIM
60	Persentase Pengembang Perumahan yang sudah memenuhi Legalitas (Terdaftar)	0	25	50	75	75	PERKIM
61	Persentase Luasan Permukiman Kumuh	97,85	96,05	94,40	93,14	93,14	PERKIM
62	Persentase Kawasan Rawan Bencana Yang Ditangani	33	33	67	100	100	PERKIM
63	Persentase Rumah Korban Bencana Yang Ditangani	5	9	13	18	18	PERKIM
1.5	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat						
64	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	5,5	5	4	3	3	SATPOLPP
65	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban, Ketentraman, Dan Kenyamanan (K3)	65	70	75	80	80	SATPOLPP
66	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	90	100	100	100	100	SATPOLPP
67	Persentase Desa Tangguh Bencana	2,12	4,25	6,38	8,51	8,51	BPBD
68	Nilai Desa Tangguh Bencana di Desa Rawan Bencana	26	27	28	30	30	BPBD
69	Persentase Kejadian Yang Ditangani Sesuai Waktu Tanggap	100	100	100	100	100	BPBD
70	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	20	25	30	30	BPBD

	Terhadap Bencana Yang Terjadi						
71	Persentase Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Sesuai Standar	100	100	100	100	100	DAMKAR
72	Persentase SDM Pemadam dan Penyelamatan Yang sesuai standar	21	47	69	79	79	DAMKAR
73	Persentase Kejadian Yang Ditangani Sesuai Waktu Tanggap	57	80	90	94	94	DAMKAR
1.6	Sosial						
74	Rasio PPKS Terhadap Jumlah Penduduk	0,033	0,032	0,031	0,030	0,030	DINSOS
75	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	55	56	58	60	60	DINSOS
76	Persentase Akurasi Data Kesejahteraan Sosial	70	72	74	75	75	DINSOS
77	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pasca Bencana Sesuai Standar	100	100	100	100	100	DINSOS
78	Persentase Sarana Prasarana Sosial Sesuai Standar	62,5	75	80	90	90	DINSOS
2	Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
2.1	Tenaga Kerja						
79	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,59	3,40	3,30	3,20	3,20	DT2K
80	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	29	30,05	31,03	31,1	31,1	DT2K
81	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Yang Layak (PP/PKB/LKS/Bipartit/ Skala Upah & Kebersertaan Bpjs Yang Terdaftar)	100	100	100	100	100	DT2K

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
82	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Per 10.000	0,0005	0,0004	0,0003	0,0002	0,0002	DP3A
83	Indek Perlindungan Anak	0	59,56	60,21	60,74	60,74	DP3A
84	Indeks Pemberdayaan Gender		58,75	59,5	59,75	59,75	DP3A
85	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	34,5	34,5	34,62	34,70	34,70	DP3A
86	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	87,50	85,70	83,30	80	80	DP3A
87	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	95,45	95,23	95	94,73	94,73	DP3A
88	Persentase Penanganan kekerasan anak yang dilakukan sesuai standar	40	80	100	100	100	DP3A
89	Persentase Penanganan kekerasan perempuan (TPPO) yang dilakukan sesuai standar	40	80	100	100	100	DP3A
90	Indeks Pemenuhan Hak Anak	57,3	58,15	59,01	59,88	59,88	DP3A
Pangan							
91	Indeks Ketahanan Pangan	66,07	67,77	69,47	71,17	71,17	Ketapang
92	Skor PPH	88,42	89,70	90,98	92,25	92,25	Ketapang
93	Rasio Ketersediaan Pangan	2,14	2,15	2,77	2,84	2,84	Ketapang
94	Persentase Rumah Tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	45,66	47,66	49,66	51,66	51,66	Ketapang
Pertanahan							
95	Persentase Kepemilikan Lahan Pemerintah Yang Sah Dan Bebas Konflik	15	23	31	39	39	PERKIM

96	Persentase Penggunaan Lahan Pemerintah yang sesuai dengan Izin Lokasi	41,63	42,02	42,41	42,80	42,80	PERKIM
97	Persentase Sengketa Dan Konflik Pertanahan Yang Difasilitasi	39	59	79	100	100	PERKIM
98	Persentase Lahan Pemerintah yang telah memiliki Sertifikat	38,50	58,50	79	100	100	PERKIM
Lingkungan Hidup							
99	Laju Penurunan Tingkat Pencemaran	0	1	2	3	3	DLH
100	Pengurangan Timbulan Sampah	12	13	14	15	15	DLH
101	Laju Penurunan Kualitas Air	1	1	1	1	1	DLH
102	Laju Penurunan Kualitas Udara	0	1	1	1	1	DLH
103	Laju Penurunan Tutupan Lahan	0	1	1	1	1	DLH
104	Persentase Usaha/Kegiatan yang Mematuhi Peraturan Lingkungan Hidup	61,40	100	100	100	100	DLH
105	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup	3,90	24,03	37,66	50,00	50,00	DLH
2.2 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
106	Indeks Kepuasan Masyarakat Disdukcapil	84,40	84,42	84,43	84,44	84,44	Disdukcapil
107	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	0	80	82	85	85	Disdukcapil
108	Persentase penduduk ber-KTP	96,24	97	98	99	99	Disdukcapil
109	Persentase keluarga ber-kartu keluarga	0	80	82	85	85	Disdukcapil
110	Persentase kepemilikan KIA	38,66	42	43	44	44	Disdukcapil
111	Persentase penduduk yang mempunyai akte kelahiran	95,70	96	97	98	98	Disdukcapil

112	Jumlah jenis pelayanan yang dilaporkan dalam SIAK ONLINE	34,78	23	23	23	23	Disdukcapil
2.3	Pemberdayaan Masyarakat Desa						
113	Indeks Desa Membangun	0,6408	0,6509	0,661	0,6711	0,6711	DPMD
114	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana yang dikelola Desa	82,99	90,47	95,23	100	100	DPMD
115	Persentase Desa Yang Terlibat dalam Kerjasama dalam Peningkatan Desa	7,4	53,06	63,94	70,74	70,74	DPMD
116	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang Aktif	59,75	60,57	62,32	69,85	69,85	DPMD
117	Persentase Desa yang melaksanakan Pemerintahan yang baik	87,07	88,43	91,83	96,59	96,59	DPMD
2.4	Pengendalian Penduduk dan KB						
118	Laju Pertumbuhan Penduduk	4,04	4,04	3,98	3,96	3,96	DPPKB
119	Indeks Pembangunan Keluarga	53,42	56,36	59,45	62,73	62,73	DPPKB
120	TFR	2,96	2,81	2,66	2,51	2,51	DPPKB
121	Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 Tahun	55	52	49	46	46	DPPKB
122	Persentase Keluarga Beresiko Stunting	38,50	37,44	36,56	35,68	35,68	DPPKB
123	Persentase Tribina Aktif	100	100	100	100	100	DPPKB
124	Persentase UPPKA AKTIF	44	60	77,15	100	100	DPPKB
125	Persentase Kampung KB Mandiri	1,28	3,20	5,12	6,41	6,41	DPPKB
2.5	Perhubungan						
126	Rasio Konektivitas Transportasi Wikayah	70	80	80	90	90	DISHUB
127	Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	3	2,89	2,79	2,69	2,69	DISHUB
128	Indeks konektivitas transportasi	0,7	0,8	0,9	0,10	0,10	DISHUB

129	Rasio Moda Transportasi Angkutan Umum yang Memenuhi Standar terhadap Masyarakat Pengguna	364	367	370	374	374	DISHUB
2.6	Komunikasi dan Informatika						
130	Indeks SPBE	2	2,3	2,5	2,7	2,7	KOMINFO
131	Nilai Indeks Domain kebijakan SPBE	2	2,3	2,5	2,7	2,7	KOMINFO
132	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE	2	2,3	2,5	2,7	2,7	KOMINFO
133	Nilai Indeks Domain tata Kelola SPBE	2	2,3	2,5	2,7	2,7	KOMINFO
134	Indeks Domain Manajemen SPBE	2	2,3	2,5	2,7	2,7	KOMINFO
2.7	Koperasi, Usaha Kecil Menengah						
135	Persentase Koperasi Sehat	22	22	24	26,7	26,7	KOPERASI, UKM
136	Persentase Pertumbuhan UMKM	17	17	19,9	25	25	KOPERASI, UKM
137	Persentase peningkatan volume usaha UMKM	29	29	33	37,5	37,5	KOPERASI, UKM
138	Persentase Peningkatan Laba Usaha Koperasi	25	25	29	30	30	KOPERASI, UKM
	Penanaman Modal						
139	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Di Kabupaten	0,05	0,06	0,07	0,08	0,05	DPMPTSP
140	Realisasi Investasi (dalam milyar)	194	220	250	275	275	DPMPTSP
141	Jumlah Project Investment yang Terealisasi	0	1	2	3	3	DPMPTSP
142	Jumlah Peluang Investasi yang Dipromosikan	1	2	3	4	4	DPMPTSP
143	Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP	85,36	86	87	88	88	DPMPTSP
2.8	Kepemudaan dan Olahraga						
144	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	2,76	2,76	2,93	3,28	3,28	DISPORA

145	Persentase Wirausaha Muda	36	37	38	39	39	DISPORA
146	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial di Bidang Ekonomi	19,53	22,33	22,83	33,13	33,13	DISPORA
147	Persentase desa yang mengikuti event olahraga	16,6	16,6	25	33	33	DISPORA
148	Persentase kenaikan perolehan medali dalam Porprov	7,5	7,5	9	10,5	10,5	DISPORA
149	Persentase Atlet Berprestasi	67	68	69	70	70	DISPORA
150	Persentase desa yang melaksanakan germas olahraga	32	32	33	35	35	DISPORA
Statistik							
151	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan daerah	100	100	100	100	100	KOMINFO
152	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	KOMINFO
Persandian							
153	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	2	2,3	2,5	2,7	2,7	KOMINFO
154	Indeks penilaian EPSS Empat Lawang	2	2,3	2,5	2,7	2,7	KOMINFO
Kebudayaan							
155	Persentase Kebudayaan Daerah Yang Dikembangkan	16,6	17	20	25	25	DIKBUD
156	Persentase Budaya Daerah Yang Dilestarikan	16,6	40	50	60	60	DIKBUD
157	Persentase Daerah Potensial Kebudayaan	10	40	45	50	50	DIKBUD

	Yang Terpenuhi Sarana Dan Prasarananya						
158	Persentase Potensi Kebudayaan Daerah Yang Dikelola	16,6	30	40	60	60	DIKBUD
2.9	Perpustakaan						
159	Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat	50,61	51,62	52,14	53,66	53,66	Dispuarsip
160	IKM Pemustaka	85,03	88,74	89,18	89,63	89,63	Dispuarsip
161	Tingkat Gemar Membaca	61,03	62,24	62,86	63,49	63,49	Dispuarsip
162	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	2610	3000	3200	3500	3500	Dispuarsip
163	Akreditasi Pusda	C	C	B	B	B	Dispuarsip
	Kearsipan						
164	Kategori hasil pengawasan kearsipan	D	D	C	C	C	Dispuarsip
165	Persentase perlindungan dan penyelamatan dokumen arsip	-	55,55	66,66	77,77	77,77	Dispuarsip
166	Persentase pengelolaan arsip	100	100	100	100	100	Dispuarsip
167	Persentase peminjam yang terlayani peminjaman arsip	-	75	80	85	85	Dispuarsip
168	Persentase penyimpan yang terlayani penyimpanan arsip	-	80	85	90	90	Dispuarsip
3	URUSAN PILIHAN						
3.1	Kelautan dan Perikanan						
169	LPE PDRB Sub Sektor Perikanan	33,1	35	36	37	37	Perikanan
170	Angka Konsumsi Ikan	29,69	29,98	30,28	30,57	30,57	Perikanan
171	Produksi Perikanan Tangkap	781	800	810	820	820	Perikanan
	Pariwisata						
172	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	Pariwisata

173	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	75	75	78	80	80	Pariwisata
174	Persentase kunjungan wisatawan	16	17	20	24	24	Pariwisata
175	Persentase Produk Ekraf yang masuk Pasar	71	71	73	75	75	Pariwisata
3.2	Pertanian						
176	Nilai Tukar Petani	98,50	100,83	101,33	101,83	101,83	Pertanian
178	Produksi Holtikultura	4.654,5	4.679,5	4.711,5	4.743,5	4.743,5	Pertanian
179	Produksi Padi	168.038	170.000	240.000	248.000	248.000	Pertanian
180	Produksi Jagung	56.012	58.000	65.000	73.000	73.000	Pertanian
181	Produksi Tanaman Perkebunan	76.022	79.823	83.814	88.005	88.005	Pertanian
182	Populasi Ternak	135.856	138.523	142.468	147.276	147.276	Pertanian
183	Persentase Produk Pertanian yang Bersertifikasi	-	60	80	100	100	Pertanian
	Perdagangan						
184	LPE PDRB Sektor Perdagangan	21,94	22,30	22,48	22,66	22,66	Disperindag
185	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Perdagangan		2	3	4	4	Disperindag
186	Indeks keberdayaan konsumen (IKK)	12	13	13	14	14	Disperindag
187	Persentase Barang Penting yang Diawasi yang Harganya Fluktuatif		75	73	71	71	Disperindag
3.3	Perindustrian						
188	LPE PDRB Sektor Perindustrian	12,02	12,08	12,11	12,14	12,14	Disperindag
189	persentase Produk IKM yang dipasarkan	4	4,05	5,33	6,57	7,79	Disperindag
190	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	2,02	3,33	4,6	5,8	5,8	Disperindag
	Tranmigrasi						
191	Ratio Penghasilan Masyarakat Ex-	80	80	80	100	100	DT2K

	Transmigrasi Terhadap Pendapatan Perkapita						
192	Persentase Desa Ex Transmigrasi Yang Difasilitasi Pembangunan	16,66	25	33,3	58,33	58,33	DT2K
193	Persentase Masyarakat Transmigran Yang Memiliki Usaha	0	50	66,66	80	80	DT2K
4	Urusan Fungsi Penunjang						
4.1	Pemerintahan						
	Sekretariat Daerah						
194	Persentase keberatan terhadap LKPJ dan LPPD yang difasilitasi untuk ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	SETDA
195	Indeks Pemantauan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4	4,03	4,06	4,10	4,10	SETDA
196	IKM Kabupaten	82	82,5	83	84	84	SETDA
197	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	21,3	25,3	31,3	51,3	51,3	SETDA
198	Tingkat Inflansi	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58	SETDA
	Sekretariat DPRD						
199	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Dewan	83,58	84,58	85,58	85,58	85,58	SETWAN
200	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	77,78	100	100	100	100	SETWAN
201	Persentase pembahasan anggaran sesuai tahapan dan tepat waktu	100	100	100	100	100	SETWAN
	Perencanaan						
202	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja	40,81	42,10	43,30	44,40	44,40	Bappeda, Litbang

203	Persentase Kesesuaian Sasaran Antar Dokumen Perencanaan Daerah	100	100	100	100	100	Bappeda, Litbang
204	Persentase capaian sasaran daerah yang termasuk kategori tinggi dan sangat tinggi	56	65,22	69,56	73,91	73,91	Bappeda, Litbang
Keuangan							
205	Nilai Derajat Fiskal Otonomi Daerah	3,40	4,3	4,4	4,5	4,5	BAPENDA
206	Persentase Pertumbuhan PAD		3	4	5	5	BAPENDA
207	IKM Layanan Pendapatan Daerah	84,39	86	87	88	88	BAPENDA
208	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	57,83	58,85	89,31	90	90	BPKAD
209	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
210	Persentase Pengelolaan Aset sesuai SAP		90	91	92	92	BPKAD
211	Porporasi Belanja Daerah yang sesuai Prioritas		93	94	95	95	BPKAD
Kepegawaian							
212	Indeks Merit Sistem	137	150	175	200	200	BKPSDM
213	Nilai NSPK	38	50	55	60	60	BKPSDM
Pendidikan dan Pelatihan							
214	Indeks Profesionalitas ASN	65	67	69	71	71	BKPSDM
Penelitian dan Pengembangan							
215	Indek Inovasi Daerah	56,37	57	58	59	59	Bappeda, Litbang
216	Persentase Inovasi Daerah Yang Difasilitasi Sesuai Standar	80	82	84	86	86	Bappeda, Litbang
217	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100	Bappeda, Litbang
Inspektorat Daerah							

218	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3	Inspektorat
219	Persentase OPD yang Menuju Maturitas SPIP Level 3	84	87	90	92	92	Inspektorat
220	Nilai Program Preventif Pencegahan Korupsi	58	65	67	70	70	Inspektorat
4.2	Unsur Kewilayaan						
221	IKM Kecamatan	83,53	84	85	86	86	Kecamatan
222	persentase pemenuhan pelayanan sesuai SOP	100	100	100	100	100	Kecamatan
223	persentase usulan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	60	65	70	75	75	Kecamatan
224	persentase penurunan angka kriminalitas	0	25	33	50	50	Kecamatan
225	Persentase desa yang melaksanakan pengelolaan pemerintahan desa sesuai standar	100	100	100	100	100	Kecamatan
226	Pemerintahan Umum						
227	Kesatuan Bangsa dan Politik						
228	Angka Partisipasi Pemilu	201.241	201.241	-	-	-	Kesbangpol
229	Persentase Konflik Yang Terselesaikan	80	80	85	90	90	Kesbangpol
230	Angka Sengketa Pemilu	0	50	30	20	20	Kesbangpol
231	Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan	80	80	85	90	90	Kesbangpol
232	Persentase Konflik Agama yang Terselesaikan	100	100	100	100	100	Kesbangpol
233	Persentase FPK Aktif	100	100	100	100	100	Kesbangpol
234	Persentase Ormas Aktif	85	86	88	90	90	Kesbangpol
C	Aspek Daya Saing Daerah						
1.1	Kemampuan Ekonomi						

235	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	509.938	577.667	713.125	780.854	780.854	
236	Pengeluaran Non Pangan Perkapita	398.837	468.945	539.053	609.161	609.161	
2.1	Pertanian						
237	Nilai Tukar Petani	98,50	100,83	101,33	101,83	101,83	Pertanian
3.1	Perhubungan						
238	Persentase Kepadatan Lalu Lintas	0,65	0,63	0,6	0,58	0,58	DISHUB
239	Rasio pengamanan pengemudi	0,4	0,42	0,44	0,46	0,46	DISHUB
4.1	Penataan Ruang						
240	Persentase Kawasan dan Zonasi yang Sesuai Potensi	100	100	100	100	100	DPUPR
241	Persentase Pembangunan Infrastruktur sesuai dengan RTR	50	70	75	80	80	DPUPR

Rencana Pembangunan Daerah merupakan pedoman pembangunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sampai dengan Tahun 2026. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 ini menjadi landasan dan rujukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk masa 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024-2026. Dokumen RPD juga menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk waktu 1 (satu) tahun. Program prioritas pembangunan yang termuat dalam RPD menjadi pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan sebagaimana termuat dalam RKPD.

9.1 Pedoman Transisi :

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 Wajib digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Tahun 2024, sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 - 2025. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPD.

9.2 Kaidah Pelaksanaan :

RPD merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang didasarkan pada Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten dan isu strategis aktual. Disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. RPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 – 2026 merupakan pedoman bagi setiap kepala Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 dan pedoman untuk menyusun RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 – 2026 menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 dan Renja Perangkat Daerah setiap tahun mulai Tahun 2024 – 2026 sesuai dengan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022;
2. Bupati Empat Lawang menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026;
3. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPD adalah sasaran dan indikator kinerja Kabupaten Empat Lawang. OPD sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah

ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing OPD berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing;

4. Seluruh Perangkat Daerah merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan arah kebijakan dalam dokumen RPD ini berdasarkan kebutuhan masing-masing SKPD serta mengacu pada peraturan perundang - undangan yang berlaku. Bappeda Litbang melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPD;
5. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPD dengan Renstra Perangkat Daerah;

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD, Bappeda Litbang berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPD kedalam Renstra Perangkat Daerah (PD).

Bupati Empat Lawang,

H. Joncik Muhammad



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

website : <https://bappeda.empatlawangkab.go.id>